BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 37 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencapaian visi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021, perlu disusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Pasal 104 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, serta dalam rangka menjamin keselarasan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan

pengawasan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 39), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 71);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 Nomor 2 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 8 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 6 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda, adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 Kabupaten Sidoarjo.

Pasal 2

RKPD merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai tanggal 1 Januari 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Pasal 3

(1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	:	PENDAHULUAN
BAB II	:	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III	:	KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV	:	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2020
BAB V	:	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI	:	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BAB VII	:	PENUTUP.

(2) Uraian secara rinci RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan sebagai :

a. pedoman bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
b. pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2020.

Pasal 5

Dalam upaya keselarasan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilakukan verifikasi oleh Bappeda dan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 6

Dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b :

a. Pemerintah Kabupaten menggunakan RKPD sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dengan DPRD;
b. Perangkat Daerah menggunakan RKPD dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020 dengan DPRD.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 27 Juni 2019

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 27 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2019 NOMOR 37

NOREG PERBUP : 37 TAHUN 2019

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2019

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan setiap daerah agar menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD); Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dan merujuk pada adanya amanat dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 bahwa setiap daerah harus memiliki dokumen perencanaan baik jangka panjang, menengah maupun tahunan, maka pemerintah Kabupaten Sidoarjo perlu menyusun dokumen perencanaan tersebut. Kabupaten Sidoarjo telah menyusun RPJPD tahun 2006-2025 yang dilegalkan dengan adanya Perda Nomor 10 Tahun 2015, dan menyusun RPJMD tahun 2016-2021 yang juga telah disahkan secara hukum melalui Perda Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. Selanjutnya perencanaan pada jangka pendek dijabarkan melalui RKPD yang disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

RKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan pemerintah daerah yang menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Dalam RKPD sendiri berisikan kebijakan dan arah pembangunan daerah dalam jangka waktu satu tahun, yang hal tersebut diantaranya terdiri dari: (i) program prioritas pembangunan daerah; (ii) rencana kerja dan pendanaannya; dan (iii) prakiraan pagu dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif. Pada tahun ini, pembangunan lebih difokuskan pada tiga aspek. ***Pertama*** peningkatan inovasi. ***Kedua,*** melakukan pembangunan infrastruktur publik yang berkelanjutan dalam rangka pencapaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidoarjo yang inklusif. ***Ketiga,*** kemandirian dan daya saing ekonomi daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah.

Dalam proses penyusunan RKPD Kabupaten Sidoarjo tahun 2020 disusun dengan mengacu pada Undang-Undang 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dengan tahapan yakni persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan musrenbang, perumusan rancangan akhir dan penetapan RKPD, dan Permendagri Nomor 31 tahun 2019 yang mengamanatkan untuk memuat urusan kesatuan bangsa dan politik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Dalam pelaksanaannya, RKPD dimulai dengan proses penyusunan rancangan RKPD yang didasarkan pada data statistik hasil pencapaian pembangunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Hal terpenting yang menjadi perhatian dalam penyusunan RKPD adalah integrasi antara program daerah dengan prioritas pembangunan Provinsi (RKPD Provinsi Jatim Tahun 2020) maupun Pemerintah Pusat (RKP Tahun 2020). Tahap berikutnya adalah forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Tujuannya, proses perencanaan pembangunan diharapkan dapat mengoptimalkan partisipasi masyarakat, sehingga forum Musrenbang menjadi penting dalam proses pengambilan keputusan bersama. Secara lebih detail proses penyusunan RKPD dapat dijelaskan melalui gambar berikut ini:

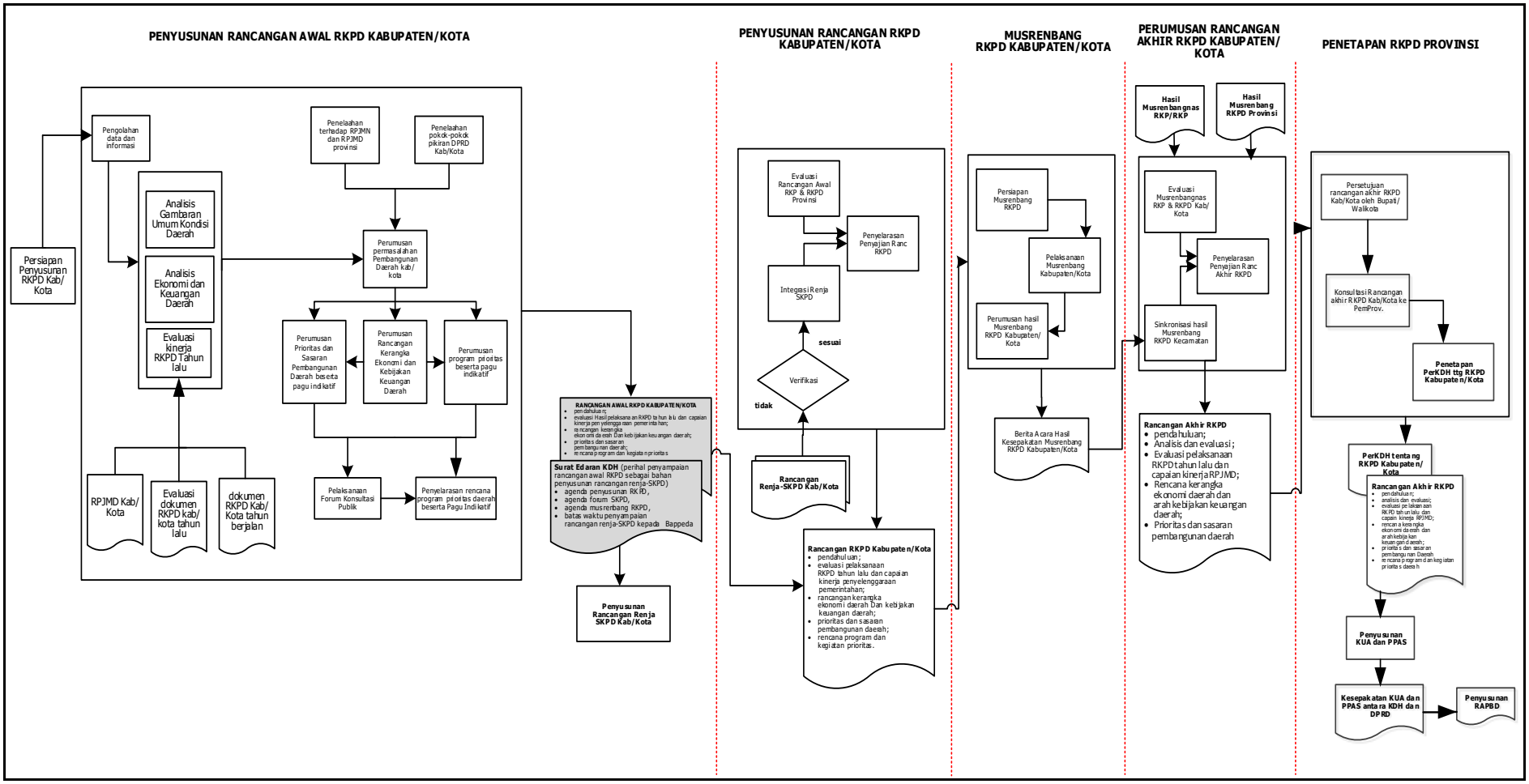

Gambar 1. 1
Alur Penyusunan RKPD

Keterkaitan RKPD dengan dokumen perencanaan lain dan dokumen penganggaran diperlukan untuk sinkronisasi program dan kegiatan demi kesejahteraan masyarakat. RPJMD akan dijabarkan secara operasional per tahun menjadi prioritas perencanaan daerah yang dituangkan dalam RKPD. Artinya, dokumen RKPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 juga merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2016-2021 sehingga seluruh pembahasannya harus disesuaikan dengan jangka waktu dalam RPJMD. Selanjutnya dokumen RKPD ini berfungsi sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) dan dokumen penganggaran yaitu Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Dokumen RKPD Kabupaten Sidoarjo tahun 2020 sekurang-kurangnya memuat tentang rancanfan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah dan Rencana Kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun. Dalam penyusunan dokumen RKPD perlu adanya keterkaitan dokumen perencanaan dan anggaran, seluruh dokumen perencanaan yang disusun akan bermuara pada penganggaran dengan disahkannya APBD yang sebelumnya telah melalui beberapa tahapan kebijakan seperti perlu adanya peran serta antara pemerintah dengan masyarakat dan legislatif dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran melalui forum Musrenbang. Dokumen perencanaan tahunan atau RKPD ini selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan anggaran tahunan atau KUA, PPAS dan RAPBD.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan RKPD Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

1. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Junto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
4. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2014-2019;
19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 -2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 8 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Siodarjo Tahun 2016 Nomor 6 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 17 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Pengendalian Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 14 Seri D).
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Dearah Kabupaten Sidoarjo.

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Sidoarjo yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020, selain mengacu pada visi dan misi Kepala daerah terpilih, juga harus terkait dan sejalan dengan arah pembangunan yang dimuat dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan nasional, provinsi Jawa Timur maupun Kabupaten Sidoarjo. Penyusunan RKPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 telah berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 – 2021 serta dengan memperhatikan perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Timur yang tertuang dalam RKPD Provinsi Jawa Timur tahun 2020 dan perencanaan pembangunan nasional yang tertuang dalam RKP tahun 2020.

Tema pembangunan nasional yang tercantum dalam RKP 2020 adalah Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas. Artinya pembangunan tahun 2020 akan diarahkan kepada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dapat menjadi daya ungkit pembangunan dan pertumbuhan yang berkualitas pula. Tema pembangunan Provinsi Jawa Timur dan prioritas pembangunan Kabupaten Sidoarjo untuk tahun 2020 telah sinergi dengan RKP tahun 2020.

Posisi RKPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo tahun 2020 berfungsi sebagai jembatan penghubung antara capaian visi dan misi serta program kerja bupati dan wakil bupati terpilih, yang akan dituangkan dalam perencanaan strategis jangka menengah, dengan perencanaan dan penganggaran

tahunan yang didalamnya tercakup arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro daerah dan program kegiatan Perangkat Daerah. Sehingga RKPD yang disusun telah berpedoman pada program yang terdapat dalam hal penentuan indicator, target capaian, program dan kegiatan serta pagu pendanaan. RKPD juga digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

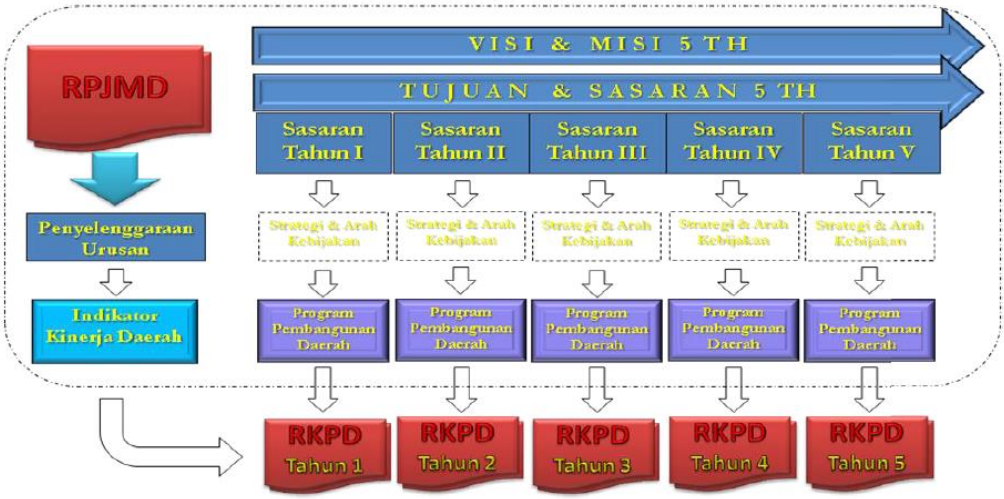

Gambar 1. 2

Keterhubungan Dokumen antara RPJMD dan RKPD

Tabel 1. 1
Keselarasan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Timur, Misi RPJPD Kabupaten Sidoarjo, Misi Kepala Daerah Kabupaten Sidoarjo Terpilih dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020

Prioritas Pembangunan Nasional (Nawa Cita)	Misi Pembangunan Jangka Menengah Jawa Timur (RPJMD Provinsi Jatim)	Misi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sidoarjo Tahun 2005-2025	Misi Kepala Daerah Kabupaten Sidoarjo Terpilih Periode 2016-2021	Prioritas Pembangunan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020
1	2	3	4	5
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara	1. Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan	1. Mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan yang berwawasan gender dan pengamalan nilai-nilai agama diiringi dengan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai dasar negara secara konsisten dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.	1. Pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui penyelenggaran pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan.	1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pengembangan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif dan efisien.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.	2. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/agroindustri dan industrialisasi.	2. Memberikan layanan masyarakat secara profesional untuk mencapai pelayanan prima.	2. Meningkatkan perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis industri pengolahan, pertanian, perikanan, pariwisata, UMKM dan Koperasi serta pemberdayaan masyarakat.	2. Meningkatkan inovasi, kemandirian dan daya saing ekonomi daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan	3. Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan dan penataan ruang	3. menfasilitasi pembangunan infrastruktur guna mendorong peningkatan pembangunan yang proporsional, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.	3. Meningkatkan kualitas dan standar pelayanan pendidikan dan kesehatan.	3. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan	4. Meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik	4. Mendorong pembangunan di 9 (sembilan) sektor perekonomian daerah dengan memprioritaskan pada	4. Meningkatkan tatanan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berakhlaqul	4. Meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan tatanan kehidupan

Prioritas Pembangunan Nasional (Nawa Cita)	Misi Pembangunan Jangka Menengah Jawa Timur (RPJMD Provinsi Jatim)	Misi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sidoarjo Tahun 2005-2025	Misi Kepala Daerah Kabupaten Sidoarjo Terpilih Periode 2016-2021	Prioritas Pembangunan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020
1	2	3	4	5
penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.		sektor-sektor yang paling potensial guna mewujudkan peningkatan taraf hidup masyarakat secara layak.	karimah, berlandaskan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban	masyarakat yang aman, nyaman, demokratis, berbudaya dan agamis.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.	5. Meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmoni sosial	5. Mendorong peningkatan pendapatan asli daerah secara berkelanjutan guna memenuhi kebutuhan pembangunan daerah.	5. Infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.	5. Optimalisasi pembangunan sistem infrastruktur daerah yang terpadu dan berkelanjutan guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.		6. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan sarana-prasarana pendidikan, kesehatan, dan peningkatan pendapatan perkapita guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.		
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.		7. Mewujudkan kondisi masyarakat dan lingkungan yang aman, tentram, dan tenggang rasa guna terciptanya situasi dan kondisi masyarakat yang kondusif.		
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.		8. Menumbuhkan iklim demokrasi yang sehat, santun, dan menjunjung tinggi nilai-nilai dan etika bermasyarakat.		
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat		9. Penegakan supremasi hukum di segala bidang.		

Adanya amanat sinergitas antara dokumen perencanaan di level pemerintah daerah kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi dan pusat, maka dalam menyusun dokumen perencanaan Kabupaten Sidoarjo seyogyanya berpedoman kepada dokumen perencanaan pembangunan Provinsi dan Pusat. Tabel 1.1 menunjukkan perencanaan pembangunan Kabupaten Sidoarjo baik jangka pendek (Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2020) dan jangka menengah (RPJMD Kabupaten Sidoarjo tahun 2016-2021) telah sinergi dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur dan Nawacita.

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari disusunnya RKPD ini adalah untuk terwujudnya penyusunan perencanaan tahun 2020 guna memberikan arahan dan pedoman kepada seluruh pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka mewujudkan visi Pembangunan Kabupaten Sidoarjo periode 2016-2021 yaitu:

"**Kabupaten Sidoarjo yang Inovatif, Sejahtera, Mandiri dan Berkelanjutan**".

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2020 adalah:

1) Menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sidoarjo tahun 2016-2021 dalam rencana program kegiatan prioritas pada Tahun 2020;
2) Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD tahun Anggaran 2020 karena memuat arah kebijakan pembangunan daerah dalam satu tahun;
3) Menjadi acuan bagi seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, karena memuat seluruh kebijakan publik;
4) Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan;
5) Terwujudnya keselarasan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan.

1.5 SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD

Sistematika penulisan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 terdiri dari 7 bab yakni

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal. Pada subbab ini tercantum peraturanperundang-undangan yang memuat ketentuan secara langsung terkait dengan penyusunan RKPD.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJMD Prov/Kab/Kota, RKP/program strategis nasional, dan RKPD Provinsi untuk penyusunan RKPD Kab/kota.

1.4. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan.

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah

Bagian ini sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Sub bab ini memuat beberapa bahasan dibawah ini:

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Diisi sesuai dengan kondisi umum geografis mengenai kondisi geografi daerah, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana. Dan kondisi demografi wilayah.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Diisi sesuai dengan kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Diisi sesuai dengan kondisi umum aspek pelayanan umum sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan.

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Diisi sesuai dengan kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD.

Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah dan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan.

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), juga kebijakan dibidang ekonomi dalam dokumen RPJMD provinsi/kabupaten/kota.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja dearah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD.

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun (n)

Gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun rencana.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Pada bab ini mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan alam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP

1.6 Tema RKPD Tahun 2020 Adalah :

Dengan memperhatikan permasalahan pembangunan Kabupaten Sidoarjo tahun 2020 serta mendasari tema Rancangan RKP dan tema rancangan RKPD Provinsi Jawa Timur, maka rumusan tema RKPD Kabupaten Sidoarjo tahun 2020 adalah:

"Percepatan Pembangunan Ekonomi Melalui Akselarasi Sektor-Sektor Potensial Daerah"

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang kondisi geografi, demografi, pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintah dan permasalahan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo.

2.1. KONDISI UMUM DAERAH

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Sebaran perkembangan pemanfaatan lahan Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat pada penggunaan lahan. Berdasarkan RT RW Kabupaten Sidoarjo tahun 2009-2029 terdapat 7 jenis lahan yang menggambarkan pola penggunaan lahan di Kabupaten Sidoarjo antara lain: Permukiman, Lahan sawah dan perikanan, Pertambangan, Industri (gudang, zona industri dan kawasan industri), Fasilitas umum, Perdagangan dan jasa, Serta kawasan khusus militer.

Dari aspek geografis, Kabupaten Sidoarjo terdiri dari 29,99% daerah pantai dan pertambakan yang berada di sebelah Timur, 40,81% meliputi daerah bagian tengah yang berair tawar, dan 29,20% sebagian besar merupakan daerah pertanian di bagian barat. Disamping hal tersebut, Sidoarjo beberapa daerah berpotensi terdapat bencana sebagaimana gambar berikut:

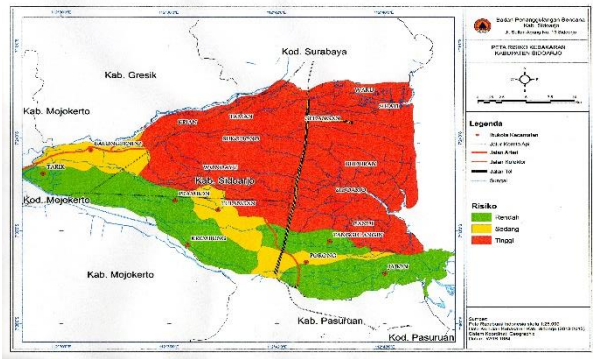

Gambar:

Peta Risiko Kebakaran Kabupaten Sidoarjo

Sementara itu, Pengembangan Kawasan berdasarkan potensi Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:

A. Kawasan Tanaman Pangan

Tanaman pangan diwilayah desa-desa basis pertanian terletak di wilayah barat Kabupaten Sidoarjo. Program yang dicanangkan adalah menetapkan kawasan tanaman

pangan yang merupakan lahan produktif (subur) dengan adanya peraturan yang melarang adanya alih fungsi lahan menjadi lahan *non*-tanaman pangan. Tahun 2014 terjadi penggalian fungsi lahan sawah sekitar 5,3 ribu hektar. Akan tetapi petani bisa mengoptimalkan lahan yang ada, sehingga total luas panen padi sawah bertambah 645 hektar. Selain tanaman pangan, lahan tersebut juga cocok untuk tanaman holtikultura meliputi tanaman sayur-sayuran dan buah-buahan. Komoditas utama antara lain: tomat, salak, pisang, pepaya, kacang panjang, terong, lombok,semangka, kubis, melon. Kawasan tersebut memiliki potensi besar sebagai sentra pertanian holtikultura. Pembentukan klaster holtikultura pada kawasan ini menjadi prioritas utama pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo untuk menunjang pembangunan.

B. Kawasan Perikanan Darat dan Laut

Kabupaten Sidoarjo memiliki potensi yang besar pada sektor perikanan. Hasil perikanan lebih besar dibandingkan dengan hasil peternakan. Produksi perikanan Kabupaten Sidoarjo meliputi ikan lele, ikan gurami, dan ikan tambak. Dengan demikian perlu adanya persiapan terutama penyediaan lahan untuk kawasan perikanan dikawasan-kawasan potensial. Karena menggeluti tambak di Sidoarjo cukup menjanjikan. Tambak seluas 15.513,41 Ha ternyata memberikan kesejahteraan tersendiri bagi 3.257 petani tambak dan 3.246 pandega. Selain perikanan darat, potensi ikan laut yang cukup besar juga perlu ditingkatkan dan didorong dengan penguatan sarana pendukung dari instansi teknis. Pengembangan sektor perikanan ini selaras dengan salah satu visi nasional yang fokus pada perekonomian maritim. Program yang perlu dicanangkan adalah penyebarluasan (ekstensifikasi) kawasan perikanan darat, revitalisasi perikanan laut, dan pemanfaatan sumber daya laut sekaligus upaya konservasi pinggiran pantai.

C. Kawasan Pengembangan Industri Kecil dan Sedang

Sebagai sektor terbesar yang mendorong perekonomian Kabupaten Sidoarjo, sektor industri tersebar luas di hampir setiap wilayah kabupaten. Berdasarkan isu strategis dan perkembangan industri di lapangan, perlu dicanangkan program penentuan sentra-sentra kawasan industri atau klaster industri berdasarkan spesifikasi jenis industri sebagai berikut:

- Sentra kawasan industri hasil-hasil perikanan laut seperti petis, kerupuk ikan, terasi berada disentra-sentra nelayan (pantai) seperti Jabon, Sidoarjo, dll.

- Sentra kawasan industri kecil kulit di daerah Tanggulangin

Dengan pola *clustering,* peningkatan program kemitraan akan mendorong dan memperkuat basis industri kecil yang diusahakan oleh masyarakat. Selain itu klaster industri juga dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan dan penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat Kabupaten Sidoarjo.

Pola ruang wilayah kabupaten Sidoarjo berdasarkan RTRW merupakan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, baik untuk pemanfaatan yang berfungsi lindung maupun budidaya yang belum ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan rencana tata ruang wilayah provinsi Jawa Timur. Pola ruang wilayah kabupaten Sidoarjo dikembangkan dengan sepenuhnya memperhatikan pola ruang wilayah yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi Jawa Timur. Pola ruang wilayah kabupaten Sidoarjo dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik zona leluasa, zona kurang leluasa, zona tidak leluasa, dan zona tidak layak yang ada di Kabupaen Sidoarjo. Kabupaten Sidoarjo telah menetapkan dan mengembangkan kawasan agropolitan dan kawasan minapolitan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Pengembangan kawasan lahan sawah tanaman pangan atau agropolitan di wilayah Kabupaten Sidoarjo dibedakan menjadi 2 kelompok yaitu ; kawasan sawah lahan basah dan sawah lahan kering. Tujuan perlindungan kawasan pertanian lahan basah adalah pengembangan areal persawahan pada kawasan-kawasan yang sesuai, yang didukung oleh kelengkapan prasarana pengairan atau irigasi. Kawasan pertanian lahan basah meliputi sawah irigasi teknis dan sawah irigasi non teknis, yang terdapat di wilayah Kecamatan Sidoarjo, Kecamatan Candi, sebagian Porong, Krembung, Tulangan, Tanggulangin, Jabon, Krian, Balongbendo, Tarik, Prambon, Wonoayu dan Kecamatan Sukodono. Sawah irigasi teknis tetap dipertahankan keberadaannya, serta tidak diperbolehkan adanya peralihan fungsi untuk kegiatan non pertanian. Kawasan perikanan pesisir (agropolitan perikanan) merupakan kawasan tambak, pantai, dan laut yang diperuntukkan bagi pengembangan kegiatan perikanan budidaya air payau dan hasil-hasil laut lainnya. Komoditas perikanan dan kelautan merupakan pendukung ekspor dan penghasil devisa negara, dan pengembangannya merupakan tambak organik yang sensitif terhadap pengembangan kota di wilayah pertambakan (perlu pengendalian). Sehingga pengembangan kota harus mengikuti ketentuan teknis tambak organik. Kawasan perikanan (agropolitan perikanan) tambak ditempatkan pada SSWP V yaitu kawasan pesisir dan laut di sekitar wilayah timur

Kabupaten. Kawasan ini meliputi Kecamatan Sedati, pesisir Kecamatan Buduran, pesisir Kecamatan Sidoarjo, pesisir Kecamatan Candi, pesisir Kecamatan Porong, Pesisir Kecamatan Tanggulangin, dan pesisir Kecamatan Jabon. Luas rencana pengembangan kawasan tambak pada tahun 2009-2029 adalah 13.349,13 Ha.

Selanjutnya adalah aspek Demografi Kabupaten Sidoarjo. Pertumbuhan jumlah penduduk kabupaten Sidoarjo dalam beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan. Jumlah penduduk tahun 2018 berdasarkan data kependudukan yang dirilis oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo sebesar 2.238.069 jiwa**.** Jumlah tersebut mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Kecamatan Waru merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu 239.348 jiwa, dan juga menjadi daerah dengan tingkat kepadatan penduduk yang paling tinggi dibandingkan dengan kecamatan lain yaitu 7.894 jiwa/Km^2. Banyaknya penduduk yang datang merupakan dampak dari letak Kecamatan Waru yang dekat dengan Ibukota Provinsi Jawa Timur yaitu Kota Surabaya. Perkembangan tersebut berdampak pada tingkat mobilitas penduduk di kota-kota sekitar daerah Surabaya, hal ini disebabkan banyak lahan di kota Surabaya yang sudah dijadikan untuk kawasan industri ataupun jasa dan perdagangan. Oleh karena itu, banyak *developer* yang merencanakan pembangunan perumahan-perumahan di Kabupaten Sidoarjo. Sedangkan Kecamatan Jabon memiliki penduduk paling sedikit yaitu 60.659 jiwa dan menjadi kecamatan dengan kepadatan terendah yaitu 748 jiwa/Km^2.

Tabel 2. 1
Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Tahun 2018

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	LUAS WILAYAH (Km^2)	KEPADATAN PENDUDUK (jiwa/Km^2)
1	TARIK	71.308	36,06	1.977
2	PRAMBON	84.095	34,23	2.457
3	KREMBUNG	74.706	29,55	2.528
4	PORONG	85.790	29,82	2.877
5	JABON	60.659	81,06	748
6	TANGGULANGIN	106.003	32,29	3.283
7	CANDI	165.552	40,67	4.071
8	SIDOARJO	225.761	62,56	3.609
9	TULANGAN	105.450	31,21	3.379
10	WONOAYU	89.209	33,92	2.630
11	KRIAN	137.818	32,51	4.239

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	LUAS WILAYAH (Km^2)	KEPADATAN PENDUDUK (jiwa/Km^2)
12	BALONGBENDO	79.374	31,41	2.527
13	TAMAN	233.347	31,54	7.398
14	SUKODONO	130.056	32,68	3.980
15	BUDURAN	106.240	41,03	2.589
16	GEDANGAN	133.522	24,06	5.550
17	SEDATI	109.831	79,45	1.382
18	WARU	239.348	30,32	7.894

Sumber: Dispendukcapil Kabupaten Sidoarjo, 2018

Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo dalam tiga tahun terakhir cenderung berfluktuatif. Pada tahun 2017 jumlah penduduk Sidoarjao mengalami peningkatan sebesar 2,44 persen dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2015 menjadi 2.214.377 jiwa. Sementara pada tahun 2018 jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo mengalami penurunan sebesar 6.788 jiwa sehingga menjadi 2.207.589 jiwa.

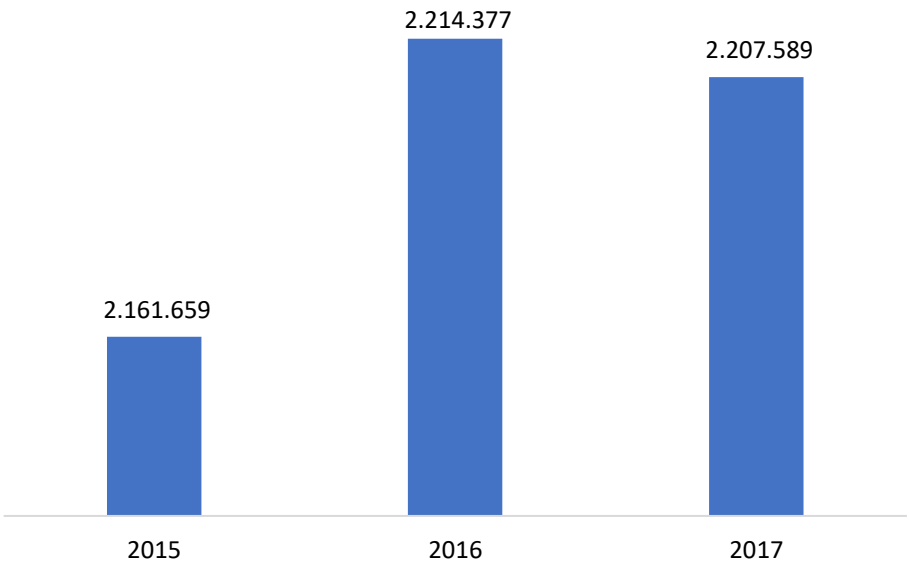

Sumber : BPS Kabupaten Sidoarjo 2018

Grafik 2. 1
Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2015 – 2017

Berdasarkan kelompok umur diketahui bahwa penduduk Kabupaten Sidoarjo didominasi usia produktif, dimana 72,64 persen penduduk merupakan usia produktif (15-64 tahun), sedangkan untuk usia 0-14 tahun sekitar 20,30 persen dan penduduk umur 65 tahun ke atas hanya sekitar 7,06 persen. Rasio jenis kelamin di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2018 sebesar 101,68 dimana hal ini berarti dari setiap 100 penduduk perempuan terdapat 101 orang penduduk laki-laki. Penduduk Kabupaten Sidoarjo yang didominasi oleh usia produktif tersebut bisa menjadi potensi sekaligus ancaman apabila tidak dibina dengan baik. Dengan meningkatnya usia produktif disuatu wilayah maka kebutuhan akan lapangan pekerjaan juga akan semakin meningkat, jika pemerintah tidak siap akan lapangan pekerjaan atau pembinaan terhadap penduduk usia produktif tersebut akan berdampak dalam hal lain seperti tindak kriminalitas, pengangguran, dsb.

Tabel 2. 2
Penduduk Menurut Struktur Usia Tahun 2018

NO	STRUKTUR UMUR	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1	0-4	65.104	60.836	125.940
2	5-9	81.366	76.116	157.482
3	10-14	88.494	82.383	170.877
4	15-19	94.910	88.995	183.905
5	20-24	87.132	83.114	170.246

NO	STRUKTUR UMUR	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
6	25-29	79.699	76.827	156.526
7	30-34	83.683	81.638	165.321
8	35-39	96.939	98.784	195.723
9	40-44	91.850	94.808	186.658
10	45-49	94.601	95.749	190.350
11	50-54	79.013	78.905	157.918
12	55-59	62.711	63.070	125.781
13	60-64	49.121	44.112	93.233
14	65-69	29.952	28.162	58.114
15	70-74	16.338	19.878	36.216
16	> 75	27.455	36.324	63.779

Sumber: Dispendukcapil Kabupaten Sidoarjo, 2018

Jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo berdasarkan tingkat pendidikan terakhirnya didominasi oleh pendidikan dibawah SMA/Sederajat, dengan jumlah 1.348.997 jiwa atau sebesar 60,28%, sedangkan untuk pendidikan terakhir SMA/sederajat sebesar 29,74% dengan jumlah 665.626 jiwa, dan 223.446 jiwa atau 9,98% sisanya memiliki pendidikan terakhir diatas SMA/Sederajat. Dengan demikian, maka jumlah penduduk dengan tingkat pendidikan terakhir di bawah SMA/SMK/sederajat masih terbilang cukup tinggi, yaitu mencapai 60,28% sehingga Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dirasa perlu untuk meningkatkan perhatiannya pada masalah pendidikan karena makin tinggi tingkat pendidikan, maka akan semakin tinggi pula kualitas sumber daya manusia yang selanjutnya akan berpengaruh pada tenaga kerja yang semakin berkualitas.

Tabel 2. 3
Penduduk Menurut Pendidikan Tahun 2018

NAMA KECAMATAN	TDK/BLM SEKOLAH	BLM TAMAT SD/ SEDERAJAT	TAMAT SD/ SEDERAJAT	SLTP/SEDERAJAT	SLTA/SEDERAJAT	D-I/II	AKADEMI/D-III/ SARJANA MUDA	D-IV/S-I	S-II	S-III	TOTAL
TARIK	13.538	4.993	18.077	14.148	17.848	158	480	1.999	64	3	**71.308**
PRAMBON	14.936	6.445	20.450	15.070	23.264	181	675	2.981	88	5	**84.095**
KREMBUNG	13.576	6.368	15.767	13.922	21.470	207	728	2.597	70	1	**74.706**
PORONG	22.618	1.978	19.907	14.928	22.024	144	737	3.320	129	5	**85.790**
JABON	12.696	3.653	16.612	11.153	14.218	123	487	1.660	52	5	**60.659**
TANGGULANGIN	21.201	5.390	21.763	18.311	31.402	249	1.308	6.149	228	2	**106.003**
CANDI	32.252	14.436	29.442	23.081	48.876	487	2.905	13.380	657	36	**165.552**
SIDOARJO	45.342	14.983	33.044	27.578	68.127	846	5.484	28.692	1.600	65	**225.761**
TULANGAN	19.497	9.564	20.116	18.088	31.962	246	1.149	4.679	145	4	**105.450**
WONOAYU	20.299	4.629	22.929	14.201	22.600	190	748	3.479	129	5	**89.209**
KRIAN	28.591	11.184	28.381	22.432	38.075	341	1.660	6.924	223	7	**137.818**
BALONGBENDO	17.187	4.980	17.931	14.887	20.793	187	579	2.745	84	1	**79.374**
TAMAN	39.128	21.006	36.786	32.968	76.758	1.401	4.776	19.352	1.075	97	**233.347**
SUKODONO	25.451	9.357	21.931	18.814	40.836	532	2.265	10.390	458	22	**130.056**
BUDURAN	19.345	9.285	15.006	15.557	34.157	372	1.985	9.946	571	16	**106.240**
GEDANGAN	31.115	7.129	20.184	18.448	41.620	443	2.413	11.578	564	28	**133.522**
SEDATI	20.883	7.471	18.800	14.875	35.080	390	2.261	9.060	987	24	**109.831**
WARU	43.970	17.043	30.825	31.066	76.516	762	5.548	31.437	2.087	94	**239.348**

Sumber: Dispendukcapil Kabupaten Sidoarjo, 2018

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat dapat dicapai dengan mewujudkan pembangunan daerah yang mandiri secara perekonomian, merata dan berkelanjutan. Aspek kesejahteraan masyarakat meliputi: 1) Aspek kesejahteraan fokus pada kesejahteraan dan pemerataan ekonomi; 2) Aspek kesejahteraan fokus pada kesejahteraan sosial; dan 3) Aspek kesejahteraan fokus pada seni budaya dan olah raga.

A. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi secara umum dapat dianalisis menggunakan indikator PDRB per kapita, Pertumbuhan Ekonomi, Laju inflasi dan indikator kesejahteraan sosial.

PDRB (Produk Domestik Regional Bruto).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencerminkan output yang dihasilkan masyarakat pada suatu daerah tertentu sebagai indikator pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. PDRB secara agregatif menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan/balas jasa terhadap faktor produksi yang ikut berpartisipasi dalam proses produksi di suatu daerah. PDRB ADHB menunjukkan pendapatan yang memungkinkan dapat dinikmati oleh penduduk suatu daerah serta menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahunnya. Secara umum, PDRB Kabupaten Sidoarjo masih ditopang oleh sektor-sektor *tradable* (industri pengolahan sebesar 46,08% pada tahun 2017), namun perkembangan sektor *non tradable* (perdagangan, dan jasa) juga menunjukan peningkatan setiap tahunnya. Sedangkan PDRB ADHK digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun, untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan / setiap sektor dari tahun ke tahun.

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Sidoarjo tahun 2016 sebesar Rp 160.020.653,40 juta, satu tahun selanjutnya yaitu tahun 2017, PDRB ADHB menjadi sebesar Rp 174.280.087,00 juta atau terjadi penambahan sebesar Rp 14.259.433,60 juta. PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2018 Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2015 hingga 2017 berturut-turut adalah sebesar Rp 112.012.859,70 juta; Rp 118.179.189,90 juta; dan Rp 125.039.056,37 juta. Selama kurun waktu tiga tahun tersebut terjadi penambahan PDRB sebesar Rp 13.026.196,7 juta.

Kontribusi sektoral menunjukan bahwa perekonomian Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2017 masih ditopang oleh sektor Industri Pengolahan serta sektor perdagangan. Kontribusi PDRB sektor industri pengolahan berada lebih besar sama dengan 46% selama tiga tahun terakhir ini, sedangkan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi berkontribusi lebih dari 15% dari total PDRB. Pada tahun 2016 kontribusi sektor industri pengolahan mengalami perlambatan, pada tahun 2015 mencapai 47,93% dan tahun 2016 mengalami perlambatan sehingga menjadi 46,00%.

Selain itu, pada tahun 2017 terdapat beberapa sektor yang memiliki kontribusi masih kurang dari 2% meliputi sektor pertambangan dan penggalian dengan kontribusi 0,09%, sektor pengadaan listrik gas dengan kontribusi 1,03%, sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dengan kontribusi 0,06%. sektor jasa keuangan dan asuransi dengan kontribusi 1,25% dan sektor real estate dengan kontribusi 0,90%. Sektor Jasa Perusahaan dengan kontribusi 0,16%, Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dengan kontribusi 1,79%, Sektor jasa Pendidikan dengan kontribusi 1,16%, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial dengan kontribusi 0,31% serta jasa lainnya berkontribusi hanya sebesar 0,35%. Untuk pembangunan perekonomian yang bekelanjutan, pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebaiknya lebih berfokus untuk melakukan stimulus pembangunan pada beberapa sektor yang masih memiliki kontribusi kurang dari 2%. Untuk data PDRB tahun 2018, sampai dengan dokumen ini dibuat **belum dirilis oleh BPS.**

Tabel 2. 4
Nilai Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 – 2017 (Juta Rupiah)

No	Sektor	2015	2016	2017
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.509.247,00	2.604.215,90	2.654.505,09
2	Pertambangan dan Penggalian	139.257,40	146.551,90	151.053,31
3	Industri Pengolahan	55.755.893,30	58.304.852,40	61.596.911,10
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1.144.906,10	1.123.396,60	1.148.319,71
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	87.381,80	90.929,50	96.739,85
6	Konstruksi	10.144.358,60	10.747.947,90	11.538.528,64
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17.938.334,20	19.059.369,70	20.271.721,91
8	Transportasi dan Pergudangan	9.150.104,30	9.833.803,00	10.401.337,23
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.694.810,50	4.023.275,20	4.344.217,83
10	Informasi dan Komunikasi	4.744.060,70	5.132.599,20	5.494.447,47
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.347.523,60	1.446.719,90	1.490.045,32
12	Real Estate	1.079.859,70	1.154.478,00	1.198.694,50
13	Jasa Perusahaan	177.623,30	187.339,30	197.605,47
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.973.449,40	2.070.543,10	2.118.372,64
15	Jasa Pendidikan	1.324.621,50	1.405.820,80	1.451.228,79
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	366.262,00	387.725,00	407.266,33
17	Jasa lainnya	435.166,20	459.622,60	478.061,17
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	112.012.859,70	118.179.189,90	125.039.056,37

Sumber: BPS Kabupaten Sidoarjo, 2018

Tabel 2. 5
Nilai Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012-2017 (Juta Rupiah)

No	Sektor	2015	2016	2017
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.559.687,40	3.817.607,90	4.055.643,40
2	Pertambangan dan Penggalian	139.475,00	141.810,40	159.920,40
3	Industri Pengolahan	68.562.265,50	73.636.756,40	80.314.622,80
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1.703.576,40	1.727.111,90	1.798.007,40
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	96.413,10	104.511,10	112.907,10
6	Konstruksi	13.228.282,50	14.597.002,90	16.006.572,00
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	23.055.489,70	25.623.446,50	28.139.685,50
8	Transportasi dan Pergudangan	17.095.795,30	19.623.165,40	21.275.283,40
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.763.893,60	5.453.140,90	6.013.345,70
10	Informasi dan Komunikasi	5.036.600,20	5.588.594,70	6.094.635,40
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.846.582,10	2.053.165,50	2.183.943,90
12	Real Estate	1.335.786,40	1.471.788,80	1.564.212,20
13	Jasa Perusahaan	229.403,10	253.008,70	275.386,80
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.666.419,60	2.942.523,50	3.113.755,80
15	Jasa Pendidikan	1.766.932,40	1.913.687,90	2.024.850,70
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	455.187,80	492.318,20	533.989,50
17	Jasa lainnya	539.099,60	581.012,70	613.325,00
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	146.080.889,70	160.020.653,40	174.280.087,00

Sumber: BPS Kabupaten Sidoarjo, 2018

Tabel 2. 6
Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 – 2017 (%)

No	Sektor	2015	2016	2017
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,44	2,39	2,33
2	Pertambangan dan Penggalian	0,1	0,09	0,09
3	Industri Pengolahan	46,93	46,02	46,08
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1,17	1,08	1,03
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,07	0,07	0,06
6	Konstruksi	9,06	9,12	9,18
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15,78	16,01	16,15
8	Transportasi dan Pergudangan	11,66	12,26	12,21
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,26	3,41	3,45
10	Informasi dan Komunikasi	3,45	3,49	3,50
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,26	1,28	1,25
12	Real Estate	0,91	0,92	0,90
13	Jasa Perusahaan	0,16	0,16	0,16
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,83	1,84	1,79
15	Jasa Pendidikan	1,21	1,2	1,16
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,31	0,31	0,31
17	Jasa lainnya	0,37	0,36	0,35
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100	100	100

Sumber: BPS Kabupaten Sidoarjo, 2018

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk mengevaluasi perkembangan/kemajuan pembangunan yang dilaksanakan khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan tersebut merupakan agregat dari pertumbuhan setiap sektornya. Indikator ini sangat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan yang telah dilaksanakan serta berguna pula untuk menentukan arah kebijaksanaan pembangunan yang akan datang. Agar diperoleh gambaran tentang pertumbuhan ekonomi secara riil, maka digunakan angka PDRB atas dasar harga konstan. Angka pertumbuhan ekonomi dapat dihitung dari perubahan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan dari tahun (n) dengan tahun (n-1).

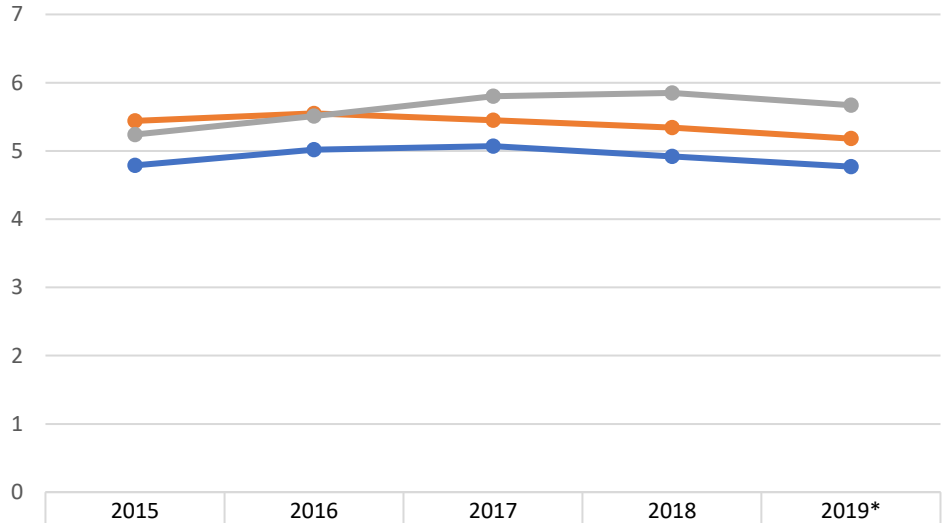

	2015	2016	2017	2018	2019*
Nasional	4,79	5,02	5,07	4,92	4,77
Jawa Timur	5,44	5,55	5,45	5,34	5,18
Sidoarjo	5,24	5,51	5,8	5,85	5,67

Sumber : BPS Kabupaten Sidoarjo 2018
**) : target*

Grafik 2. 2
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur dan Nasional
Tahun 2015 – 2019*

Perkembangan ekonomi di Kabupaten Sidoarjo berdasarkan PDRB ADHK 2015-2019* mengalami fase yang dinamis, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 mencapai 5,44%. Perlambatan yang terjadi sebelum tahun 2015 disebabkan oleh adanya perlambatan ekonomi global, yang tidak hanya dialami oleh Indonesia, tetapi juga hampir semua negara di dunia. Pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan menjadi 5,51% dan kembali meningkat pada tahun 2017 dan 2018 menjadi 5,8% di tahun 2017 dan 5,85% di

tahun 2018. Pertumbuhan perekonomian Kabupaten Sidoarjo nilainya lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan perekonomian nasional. Hal ini berarti perekonomian Kabupaten Sidoarjo memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan perekonomian nasional.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidoarjo dalam lima tahun terakhir cenderung meningkat, terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu 2015-2018 hingga pada level 5,85%. Pada tahun 2016 mengalami sedikit peningkatan mejadi 5,51% dan tahun 2017 kembali meningkat menjadi 5,8% dan di tahun 2018 mengalami kenaikan 0,05% dari tahun 2017 sehingga menjadi 5,85% untuk pertumbuhan perekonomian Kabupaten Sidoarjo. Namun pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidoarjo mengalami perlambatan yaitu berada pada angka 5,67%. Walaupun mengalami perlambatan namun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidoarjo berada jauh di atas ekonomi nasional. Berikut merupakan ringkasan pertumbuhan sektoral Kabupaten Sidoarjo periode 2015-2017. Laju pertumbuhan PDRB ADHK 2012 menurut Lapangan Usaha Kabupaten Sidoarjo bisa diamati dalam tabel 2.7.

Tabel 2. 7
Laju Pertumbuhan PDRB seri 2012 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Sidoarjo

NO	Sektor	2015	2016	2017
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,50	3,78	1,93
2	Pertambangan dan Penggalian	-13,98	5,24	3,07
3	Industri Pengolahan	6,27	4,52	5,70
4	Pengadaan Listrik dan Gas	9,51	-1,88	2,22
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,19	4,06	6,39
6	Konstruksi	3,66	5,95	7,06
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,30	6,25	6,36
8	Transportasi dan Pergudangan	5,71	7,47	5,77
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,23	8,89	7,98
10	Informasi dan Komunikasi	6,88	8,19	7,05
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	12,44	7,36	2,99
12	Real Estate	5,74	6,91	3,83
13	Jasa Perusahaan	5,05	5,47	5,48
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,11	4,92	2,31
15	Jasa Pendidikan	7,21	6,13	3,23
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,09	5,86	5,04
17	Jasa lainnya	4,07	5,62	4,01
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	6,89	5,51	5,80

Sumber: BPS Kabupaten Sidoarjo, 2018

Berdasarkan data di atas, kurang dari separuh sektor mengalami pertumbuhan yang fluktuatif selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2017, dari 17 sektor terdapat 5 sektor yang mengalami kenaikan pertumbuhan ADHK, diantaranya yaitu sektor industri pengolahan, sektor pengadaan listrik dan gas, sektor pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang, sektor konstruksi, dan sektor jasa perusahaan. Sektor konstruksi Kabupaten Sidoarjo mengalami pertumbuhan yang cukup besar pada tahun 2017 menjadi 7,06%. Hal tersebut merupakan salah satu faktor pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidoarjo mengalami percepatan pada tahun 2017 sebesar 5,63%.

Selain PDRB dan pertumbuhan ekonomi, indikator kesejahteraan dan pemerataan ekonomi lainnnya adalah PDRB perkapita. Apabila dilihat dari pertumbuhan PDRB Kabupaten Sidoarjo tahun 2015-2018 nampak sudah cukup signifikan. Pendapatan perkapita masyarakat Kabupaten Sidoarjo tahun 2015-2017 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sementara nilai PDRB perkapita tahun 2018 sama dengan tahun 2017. Pada tahun 2015 Rp. 68.99 juta, Tahun 2016 sebesar Rp 74.41 juta, Tahun 2017 dan 2018* PDRB Per Kapita sebesar Rp 79,81 juta.

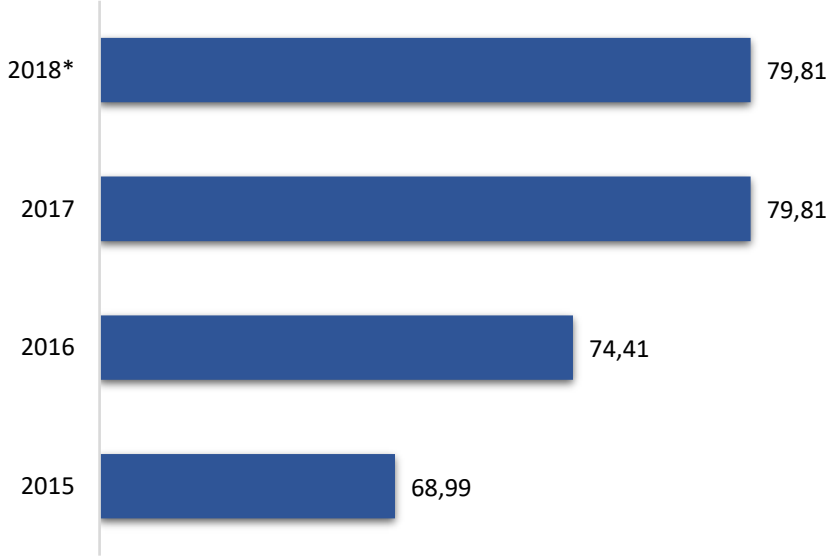

Sumber: BPS Kabupaten Sidoarjo, 2018

Grafik 2. 3
Pendapatan Perkapita Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2015 -2018* (Juta/Tahun)

Laju Inflasi

Inflasi adalah suatu keadaan di mana harga barang-barang secara umum mengalami kenaikan dan berlangsung dalam waktu yang relatif lama dan terus-menerus

sesuai dengan mekanisme pasar. Inflasi dapat disebabkan karena konsumsi masyarakat yang meningkat, likuiditas di pasar yang berlebih yang memicu aksi konsumsi atau spekulasi, serta dimungkinkan akibat adanya hambatan dalam distribusi dan suplai barang. Inflasi dapat memperburuk tingkat kesejahteraan masyarakat akibat menurunnya daya beli masyarakat secara umum akibat harga-harga yang naik. Selain itu distribusi pendapatan pun semakin buruk akibat tidak semua orang dapat menyesuaikan diri dengan inflasi yang terjadi. Terdapat banyak cara untuk mengukur tingkat inflasi, contohnya: Indeks harga konsumen (CPI), Indeks biaya hidup, Indeks harga produsen, Indeks harga komoditas, Indeks barang-barang modal, dan Deflator PDB. Yang paling sering digunakan dalam mengukur infasi adalah CPI dan GDP Deflator.

Perkembangan inflasi di Kabupaten Sidoarjo secara tidak langsung dipengaruhi oleh kebijakan makro ekonomi dari pemerintah pusat yang dapat mempengaruhi kenaikan harga-harga. Inflasi di Kabupaten Sidoarjo setiap bulan pada tahun 2016-2017 tercatat tidak terlalu tinggi dan cenderung stabil. Pola yang dihasilkan setiap bulannya selama dua tahun cenderung sama. Hal tersebut mengindikasikan bahwasannya terdapat beberapa fenomena yang hampir selalu terulang setiap tahunnya. Inflasi yang sangat tinggi terjadi pada bulan-bulan tertentu seperti bulan ketika terdapat hari-hari besar seperti Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Ajaran Baru, Natal dan Tahun baru, hal tersebut ditunjukkan dengan tingginya inflasi pada bulan Januari, Juni, Juli, serta Desember 2017. Peningkatan laju inflasi yang tinggi dikarenakan pada bulan- bulan tersebut permintaan akan barang meningkat terutama permintaan bahan pokok sehingga menyebabkan kenaikan harga.

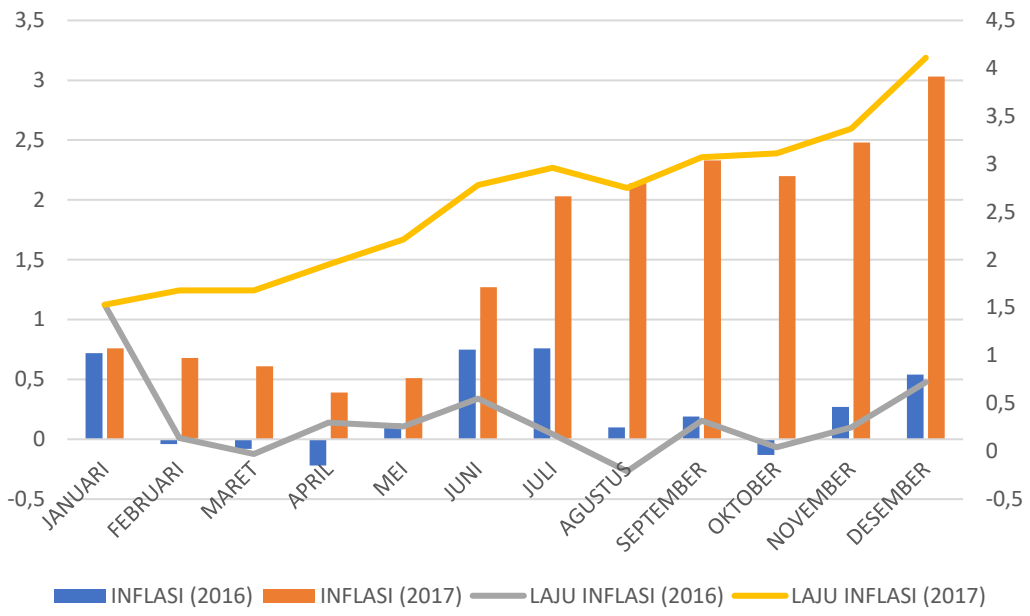

Sumber: LKPJ Kabupaten Sidoarjo 2017

Grafik 2. 4
Inflasi dan Laju Inflasi Bulanan Tahun 2016 dan 2017

B. Fokus Kesejahteraan Sosial

Tingkat kesejahteraan sosial dapat diukur dari beberapa indikator. Indikator yang biasa dipakai dalam mengukur kesejahteraan sosial adalah IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yang terdiri dari indeks pendidikan, indeks kesehatan dan indeks kemampuan daya beli.

1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan standart yang di tetapkan oleh UNDP (*United Nations Development Programme*) dalam mengukur kualitas pembangunan manusia disuatu wilayah. IPM merupakan indeks komposit dari 3 (tiga) jenis indeks yang mengukur tingkat kesehatan, pendidikan, dan pendapatan masyarakat.

Angka indeks pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2015 sampai tahun 2018 mengalami peningkatan setiap tahunnya. IPM Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2015 sebesar 77,43. Di tahun berikutnya, yaitu 2016 naik menjadi 78,17. Selanjutnya secara terus menerus mengalami kenaikan hingga puncaknya di tahun 2018 IPM mencapai 79,50 yang merupakan capaian tertinggi Kabupaten Sidoajo dalam kurun waktu empat tahun terakhir. Meningkatnya nilai IPM Kabupaten Sidoarjo menandakan bahwa semakin baiknya derajat kesehatan masyarakat, meningkatnya kemampuan daya

beli, dan semakin baiknya pembangunan yang dirasakan oleh penduduk.

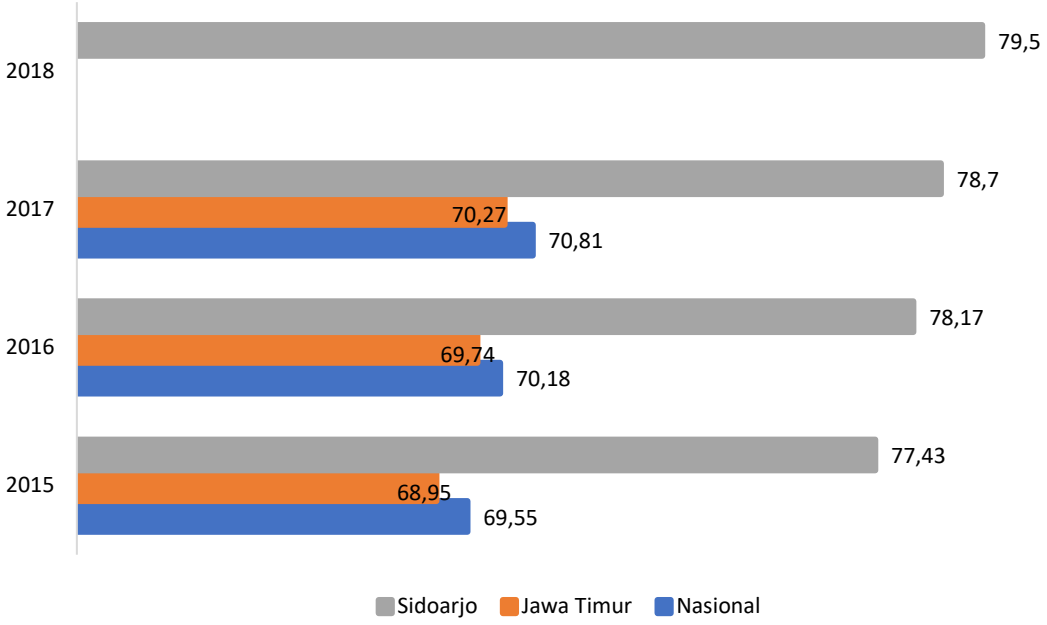

Sumber: BPS Provinsi Jatim 2018

Grafik 2. 5
Perkembangan Angka IPM Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 – 2018

2. Indeks Pendidikan

Indeks Pendidikan yang menggambarkan tingkat pendidikan serta kemampuan akademik dan ketrampilan, dan tercermin melalui angka Harapan Lama Sekolah (*EYS*) dan Rata-Rata Lama Sekolah (*MYS*). Angka Harapan Lama Sekolah dihitung pada penduduk usia 7 tahun keatas. Angka ini digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Rata-rata lama sekolah mengindikasikan lama rata-rata seseorang menempuh pendidikan formal dengan artian waktu maksimal yang digunakan seseorang dalam menekuni pendidikan sekolah pada semua jenjang dengan cakupan penduduk berusia 25 tahun keatas.

Angka harapan lama sekolah Kabupaten Sidoarjo selama 3 tahun terakhir menunjukkan kemajuan yang berarti. Pada tahun 2015 sebesar 13,89 tahun dan di tahun 2016 mencapai 14,13 tahun dan 2017 sebesar 14,34 tahun. Hal itu berarti pada tahun 2017 diharapkan penduduk Sidoarjo usia 7 tahun ke atas dapat mengenyam pendidikan sampai lulus jenjang pendidikan setara SMA (12 tahun pendidikan formal). Tidak hanya berhenti sampai jenjang SMA, akan tetapi diharapkan bisa memasuki jenjang diploma (diploma I dan

diploma III).Tahun 2017 rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Sidoarjo sebesar 11,82 tahun, maka secara umum telah menamatkan pendidikan sampai jenjang setingkat SMA.

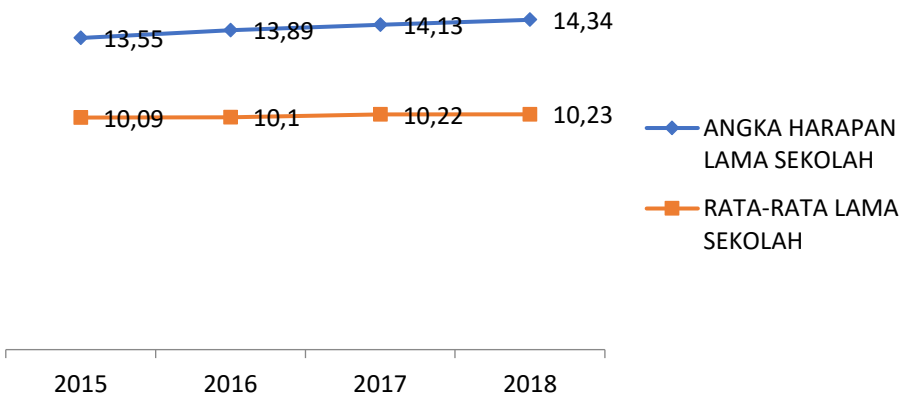

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo

Grafik 2. 6
Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah

3. Indeks Kesehatan.

Indeks Kesehatan diindikasikan dengan indeks Harapan Hidup (*Life Expectancy At Age*), menggambarkan tingkat kesehatan masyarakat yang ditunjukkan oleh indikator Angka Harapan Hidup. Angka harapan hidup adalah rata-rata lamanya hidup yang akan dicapai oleh penduduk. Angka harapan hidup penduduk Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2013 dan 2014 konstan berada pada nilai 73,43 tahun. Pada tahun 2015 Angka Harapan Hidup penduduk Kabupaten sidoarjo naik signifikan menjadi 73,63 tahun, kemudian pada tahun 2016 naik melamban yaitu 73,67 tahun dan pada tahun 2017 sebesar 73,63 tahun.

Angka harapan hidup juga dapat mencerminkan hasil dari upaya pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam menyediakan layanan kesehatan kepada masyarakat. Oleh karena itu komponen pendukung atau indikator dalam perhitungan Angka Harapan Hidup cukup kompleks karena melibatkan berbagai layanan kesehatan seperti penanganan terhadap ibu hamil, melahirkan, bayi, masyarakat usia lanjut dan lainnya yang menyangkut pelayanan kesehatan.

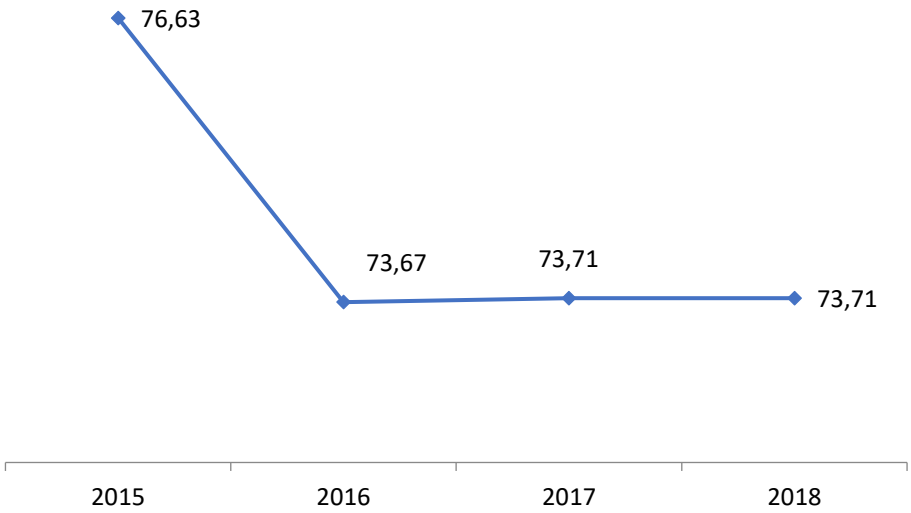

Sumber: BPS Kabupaten Sidoarjo

Grafik 2. 7
Angka Harapan Hidup Penduduk Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015– 2018

4. Indeks Kemampuan Daya Beli (*Purchasing Power Parity*/PPP),

Indeks Kemampuan Daya Beli menggambarkan tingkat kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup layak di Kabupaten Sidoarjo. Kemampuan daya beli masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor,antara lain tingkat pendapatan, pola konsumsi dan perkembangan harga-harga. Daya Beli masyarakat digambarkan melalui pengeluaran riil masyarakat. Secara umum Indeks daya beli masyarakat Kabupaten Sidoarjo selama tahun 2011-2017 mengalami peningkatan secara bertahap setiap tahunnya. Pencapaian tertinggi selama kurun waktu lima tahun terjadi pada tahun terakhir yaitu mencapai Rp 13.710.000,- pada tahun 2017. Walaupun indeks daya beli Kabupaten Sidoarjo terus mengalami kenaikan setiap tahunnya, Indeks daya beli tersebut masih harus tetap ditingkatkan kembali supaya kesejahteraan masyarakat lebih terjamin.

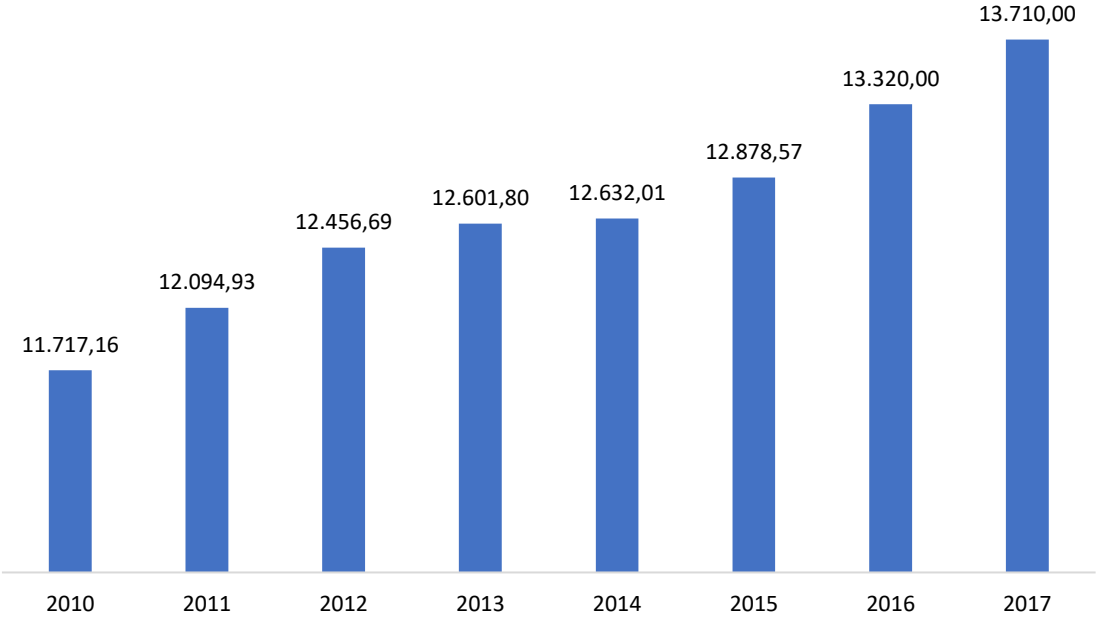

Sumber: BPS Prov Jatim April, 2018

Grafik 2. 8
Pengeluaran Perkapita yang disesuaikan Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2010 – 2017 (Ribu Rupiah)

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan umum merupakan segala bentuk pelayanan baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat. Gambaran kondisi Kabupaten Sidoarjo pada aspek pelayanan umum dijabarkan dalam Fokus layanan Wajib dan Layanan Pilihan. Fokus Layanan Wajib terdiri dari Fokus Layanan Wajib Pelayanan Dasar dan Fokus Layanan Wajib Bukan Pelayanan Dasar.

A. Fokus Layanan Wajib Pelayanan Dasar

Urusan Pendidikan

Indikator urusan pendidikan di Kabupaten Sidoarjo meliputi Angka Partisipasi Murni, Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Putus Sekolah (APS), sarana prasarana pendidikan, rasio guru-murid, kualifikasi guru, angka kelulusan, RAPBS pada satuan Pendidikan. Berikut merupakan rincian indikator pendidikan Kabupaten Sidoarjo.

Tabel 2. 8
Indikator Urusan Pendidikan

NO	INDIKATOR	2013	2014	2015	2016	2017	2018

1	Angka Partisipasi Murni							
		SD/ MI	93,42	100,78	95,46	95,78	96,42	98,35
		SMP/Mts	72,31	78,72	74,60	78,12	79,58	84,03
2	Angka Partisipasi Kasar							
		SD/ MI	103,83	110.29	104,61	107,12	107,71	107,97
		SMP/Mts	95,6	101,55	97,81	98,51	98,85	99,01
3	Angka Putus Sekolah							
		SD/ MI	0,01	1	0	0,01	0,00	
		SMP/Mts	0,14	0,7	0,11	0,08	0,06	
4	Persentase Nilai Rata-rata UN							
		SD/ MI	8,7	8,75	8,7	8,2	8,32	8,39
		SMP/Mts	7,69	7,69	7,69	7,06	6,25	5,16
5	Persentase angka kelulusan sekolah							
		SD/ MI	100	100	100	100	100	
		SMP/Mts	99,97	99,99	100	100	100	
6	Rasio ideal prasarana dan sarana pendidikan terhadap jumlah murid							
	Rasio guru terhadap jumlah murid							
		SD/ MI	1:27	1:28	1:18	1:18	1:20	1:20
		SMP/Mts	1:18	1:19	1:15	1:15	1:20	1:20

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kab,sidoarjo, 2018

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan perbandingan antara jumlah seluruh murid sekolah untuk jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah seluruh anak usia sekolah untuk jenjang pendidikan tersebut. Seiring dengan nilai APK, tingkat APM kabupaten Sidoarjo juga cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya pada semua jenjang. Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang pendidikan SD/MI tahun 2013 sebesar 93,42% dan 2014 sebesar 100,78%. Pada tahun 2015 mengalami perlambatan menjadi 95,46%, dan kembali mengalami peningkatan hingga pada tahun 2018 menjadi 98,35%. APM untuk jenjang pendidikan SMP/MTs pada tahun 2013 sebesar 72,31%, tahun 2014 mengalami kenaikan menjadi 78,72%, dan tahun 2015 menjadi 74,60%. APM Kabupaten Sidoarjo untuk jenjang pendidikan SMP/MTs kembali mengalami peningkatan hingga pada tahun 2018 menjadi 84,03%.

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan perbandingan antara jumlah seluruh murid sekolah untuk jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah seluruh anak usia sekolah untuk jenjang pendidikan tersebut. Berdasarkan data Angka Partisipasi Kasar (APK) pada semua jenjang pendidikan di Kabupaten sidoarjo secara umum mengalami peningkatan. Pada jenjang pendidikan SD/MI Tahun 2013 APK sebesar 103,83% dan meningkat hingga pada tahun 2014 menjadi sebesar 110,29%. Namun pada tahun 2015 mengalami perlambatan menjadi 104,61% dan kembali meningkat hingga tahun 2018 mencapai 107,97%. Sedangkan APK untuk jenjang pendidikan SMP/MTs tahun 2013 sebesar 95,6%

meningkat menjadi 101,55% pada tahun 2014. Mengalami perlambatan yang cukup signifikan pada tahun 2015 menjadi 97,81% dan kembali meningkat hingga 99,01% di tahun 2018. Nilai Angka Partisipasi Kasar (APK) yang meningkat tersebut mengartikan bahwa program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk Sidoarjo untuk mengenyam pendidikan semakin membaik atau daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan semakin tinggi

Angka Putus Sekolah (APS) adalah angka (jumlah siswa) putus sekolah per 100 siswa pada setiap jenjang pendidikan. Pada jenjang pendidikan SD/MI angka putus sekolah tahun 2013 sebesar 0,01%. Pada tahun 2015 sudah tidak ada siswa SD/MI yang putus sekolah (0%), akan tetapi mengalami kenaikan lagi sebesar 0,01% pada tahun 2016, pada tahun 2017 tidak ada siswa SD/MI yang putus sekolah. Angka putus sekolah untuk jenjang pendidikan SMP/MTs tahun 2013 sebesar 0,14%, dan cenderung mengalami perlambatan hingga mencapai 0,12% pada tahun 2017 dan 2018 menjadi 0,00%.

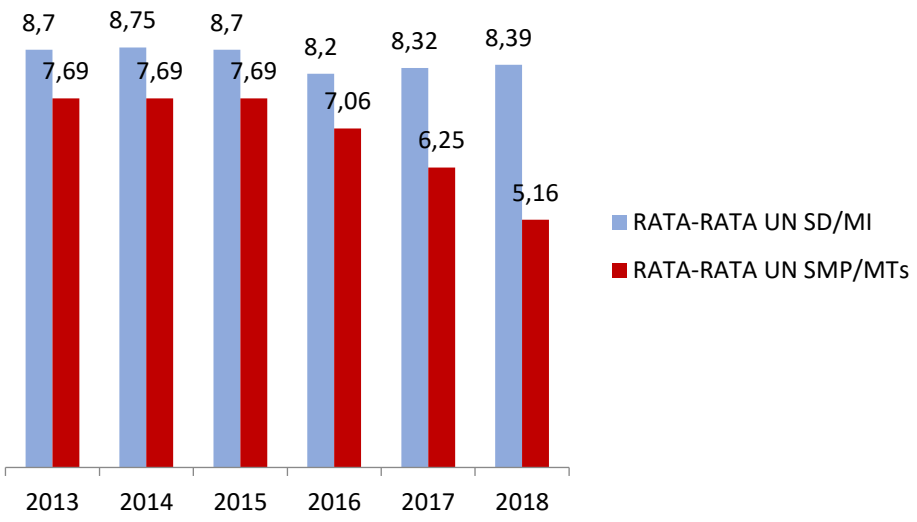

Sumber: Laporan Hasil Ujian Sekolah/Madrasah SD/MI dan SMP/MTs Tahun Ajaran 2017/2018 Provinsi Jawa Timur

Grafik 2. 9
Rata-Rata Nilai UAN 2013-2018

Grafik 2.9 menjelaskan mengenai indikator nilai rata-rata UN untuk jenjang pendidikan SD dan SMP yang menggambarkan prestasi pendidikan siswa Kabupaten Sidoarjo. Realisasi nilai rata-rata UAN untuk jenjang SD/MI cenderung mengalami fluktuasi

yakni dari tahun 2013-2015 yaitu pada tahun 2013 mencapai 8,7 dan di tahun 2014 naik menjadi 8,75 namun mengalami perlambatan menjadi 8,7 di tahun 2015. Di tahun 2016-2018 mengalami kenaikan yaitu 8,2 di tahun 2016, 8,32 di tahun 2017, dan 8,39 di tahun 2018. Sedangkan untuk jenjang SMP/MTs dari tahun 2013-2018 terus mengalami perlambatan hingga pada tahun 2018 nilai UAN SMP/MTs sebesar 5,16. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kualitas pendidikan khususnya untuk jenjang SMP/MTs di Kabupaten Sidoarjo.

Tabel 2. 9
Perkembangan Rasio Pendidik dan Peserta Didik
di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013 – 2018

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	2018
SD/ MI	1:27	1:28	1:18	1:18	1:20	1:20
SMP/MTs	1:18	1:19	1:15	1:15	1:20	1:20

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo, 2018

Tabel 2.9 menunjukkan fasilitas utama pendidikan adalah adanya tenaga pengajar atau guru. Semakin banyak tenaga pengajar maka fasilitas pendidikan semakin baik. Rasio jumlah guru terhadap jumlah murid dihitung dari jumlah guru dibanding dengan jumlah murid. Pada Tahun 2018 rasio minimal jumlah guru terhadap murid untuk jenjang SD adalah 1:20 dan SMP 1:20.

Tabel 2. 10
Rasio Jumlah Kelas Terhadap Jumlah Murid

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	2018
SD/ MI	1:29	1:29	1:29	1:28	1:28	1:30
SMP/MTs	1:33	1:33	1:33	1:32	1:36	1:30

Sumber: Dapodik Tahun 2018

Fasilitas fisik yang mendukung adanya pengembangan aspek pendidikan juga ditunjukan dengan adanya fasilitas kelas. Rasio jumlah kelas terhadap murid dihitung dari jumlah kelas dibanding dengan jumlah murid. Standar nasional berdasarkan standar ideal indikator pemerataan pendidikan yang ditetapkan melalui Permendiknas 41 Tahun 2007 tentang standar proses satuan pendidikan dasar dan menengah adalah SD/MI sebesar 1:28 dan SMP/MTs sebesar 1:32, apabila dibandingkan dengan Kabupaten Sidoarjo berdasarkan realisasi tahun 2018 dalam Tabel 2.10 standar proses tersebut tidak terpenuhi untuk jenjang SD/MI tetapi terpenuhi untuk jenjang SMP/MTs. Hal ini dapat dikarenakan semakin

tingginya jumlah masyarakat yang mengenyam pendidikan tetapi tidak diimbangi dengan kuantitas jumlah kelas maupun sekolah atau meningkatnya kesadaran wajib sekolah 9 tahun dalam masyarakat. Selain itu, banyaknya jumlah penduduk pada usia produktif khususnya usia 7-13 tahun juga dapat meningkatkan kebutuhan atas pendidikan jenjang SD.

Tabel 2. 11
Kualitas Bangunan Sekolah

Kondisi Bangunan	TK			SD			SMP		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Baik	1,016	746	769	781	836	796	224	231	237
Tidak Baik	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo, 2018

Kondisi bangunan akan sangat berpengaruh pada tingkat pendidikan masyarakat. Kepedulian pemerintah terhadap kualitas bangunan sekolah sangat menunjang perbaikan kualitas pendidikan daerah. Berdasarkan pada tabel diatas diketahui bahwa tidak ada sekolah yang rusak/tidak baik di Kabupaten Sidoarjo. Artinya seluruh sekolah dalam keadaan baik. Terdapat peningkatan jumlah sekolah khususnya untuk jenjang SD dan SMP. Semula jumlah bangunan sekolah untuk jenjang SD sebesar 781 pada tahun 2016 dan meningkat menjadi 836 pada tahu 2017,untuk 2018 mengalami penurunan menjadi 796. Sedangkan untuk jenjang pendidikan SMP, pada tahun 2016 terdapat 224 bangunan dalam kondisi baik dan meningkat sebanyak 7 bangunan menjadi 231 bangunan pada tahun 2017, untuk tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi 237.

Urusan Kesehatan

Selain pendidikan, kualitas pembangunan masyarakat juga dapat dilihat dari tingkat kesehatan masyarakat. Sasaran pembangunan urusan kesehatan Kabupaten Sidoarjo yaitu: (1). Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat; dan (2). Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan.

Perkembangan kesehatan diukur berdasarkan berbagai indikator yang telah terukur di Kabupaten Sidoarjo. Indikator yang digunakan antara lain: 1) Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup; 2) Angka kematian balita; 3) Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran; 4) Angka morbiditas; 5) Persentase penduduk yang memanfaatkan Puskesmas, dan 6) Persentase penduduk yang memanfaatkan RSUD.

Tabel 2. 12
Indikator Urusan Kesehatan

NO	INDIKATOR		Satuan	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Angka Kematian Bayi		Per 1.000 kh	8,8	6,86	6,27	4,30	5,45	4,38
2	Angka kematian balita		Per 1.000 balita	10,08	7,57	7,1	5,39	7,00	5,00
3	Angka kematian ibu		Per 100.000 kh	72,82	80,02	72,09	66,34	82,62	64,13
4	Angka Morbiditas								
	a	Angka Keberhasilan Pengobatan TB Paru	%	90,88	92,5	90,3	86,44	89,64	88,34
	b	Angka kesakitan DBD	%	10,75	8,12	28,3	79,42	23,63	12,30
	c	Angka penemuan AFP (*Acute Flaccid Paralysis* = Lumpuh layu mendadak)	jiwa	1,79	1,98	1,74	2,31	4,78	3,81
	d	Balita dengan gizi buruk	%	0,02	0,02	0,8	0,7	1,10	0,82
	e	Prevalensi Gizi kurang	%	6,9	5,92	4,9	6,2	-	-
	f	Kecamatan Bebas rawan gizi	%	100	100	100	100		
5	Persentase penduduk yang memanfaatkan puskesmas								
	a	Persentase kunjungan rawat jalan	%	67,39	72,9	77,31	86,79	125,43	76,47
	b	Persentase kunjungan rawat inap	%	0,83	0,82	0,83	1,26	5,32	0,60
6	Kualitas RSUD		%	18,47	16,79	NA			
	a	Bed Ocupancy Rate (BOR)	%	77,4	71,9	71,2	78,30	74,20	75,10
	b	Length of Stay (LOS)	hari	3,8	3,6	3,8	4,70	4,70	4,50
	c	Turn Over Interval (TOI)		1,1	1,3	NA	1,20	1,50	1,40

Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, 2018

Dari Tabel di atas dapat diperoleh informasi bahwa perkembangan Angka kematian bayi dari tahun 2013 – 2016 cenderung mengalami perlambatan, pada tahun 2017 mengalami peningkatan yaitu sebesar 5,45 namun di tahun 2018 mengalami perlambatan kembali menjadi 4,38. Angka kematian bayi dan balita diukur per 1000 kelahiran hidup. Sedangkan untuk kematian ibu dihitung per 100.000 kelahiran hidup. Angka kematian bayi nasional terletak diangka < 13 per 1.000 kelahiran hidup, bila melihat data di atas angka kematian bayi dibawah angka nasional.

Perkembangan angka kematian balita pada tahun 2017 sebesar 7,00 meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 5,39, namun di tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 5,00. Pada angka kematian balita secara nasional terletak pada angka < 46 per 1000 kelahiran hidup.

Angka kematian Ibu untuk tahun 2017 sebesar 82,62, angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan 2016 sebesar 66,3, namun mengalami perlambatan menjadi 64,13 di tahun 2018. Angka kematian ibu nasional terletak diangka < 89 per 100.000 kelahiran hidup. Angka kematian ibu di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2018 dibawah angka kematian nasional. Namun tercatat pada tahun 2012 mencapai 96 yang cukup tinggi melebihi angka kematian nasional.

Angka morbiditas digunakan untuk menilai pelayanan terhadap penanggulangan penyakit menular, sehingga perlu diukur angka kesakitan beberapa penyakit potensial yang terjadi. Penyakit tersebut adalah TB Paru dan Demam Berdarah Dengue. Angka morbiditas terdiri dari:

a. Perkembangan Angka Kesembuhan TB Paru dari tahun ketahun mengalami fluktuasi. Namun pada tahun 2016 Angka Kesembuhan TB Paru mengalami perlambatan menjadi 89,8 hingga pada tahun 2018 Angka Kesembuhan TB Paru menjadi 88,34.
b. Angka kesakitan DBD pada tahun 2016 sebesar 79,42 mengalami peningkatan yang drastis dibandingkan tahun 2015 sebesar 28,3 persen. Namun pada tahun 2017 dan 2018 mengalami perlambatan, yaitu angka kesakitan DBD di tahun 2017 mencapai 23,63 persen serta melambat kembali menjadi 12,30 persen di tahun 2018.

Persentase penduduk yang memanfaatkan Puskesmas (rawat jalan) tahun 2018

sebesar 76,47% angka tersebut mengalami perlambatan dari tahun 2017 yang mencapai 125,43%. Sedangkan, persentase kunjungan rawat inap tahun 2016 sebesar 86,79% angka ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2015 sebesar 77,31%. Persentase kunjungan rawat inap dari tahun 2013-2018 mengalami fluktuasi. Kunjungan rawat inap terbesar terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 5,32 persen, untuk tahun 2018 besar cakupan rawat inap mencapai 0,60 persen.

BOR merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat tinggi rendahnya pemanfaatan tempat tidur rumah sakit dalam kurun waktu tertentu. Tingkat pemanfaatan diukur dari penggunaan tempat tidur yang tersedia. Standar BOR yang ditetapkan untuk setiap Rumah Sakit sebesar 60% s.d 85%. *Bed Occupancy Ratio* (BOR) untuk tahun 2013 sebesar 77,40%. BOR mengalami perlambatan dari tahun ke tahun, hingga pada tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi 78,30%. Untuk tahun 2017 BOR di Kabupaten Sidoarjo mengalami perlambatan menjadi 74,20, dan mengalami kenaikan di tahun 2018 menjadi 75,10. Artinya Angka realisasi BOR dari tahun 2010 hingga tahun 2016 menunjukkan sudah adanya efisiensi dalam pemanfaatan tempat tidur dirumah sakit, hal tersebut disimpulkan dari angka rata-rata capaian tidak melebihi 85% dan tidak kurang dari 60% yang menunjukkan telah efektif dan efisiensi.

Standar ALOS yang ditentukan di seluruh Rumah Sakit termasuk di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo sebesar 6 s.d 9 hari. *Average Length of Stay* (ALOS) tahun 2013 sebesar 3,8 hari. Hingga pada tahun 2018 mengalami peningkatan ALOS menjadi 4,5 hari. Namun nilai tersebut masih berada dalam standar yang ditentukan yaitu tidak lebih dari 9 hari dan tidak kurang dari 6 hari. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan di RSUD Kabupaten Sidoarjo telah cukup baik sehingga pasien tidak perlu dirawat terlalu lama di rumah sakit.

Turn Over Interval (TOI) tahun 2018 sebesar 1,4 mengalami perlambatan dari tahun sebelumnya yang mencapai 1,5. Bila merujuk pada standart nasional *Turn Over Interval* (TOI) yang ada, TOI RSUD Kabupaten Sidoarjo berada pada angka 1 sampai dengan 3 hari maka capaian tersebut bisa dianggap telah efisien dan masih dalam batas normal.

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- **Urusan Pekerjaan Umum**

Peran infrastruktur tidak dapat dipisahkan dalam keberhasilan pembangunan ekonomi suatu bangsa. Penyediaan infrastruktur yang memadai dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur yang menunjang aktivitas ekonomi masyarakat salah

satunya adalah jalan dan jembatan. Program pemerintah nasional saat ini adalah memperbaiki segala aspek yang menyangkut infrastruktur untuk mempermudah akses masyarakat. Untuk mendukung program nasional pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga melaksanakan program-program prioritas terkait infrastruktur. Kinerja pekerjaan umum di Kabupaten Sidoarjo ditunjukkan dengan beberapa indikator, yaitu antara lain kondisi jalan dan jembatan, perkembangan jumlah jembatan kabupaten, ketersediaan PJU, dan luas daerah genangan banjir.

Tabel 2. 13
Indikator Urusan Pekerjaan Umum

NO	INDIKATOR		Satuan	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Perkembangan kondisi jalan aspal								
	a.	Baik	KM	788,03	812,68	848,68	849,446	887,153	826,68
	b.	Sedang	KM	111,25	95,41	104,24	107,5	80,581	115,15
	c.	Rusak	KM	66,18	84,23	48,54	47,006	41,946	70,25
		Jumlah	KM	965,46	992,32	1.001,46	1.003,95	1.009,68	1.012,08
2	Perkembangan jumlah jembatan kabupaten		Buah	370	376	378	380	390	396
3	Kondisi jembatan								
	a.	Baik	Buah	355	361	366	367	370	380
	b.	Sedang	Buah	10	9	8	8	2	9
	c.	Rusak	Buah	5	6	4	5	18	7
		Jumlah	Buah	370	376	378	380	390	396
4	Luas daerah genangan banjir		Hektar	1.076	1.030,32	982,0	599	572	473
	a.	Pertanian	Hektar	600	560	515	509	490	405
	b.	Pemukiman	Hektar	476	470,32	467	90	82	68

Sumber: Dinas PUBM dan SDA Kabupaten Sidoarjo, 2018

Tabel 2.13 disimpulkan bahwa kinerja dari Dinas PU dan Penataan Ruang dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan semakin baik, hal ini dibuktikan dengan perkembangan kondisi jalan aspal yang baik semakin meningkat, selain itu jembatan dengan kondisi baik juga mengalami peningkatan, ketersediaan PJU meningkat, dan luas daerah genangan banjir cenderung melambat.

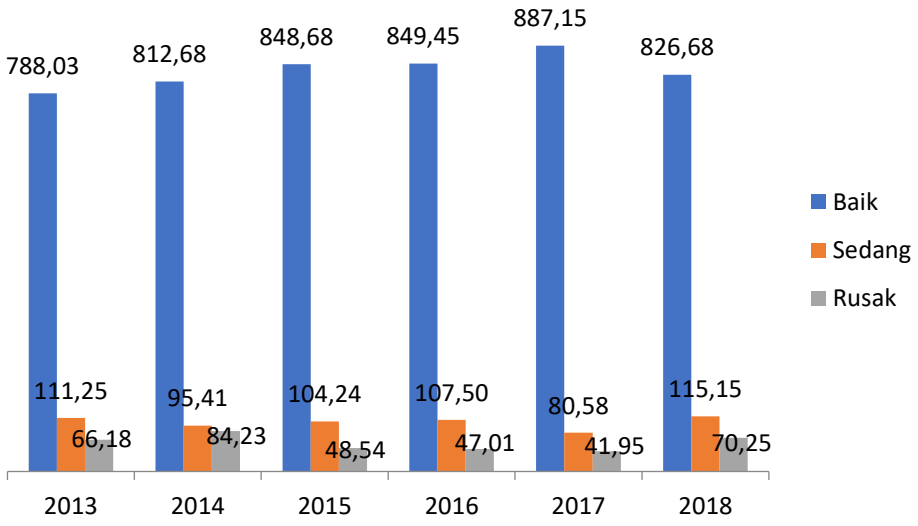

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2018

Grafik 2. 10
Kondisi Jalan Aspal Tahun 2013-2018

Grafik 2.10 menggambarkan kondisi jalan aspal pada kriteria baik cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2018 panjang jalan dengan kondisi baik sepanjang 826,68 KM melambat dari tahun 2017 yang sebesar 887,15 KM. Jalan aspal dengan kondisi Sedang pada tahun 2018 sebesar 115,15 KM mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2017 sebesar 80,58 KM. Sedangkan pada tahun 2018, jalan aspal dengan kondisi jalan rusak sebesar 70,25 KM lebih tinggi jika dibandingkan tahun 2017 sebesar 41,95 KM.

Secara umum jalan di Kabupaten Sidoarjo yang dalam kondisi baik jumlahnya berfluktuasi selama tiga tahun terakhir. Kondisi jalan yang rusak juga mengalami fluktuasi. Sehingga pelaksanaan pembangunan jalan di Kabupaten Sidoarjo harus ditingkatkan untuk meningkatkan jalan yang baik di Kabupaten Sidoarjo.

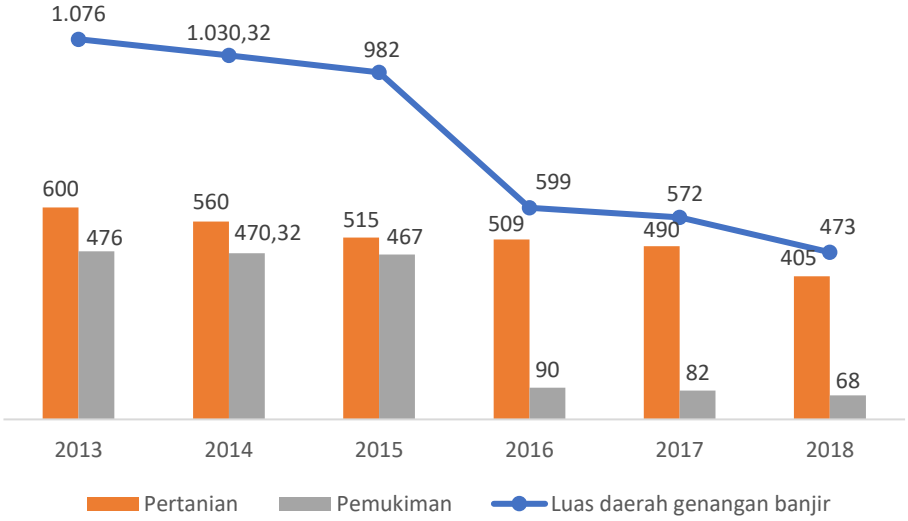

Sumber: Dinas PUBM dan SDA Kabupaten Sidoarjo, 2018

Grafik 2. 11
Luas Daerah Genangan Banjir (Hektar)

Luas area genangan banjir dibagi menjadi dua yaitu genangan di areal pertanian dan genangan di wilayah pemukiman. Keduanya secara tidak langsung akan berdampak buruk disaat ada genangan banjir, di areal pertanian akan mempengaruhi produktifitas hasil pertanian baik kualitas maupun kuantitas. Begitu juga dengan di wilayah pemukiman, banjir merugikan secara materil yang dihitung dari biaya renovasi rumah warga pasca banjir dan juga menjalar pada aspek lain seperti kesehatan. Kedua alasan tersebut merupakan alasan pentingnya pemerintah dalam menekan angka genangan akibat banjir. Secara keseluruhan bila kita melihat data diatas dari tahun 2013 genangan banjir perlahan berkurang hingga pada tahun 2018. Begitu halnya dengan pada wilayah pemukiman dan areal pertanian. Luas daerah genangan banjir tahun 2013 sebesar 1.076 hektar, mengalami perlambatan hingga tahun 2018 yakni seluas 473 hektare. Jumlah titik lokasi genangan banjir tiap tahun menunjukkan peningkatan daya dukung pemerintah bidang infrastruktur dalam menangani banjir.

Kebijakan dari pemerintah Kabupaten Sidoarjo diperlukan untuk memperkuat kualitas infrastruktur terutama bagian perbaikan jalan. Sebagai jalur utama dan jantung transportasi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo dituntut untuk memperbaiki kualitas jalan dan infrastruktur lainnya. Selain itu untuk meningkatkan produktivitas pertanian maka perlu adanya kebijakan pemerintah untuk pembatasan konversi lahan pertanian menjadi pemukiman atau lahan non pertanian yang lain.

- **Penataan Ruang**

Kegiatan penataan ruang dilakukan untuk dapat mewujudkan efisiensi pemanfaatan ruang sebagai tempat berlangsungnya kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat maupun keserasian antara pemanfaatan ruang dengan daya dukung lingkungan, fungsi lingkungan melalui struktur ruang dan pola ruang yang telah direncanakan dalam RTRW dan RDTRK serta peraturan zonasinya. Salah satu instrumen pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Sidoarjo adalah IMB (Izin Mendirikan Bangunan). Oleh karena itu salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja urusan penataan ruang adalah Banyaknya bangunan yang mempunyai IMB. Perkembangan jumlah bangunan ber IMB menunjukkan trend yang meningkat. Selengkapnya dapat dilihat pada Grafik 2.11.

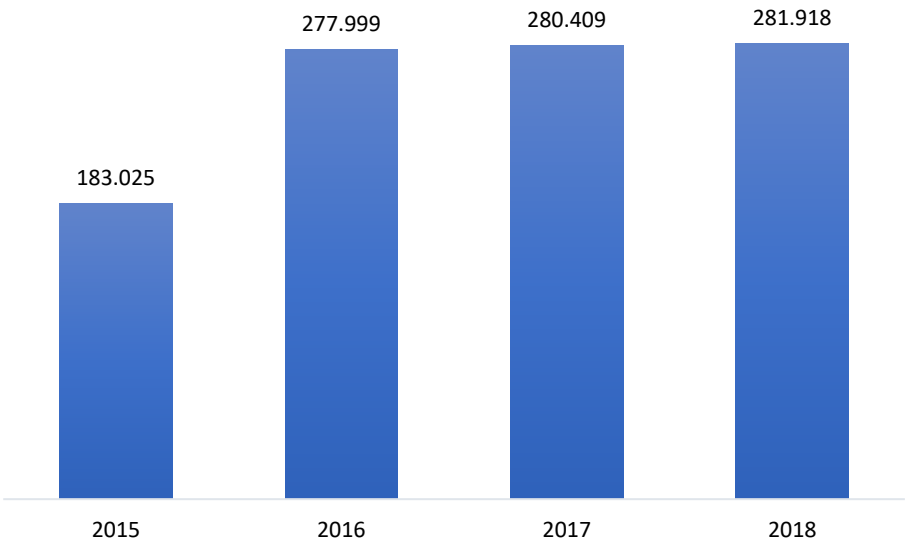

Sumber: SIPD Kabupaten Sidoarjo 2018

Grafik 2. 12
Bangunan Ber-IMB

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa bangunan Ber-IMB mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 jumlah bangunan yang ber-IMB yang berjumlah 183.025 bangunan, meningkat pada tahun 2016 menjadi sebesar 277.999 bangunan, pada tahun 2017 meningkat menjadi 280.409 bangunan ber IMB, dan meningkat kembali di tahun 2018 menjadi 281.918 bangunan ber-IMB.

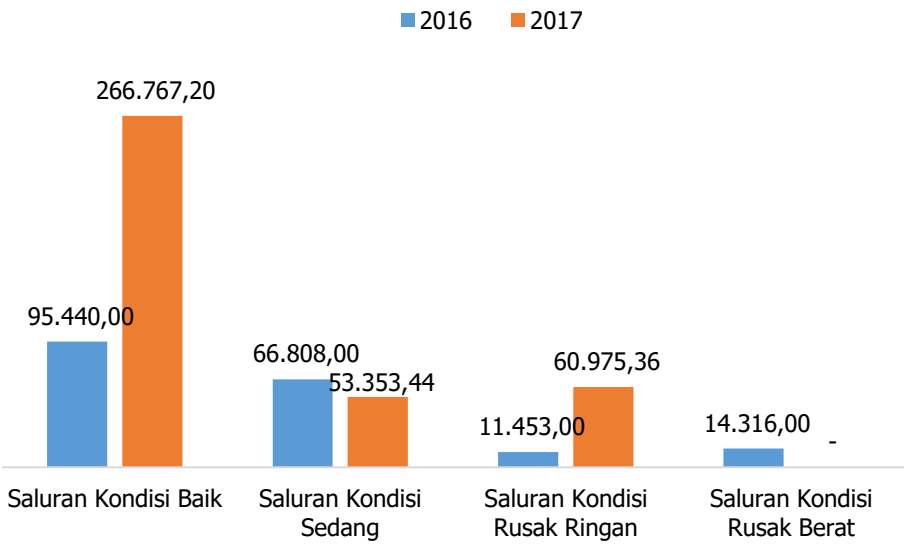

Sumber: SIPD Kabupaten Sidoarjo, 2018

Grafik 2. 13
Kondisi Saluran Primer Tahun 2016-2017

Grafik 2.13 menggambarkan kondisi saluran primer dengan kondisi baik meningkat 280% pada tahun 2017. Pada tahun 2017 panjang saluran dengan kondisi baik sepanjang 266.767,20 meter meningkat dari tahun 2016 yang sebesar 95.440 meter. Saluran primer dengan kondisi Sedang pada tahun 2017 sebesar 53.353,44 meter lebih rendah dibandingkan tahun 2016 sebesar 66.808 meter. Sedangkan pada tahun 2017, jalan aspal dengan kondisi jalan dengan kondisi rusak ringan sebesar 60.975,36 meter meningkat dibandingkan tahun 2016 sebesar 11.453 meter.

Untuk selanjutnya urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ditangani oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air dan Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang.

Urusan Perumahan Rakyat

Peningkatan dan pengembangan pembangunan perumahan dengan berbagai aspek permasalahannya selalu diupayakan secara terpadu oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sehingga pembangunan perumahan merupakan satu kesatuan fungsional dalam wujud tata ruang fisik, kehidupan ekonomi, dan sosial budaya untuk mendukung ketahanan nasional, mampu menjamin kelestarian lingkungan hidup, dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia Indonesia dalam berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Hasil pelaksanaan program dalam urusan perumahan ditunjukkan dengan capaian indikator kinerja sebagai berikut:

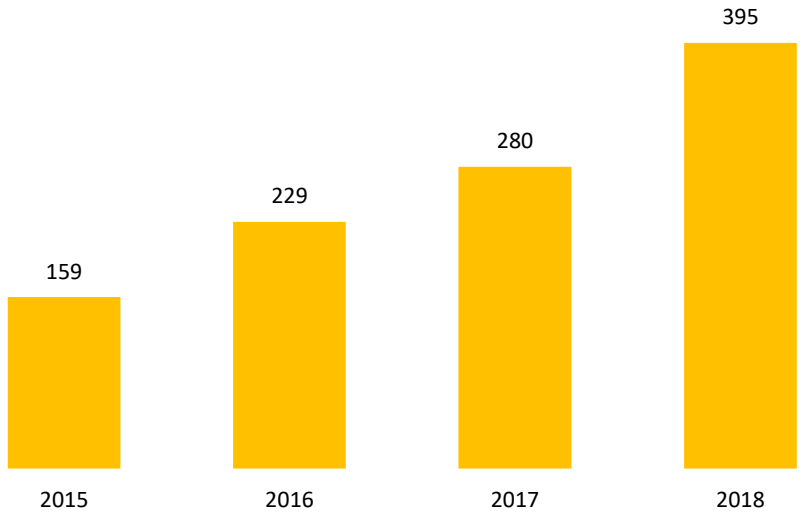

Sumber: SIPD Kabupaten Sidoarjo 2018

Grafik 2. 14
Peningkatan Rumah Layak Huni

Jumlah rumah tidak layak huni di tahun 2017 sebanyak 443.360 rumah tinggal. telah dilakukan rehabilitasi sebanyak 442.857 unit rumah tinggal, atau sekitar 99,89% dari jumlah keseluruhan rumah tinggal di Kabupaten Sidoarjo. Sehingga pada akhir tahun tersebut diketahui terdapat 503 Unit rumah yang belum dilakukan rehabilitasi. Pada Tahun 2018 mempunyai target tahunan untuk rumah tidak layak huni sebanyak 116 unit, dan telah dilakukan rehabilitasi sebanyak 115 unit rumah atau terealisasi sebesar 99,91% dari target. Keberhasilan peningkatan rumah layak huni ini telah banyak dilakukan oleh kerjasama antara Pemerintah dan masyarakat, seperti halnya peningkatan rumah layak huni pada tahun 2018 diperoleh dari Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

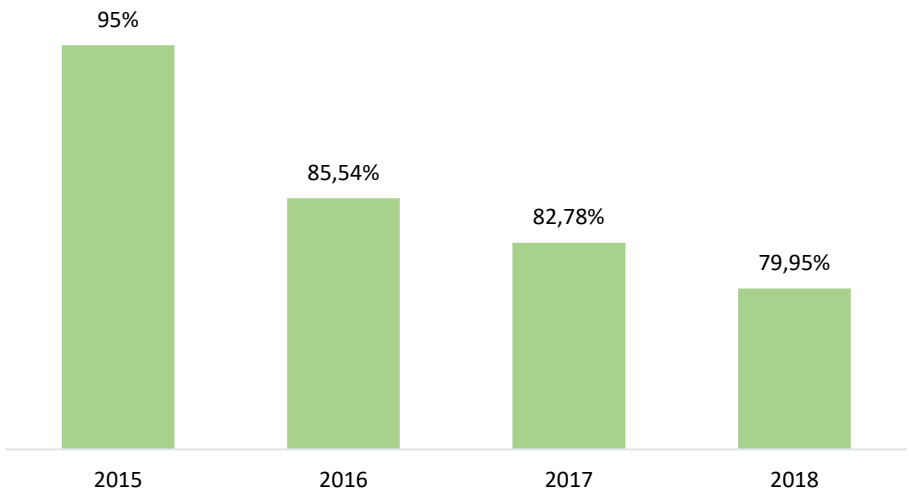

Sumber: SIPD Kabupaten Sidoarjo 2018

Grafik 2. 25
Persentase Penurunan Luas Kawasan Kumuh

Luasan kawasan kumuh di kabupaten Sidoarjo sesuai dengan SK Bupati seluas 301,08 Ha. Luasan wilayah kumuh tersebut terbagi dalam 42 desa dan 13 kecamatan. Pada tahun 2018 dilakukan penanganan penurunan luasan permukiman kumuh sebesar 79,95% dari target yang ditetapkan yakni sebesar 76,8%. Penurunan luasan permukiman kumuh ini diupayakan dengan intervensi pembangunan fisik pada 7 (tujuh) indikator kumuh.

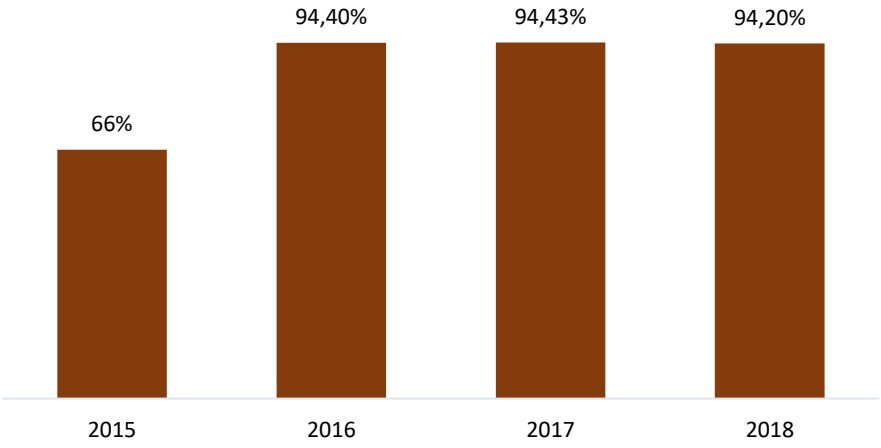

Sumber: SIPD Kabupaten Sidoarjo 2018

Grafik 2. 16
Persentase Masyarakat yang Terlayani Sarana Sanitasi

Pembangunan sarana sanitasi lingkungan ini dilakukan untuk meningkatkan akses

masyarakat terhadap sanitasi lingkungan secara berkesinambungan kepada separuh dari proporsi penduduk yang belum mendapatkan akses sanitasi. Untuk realisasi persentase masyarakat yang terlayani sarana sanitasi lingkungan pada tahun 2017 tercapai sebesar 94,43% jika dibandingkan dengan capaian tahun 2016 sebesar 94.40% meningkat hanya sebesar 0.02% hal ini dikarenakan pada tahun 2017 untuk pembangunan sanitasi sehat disarankan untuk menggunakan bio septic agar kelestarian lingkungan tetap terjaga.

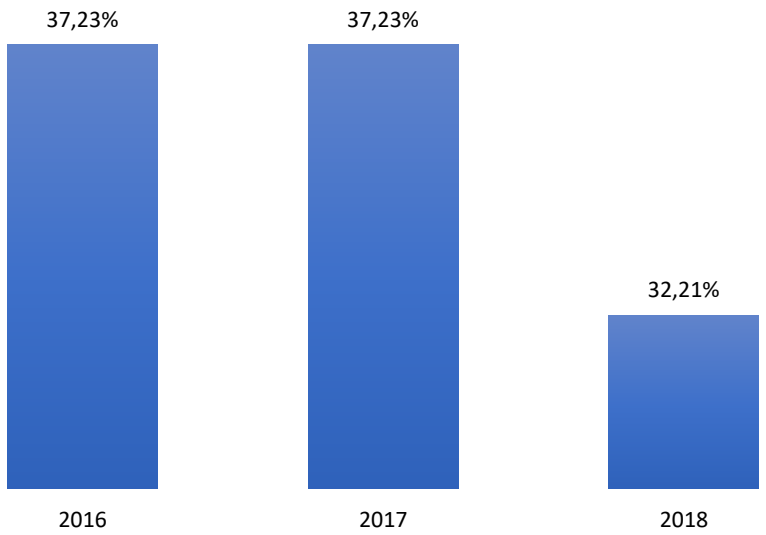

Sumber: SIPD Kabupaten Sidoarjo 2018

Grafik 2. 17
Perkembangan Persentase Masyarakat yang Terlayani Sarana Air Bersih

Grafik 2.17 menggambarkan perkembangan persentase masyarakat yang terlayani sarana air bersih. Pada tahun 2016 sebanyak 37,23% masyarakat terlayani sarana air bersih, jumlah ini sama pada tahun 2017 yaitu sebanyak 37,23%. Sedangkan pada tahun 2018 mengalami perlambatan menjadi 32,21%.

Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Salah satu indikator tingkat ketertiban masyarakat adalah diukur dengan tingkat pelanggaran masyarakat terhadap perda ketenteraman dan ketertiban. Kondisi pelanggaran yang terjadi pada tahun 2015 sebanyak 1.865 pelanggaran. Pada tahun 2016 mengalami sedikit peningkatan sebanyak 8,1% menjadi 2.016 pelanggaran. Tahun 2017 jumlah pelanggaran menurun sebanyak 29,22% menjadi 1.427, kemudian pada tahun 2018 juga mengalami penurunan sebesar 37,21% menjadi 896 pelanggaran. Ada dua jumlah pelanggaran terbanyak yaitu jenis pelanggaran PKL dan bangunan liar yang masing-masing sebanyak 344dan 242 pelanggaran. Selanjutnya jumlah pelanggaran terendah adalah

pelanggaran PMKS sebanyak 53 pelanggaran.

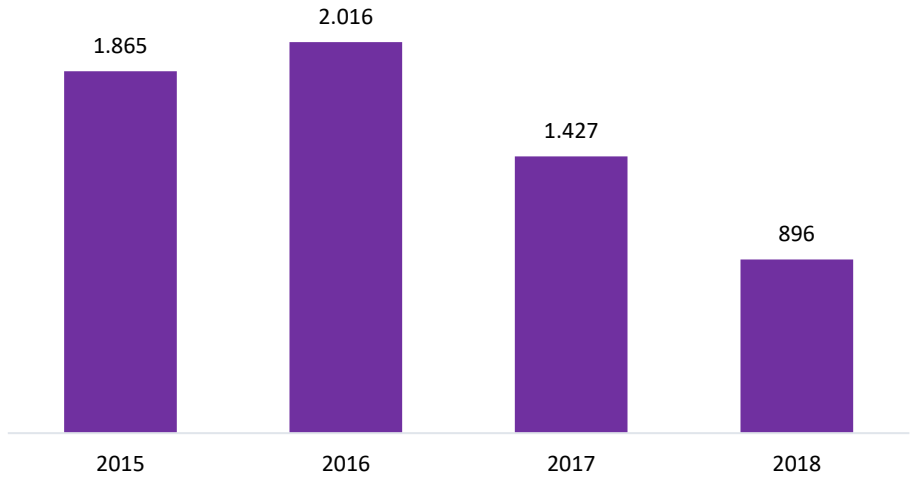

Sumber: SIPD Kabupaten Sidoarjo 2018

Grafik 2. 18
Jumlah Kejadian Pelanggaran Perda Trantib

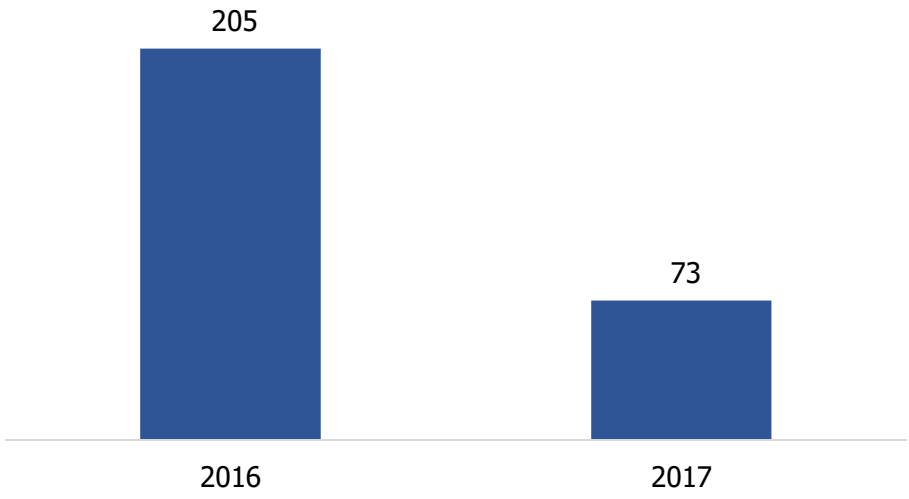

Sumber: SIPD Kabupaten Sidoarjo, 2018

Grafik 2. 19
Jumlah Kasus Pemogokan Kerja

Dari grafik di atas menunjukkan bahwa kejadian pemogokan kerja di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2016 sebesar 205 kasus pemogokan kerja. Namun pada tahun 2017 terjadi kasus pemogokan kerja yang lebih kecil. Terjadi kasus pemogokan kerja sebesar 132 kasus pemogokan kerja menjadi 73 kasus pemogokan kerja.

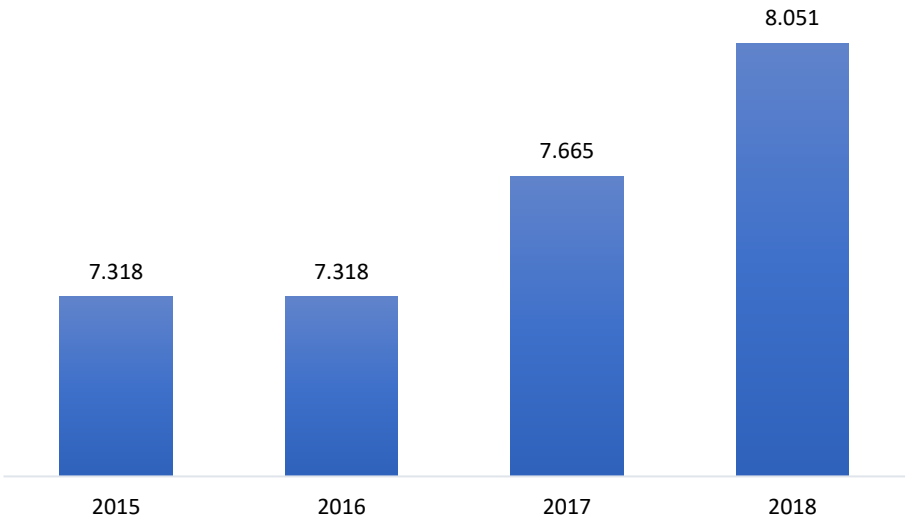

Sumber : SIPD Kabupaten Sidoarjo 2018

Grafik 2. 20
Total Anggota Satlinmas Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2008 Tentang Standard Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota, disebutkan ideal komposisi personil Satlinmas di Kabupaten/Kota adalah jumlah personil Satlinmas berbanding dengan jumlah RT (Rukun Tetangga).

Kondisi riil jumlah RT di seluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo sebanyak 8.427, sedangkan jumlah personil Satlinmas yang ada sampai dengan tahun 2016 terdata sebanyak 7.318 Personil. Target pemenuhan/penambahan anggota Satlinmas pada tahun 2017 adalah 0,90% (337 personil). Pencapaian target dilakukan dengan kegiatan Pembinaan Potensi Masyarakat. Secara eksplisit kegiatan dimaksud berupa Sosialisasi terhadap warga masyarakat perihal urgensi keberadaan dan partisipasi satlinmas dalam pengendalian keamanan lingkungan, ketentraman masyarakat, ketertiban umum dan tanggap bencana. Sasaran utama locus sosialisasi ditujukan pada Desa/Kelurahan yang masih minim jumlah personil satlinmas. Dari penetapan target tahun 2018 (0,95%/383 personil), pemenuhan/penambahan anggota satlinmas telah tercapai pada angka 386 personil. Berikut penyajian data perihal pemenuhan anggota satlinmas.

Urusan Sosial

Pelaksanaan urusan sosial meliputi berbagai kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan kondisi sosial masyarakat. Kegiatan ini juga meliputi peningkatan ekonomi masyarakat pedesaan, sehingga dibentuklah Badan Kredit Desa (BKD) yaitu badan usaha milik desa yang merupakan kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan desa. BKD bertujuan untuk menggerakkan ekonomi pedesaan.

Pengukuran indikator sosial ekonomi lainnya adalah dengan menggunakan pemantauan terhadap perkembangan jumlah keluarga miskin. Indikator pengukuran lainnya adalah pekembangan jumlah PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) diantaranya anak jalanan, fakir miskin, anak terlantar, PSK, penyandang cacat, lansia terlantar. Untuk menilai perlindungan dan penanganan permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat maka pemerintah Kabupaten Sidoarjo mempunyai tanggung jawab untuk mengurangi jumlah PMKS. Pengurangan PMKS dilakukan melalui upaya untuk memberdayakan PMKS dan mengurangi faktor penyebab meningkatnya PMKS. Jenis PMKS yang mendapat bantuan pada tahun 2013 adalah anak terlantar, anak jalanan, anak cacat, lanjut usia terlantar, penyandang cacat, tuna susila, korban penyalahgunaan narkoba, dan fakir miskin. Bantuan yang diberikan berupa pelatihan keterampilan, bantuan UEP (Usaha Ekonomi Produktif), bantuan peralatan sekolah bagi anak terlantar atau bantuan bahan pangan bagi lanjut usia KKM (Keluarga Kurang Mampu).

Selain itu, untuk membantu meringankan beban masyarakat miskin maka pemerintah pusat bersama dengan pemerintah kabupaten menyalurkan bantuan beras bagi masyarakat miskin atau yang lebih dikenal dengan program Raskin.

Di sisi lain, untuk memelihara kerukunan umat beragama oleh pemerintah Kabupaten disiapkan bantuan bagi rumah ibadah. Bantuan tersebut berupa bantuan dana bagi kegiatan peribadatan baik membangun sarana maupun kegiatan ibadah.

Tabel 2. 14
Indikator Kinerja Kesejahteraan Sosial Masyarakat

No	Indikator	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Keluarga Miskin	93.243	78.103	78.103	N/A	134.326	134.326
2.	Jumlah PMKS yang		10.573	14.343	19.401	28.756	31.667

No	Indikator	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Dibantu						

Sumber: SIPD Kabupaten Sidoarjo, 2018

Jumlah keluarga miskin di tahun 2012 sebanyak 93.243 jiwa, meningkat dibandingkan tahun 2011 yang hanya sebesar 61.791 jiwa. Tahun 2013 dan 2014 jumlah keluarga miskin berada pada tingkat 78.103 jiwa. Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) tahun 2015 sebesar 42.286 jiwa dan untuk jumlah PMKS yang dibantu sebanyak 19.401 jiwa. Pada tahun 2016 PMKS sebanyak 43.042 jiwa dan yang dibantu sebanyak 28.756 jiwa. Jumlah rumah tangga penerima raskin tahun 2013 sebanyak 83.936, dan pada tahun 2014 yang menerima raskin hanya sebanyak 81.745.

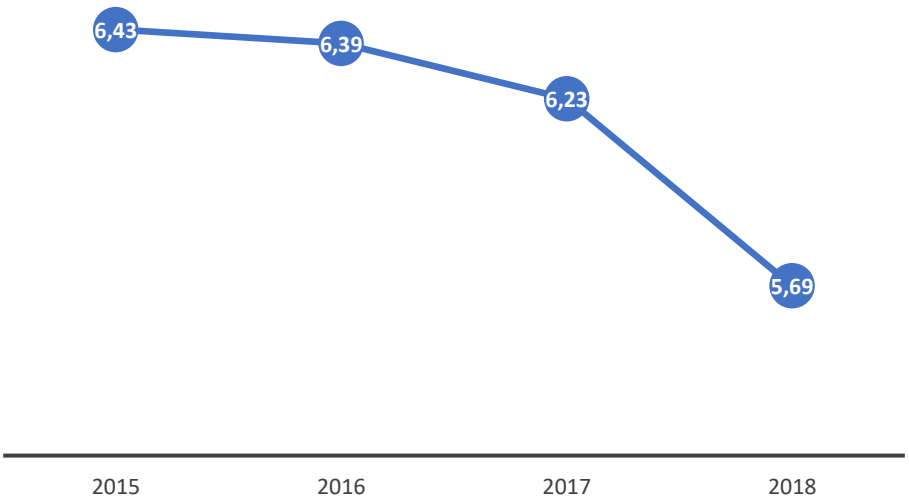

Sumber: SIPD Kabupaten Sidoarjo, 2018

Grafik 2. 21
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015-2018

Persentase kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 menunjukkan trend yang signifikan menurun. Persentase angka kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2015 masih mencapai 6,43%, kemudian turun berturut-turut hingga menjadi 5,69% di tahun 2018. Selain memiliki trend menurun setiap tahunnya, persentase kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo juga masih di bawah persentase kemiskinan di Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Dari total penduduk Sidoarjo Tahun 2018 sebesar 2,22 juta jiwa, sebanyak 126,26 ribu jiwa atau 5,69 persen nya merupakan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (miskin/ sangat miskin).

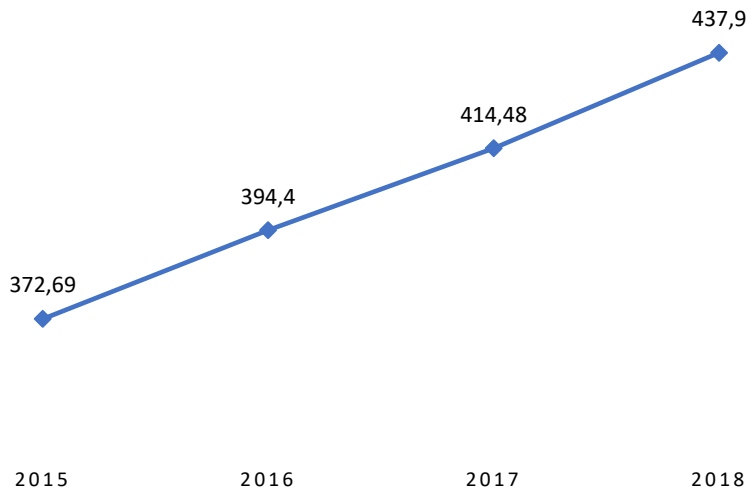

Sumber: SIPD Kabupaten Sidoarjo, 2018

Grafik 2. 22
Garis Kemiskinan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015-2018

Sedangkan untuk garis kemiskinan atau batas kemiskinan minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di Kabupaten Sidoarjo digambarkan pada Grafik 2.21. Upaya untuk mengurangi angka kemiskinan yaitu dengan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, menjaga stabilitas makro ekonomi, stabilisasi harga, menciptakan lapangan kerja produktif, menjaga iklim Investasi, menjaga regulasi perdagangan, meningkatkan produktivitas sektor potensial daerah, dan mengembangkan infrastruktur di wilayah tertinggal.

B. Fokus Layanan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

Urusan Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan merupakan isu penting dalam sebuah aktifitas bisnis dan perekonomian karena tenaga kerja merupakan modal bagi bergeraknya roda pembangunan. Seluruh kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terutama dalam urusan ketenagakerjaan diarahkan pada meningkatnya kualitas dan produktifitas tenaga kerja dengan hasil/ capaian seperti berikut:

Tabel 2. 15
Indikator Urusan Ketenagakerjaan

No	Indikator	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,12	3,88	6,30	6,12	4,97	4,73
	Angkatan kerja yang tidak	orang	42.416	45.520	68.311	68.058	53.575	

No	Indikator	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	bekerja							
	Angkatan kerja	orang	1.039.833	1.069.708	1.083.519	1.112.691	1.075.359	1.094.650
2	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan	orang	3.276	4.209	4.233	4.925	5.115	5,518

Sumber: BPS Kabupaten Sidoarjo dan LKPJ Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017

Tingkat pengangguran terbuka menunjukkan perlambatan selama dua tahun terakhir yaitu pada tahun 2016 dan 2017. Pada tahun 2015 tingkat pengangguran terbuka sebesar 6,30% kemudian melambat menjadi 6,12% pada tahun 2016, pada tahun 2017 menjadi 4,97% dan pada tahun 2018 kembali mengalami penurunan menjadi 4,73%. Hal ini disebabkan karena adanya stabilitas perekonomian di Kabupaten Sidoarjo yang cukup mendukung dan komitmen pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam mempermudah investasi.

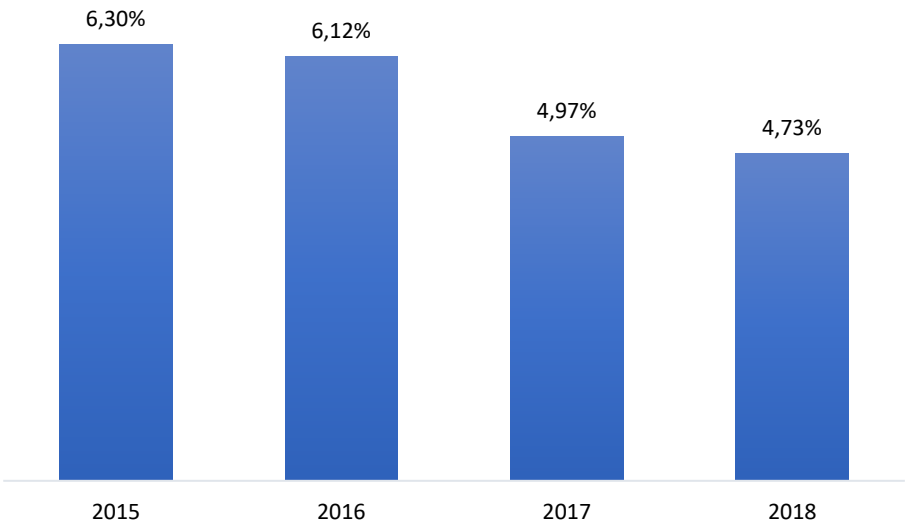

Sumber: SIPD Kabupaten Sidoarjo 2018

Grafik 2. 23
Tingkat Pengangguran Terbuka

Menurut data statistik dan perhitungan yang dilakukan oleh Pusat Perencanaan Ketenagakerjaan Barenbang Kementerian Ketenagakerjaan berikut disampaikan tenaga kerja yang bekerja pada berbagai bidang pada tahun 2015, 2016 dan tahun 2017 sebagai berikut.

Tabel 2. 16
Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja di 9 Sektor Unggulan

No	Sektor	2015	2016	2017
1	Pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan	64.648	64.999	32.933

2	Pertambangan dan penggalian	1.429	1.153	3.599
3	Industri pengolahan	366.800	368.598	360.215
4	Listrik, gas dan air	2.302	2.396	3.365
5	Bangunan	80.921	93.229	60.372
6	Perdagangan besar, eceran, rumah makan, dan hotel	237.022	249.040	248.286
7	Angkutan, pergudangan dan komunikasi	49.377	50.043	46.157
8	Keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah, dan jasa perusahaan	45.455	47.049	50.815
9	Jasa kemasyarakatan	167.254	168.125	216.142

Sumber SIPD Kabupaten Sidoarjo 2018

Data penduduk yang bekerja pada tahun 2015-2017 mengalami perubahan yang bervariasi, namun sektor industri pengolahan dan perdagangan masih menjadi ikon Kabupaten Sidoarjo walaupun mengalami perlambatan. Sektor industri pengolahan dan perdagangan merupakan sektor yang menyerap tenaga kerja terbesar. Perlambatan dari semua sektor banyak yang beralih pada jasa kemasyarakatan. Sektor jasa kemasyarakatan mengalami peningkatan yang cukup tinggi dari 168.125 orang pada tahun 2016 menjadi 216.142 orang pada tahun 2017.

Pada tahun 2017, jumlah tenaga kerja yang berhasil ditempatkan meningkat dibanding tahun 2016. Pada tahun 2016 jumlah tenaga kerja yang ditempatkan sejumlah 4.925 orang, sedangkan pada tahun 2017 meningkat menjadi sebesar 5.115 orang dan pada tahun 2018 sebesar 5158 orang. Hal inimenunjukkan adanya upaya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam menanggulangi masalah pengangguran dan kemampuan para pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan secara mandiri atau menciptakan lapangan kerja secara mandiri (berwirausaha). Peningkatan jumlah tenaga kerja yang ditempatkan juga didukung adanya penyelenggarakan Bursa Kerja dan upaya lain yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja adalah melalui penyelenggaraan kerjasama dengan sektor swasta dalam hal rekruitmen tenaga kerja.

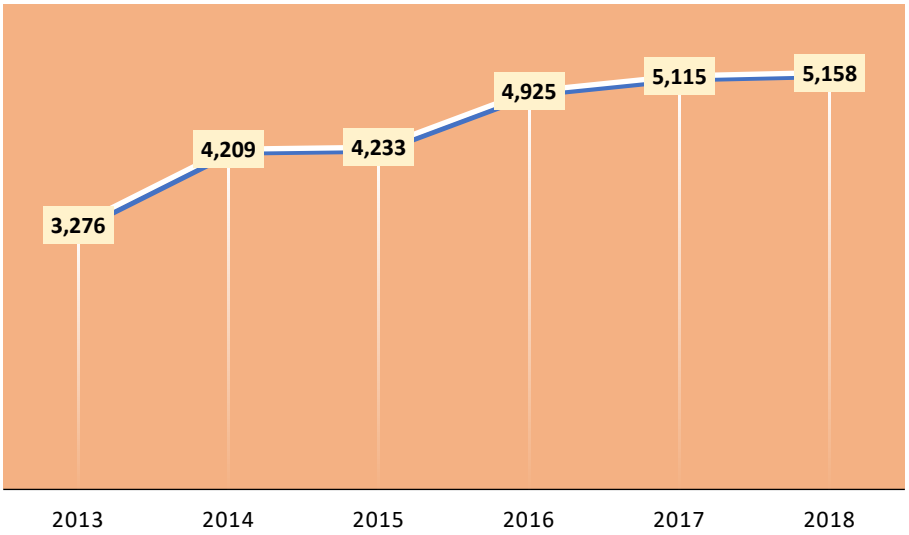

Sumber: SIPD Kabupaten Sidoarjo 2018

Grafik 2. 24
Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan

Dengan berkembang dan meningkatnya program-program kegiatan pelatihan dan produktifitas telah berdampak terhadap kemampuan dan kemandirian pencari kerja yang mengakses program tersebut sehingga pencari kerja mampu menciptakan lapangan kerja secara mandiri minimal untuk dirinya sendiri maupun untuk pencari kerja yang lain. Banyaknya jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dipengaruhi oleh :

- Keterampilan pencari kerja yang memadai
- Pencari kerja yang mandiri dan siap membuka usaha baru
- Banyaknya rekrutmen dari perusahaan penyedia jasa tenaga kerja / *outsourcing*.
- Sosialisasi/pelatihan dan sinkronisasi antara pemerintah Kabupaten Sidoarjo, bersama perusahaan dan dunia pendidikan, lembaga pelayanan penempatan swasta, serta stakeholder lain yang peduli terhadap adanya pengangguran.
- Kesiapan pencari kerja untuk masuk pasar kerja.

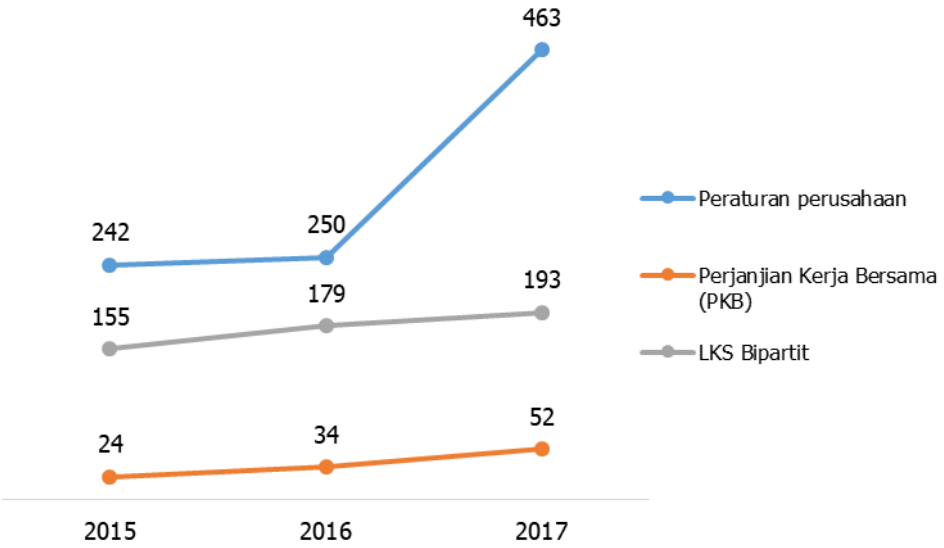

Sumber: SIPD Kabupaten Sidoarjo 2018

Grafik 2. 25
Jumlah Perusahaan yang Membentuk/Membuat Sarana Hubungan Industrial (HI)

Jumlah perusahaan yang membentuk/membuat sarana Hubungan Industrial (HI) mengalami peningkatan pada tahun 2017 baik pada peraturan perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama maupun LKS (Lembaga Kerja Sama) Bipartit. Sarana hubungan industrial sangat penting dalam mendukung terciptanya hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan di dalam perusahaan. Hal ini karena dalam peraturan perusahaan dan PKB tercantum dengan jelas akan ha dan kewajiban masing-masing pihak, baik pengusaha maupun pekerja/buruh. Sedangkan keberadaan LKS Bipartit yang merupakan forum komunikasi, konsultasi untuk musyawarah antara wakil serikat pekerja/serikat buruh atau pekerja/buruh sangat diperlukan pada tingkat perusahaan guna membahas masalah hubungan industrial dalam rangka peningkatan produktivitas kerja dan kesejahteraan pekerja yang menjamin kelangsungan usaha dan terciptanya kesempatan kerja. Sehingga di Kabupaten Sidoarjo tercipta hubungan industrial yang harmonis, dinamis, berkeadilan dan bermartabat. Selain itu para investor asing akan menanamkan investasinya di Kabupaten Sidoarjo dengan rasa aman dan nyaman.

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Untuk mengukur perhatian pemerintah Kabupaten Sidoarjo terhadap perlindungan perempuan dan anak adalah dengan mengukur sampai sejauh mana fasilitas yang disediakan oleh pemerintah kabupaten dalam mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Selain itu, indikator *Gender Empowerment Measurement* (GEM) atau Indeks Pemberdayaan Jender (IDG) merupakan ukuran komposit yang dapat digunakan untuk mengaji sejauh mana persamaan peranan perempuan dalam proses pengambilan keputusan serta kontribusi dalam aspek ekonomi maupun sosial. Peningkatan Indeks Pemberdayaan Jender (IDG) menandakan bahwa tingkat pemberdayaan perempuan di Kabupaten Sidoarjo semakin meningkat lebih baik lagi.

Selain indeks IDG, indikator pemberdayaan jender lainnya adalah *Gender Development Indeks* (GDI) atau Indeks Pembangunan Jender (IPG). IPG adalah indikator komposit yang dibangun dari berbagai variabel untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia dengan memperhatikan disparitas jender.

Tabel 2. 17
Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidoarjo

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah Kejadian Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	95	106	363	279	185	137
2.	Indeks Pemberdayaan Jender (IDG)	64,49%	63,38%	63,99%	63,99%	64,65%	63,99%
3.	Indeks Pembangunan Jender (IPG)	69,09%	69,77%	94,28%	94,28%	93,33%	

Sumber: Data Dinamis TW IV 2018

Berdasarkan data di atas jumlah kejadian tindak kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Sidoarjo cenderung melambat selama tiga tahun terakhir. Jumlah kejadian tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditemukan tahun 2016 sebanyak 279 kasus, lebih kecil 84 kasus dari jumlah kasus yang ditemukan pada tahun 2015. Kemudian pada tahun 2017 menjadi 185 kasus dan 100% teradvokasi. Upaya advokasi yang dilakukan untuk menyelesaikan kasus kekerasan pada perempuan dan anak, yaitu:

1. Bekerjasama dengan LSM, Perguruan Tinggi, organisasi profesi, organisasi masyarakat, Relawan dan Pemerintah.
2. Membangun jaringan dengan kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Rumah Sakit Umum (RSU), Dinkes, Psikiater dan Kementerian Agama.
3. Melakukan validasi data korban kekerasan terhadap perempuan dan anak ke semua pelayanan yang menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Untuk melindungi perempuan dan anak dari kekerasan yang berpotensi dialami maka dilakukan pencegahan yaitu dengan melakukan sosialisasi tentang undang-undang perlindungan perempuan dan anak melalui sekolah-sekolah, Jaringan P2TP2A kecamatan, Organisasi kemasyarakatan dan keluarga.

Adapun indikator-indikator pengukuran IPJ Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1) Proporsi penduduk, jumlah penduduk laki-laki 50,24% sedangkan perempuan sebesar 49,76%
2) Angka Harapan Hidup (AHH) penduduk Kabupaten Sidoarjo, yaitu penduduk laki-laki dari 70,99 tahun sedangkan untuk penduduk perempuan 74,94 tahun
3) Harapan Lama Sekolah (HLS) yaitu untuk penduduk laki-laki 13,61% sedangkan untuk penduduk perempuan 14,14%
4) Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yaitu untuk penduduk laki-laki dari 10,63 tahun, sedangkan untuk penduduk perempuan 9,64 tahun
5) Pengeluaran perkapita, laki-laki 17,91% sedangkan perempuan 12,50%.

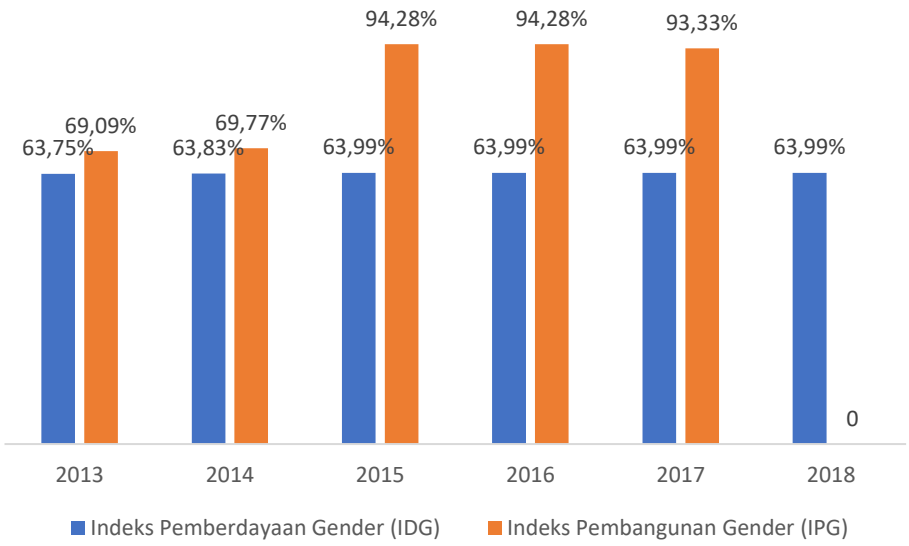

Sumber: SIPD Kabupaten Sidoarjo 2018

Grafik 2. 26
Indeks Pemberdayaan dan Pembangunan Gender

Berbeda dengan jumlah kejadian tindak kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, Indeks Pemberdayaan Jender (IDG) selama empat tahun terakhir konstan dan Indeks Pembangunan Jender (IPG) selama dua tahun berturut-turut pada tahun 2015 dan 2016 konstan. Pada tahun 2018 IDG sebesar 63,99% sedangkan IPG tahun 2018 belum diketahui.

Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang merupakan pemecahan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana.

Urusan Pangan

Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang terdiri dari sub sistem ketersediaan, sub sistem distribusi dan sub sistem konsumsi. Sub sistem ketersediaan mencakup pengaturan kestabilan dan kesinambungan penyediaan panganyang berasal dari produksi Kabupaten, serta cadangan pangan dalam kabupaten maupun dari luar Kabupaten. Sub sistem distribusi mencakup pengaturan untuk menjamin aksesibilitas penduduk secara fisik dan ekonomi terhadap pangan antar wilayah dan waktu serta stabilitas harga pangan strategis, dan sub sistem konsumsi mencakup pengelolaan pangan di tingkat daerah maupun rumah tangga, untuk menjamin setiap individu memperoleh pangan dalam jumlah, gizi, keamanan, keragaman dan keterjangkauan sesuai kebutuhan dan pilihan.

Aspek ketersediaan pangan di Kabupaten Sidoarjo telah mencukupi sampai pelosok wilayah, walaupun produksi tidak cukup tersedia sehingga untuk memenuhi ketersediaan diperlukan bahan pangan dari luar daerah Kabupaten Sidoarjo. Untuk aspek kualitas pangan dari semua unsur yang dibutuhkan yaitu karbohidrat, protein nabati maupun hewani telah tersedia dan cukup untuk dikonsumsi meskipun sebagian mendatangkan dari luar daerah.

Aspek distribusi yang berfungsi dengan baik akan mampu menggerakkan produk dari petani kepada konsumen dalam waktu, tempat, bentuk dan mutu yang diinginkan dengan biaya minimal. Dengan demikian, efisiensi sistem distribusi secara langsung ataupun tidak langsung akan berkaitan dengan daya beli masyarakat dan pendapatan petani.

Aspek konsumsi pangan dikatakan ideal apabila pangan masyarakat telah memenuhi kaidah pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA). Kondisi itu dapat dilihat dari aspek kuantitas dan aspek kualitas. Kuantitas pangan digunakan untuk mengetahui cukup atau tidaknya jumlah konsumsi pangan penduduk untuk hidup sehat dan produktif, sedangkan kualitas pangan digunakan untuk mengetahui keseimbangan gizi dari anekaragam pangan yang dikonsumsi penduduk. Statistik mengenai kondisi ketahanan

pangan Kabupaten Sidoarjo tersaji pada Tabel berikut:

Tabel 2. 18
Statistik Ketahanan Pangan Kabupaten Sidoarjo

No	Indikator	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Perkembangan Pola Pangan Harapan	(%)	82,98	83,40	84,38	86,95	87,78
2.	Stok Pangan Daerah	Setara Ton Beras	125.116,40	130.921,96	171.334,66	129.167,30	121.639,81
3.	Kebutuhan Pangan Daerah		191.558,74	198.870,00	212.324,50	235.499,21	237.171,96

Sumber: SIPD Kabupaten Sidoarjo 2017; SIPD Kabupaten Sidoarjo 2018

Berdasarkan Tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator statistik ketahanan pangan Kabupaten Sidoarjo selama 5 tahun terakhir mengalami perkembangan yang berfluktuatif. Secara kualitas konsumsi pangan memenuhi target yaitu 85,25. Artinya Standard Pelayanan Minimal (SPM) untuk Pola Pangan Harapan terpenuhi. Terjadi peningkatan skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Sidoarjo dari 86,95% tahun 2016 menjadi 87,78% pada tahun 2017.

Realisasi produksi beras lokal selama dua tahun terakhir mengalami perlambatan. Pada tahun 2015 jumlah produksi beras lokal mencapai 171.334,66 ton kemudian melambat menjadi 129.167,30 ton pada tahun 2016. Pada tahun 2017 kembali mengalami perlambatan menjadi 121.639,81 ton beras.

Kebutuhan pangan khususnya beras di Kabupaten Sidoarjo selama lima tahun terakhir mengalami kenaikan secara terus-menerus dari tahun 2013 hingga tahun 2017. Pada tahun 2016 kebutuhan pangan Kabupaten Sidoarjo sebesar 235.499,21 ton. Kemudian pada tahun 2017 kebutuhan pangan naik menjadi 237.171,96 ton.

Secara umum stok pangan Kabupaten sidoarjo tahun 2017 lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2016 yaitu mencapai 121.693,81 ton. Sedangkan kebutuhan pangan masyarakat Kabupaten Sidoarjo tahun 2017 sebesar 237.171,96 ton beras atau Kabupaten Sidoarjo mengalami defisit beras. Dengan demikian perlu ada peningkatan produksi atau impor kebutuhan bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan Kabupaten Sidoarjo.

Urusan Pertanahan

Urusan Pertanahan dilaksanakan oleh OPD yaitu Dinas Perumahan dan Permukiman. Indikator yang digunakan dalam mengukur urusan pertanahan adalah

penyelesaian kasus pertanahan dan fasilitasi pengadaan tanah. Namun dikarenakan Dinas Perumahan dan Permukiman merupakan dinas baru maka belum ditemukan data terkait capaian penyelesaian kasus pertanahan pada tahun 2017. Sebelumnya urusan pertanahan dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Urusan Lingkungan Hidup.

Kabupaten Sidoarjo juga mengutamakan urusan lingkungan hidup dalam rangka menunjang keberhasilan program pembangunan. Urusan lingkungan hidup dilaksanakan oleh 3 (Tiga) SKPD yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), dan Dinas Koperasi dan UMKM (Dinkop UMKM). Indikator kinerja pada urusan lingkungan hidup antara lain adalah: 1) Pemenuhan baku mutu udara, 2) Jumlah sampah yang terangkut ke TPA, 3) Persentase perusahaan yang memiliki SIPA dan 4) Jumlah penambang tanpa izin. Berikut adalah kinerja atas indikator-indikator tersebut:

Tabel 2. 19
Indikator Urusan Lingkungan Hidup

No	Indikator Lingkungan Hidup	2013	2014	2015	2016	2017
1	Indeks Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan					
	Indeks Kualitas Air				49,54	49,77
	Indeks Kualitas Udara				84,04	82,05
	Indeks Kualitas Lahan/Vegetasi				22,97	23,11
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup				49,26	48,79
2	Jumlah sampah yang terangkut ke TPA					
	*Jumlah sampah yang terangkut (M3/hari)	802	924	1.266	1.502	2.021
	*Jumlah produksi sampah (M3/hari)	4.517	4.517	4.599	5.404	5.536
	*% jumlah sampah terangkut	17,76%	20,46%	28,03%	27,79%	36,50%
	*Jumlah lokasi pemilahan sampah	10 lokasi	25 lokasi	41 lokasi	87 lokasi	156 lokasi
3	Pemenuhan ruang terbuka hijau	12,78 Ha	27,94 Ha	29,53 Ha	32,53 Ha	36,05 Ha
4	Pemenuhan baku mutu air				23%	25,58%
5	Pemenuhan baku mutu udara				100%	100%

No	Indikator Lingkungan Hidup	2013	2014	2015	2016	2017
6	Kasus Lingkungan Hidup yang diselesaikan				100%	97,73%

Sumber: SIPD Kabupaten Sidoarjo 2018

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Sidoarjo mengalami perlambatan dari 49,26 pada tahun 2016 menjadi 48,79 pada tahun 2017. Komponen IKLH yang mengalami perlambatan yaitu Indeks Kualitas Udara. Pada tahun 2016 Indeks Kualitas Udara Kabupaten Sidoarjo sebesar 84,04 mengalami perlambatan menjadi 82,05 pada tahun 2017. Sedangkan dua indeks lainnya yaitu Indeks Kualitas Air dan Indeks Tutupan Lahan/Vegetasi mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 sebesar 49,77 untuk Indeks Kualitas Air dan 23,11 untuk Indeks Tutupan Lahan/Vegetasi.

Jumlah sampah yang terangkut tahun 2012 sebesar 820 M3/Hari. Tahun 2013 mengalami perlambatan sebesar 802 m3/Hari, kemudian mengalami kenaikan kembali pada tahun 2014 sebesar 924 m3/hari. Pada tahun 2015 sampai dengan 2017 mengalami peningkatan sampah yang terangkut yaitu 1.266 m3/hari (2015), 1.502 m3/hari (2016), dan 2.021 m3/hari (2017). Selanjutnya, jumlah produksi sampah pada tahun 2009 sebesar 3.991 m3/Hari, tahun 2010 sebesar 4.043 m3/Hari, tahun 2011 sebesar 4.421, sementara itu tahun 2012- 2014 memiliki besaran yang sama yaitu sebesar 4.517 M3/Hari. Sedangkan pada tahun 2015-2017 jumlah produksi sampah mengalami peningkatan terus menerus sebesar 4.599 m3/hari (2015), 5.404 m3/hari (2016), dan 5.536 m3/hari (2017).

Pemenuhan ruang terbuka hijau di Kabupaten Sidoarjo mengalami peningkatan secara terus-menerus selama lima tahun terakhir, sejak tahun 2013 hingga tahun 2017. Pada tahun 2013 seluas 12,78 Ha meningkat pada tahun 2017 mencapai luas 36,05 Ha.

Pemenuhan baku mutu air di Kabupaten Sidoarjo mengalami peningkatan pada tahun 2017 menjadi sebesar 25,58%. Upaya - upaya yang telah dilakukan untuk peningkatan kualitas air badan air antara lain

a. Melaksanakan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam rangka pembersihan sampah di sungai
b. Melaksanakan program yang berkaitan dengan peningkatan kesadaran masyarakat maupun pelaku usaha dan kegiatan terhadap kualitas lingkungan seperti program Desa Berseri, Adiwiyata, Sidoarjo Bersih dan Hijau, Status Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bimbingan Teknis Penyusunan

Pelaporan Dokumen Lingkungan dan lain-lain.

Sedangkan untuk pemenuhan baku mutu udara di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2017 sama dengan tahun sebelumnya yaitu 100%. Upaya - upaya yang telah dilakukan untuk peningkatan kualitas udara ambien antara lain

a. Melakukan pemantauan terhadap kualitas udara ambien di beberapa titik pantau yang menjadi pusat kegiatan di Kabupaten Sidoarjo
b. Melaksanakan *Car Free Day*
c. Melaksanakan penanaman pohon yang dapat menyerap polutan di Kabupaten Sidoarjo

Kasus lingkungan hidup yang diselesaikan di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2017 lebih kecil dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 kasus lingkungan hidup yang diselesaikan sebanyak 100% lebih kecil pada tahun 2017 yang hanya 97,73%. Upaya dan Inovasi yang dilakukan untuk penanganan pengaduan masyarakat, antara lain:

1. Mengajukan Surat Keputusan (SK) terkait pendelegasian wewenang sanksi administrasi
2. Pengajuan penetapan Jabatan fungsional PPLHD kepada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sidoarjo dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD)

Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pelaksanaan pembangunan khususnya bidang kependudukan dan pencatatan sipil di arahkan pada pencapaian sasaran meningkatkan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil berbasis SIAK (Sistem Administrasi Kependudukan) dengan indikator jumlah penduduk ber-KTP dengan wajib KTP, dan Jumlah penduduk yang berakta kelahiran dengan jumlah penduduk yang wajib ber-akta kelahiran.

Tabel 2. 203
Indikator Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	INDIKATOR		Satuan	2016	2017	2018
1	Persentase penduduk ber-KTP		%	82,37%	84,01%	90,50%
		Wajib KTP	Org	1.667.686	1.601.909	1.652.408
		Ber-E-KTP	Org	1.373.672	1.345.763	1.495.386
2	Persentase penduduk usia 0-18 tahun berakta kelahiran		%	74,04%	80,01%	89,54%
		Penduduk 0-18 tahun	Org	527.227	528.329	508.329

NO	INDIKATOR		Satuan	2016	2017	2018
		Ber- Akta kelahiran	Org	390.358	422.717	455.169
3	Jumlah Pelayanan Akta Kependudukan					
		Akta Kelahiran	Buah	30.916	29.843	34.211
		Akta kematian	Buah	1.557	1.852	2.744
		Akta perkawinan	Buah	266	289	348
		Akta Perceraian	Buah	67		88

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, 2018

E-KTP telah diserahkan/dibagikan ke masyarakat dan diharapkan selesai pada tanggal 31 Desember 2014 berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 470/327/sj tanggal 17 Januari 2014. Penerapan SIAK (Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan) telah dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo sejak tahun 2009 dan terus mengalami pengembangan sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat dan telah terintegrasi dengan E-KTP. Jumlah penduduk yang melakukan perekaman E-KTP sampai dengan tahun 2018 sebanyak 1.495.386 jiwa dari yang wajib ber KTP 1.652.408 jiwa atau sekitar 90,50%. Jumlah wajib KTP dari tahun ke tahun mengalami peningkatan begitupula dengan persentase penduduk ber E-KTP di Kabupaten Sidoarjo juga terus bertambah.

Pada tahun 2018 penduduk usia 0-18 tahun yang memiliki Akta kelahiran sebanyak 455.169 orang. Persentase penduduk usia 0-18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya. Begitu pula dengan kepemilikan akta yang lain seperti akta kematian, akta pernikahan, dan akta perceraian. Peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil mengartikan bahwa kesadaran masyarakat Kabupaten Sidoarjo meningkat tentang pentingnya memiliki legalitas sebagai penduduk.

Pada tahun 2018 juga telah dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengetahui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo. IKM yang didapatkan setelah survei adalah sebesar 85,17 yang termasuk dalam mutu pelayanan kategori A dengan kategori kinerja yang sangat baik. Berikut grafik perkembangan capaian Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil.

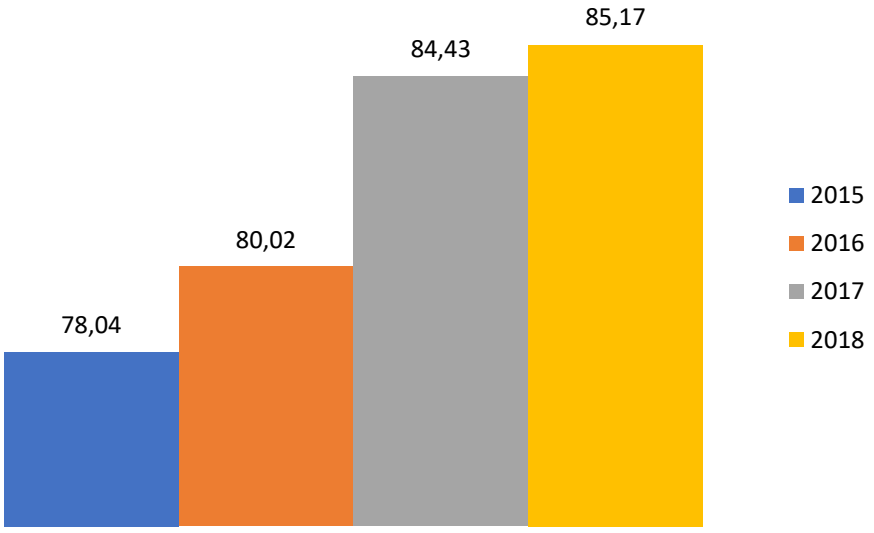

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo

Grafik 2. 27
Nilai IKM Terhadap Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo

Dari grafik di atas dapat dilihat perkembangan nilai capaian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dari tahun 2015 hingga tahun 2018 yang terus meningkat. Pada tahun 2015 capaian Nilai SKM sebesar 78,04 dan nilai tersebut meningkat di tahun selanjutnya, pada 2016 nilainya menjadi 80,02, di tahun 2017 mencapai 84,43, dan di tahun 2018 mengalami kenaikan lagi hingga mencapai 85,17.

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pembangunan pedesaan adalah salah satu program pemerintah nasional yang ada dalam visi misi nawacita dan trisakti. Adanya UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa dengan aturan pelaksananya memberikan kewenangan kepada Pemerintahan Desa yang lebih besar dalam pengelolaan keuangan Desa. Selain itu, kucuran dana yang besar berupa Dana Desa dari APBN memberikan peran strategis bagi desa sebagai ujung tombak pembangunan di masyarakat. Kewenangan begitu besar yang dimiliki oleh Desa tentunya menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Daerah untuk membina, mendampingi dan mengawasi proses pembangunan dan pengelolaan keuangan di Desa agar tidak terjadi penyimpangan, sehingga dana yang diperoleh dari Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten tepat sasaran kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mendukung

program pemerintah nasional dalam membangun pedesaan melalui urusan pemberdayaan masyarakat dan desa. Pembangunan di daerah bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten tetapi memerlukan peran serta aktif masyarakat baik berupa pemikiran maupun material. Status desa yang dihasilkan berdasarkan Indeks Desa Membangun di Kabupaten Sidoarjo untuk tahun 2017 adalah sebagai berikut

Tabel 2. 21
Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun

No	Status Desa	Tahun 2016		Tahun 2017	
		Jumlah Desa	%	Jumlah Desa	%
1	Desa Mandiri	0	0,00	0	0,00
2	Desa Maju	57	17,70	66	20,50
3	Desa Berkembang	189	58,70	207	64,29
4	Desa Tertinggal	71	22,05	48	14,91
5	Desa Sangat Tertinggal	5	1,55	1	0,31
	JUMLAH DESA	**322**		**322**	

Sumber: Kementrian Desa Indek desa membangun 2018

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun target desa mandiri tidak tercapai namun sudah dihasilkan beberapa perkembangan status desa antara lain:

a. Desa Sangat Tertinggal tercapai 1 desa atau 0,31% dari 322 desa yang ada atau tercapai 100% dari target yang direncanakan sebanyak 1 desa;
b. Desa Tertinggal tercapai 48 desa atau 14,91% dari 322 desa yang ada atau tercapai 97,96% dari target yang direncanakan sebanyak 49 desa;
c. Desa Berkembang tercapai sebanyak 207 desa atau 64,29% dari 322 desa yang ada atau tercapai 137,09% dari target yang ditetapkan sebanyak 151 desa;
d. Desa Maju tercapai sebanyak 66 desa atau 20,49% dari 322 desa yang ada atau tercapai 83,54% dari target yang ditetapkan sebanyak 79 desa.

Beberapa kendala yang dihadapi atas tidak tercapainya target desa mandiri yaitu:

a. Kondisi wilayah berdasarkan data yang ada dalam isian kuesioner Indeks Desa Membangun
b. Pencapaian Desa Mandiri masih terlalu jauh diukur dengan keadaan desa di Sidoarjo saat ini yang mempunyai PADes rata-rata Rp. 125.000.000,- /tahun dan paling tinggi saat ini sementara sebesar Rp. 345.000.000,-
c. Percepatan untuk menuju kearah Desa Mandiri adalah dengan meningkatkan

Pendapatan Asli Desa yang salah satu penyokong utama PADes adalah dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pengembangan BUMDes baru kita galakan mulai tahun 2017, sehingga menuju BUMDes yang berhasil yang akhirnya untuk meningkatkan PADes masih membutuhkan waktu.

Keberhasilan peningkatan dari desa tertinggal ke desa berkembang akibat;

- Penyiapan Infrastruktur seperti pembangunan jalan paving
- Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat
- Pembinaan secara rutin terhadap kepala desa dan perangkat desa

Keberhasilan pencapaian indikator tersebut didukung oleh indikator – indikator pendukung, sebagai berikut:

1) Tingkat Usaha Ekonomi Pedesaan

Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat di pedesaan melalui perkembangan usaha ekonomi yaitu Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP), Program Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal (P3EL) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Pencapaian kelompok UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) Mandiri akan ditampilkan dalam Grafik berikut.

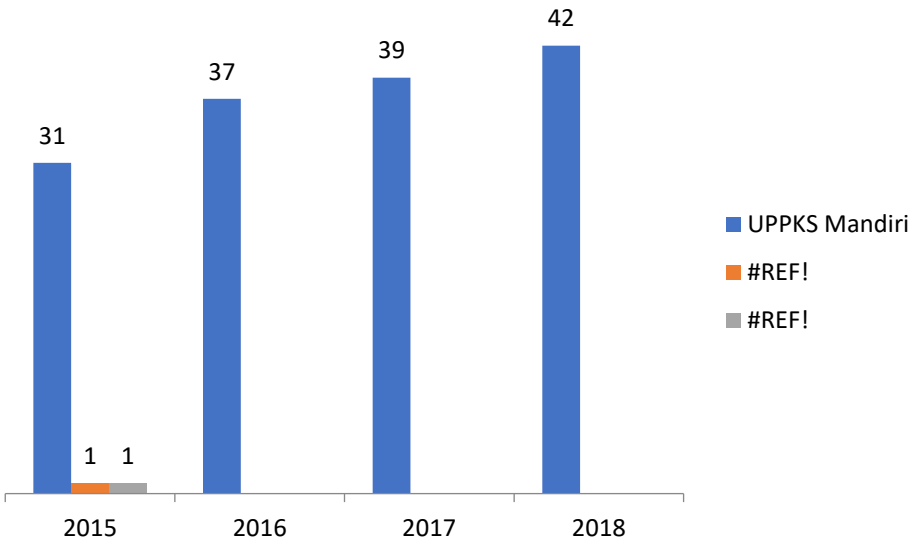

Sumber : Dinas PMD P3A KB Kabupaten Sidoarjo

Grafik 2. 28
Pencapaian Kelompok UPPKS

Realisasi kelompok UPPKS Mandiri tahun 2018 sebanyak 42 kelompok usaha atau 19% dari jumlah kelompok usaha keseluruhan yaitu sebanyak 221 kelompok. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2018 yaitu

sebesar 21% maka capaian dari UPPKS Mandiri tahun 2018 sebesar 90,48%. Capaian tersebut meningkat 0,16% atau bertambah sebanyak 3 kelompok usaha dari tahun 2017.

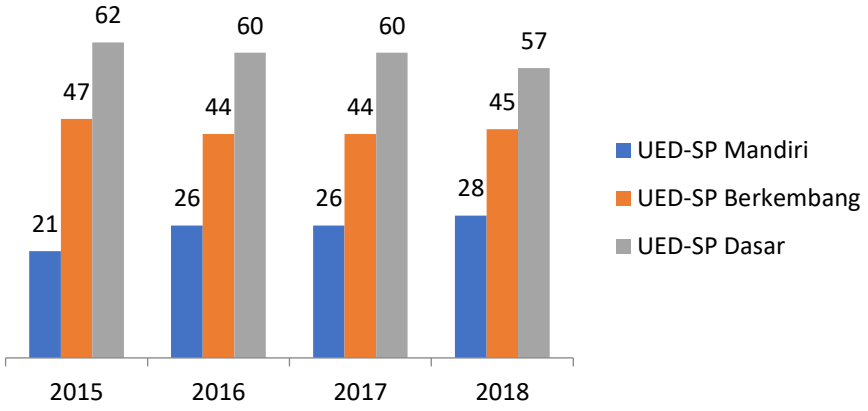

Sumber : Dinas PMD P3A KB Kabupaten Sidoarjo

Grafik 2. 29
Pencapaian Kelompok UED-SP

Realisasi UED-SP Mandiri tahun 2018 sebanyak 28 kelompok usaha atau 21,54% dari jumlah kelompok usaha keseluruhan yaitu sebanyak 130 kelompok. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2018 yaitu sebesar 21% maka capaian kinerja dari UED-SP Mandiri tahun 2018 sebesar 102,57%. Jika dibandingkan dengan realisasi capaian kinerja UED-SP Mandiri Tahun 2017 sebesar 20,00% atau 26 kelompok usaha dari 130 kelompok usaha, sedangkan realisasi tahun 2018 sebesar 21,54% maka kelompok usaha UED-SP Mandiri tahun 2018 terdapat peningkatan sebanyak 2 kelompok atau 1,54%.

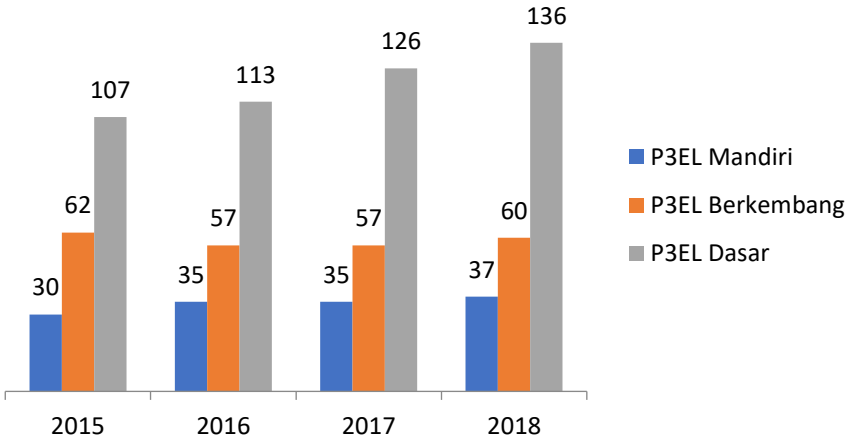

Sumber : Dinas PMD P3A KB Kabupaten Sidoarjo

Grafik 2. 30

Pencapaian Kelompok P3EL

Dalam tahun 2018 realisasi P3EL Mandiri sebanyak 37 kelompok usaha atau 15,88% dari jumlah kelompok usaha keseluruhan yaitu sebanyak 233 kelompok. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2018 yaitu sebesar 17% maka capaian kinerja dari P3EL Mandiri tahun 2018 sebesar 93,14%. Jika dibandingkan dengan realisasi capaian kinerja P3EL Mandiri Tahun 2017 sebesar 16,06% atau 35 kelompok usaha dari 218 kelompok usaha, sedangkan realisasi tahun 2018 sebesar 15,88% maka kelompok usaha P3EL Mandiri tahun 2018 terjadi perlambatan sebanyak 0,18%.

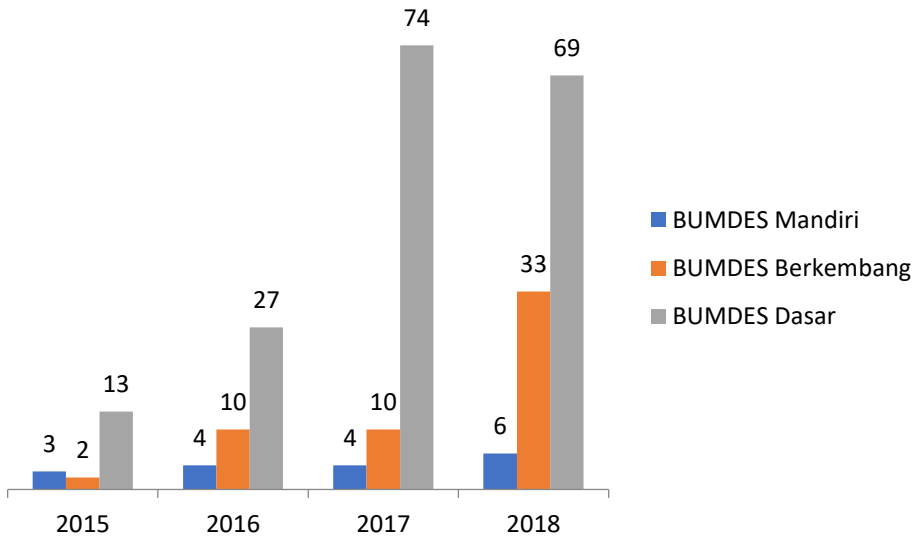

Sumber : Dinas PMD P3A KB Kabupaten Sidoarjo

Grafik 2. 31
Pencapaian Kelompok BUMDes

Dalam tahun 2018 realisasi BUMDes Mandiri sebanyak 6 kelompok usaha atau 5,56% dari jumlah kelompok usaha keseluruhan yaitu sebanyak 108 kelompok. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2018 yaitu sebesar 20% maka capaian kinerja dari BUMDes Mandiri tahun 2018 sebesar 27,80%. Jika dibandingkan dengan realisasi capaian kinerja BUMDes Mandiri Tahun 2017 sebesar 4,55% atau 4 kelompok usaha dari 88 kelompok usaha, sedangkan realisasi tahun 2018 sebesar 5,56% maka kelompok usaha BUMDES Mandiri tahun 2018 terjadi peningkatan sebesar 1,01%.

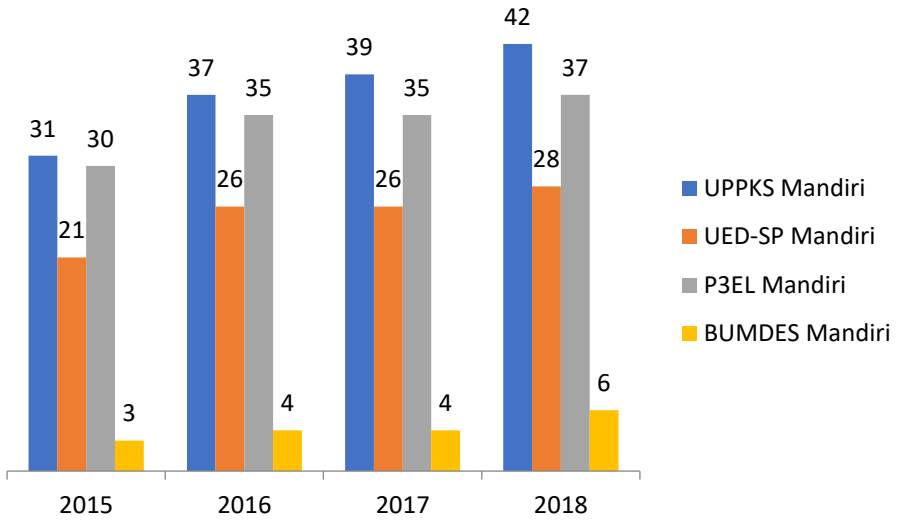

Sumber : Dinas PMD P3A KB Kabupaten Sidoarjo

Grafik 2. 32
Persentase Capaian Lembaga Ekonomi yang Mandiri

Dari grafis terlihat bahwa perkembangan usaha ekonomi masyarakat pedesaan mencerminkan keberhasilan peningkatan peran serta dan inovasi masyarakat. Adapun upaya yang dilakukan untuk peningkatan usaha ekonomi masyarakat pedesaan yaitu:

a. Meningkatkan sumberdaya manusia secara profesional dalam pengelolaan lembaga ekonomi
b. Mencari terobosan dan kerja sama dengan pihak lain dalam mengembangkan lembaga ekonomi

2) Jumlah Desa yang Menyusun Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

Dalam tahun 2018, desa yang melaksanakan administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan dengan tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan di Kabupaten Sidoarjo tercapai sebesar 100%, yaitu sebanyak 322 desa dari jumlah desa yang ada sebanyak 322 desa. Berikut perbandingan antara desa dengan administrasi pemerintahan yang sudah baik dengan yang belum baik di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2018:

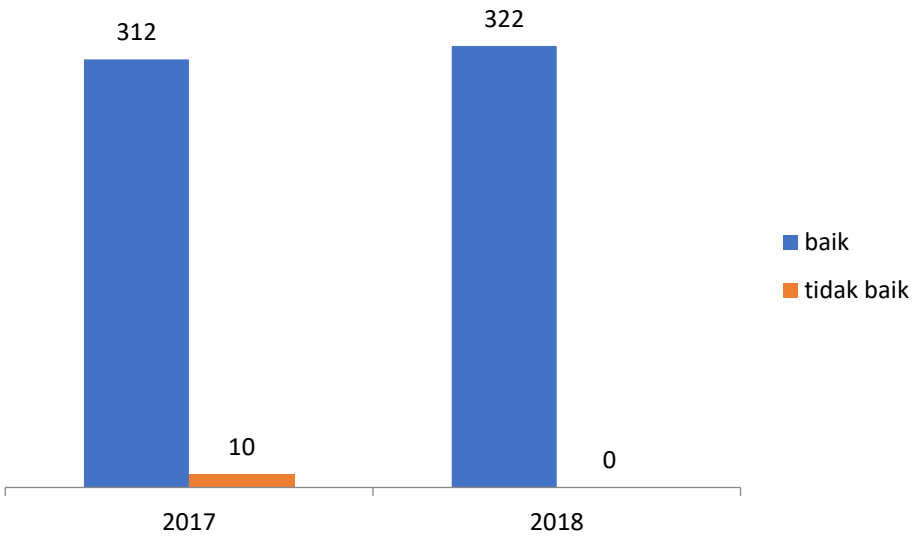

Sumber : Dinas PMD P3A KB Kabupaten Sidoarjo

Grafik 2. 33
Kategori Administrasi Pemerintahan Desa

Pelaksanaan administrasi pemerintahan desa yang baik meliputi :

a. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa (RPJMDes)
b. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes)
c. Penyusunan RAPBDes
d. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPDes)
e. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LKPPDes)
f. Laporan Realisasi APBDes beserta Dokumen Perdes Keuangan
g. Mengisi buku Inventaris Kekayaan dan Aset desa
h. Pelaksanaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Program pembangunan ini ditujukan pada sasaran meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya keluarga kecil, dengan beberapa indikator sebagai berikut:

1) Persentase Peserta KB Aktif

Untuk mengukur tingkat keberhasilan program KB di masyarakat maka yang diukur adalah tingkat prevalensi peserta KB aktif. Peserta KB diukur dari jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang mengikuti program KB secara terus menerus tanpa ada jeda kehamilan. Peserta KB aktif ini terdiri dari peserta KB mandiri yang menggunakan alat kontrasepsi dengan biaya sendiri maupun peserta KB dengan program pengadaan alat kontrasepsi dari pemerintah.

Tabel 2. 22
Perbandingan Peserta KB Aktif dengan PUS

Variabel	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah KB Aktif (akseptor)	304.394	309.728	218.006	315.916	293.270	306.116
Pasangan Usia Subur (PUS)	371.428	378.857	375.733	384.751	365.633	376.576

Sumber : Dinas PMD P3A KB Kabupaten Sidoarjo

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa Jumlah KB Aktif terus mengalami peningkatan. Selama kurun waktu 5 tahun terakhir Jumlah peserta KB aktif dari tahun ke tahun terus meningkat, namun persentasenya terhadap PUS untuk tahun 2014 lebih kecil dibandingkan tahun 2013. Hal ini disebabkan terdapat peserta KB aktif yang *drop out* atau pasangan usia subur yang tidak menggunakan alat kontrasepsi, sehingga pembinaan kepada peserta KB aktif masih perlu ditingkatkan melalui peran serta kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) sebagai pengelola program KB tingkat Desa/Kelurahan, Dusun, RW dan RT. Semakin tahun semakin meningkat jumlah KB aktif dan usia subur. Tahun 2015 KB aktif 315.916 dan usia subur 384.751. Pada tahun 2016 jumlah KB aktif mengalami perlambatan sehingga menjadi 293.270, diikuti dengan jumlah pasangan usia subur menjadi 365.633 jiwa. Pada tahun 2017 jumlah KB aktif dan pasangan usia subur kembali meningkat, masing-masing menjadi 206.116 dan 376.576 orang. Siklus pertumbuhan yang melambat antara Pasangan Usia Subur dan Jumlah KB aktif ini menunjukkan bahwa pemerintah perlu melakukan pembinaan KB Aktif secara terus, agar dapat kembali meningkatkan jumlah KB aktif, sehingga dapat menekan jumlah penduduk. Jumlah Pasangan Usia Subur pada tahun 2016 menunjukkan perlambatan dibandingkan tahun 2015. Hal ini disebabkan akibat urbanisasi atau banyaknya penduduk yang datang dari luar Kabupaten Sidoarjo terutama yang ada di perumahan.

2) *Total Fertility Rate* (TFR)

Total Fertility Rate (TFR) ini menunjukkan rata rata jumlah anak yang dimiliki Wanita Usia Subur (WUS) sepanjang siklus kehidupan reproduksinya. Realisasi Total Fertility Rate tahun 2017 sebesar 1,98 / WUS. Jika dibandingkan capaian TFR tahun 2016 sebesar 1,99 /WUS maka capaian tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 0,01 / WUS. Jika dibandingkan dengan target TFR tahun 2017 sebesar 2,08/WUS maka capaian TFR tahun 2017 sebesar 95,19% semakin kecil terjadinya kelahiran semakin baik. Dengan tercapainya Total Fertility Rate tahun 2017 sebesar 1,98 /WUS, pembinaan kepada Pasangan Usia Subur (PUS) dalam memberikan KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) tetap dilakukan secara

kontinyu, atau memberikan informasi kepada masyarakat agar peduli terhadap Kesehatan Reproduksi dengan cara mengatur jarak kelahiran dan membatasi jumlah anak yang dilahirkan melalui Program Keluarga Berencana.

3) *Crude Birth Rate* (CBR)

Salah satu ukuran yang sering dipakai untuk mengetahui tingkat kelahiran di suatu wilayah pada suatu waktu tertentu adalah Angka Kelahiran Kasar atau *Crude Birth Rate* (CBR). Nilai CBR dapat dimanfaatkan untuk acuan mengetahui tingkat populasi penduduk di suatu wilayah. Realisasi *Crude Birth Rate* (CBR) tahun 2017 sebesar 16,8 /1000 penduduk yang menunjukkan bahwa di Kabupaten Sidoarjo terjadi kelahiran 16 orang atau 17 orang per 1000 penduduk.

Urusan Perhubungan

Pengukuran kinerja pada urusan perhubungan meliputi beberapa indikator terukur, diantaranya (1) Perpanjangan Ijin Trayek Angkutan Pedesaan; (2) Jumlah Penumpang Umum yang Diangkut; (3) Tingkat Fatalitas Kecelakaan Lalu Lintas; (4) Ketersediaan Sarana dan Prasarana Transportasi; serta (5) Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor. Perkembangan kinerja indikator-indikator tersebut disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 4
Perkembangan Indikator-Indikator Perhubungan

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Perkembangan Ijin Trayek Angkutan Pedesaan yang Diberikan (trayek)	868	565	564	186	211
2.	Jumlah Penumpang Umum yang Diangkut (orang)	41.046.200	39.505.000	41.093.439	37.563.484	3.082.540
3.	Tingkat Fatalitas Kecelakaan Lalu Lintas					
	Meninggal	179	514	245	324	244
	Luka Parah	29	41	18	26	24
	Luka Ringan	1.366	2.266	1.395	1.619	1.740
4.	Ketersediaan Sarana dan Prasarana Transportasi					
	Halte	20	24	41	44	46
	Traffic Light	43	42	48	7	
	Terminal	7	7	7	7	7
	Dermaga/Pelabuhan	12	12	12	12	12
5.	Pengembangan Pengujian Kendaraan Bermotor					
	Wajib Uji	24.214	31.567	36.252	42.512	44.688
	Lulus Uji	39.334	47.566	56.466	58.193	49.322

Sumber: Sumber : SIPD Kabupaten Sidoarjo 2018

Dari data tabel tersebut diatas terlihat bahwa jumlah kendaraan yang wajib uji tahun 2017 (44.688) dibandingkan tahun 2016 (42.512) dalam posisi naik namun kendaraan yang lulus uji sebesar 15,24%. Kecilnya kendaraan yang lulus uji KIR karena:

- Pelaksanaan uji kir dilakukan lebih cermat, lebih teliti dan lebih tegas, sehingga kualitas hasil uji lebih optimal dan diharapkan capaian ini akan mengurangi tingkat kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas lainnya di jalan raya.
- Adanya kendaraan yang mutasi ke luar daerah karena kendaraan tersebut berdomisili di Kabupaten Sidoarjo tetapi pindah/mutasi ke daerah yang lain atas permintaan pemilik kendaraan tersebut, maupun kendaraan yang berdomisili di Kabupaten Sidoarjo tetapi numpang uji KIR di daerah lain.
- Adanya kendaraan yang tidak lulus uji KIR.

Wajib uji menjadi 36.252 dan yang lulus uji sejumlah 56.466. Pada tahun 2016 juga terjadi peningkatan pada kendaraan wajib uji menjadi 42.512 dan yang lulus uji sebesar 58.193 kendaraan.

Selanjutnya untuk menilai tingkat ketaatan dalam berlalu lintas di Kabupaten Sidoarjo maka tingkat fatalitas kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu ukuran. Secara umum kecelakaan di jalan diawali tidak patuhnya tehadap peraturan lalu lintas sehingga tingkat fatalitas ini dapat menggambarkan tingkat ketaatan. Fatalitas kecelakaan di Kabupaten Sidoarjo mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015 terjadi perlambatan fatalitas kecelakaan baik pada jumlah korban meninggal, luka parah maupun luka ringan. Namun pada tahun berikutnya yaitu tahun 2016, terjadi peningkatan jumlah korban kecelakaan di ketiga kondisi tersebut. Jumlah korban meninggal di tahun 2016 mencapai 324 orang, luka parah sebanyak 26 orang, dan luka ringan sebanyak 1.619 orang. Pada tahun 2017 jumlah korban kecelakaan lalu lintas lebih kecil untuk kondisi meninggal di tempat dan luka parah yaitu masing-masing sebesar 244 dan 24 orang. Namun pada korban luka ringan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi 1.740 orang.

Meningkatnya tingkat kecelakaan lalu lintas yang cukup tinggi tersebut disebabkan oleh rendahnya disiplin masyarakat dalam berlalu lintas, hal ini ditunjukkan dengan data penyebab kecelakaan lalu lintas yaitu 100% karena faktor manusia, walaupun pada beberapa lokasi sudah ditempatkan TAC (*Traffic Accident Center*) yang merupakan posko gabungan antara Dishub, Polres, Jasa Raharja,dan tenaga kesehatan didaerah rawan

kecelakaan seperti jalan Raya Trosobo. Demikian pula bertambahnya kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat menjadikan daya tampung jalan sangat padat, sehingga meningkatkan resiko terjadinya kecelakaan.

Selain itu, menurut data statistik dari Polres Sidoarjo 6,43% kecelakaan lalu lintas disebabkan karena kurangnya kesadaran orang tua akan bahaya penggunaan kendaraan bermotor bagi anak usia dibawah 16 tahun. Temuan menarik lainnya dari data Polres Sidoarjo adalah 45,51% pemakai jalan yang terlibat kecelakaan belum memiliki Surat Ijin Mengemudi.

Urusan Komunikasi dan Informasi

Untuk meningkatkan hubungan dan komunikasi antara Pemerintah Kabupaten dan masyarakat diperlukan suatu media informasi dan komunikasi. Pada tahun 2017 terdapat 84 aplikasi di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Sidoarjo. Dari 84 aplikasi tersebut, 37 aplikasi bersifat aktif dan layak digunakan dan sisanya sebanyak 47 aplikasi bersifat pasif/mengalami gangguan dan butuh perbaikan. Aplikasi yang digunakan dalam pemerintahan Kabupaten Sidoarjo tersebut meliputi aplikasi basis data, aplikasi administratif dan aplikasi informatif.

Untuk meningkatkan hubungan dan komunikasi antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan masyarakat diperlukan suatu media informasi dan komunikasi. Semakin banyak media informasi dan komunikasi yang tersedia diharapkan akan semakin baik hubungan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakatnya. Bentuk media/sarana komunikasi yang tersedia, diantaranya:

1. PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)

   Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertugas dan bertanggung jawab melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi. Media komunikasinya dapat diakses secara online melalui alamat website http://ppid.sidoarjokab.go.id .

2. KIM (Kelompok Informasi Masyarakat)

   Media komunikasi yang bertujuan menunjang kelancaran komunikasi antar anggota dan pengurus kelompok informasi masyarakat untuk meningkatkan daya

guna dan hasil guna informasi yang ada.

3. P3M (Pusat Pelayanan Pengaduan Masyarakat)

   Pusat Pelayanan Pengaduan Masyarakat (P3M) berfungsi menerima, melaporkan dan menindaklanjuti pengelolaan pengaduan. Media komunikasinya dapat diakses secara online melalui alamat website http://p3m.sidoarjokab.go.id

4. Media Center

   Media center merupakan lembaga strategis dalam mempublikasikan berbagai program kerja, kegiatan dan himbauan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

5. Media Pers

   Keberadaan Media Pers yang bermitra/bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo di bawah koordinasi Dinas Komunikasi dan Informatika berjumlah 69 buah yang meliputi : media cetak harian sebanyak 13 buah, media cetak mingguan/tabloid sebanyak 22 buah, media online sebanyak 17 buah dan media elektronik (TV/Radio) sebanyak 17 buah.

6. Klipping dan Majalah

   Dalam mendokumentasi berita harian dari berbagai media massa maka dilakukan Klipping "**Sidoarjo Hari Ini**". Selain itu Dinas Komunikasi dan Informatika juga menerbitkan majalah "**Gema Delta**". Kedua media ini memberikan informasi mengenai hal-hal yang terjadi di Sidoarjo dan Pembangunan Sidoarjo yang lebih baik. Kedua media ini diberikan kepada semua OPD di Kabupaten Sidoarjo.

Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi dan UKM memiliki nilai strategis menjadi pilar atau sendi perekonomian karena bersentuhan langsung dengan rakyat, menggerakkan roda aktivitas ekonomi rakyat, meningkatkan pendapatan sekaligus mengurangi kemiskinan, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, dan meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi sekaligus meningkatkan perekonomian daerah. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas Koperasi dan UMKM.

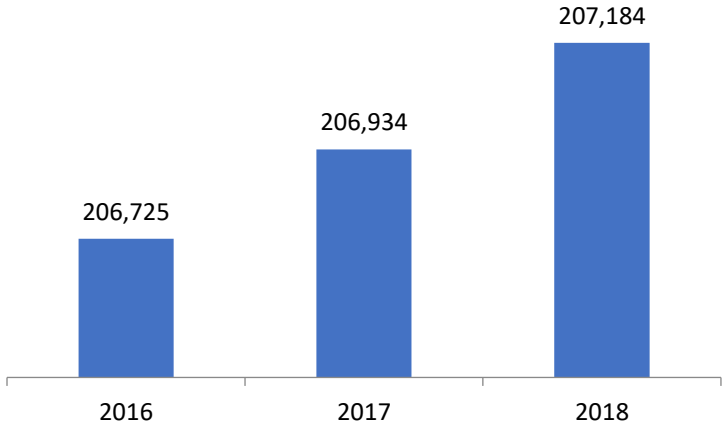

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo

Grafik 2. 34
Perkembangan Jumlah Usaha Mikro

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa jumlah usaha mikro pada tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi 207.184 unit. Persentase Jumlah Usaha Mikro pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 12 % dibandingkan tahun 2017 yaitu dari 206.934 unit usaha mikro. Lima besar kelompok usaha mikro di Kabupaten Sidoarjo meliputi usaha makanan dan minuman, *fashion,* pengrajin produk kulit, handicraft dan batik.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang menyatakan bahwa semua profesi wajib bersertifikasi termasuk usaha mikro, maka untuk meningkatkan kompetensi Usaha Mikro dalam menghadapi era globalisasi, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro memfasilitasi uji kompetensi bagi usaha mikro.

Sertifikasi kompetensi usaha mikro merupakan proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional yang diubah dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional.

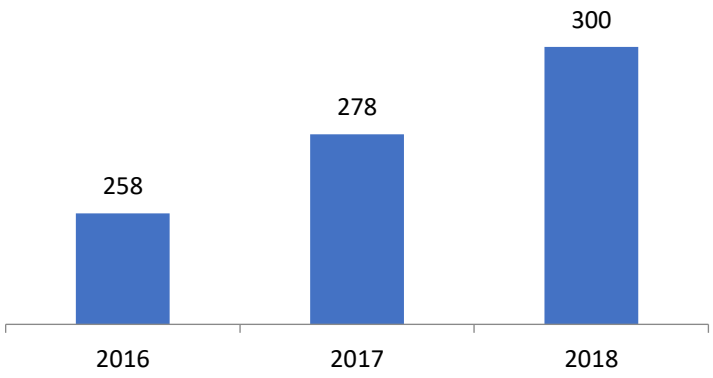

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo

Grafik 2. 35
Perkembangan Jumlah Usaha Mikro yang Bersertifikasi

Pada tahun 2017 jumlah usaha mikro yang dinyatakan lulus uji sertifikasi kompetensi di bidang wirausaha mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2016 yaitu dari 258 usaha mikro menjadi 278 usaha mikro.

Koperasi yang aktif tentunya telah memiliki legalitas yang lengkap dan jelas dari pemerintah seperti memiliki Nomor Induk Koperasi (NIK), Surat Keputusan Anggaran Dasar oleh Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia oleh Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dan dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota. Koperasi aktif mendukung parameter koperasi berkualitas dari sisi aspek badan usaha aktif.

Tabel 2. 5
Jumlah Koperasi di Kabupaten Sidoarjo

INDIKATOR	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Koperasi	Unit	1.316	1.321	1.337	1.432	1.446	1.462
* Aktif	Unit	1.171	1.179	1.195	1.270	1.287	1.289
* Tidak aktif	Unit	145	142	142	162	159	157
* % koperasi aktif	%	88,98	89,02	89,40	88,69	89,00	89,14
* % koperasi tidak aktif	%	11,02	10,97	10,60	11,31	11,00	10,86

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo

Realisasi persentase koperasi aktif pada tahun 2018 sedikit melampaui target yang ditentukan yaitu sebesar 89,14% dimana sebanyak 1.289 unit koperasi dinyatakan masih aktif beroperasi dari 1.462 unit koperasi. Jika dibandingkan dengan tahun 2017, maka persentase koperasi aktif terjadi peningkatan sebesar 0,14% yaitu dari 89,00% menjadi

89,14% atau sejumlah 1.287 koperasi menjadi 1.289 koperasi yang artinya pada tahun 2018 ada peningkatan jumlah koperasi aktif sebesar 2 koperasi. Target persentase koperasi aktif tahun 2018 dapat dicapai melalui kegiatan berupa Revitalisasi Koperasi, Pengembangan dan Pembinaan Kelembagaan Koperasi serta Penyuluhan dan Fasilitasi Advokasi Koperasi

Koperasi sehat mendukung parameter koperasi berkualitas dari sisi aspek usaha koperasi, aspek keuangan koperasi, aspek manfaat koperasi terhadap anggota, aspek manfaat koperasi terhadap masyarakat. Perkembangan jumlah koperasi sehat selama tiga tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut ini:

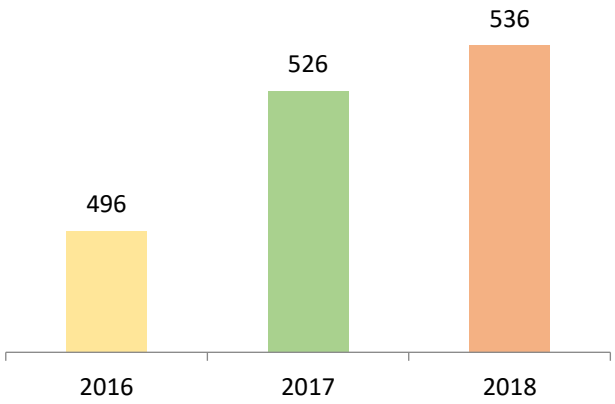

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo

Grafik 2. 36
Jumlah Koperasi Sehat

Berdasarkan Grafik 2.35 dapat diketahui bahwa jumlah koperasi sehat di Kabupaten Sidoarjo mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2018 koperasi sehat mengalami peningkatan sebesar 0,28% jika dibandingkan dengan tahun 2017 atau dari 526 unit koperasi menjadi 536 unit koperasi. Peningkatan tersebut dapat dicapai melalui kegiatan berupa Pembinaan, Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Koperasi serta Monitoring dan Evaluasi Koperasi.

Pertumbuhan koperasi didasarkan pada peran anggota di dalam koperasi. Pertumbuhan jumlah anggota yang terus meningkat didukung dengan tingginya partisipasi anggota untuk menyimpan dan dipergunakan kembali oleh anggota akan semakin

meningkatkan jumlah modal untuk memenuhi kebutuhan usaha dan kegiatan operasional sehari –hari. Perkembangan jumlah anggota koperasi selama tiga tahun terakhir terangkum pada grafik berikut ini:

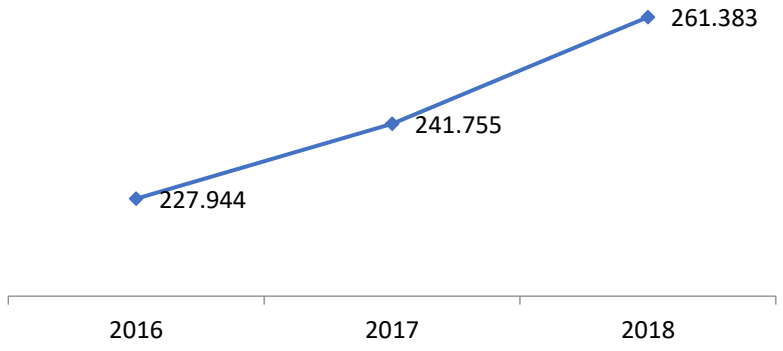

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo

Grafik 2. 37
Jumlah Anggota Koperasi

Jumlah anggota koperasi selama tiga tahun terakhir mengalami peningkatan. Jumlah anggota pada tahun 2017 sebanyak 241.755 anggota, terjadi peningkatan ditahun 2018 menjadi 261.383 anggota yang tersebar di seluruh koperasi yang ada di Kabupaten Sidoarjo.

Permodalan merupakan salah satu input usaha koperasi. Semakin besar modal koperasi semakin tinggi kemampuan koperasi melakukan ekspansi usaha. Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal luar/pinjaman.

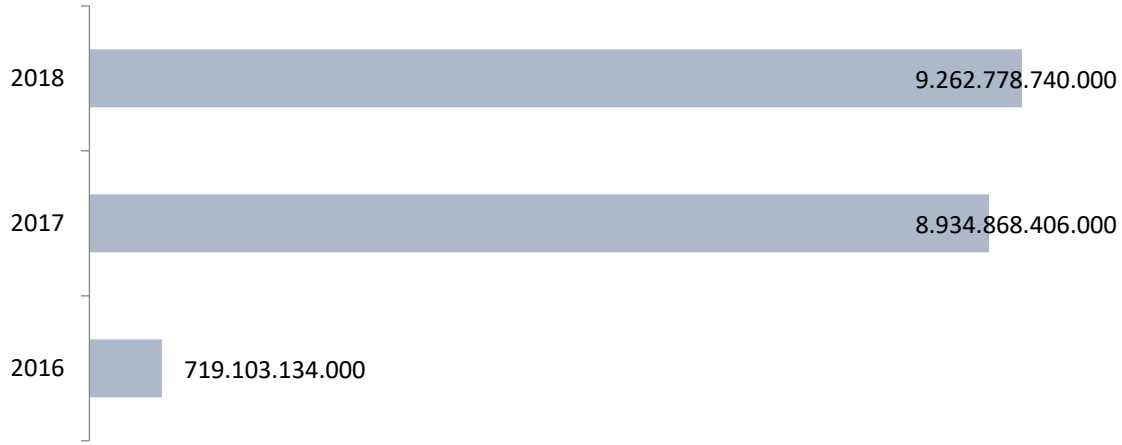

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo

Grafik 2. 38
Modal Koperasi

Jumlah modal koperasi pada tahun 2018 meningkat dibanding tahun 2017 dari Rp. 8.934.868.406.000 menjadi Rp. 9.262.778.740.000. Kenaikan modal sudah pasti akan lebih besar dari kenaikan SHU, karena SHU merupakan salah satu komponen dari modal sendiri selain simpanan pokok, simpanan wajib, donasi/hibah maupun cadangan resiko dan pinjaman bank serta titipan uang dari anggota pada koperasi (modal luar).

Sebagai salah satu bentuk usaha, output koperasi dinyatakan dalam volume usaha. Semakin besar volume usaha mencerminkan semakin berkembangnya bisnis dan ekonomi koperasi.

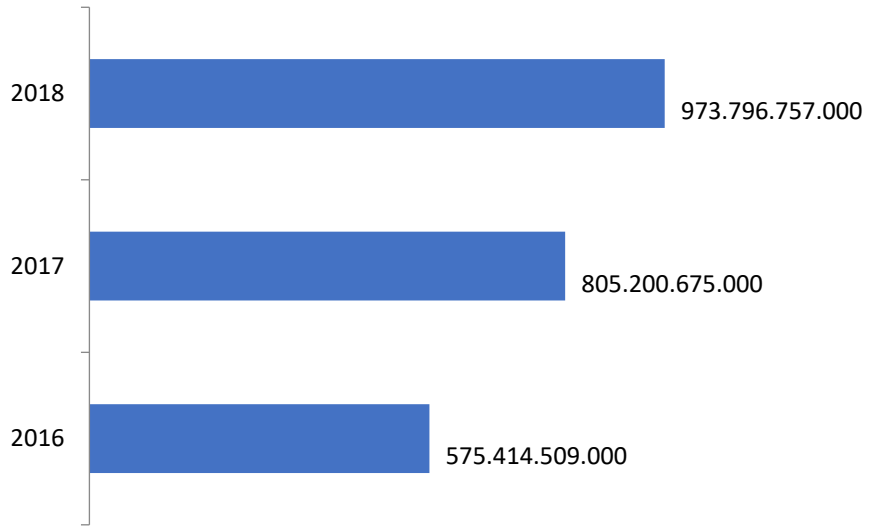

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo

Grafik 2. 39
Volume Usaha Koperasi

Realisasi jumlah volume usaha koperasi pada tahun 2018 meningkat dibanding tahun 2017 dari Rp 805.200.675.000 menjadi Rp 973.796.757.000. Kenaikan volume usaha koperasi menunjukkan bahwa usaha dan pendapatan koperasi yang ada di Kabupaten Sidoarjo telah berkembang. Hal ini juga tidak lepas dari pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro melalui pelaksanaan bimbingan teknis antara lain bimtek kelembagaan, bintek usaha, bintek pembentukan wirausaha baru.

Urusan Penanaman Modal

Urusan penanaman modal dilakukan dalam rangka untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas layanan perijinan dan penanaman modal. Berikut adalah hasil capaian berdasarkan indikator yang telah ditetapkan:

Tabel 2. 6
Indikator Urusan Penanaman Modal

NO	INDIKATOR	Satuan	2016	2017	2018
1	Jumlah investasi PMA dan PMDN	Juta Rp	16.908.099.687.085	17.885.626.090.815	23.832.580.166.842

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidoarjo

Dari Tabel 2.26 dijelaskan bahwa Realisasi jumlah investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Sidoarjo tahun 2018 mencapai Rp 23.832.580.166.842,00 atau 140,48% dari target yang ditetapkan dalam RPJMD sebesar Rp 16.965.413.000.000,00 dan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar Rp 17.885.626.090.815,89 terjadi peningkatan sebesar Rp 6.867.167.166.842,00 (38,94%)

Urusan Kepemudaan Dan Olahraga

Sasaran yang telah dicapai dalam urusan kepemudaan dan olahraga terbagi dalam empat sasaran capaian, yaitu: (1). Jumlah Prestasi Pemuda yang Diperoleh di Tingkat Regional, Nasional dan Internasional. (2). Jumlah pemuda yang berwirausaha (sebagai Wira Usaha Baru, WUB). (3) Jumlah Prestasi Olahraga di tingkat Regional, Nasional dan Internasional dan (4) Tingkat Kepuasaan Pengunjung Fasilitas Olahraga Berikut adalah capaian kinerja tahun 2017-2018:

Tabel 2. 7
Indikator Urusan Kepemudaan dan Olahraga

NO	INDIKATOR	Satuan	2017	2018
1	Jumlah prestasi pemuda yang diperoleh di Tingkat Regional, Nasional dan Internasional	prestasi	9	22
2	Jumlah pemuda yang berwirausaha (sebagai Wira Usaha Baru, WUB)	orang	12	12
3	Jumlah Prestasi Olahraga di tingkat Regional, Nasional dan Internasional	prestasi	384	452
4	Tingkat Kepuasaan Pengunjung Fasilitas Olahraga	indeks	74,93	76,69

Sumber: Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata, 2018

Data di atas dapat dideskripsikan bahwa dari tahun 2017 menuju 2018 terjadi peningkatan capaian indikator, pencapaian dalam bidang olahraga di Kabupaten Sidoarjo relatif mengalami peningkatan. Jumlah prestasi pemuda yang diperoleh tingkat regional, nasional dan internasional mengalami peningkatan yang sebelumnya 9 prestasi menjadi 22 prestasi. Jumlah pemuda yang beriwausaha pada tahun 2018 sebanyak 12 orang jumlahnya tetap dengan capaian pada tahun 2017. Jumlah Prestasi Olahraga di tingkat Regional, Nasional dan Internasional pada tahun 2018 sebanyak prestasi, nilai ini mengalami peningkatan dibanding tahun 2017 yang sebelumnya sebanyak 384 prestasi. Untuk indikator Tingkat Kepuasaan Pengunjung Fasilitas Olahraga, Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo telah melakukan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pengunjung fasilitas olah raga dan hasilnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencapai angka sebesar 76,68 dan masuk tataran “baik”. Angka ini mengalami kenaikan dari IKM Tahun 2017 yang hanya mencapai 74,93.

Urusan Statistik

Arah pembangunan suatu daerah tidak terlepas dari tersedianya data-data yang *valid* dan *up to date*. Data statistik menunjukan kondisi riil kinerja pembangunan suatu daerah. Data statistik yang dimaksud adalah data yang relevan dengan kebutuhan perencanaan sekaligus mampu menjawab kebutuhan pengukuran kinerja di setiap satuan kerja. Jenis-jenis dokumen statistik yang disusun diantaranya:

1. Indikator Ekonomi;
2. Indikator Sosial;
3. Indeks Harga Konsumen;
4. Indikator Tenaga Kerja;
5. Analisa Gender;
6. ICOR
7. Sidoarjo Dalam Angka;
8. PDRB;
9. Indeks Pembangunan Manusia;
10. Kecamatan Dalam Angka;
11. Statistik Daerah;
12. Data Statistik Sektoral.

Urusan Kebudayaan

Urusan budaya merupakan upaya pemerintah dalam menjaga kearifan lokal daerah. Kinerja urusan kebudayaan diukur melalui tiga indikator, yaitu: (1) Jumlah Budaya Daerah yang Dilestarikan; (2) Prestasi dalam bidang seni Budaya.

Untuk menopang pelestarian seni dan budaya daerah maka harus dijaga eksistensi kelompok seni dan budaya yang ada di masyarakat. Pada Tahun 2018, adat budaya yang dilestarikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo, antara lain Lelang Bandeng, Nyadran, Remo Munali Patah, Reog Cemandi, Gagrak Wayang Kulit Porongan. Untuk melestarikan seni budaya, peran kelompok seni budaya yang ada di masyarakat sangat besar. Kelompok seni budaya yang terbentuk terbagi dalam beberapa bidang seni yaitu : Ludruk, Wayang Kulit, Reog Ponorogo, Patrol, Jaranan/Bantengan, Musik (Orkes Melayu, Hadrah, Samroh, Gambus, Al Banjari dan Keroncong), Kentrung, Tari, Teater, Karawitan, Campursari dan Mocopat. Di Kabupaten Sidoarjo juga terdapat daerah pesisir yang melestarikan budaya nelayan pesisir. Sampai saat ini budaya nelayan pesisir dilestarikan oleh enam desa, yaitu :

1) Desa Balong Dowo Kecamatan Candi
2) Desa Balong Gabus Kecamatan Candi
3) Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi
4) Desa Bluru Kidul Kecamatan Sidoarjo
5) Desa Gisik Cemandi Kecamatan Sedati
6) Desa Kepetingan Kecamatan Sidoarjo

Pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah melakukan upaya pembinaan terhadap seluruh potensi budaya yang ada. Hal ini di lakukan dalam rangka memelihara nilai-nilai kearifan lokal yang sudah tumbuh dan berkembang di masyarakat. Prestasi di bidang budaya pada tahun 2018, antara lain FKPU (Festival Kesenian Pesisir Utara) tingkat nasional, Kolaborasi drama tari dalam pagelaran seni budaya Kab. Sidoarjo dengan judul " Candi Tawangalun " prestasi tingkat nasional dan Jatim Specta Night Carnival 2018 prestasi tingkat nasional.

Urusan Perpustakaan

Budaya membaca akan berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat. Urusan perpustakaan merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan budaya membaca untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi masyarakat. Hasil pelaksanaan program

dan perkembangan kinerja urusan perpustakaan ditunjukkan pada indikator-indikator berikut ini:

Tabel 2. 8
Perkembangan Kinerja Indikator Urusan Perpustakaan

No	Indikator	2016	2017	2018
1.	Indeks Minat Baca	0,00	42,00	69
2.	Jumlah pengunjung perpustakaan	140.297	164.358	151.463
3.	Jumlah Buku Perpustakaan	87.554	88.656	99.998
4.	Jumlah Judul Buku Perpustakaan	29.554	34.077	37.100

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2018

Target yang ditetapkan di tahun 2018 dalam RPJMD untuk indeks minat baca adalah 60. Realisasi Indeks Minat Baca Masyarakat tahun 2018 tercapai sebesar 69 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar 42, maka realisasi tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 27 atau 64,29%.

Realisasi jumlah pengunjung perpustakaan tahun 2018 tercapai sebanyak 151.463 pengunjung dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar 164.385 pengunjung, maka realisasi tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 12.922 pengunjung atau 7,86%. Bila dibandingkan dengan target tahun 2018 sebesar 150.000 pengunjung, maka capaian target tingkat kunjungan perpustakaan telah tercapai sebesar 108,97%. Realisasi jumlah buku pada tahun 2018 tercapai sebanyak 99.998 eksemplar. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebanyak 88.656 eksemplar, maka realisasi tahun 2017 mengalami peningkatan sebanyak 11.342 eksemplar atau 12,79%. Realisasi jumlah koleksi buku perpustakaan tahun 2018 tercapai sebanyak 99.998 eksemplar dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar 88.656 eksemplar, maka realisasi tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 11.342 eksemplar atau 12,79%. Bila dibandingkan dengan target tahun 2018 sebesar 92.000 eksemplar, maka capaian target jumlah koleksi buku perpustakaan telah tercapai sebesar 108,69%.

Urusan Kearsipan

Indikator kinerja urusan kearsipan ditinjau dari meningkatnya satuan kerja yang menerapkan sistem kearsipan yang baku. Berikut diagram untuk menjelaskan perkembangan Perangkat Daerah (PD) yang menerapkan Sistem Kearsipan yang Baku.

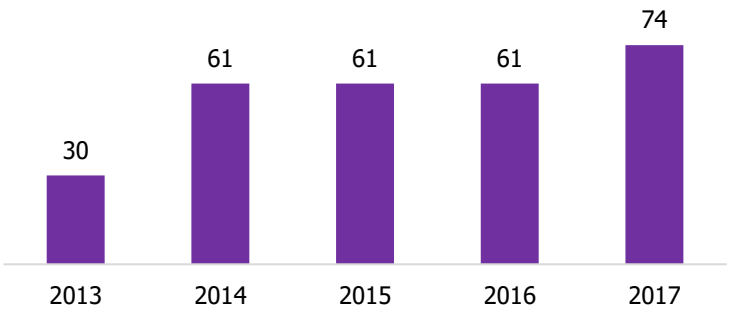

Sumber: SIPD Kabupaten Sidoarjo 2018

Grafik 2. 40
Perkembangan PD yang Menerapkan Sistem Kearsipan yang Baku

Tahun 2013 sebanyak 30 PD; pada tahun 2014 sampai 2016 sebanyak 61 PD yang menerapkan sistem kearsipan yang baku atau terstandar. Sedangkan pada tahun 2017 terjadi peningkatan jumlah PD yang menerapkan sistem kearsipan yang baku menjadi sebesar 74 PD. Dengan semakin banyaknya PD yang menerapkan sistem kearsipan, maka dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan.

C. Fokus Layanan Urusan Pilihan

Urusan Kelautan dan Perikanan

Pembangunan ekonomi Maritim menjadi salah satu poros pembangunan perekonomian nasional yang menitikberatkan pada sektor kelautan dan perikanan. Oleh karena itu, urusan Kelautan dan Perikanan sangat penting dalam arah kebijakan pembangunan perekonomian Kabupaten Sidoarjo untuk mendukung program nasional. Pada dasarnya 70% wilayah Negara Indonesia terdiri dari lautan dan penduduknya sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan. Oleh karena itu, laut memiliki pengaruh yang besar terhadap kehidupan masyarakat kita. Untuk menunjang keberhasilan kinerja di bidang Kelautan dan Perikanan ditunjukkan pada indikator berikut ini :

1. Produksi Perikanan

Tabel 2. 9
Perkembangan Produksi Perikanan

No	Indikator	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Perkembangan Produksi Perikanan							
	Laut	Kg	14.659.596	14.828.000	14.898.400	14.908.760	15.057.400	NA
	Perairan Umum	Kg	383.780	449.280	521.710	525.050	530.000	NA

No	Indikator	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Kolam	Kg	15.549.000	18.377.900	18.132.000	19.718.950	19.136.550	NA
	Tambak	Kg	7x b 0.887.300	77.223.800	75.085.800	74.884.800	75.719.740	75.653.734
2	Perkembangan Tingkat Produksi (Kg)							
	Udang Windhu	Kg	254	259	274	332,63	334,03	335,46
	Bandeng	Kg	2.000	2.225	2.181	2.226,26	2.235	2.241,82

Sumber: SIPD Kabupaten Sidoarjo, 2018;

Perkembangan produksi perikanan hasil tangkap ikan laut pada tahun 2015 sebesar 14.898.400 kg meningkat sebesar 70.400 kg apabila dibanding tahun 2014 sebesar 14.828.000 kg. Pada tahun 2017 meningkat kembali menjadi 15.057.400 kg. Realisasi hasil tangkap perairan umum pada tahun 2015 sebesar 521.710 kg meningkat sebesar 72.430 kg dibandingkan tahun 2014 sebesar 449.280 kg, pada tahun 2017 realisasi meningkat menjadi 530.000 kg.

Di sisi lain, hasil produksi perairan kolam pada tahun 2015 sebesar 18.132.000 kg lebih kecil dibandingkan tahun 2014 sebesar 18.377.900 kg atau berkurang 245.900 kg. Kemudian pada tahun 2016 meningkat kembali mencapai 19.718.950 kg, peningkatan ini terjadi dikarenakan adanya optimalisasi dan perluasan area kolam pada budidaya ikan. Namun, pada tahun 2017 produksi perikanan kolam sebesar 19.136.550 kg mengalami selisih sebesar 582.400 apabila dibandingkan tahun 2016 sebesar 19.718.950 kg. Realisasi hasil produksi tambak tahun 2015 sebesar 75.085.800 kg lebih kecil jika dibanding tahun 2014 sebesar 77.223.800 kg. Pada tahun 2016 kembali melambat menjadi 74.884.800 kg. Perlambatan ini terjadi karena penyakit yang menyerang komoditas unggulan dan rendahnya mutu genetik ikan yang dihasilkan serta masyarakat masih menggunakan teknologi tradisional dalam budidaya perikanan. Pada tahun 2018, realisasi produksi tambak meningkat menjadi 75.653.734 kg.

Perkembangan produksi udang windhu pada tahun 2015 sebesar 274 kg meningkat sebesar 15 kg apabila dibandingkan tahun 2014 sebesar 259 kg. Pada tahun 2017 produksi udang windhu meningkat kembali menjadi 334 kg dan menjadi 335,46 kg. Produksi bandeng pada tahun 2016 sebesar 2.181 kg memiliki selisih sebesar 44 kg dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 2.225 kg. Namun produksi bandeng pada tahun 2016 sebesar 2.226,26 kg meningkat sebesar 45,26 kg dibandingkan produksi bandeng pada

tahun 2015. Pada tahun 2017 produksi bandeng meningkat kembali menjadi 2.235 kg. Pada tahun 2018, produksi bandeng meningkat menjadi 2.241,82 kg.

2. Tingkat Konsumsi Ikan

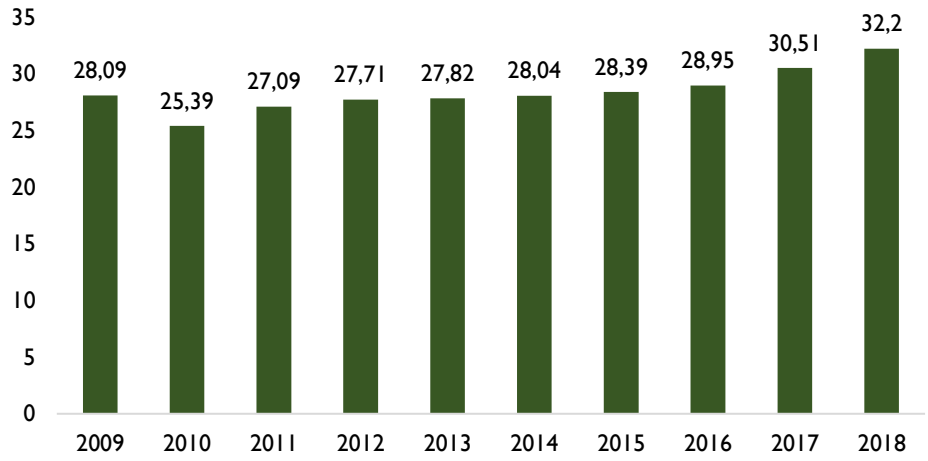

Sumber: Dinas Perikanan, 2018

Grafik 2. 41
Perkembangan Tingkat Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)

Secara umum perkembangan tingkat konsumsi ikan pertahun masyarakat Kabupaten Sidoarjo semakin meningkat. Terbukti tahun 20011 sebesar 27,09 kg/kapita/tahun meningkat menjadi 27,71 kg/kapita/tahun (2012). Tahun 2013 menjadi 27,82 kg/kapita/tahun, tahun 2014 meningkat menjadi 28,04 kg/kapita/tahun. Sampai pada tahun 2015 mencapai level 28,39 kg/kapita/tahun dan pada tahun 2016 menjadi 28,95 kg/kapita/tahun yang artinya masyarakat yang mengkonsumsi ikan semakin meningkat. Peningkatan ini terjadi setiap tahun hingg pada tahun 2018 tingkat konsumsi ikan sebesar 32,2 kg/kapita/tahun. Perkembangan ini mendukung program pemerintah terutama kementerian kelautan yang mendorong konsumsi ikan bagi masyarakat Indonesia.

3. Perkembangan Produksi Hasil Olahan Perikanan

Dari mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 perkembangan produksi hasil olahan perikanan Kabupaten Sidoarjo mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 produksi hasil olahan perikanan sebesar 11.285.260 kg meningkat sebesar 228.819 kg dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 11.156.441 kg.

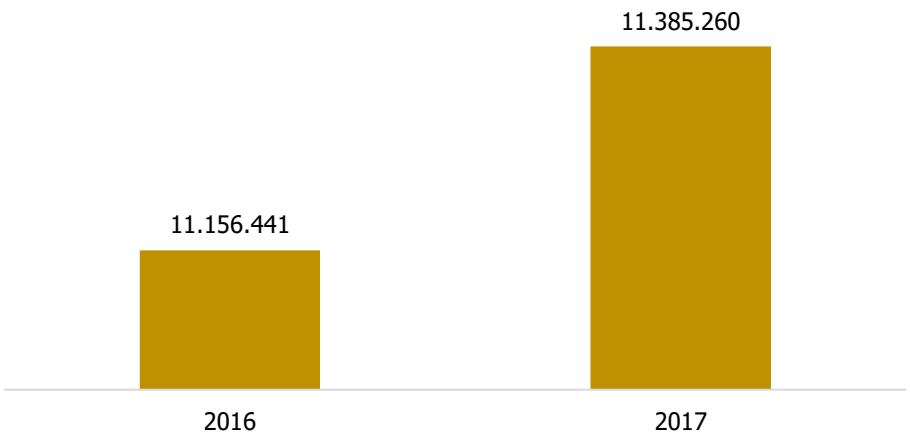

Sumber: SIPD Kabupaten Sidoarjo 2018

Grafik 2. 42
Perkembangan Produksi Hasil Olahan Perikanan (Kg)

Urusan Pariwisata

a. Rata-rata Lama Wisatawan Tinggal

Rata-rata lama wisatawan tinggal adalah tingkat rata-rata lamanya seluruh wisatawan berada di suatu daerah atau negara tujuan wisatawan.

Untuk kunjungan wisatawan di Kabupaten Sidoarjo, rata-rata tinggal selama 2 hari (angka sementara) didasarkan pada tingkat hunian hotel di Sidoarjo pada tahun 2017. Capaian ini memenuhi 100% dari target RPJMD selama 2 hari tinggal.

b. Jumlah Kunjungan Wisatawan

Pengunjung pariwisata Kabupaten Sidoarjo dalam kurun waktu enam tahun dari 2012 hingga 2018 selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2012 jumlah kunjungan wisatawan sebesar 856.620 pengunjung. Hingga akhir tahun 2017 tercatat sejumlah 1.942.079 pengunjung. Angka ini meningkat di tahun 2018 yaitu sebanyak 1.990.903 pengunjung. Peningkatan indikator urusan pariwisata di Kabupaten Sidoarjo baik dari jumlah pengunjung maupun jumlah pengelola jasa wisata mengindikasikan bahwa pariwisata di Kabupaten Sidoarjo mengalami perbaikan.

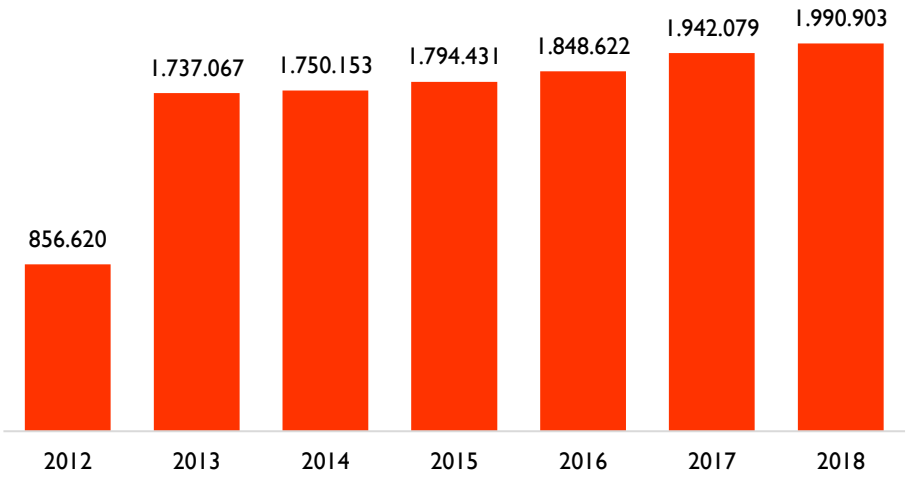

Sumber: Disporabudpar, 2018

Grafik 2.43

Jumlah Kunjungan Wisatawan

Urusan Pertanian

Sektor pertanian merupakan aspek terpenting dalam kehidupan, terutama sub sektor bahan pangan. Kinerja sektor pertanian merupakan fokus utama pemerintah. Hal ini disebabkan sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Kinerja sektor pertanian yang semakin memburuk akan berdampak pada kerentanan pangan suatu wilayah. Data Indikator Urusan Pertanian tahun 2018 hingga dokumen disusun **belum dirilis oleh BPS**. Berikut merupakan perkembangan indikator pertanian Kabupaten Sidoarjo :

Tabel 2. 29
Indikator Urusan Pertanian

No	Indikator	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
1	Perkembangan Produksi Tanaman Pangan dan Holtikultura (Kw)						
	Padi	Kw	1.979.690	2.041.380	2.325.190	2.186.310	2.058.900
	Jagung	Kw	11.766,00	2.170,00	6.510,00	7.170,00	11.788
	Kacang Hijau	Kw	19.040,00	23.340,00	20.233	15.702	15.704
	Kedelai	Kw	15.627,00	18.028,00	21.250,00	9.350	9.716
	Sawi	Kw	49.243,00	45.098,00	45.252	4.229	NA
	Bayam	Kw	47.188,00	52.535,00	45.310	4.011	NA
	Kangkung	Kw	49.190,00	47.040,00	62.801	3.356	NA
2	Produktivitas Tanaman Pangan dan Holtikultura						
	Padi	Kw	66,03	66,66	73,92	68,8	62,9
	Jagung	Kw	50,94	83,46	58,65	60,75	64,74
	Kacang Hijau	Kw	12,07	12,48	13	13,86	13,86
	Kedelai	Kw	16,26	15,69	19,08	18,63	15,85
	Sawi	Kw	116,14	110	108	111,3	NA
	Bayam	Kw	107,25	95	93,616	97,47	NA
	Kangkung	Kw	78,96	70	62,8	65,2	NA
3	Produksi pertanian, perkebunan dan peternakan : padi	Kw	NA	NA	23.251,9	21.863,1	20.589
4	Produksi perkebunan tebu		4.719.162	3.856.721	2.916.560	3.721.064	3.086.659
5	Produktivitas perkebunan tebu	kw/ha	774,15	681	720,9	776	742
6	Produksi Peternakan						
	Daging (000 Kg)	kg	12.420	16.503	19.804.835	20.201.285	21.019.421
	Telur (Ton)	ton	1.075.050	1.379.075	1.737.560	2.244.286	2.799.930
	Susu (Liter)	liter	4.582.080	66.712.014	6.689.102	6.942.150	7.300.702
7	Populasi binatang ternak						
	Kuda	ekor	111	105	113	106	106
	Sapi	ekor	9.458	9.356	9.507	9.802	10.102

No	Indikator	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
	Sapi Perah	ekor	3.261	2.824	3.425	3.632	3.739
	Kerbau	ekor	606	598	577	556	556
	Kambing	ekor	32.173	31.520	31.617	32.516	36.369
	Domba	ekor	33.029	30.365	30.582	31.369	37.961
	Babi	ekor	0	-	-	-	-
	Ayam Buras	ekor	355.100	356.412	344.007	367.542	367.542
	Ayam Ras	ekor	127.930	125.630	72.272	165.300	131.505
	Itik	ekor	226.23	211.397	223.454	293.552	264.922
	Enthok	ekor	31.301	27.315	4.963	NA	NA

Sumber: SIPD Kabupaten Sidoarjo, 2018

Pada tahun 2017 produksi komoditas jagung, mengalami peningkatan sebanyak 39,18% atau sebesar 4.618 Kw, yaitu produksi jagung tahun 2016 sebesar 7.710 Kw menjadi 11.788 Kw di tahun 2017. Hal ini dikarenakan musim hujan yang lebih panjang di beberapa kecamatan sehingga petani lebih banyak yang melakukan penanaman jagung di lahan bukan sawah. Produksi padi, kacang hijau dan kedelai rata-rata lebih kecil dari tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan adanya anomali iklim yaitu *La Nina* (salah satu bentuk penyimpangan iklim di Samudera Pasifik ditandai dengan menurunnya suhu permukaan laut) yang akan mendorong berkembangnya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) yaitu Wereng Batang Cokelat (WBC), tikus dan *Xantomonas Oryzae* yang dapat merusak tanaman, termasuk adanya kerusakan tanaman padi karena banjir.

Produksi tanaman tebu pada tahun 2017 mengalami perlambatan dibandingkan pada tahun 2016, dari 3.721.064 Kw menjadi 3.086.659 Kw. Produksi perkebunan tebu cenderung melambat selama lima tahun, dikarenakan beberapa faktor antara lain:

a. Berkurangnya area tanaman tebu karena fungsi lahan telah berubah menjadi perumahan, lokasi industri, dan perdagangan dan komoditas tanaman.
b. Kecilnya minat petani untuk menanam tebu karena harga gula tidak menjamin dan dinilai kurang memberikan keuntungan.
c. Bibit yang sudah waktunya harus diganti, namun tidak segera diganti.

Produksi daging pada tahun 2017 mengalami peningkatan 3,89% menjadi sebesar 21.019.421 Kg. Beberapa penyebab terjadinya peningkatan tersebut adalah:

a. Kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi daging ternak terutama daging sapi dan unggas semakin tinggi sehingga permintaan dan pemotongan ternak juga naik.
b. Harga daging yang terus naik (mahal) sehingga banyak peternak yang mengambil tindakan menjual hewan ternak untuk diambil dagingnya
c. Adanya program pemerintah pusat yaitu swasembada daging sapi dan kerbau yang membatasi impor daging. Untuk memenuhi kebutuhan pasokan daging maka banyak peternak yang memotong ternaknya.

Produksi susu pada tahun 2017 mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun 2016, yaitu meningkat sebanyak 358.552 liter atau sebesar 4,91%. Meskipun meningkat tetapi nilai peningkatannya masih cukup kecil. Rendahnya peningkatan produksi

susu dikarenakan adanya kenaikan biaya operasional (harga pakan ternak dan biaya tenaga kerja) sehingga petani mengurangi pakan ternaknya yang berakibat produk susu juga rendah.

Secara umum populasi ternak tahun 2013 sebanyak 819.218 ekor meningkat dibanding tahun 2012 yang mencapai 806.646 ekor ternak. Peningkatan populasi ternak karena adanya penggunaan insemenasi buatan (IB) yang tepat pada induk betina, sehingga dapat menghasilkan anakan yang berkualitas tahan penyakit dan lebih cepat pembesarannya. Namun demikian populasi ternak 2013 tidak mencapai target populasi ternak sebanyak 866.667 disebabkan karena naiknya harga pakan dan harga daging sehingga petani cenderung menjual ternaknya untuk dipotong. Hal serupa juga terjadi pada tahun 2014, sebagian besar hewan ternak dipotong sehingga mengalami perlambatan populasi pada beberapa jenis hewan, seperti sapi, sapi perah, kerbau, kambing, domba, ayam ras, dan itik. Hewan ternak yang tidak mengalami perlambatan jumlah populasi bahkan mengalami peningkatan pada tahun 2014 adalah kuda dan ayam buras.

Urusan Perdagangan

Pada tahun 2015 Indonesia memasuki periode baru untuk urusan perdagangan. MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) merupakan salah satu kerjasama antar negara-negara ASEAN yang membuka lebar pintu perdagangan antar negara. Untuk meningkatkan kinerja perdagangan maka ditunjukkan pada indikator di bawah ini :

Tabel 2. 3010
Indikator Kinerja Urusan Perdagangan

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017
1	Volume perdagangan	Juta (Rp.)	17.142.349	18.218.829	19.059.365
2	Pasar ber SNI	Pasar	NA	16	17
3	Nilai eksport menurut komoditi	Juta (Rp.)	NA	10.687,88	11.195,76
4	Nilai eksport menurut negara tujuan	Juta (Rp.)	NA	10.731.118,19	11.812.386.41

Sumber: SIPD Kabupaten Sidoarjo, 2018

Secara umum sektor perdagangan Kabupaten Sidoarjo selalu mengalami peningkatan setiap tahun. Realisasi volume perdagangan pada tahun 2016 sebesar Rp. 28.218.829.000.000 meningkat sebesar 5,91% atau Rp. 1.076.480.000.000 dibandingkan

dengan tahun 2015 sebesar Rp. 17.142.349.000.000. Pada tahun 2017 volume perdagangan meningkat sebesar 4,41% atau Rp. 840.536.000.000 dari Rp. 19.059.365.000.000 menjadi Rp. 18.218.829.000.000 dibandingkan tahun 2016. Pasar ber SNI mengalami peningkatan pada tahun 2017 yaitu sebesar 5,88% atau 1 pasar dari 16 pasar yang ber SNI menjadi 17 pasar ber SNI dibandingkan tahun 2016.

Nilai ekspor menurut komoditi pada tahun 2017 sebesar Rp. 11.195.760.000 mengalami peningkatan sebesar 4,53% atau Rp. 507.880.000 dibandingkan dengan nilai ekspor menurut komoditi tahun 2016 sebesar Rp. 10.687.880.000. Sedangkan, nilai ekspor menurut negara tujuan dari tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 9,15% atau Rp. 1.081.268.220.000 dengan nilai ekspor menurut negara tujuan pada tahun 2016 sebesar Rp. 10.731.118.190.000 dan nilai ekspor negara tujuan pada tahun 2017 sebesar Rp. 11.812.386.410.000.

Urusan Perindustrian

Sebagai sektor utama penggerak perekonomian Kabupaten Sidoarjo, sektor industri merupakan sektor acuan dalam mendesain kerangka kebijakan pembangunan. Perkembangan kinerja sektor industri Kabupaten Sidoarjo ditunjukan oleh indikator berikut ini :

Tabel 2. 31
Indikator Kinerja Urusan Industri

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Industri	Industri	16.697	16.770	16.891	16.966
2	Jumlah Industri yang terstandarisasi	Industri	75	2	107	71

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2018

Jumlah industri yang ada tahun 2016 sebanyak 16.770 unit usaha. Jumlah ini meningkat 73 unit atau 0,44% dibandingkan dengan jumlah industri pada tahun 2015 yang sebanyak 16.697 unit. Pada tahun 2017 jumlah industri mengalami kenaikan sebesar 121 unit usaha atau 0,72%. Hal ini dapat dilihat dari jumlah industri pada tahun 2016 dan 2017

masing-masing sebesar 16.770 unit usaha dan 16.891 unit usaha. Sedangkan jumlah industri yang terstandarisasi pada tahun 2016 sebesar 2 unit usaha mengalami perlambatan yang drastis sebesar 97,33% atau sebesar 73 unit usaha apabila dibandingkan dengan jumlah industri yang terstandarisasi pada tahun 2015 sebesar 75 unit usaha. Namun, pada tahun 2017 jumlah industri yang terstandarisasi mengalami kenaikan sebesar 98,02 atau sebesar 99 unit usaha dibandingkan dengan tahun 2016. Hal ini dapat dilihat dari jumlah industri yang terstandarisasi pada tahun 2016 dan 2017 masing-masing 2 unit usaha dan 107 unit usaha. Sedangkan pada tahun 2018, jumlah industri sebanyak 16.966 unit dengan total 71 jumlah industri yang telah terstandardisasi.

Urusan Transmigrasi

Padatnya penduduk di Pulau Jawa mendorong pemerintah untuk melaksanakan transmigrasi ke luar Pulau Jawa. Untuk mendukung program tersebut, pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga melaksanakan program transmigrasi guna mengurangi kepadatan penduduk. Hasil pelaksanaan program tersebut dapat ditunjukkan pada meningkatnya pelayanan ketransmigrasian, dengan indikator kinerja jumlah transmigran yang diberangkatkan.

Tabel 2. 3211
Indikator Urusan Ketransmigrasian

No	Indikator	Satuan	2017
1	Jumlah transmigran	KK	3

Sumber: SIPD Kabupaten Sidoarjo, 2018

Jumlah transmigran yang berhasil diberangkatkan pada tahun 2017 sebanyak 3 KK (Kepala Keluarga) dengan tujuan pemberangkatan ke Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara. Namun, terdapat 15 KK dari transmigran yang diberangkatkan pada tahun-tahun sebelumnya yang memperoleh tingkat kesejahteraan yang lebih baik dari sebelumnya. Diharapkan dengan upaya transmigrasi ini dapat mendorong dan memperlancar proses pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

D. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Fungsi penunjang urusan pemerintahan, memiliki beberapa indikator yang diuraikan dalam Tabel 2.24.

Tabel 2. 33
Indikator Penunjang Urusan Pemerintahan

No	INDIKATOR		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Realisasi Komponen pendapatan daerah	Pendapatan Asli Daerah	810.800.099.696	1.003.045.392.951	1.180.576.448.721	1.203.779.439.005	4.029.066.902.057,03	
		Dana Perimbangan	858.443.670.217	1.115.332.938.500	1.266.786.627.409	1.335.283.958.792	4.045.363.972.962,00	
		Lain-Lain Pendapatan yang Sah					100,40	
2	Pendapatan daerah	a. target	2.644.581.299.007	3.128.535.332.717	3.561.941.283.569	3.389.966.737.239	4.029.066.902.057,03	
		b. realisasi	2.695.270.157.664	3.273.379.955.995	3.556.219.038.762	3.668.041.957.746	4.045.363.972.962,00	
3	Opini BPK atas laporan keuangan		Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
4	Status kinerja LPPD		3.1415	3.2526	3.4187	3.4783	3,5926	
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		baik	77,75 (baik)	78,09 (Baik)	78,91 (Baik)	79,69 (Baik)	84,84 (Baik)
6	Jumlah produk hukum yang ditetapkan	a. Perda	14 perda	10 Perda	11 Perda	16 Perda	10 perda	9 Perda
		b. Peraturan Bupati	62 perbup	62 Perbup	64 Perbup	102 Perbup	104 Perbup	116 Perbup
		c. Keputusan Bupati	1.392 keputusan	1.545 Keputusan	1.268 Keputusan	1.443 Keputusan	721 Keputusan	855 Keputusan

Sumber: SIPD Kabupaten Sidoarjo 2018

Perencanaan pembangunan mempunyai peran vital dalam proses pembangunan suatu daerah. Bagi Kabupaten Sidoarjo, upaya dan proses pembangunan untuk memperbaiki kesejahteraan rakyatnya pasti menghadapi berbagai permasalahan dan kendala yang kompleks. Pentingnya peranan perencanaan pembangunan dan lembaga perencana menjadi bagian yang tidak terhindarkan, sebagai suatu kebutuhan untuk menyusun rancangan kebijakan, program, dan kegiatan yang akan secara konsisten menuju pada cita-cita yang disepakati. Fungsi perencanaan diperlukan untuk menjelaskan dan memberikan mekanisme pengambilan keputusan yang rasional dan bertanggungjawab atas berbagai pilihan-pilihan terutama yang bersifat *trade-off* dari kebijakan dan strategi pembangunan yang tidak selalu mudah dan menyenangkan.

Hasil pelaksanaan program dalam urusan perencanaan pembangunan tahun 2017 ditunjukkan dengan capaian indikator kinerja sebagai berikut:

1. Hasil evaluasi SAKIP Kabupaten Sidoarjo

   Untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan akuntabilitas kinerja menuju pemerintahan yang berorientasi hasil, adalah dengan dilakukan suatu evaluasi terhadap implementasi SAKIP. Hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Kabupaten Sidoarjo yang dilakukan oleh Kementrian PAN dan RB tahun 2017 memperoleh kategori BB (Sangat Baik). hasil tersebut telah melampau dari target yang ditetapkan pada RPJMD yakni kategori B. Berikut merupakan evaluasi SAKIP Kabupaten Sidoarjo dari tahun 2012 sampai dengan 2018.Untuk nilai SAKIP Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 memperoleh nilai 80,04 dengan katagori A.

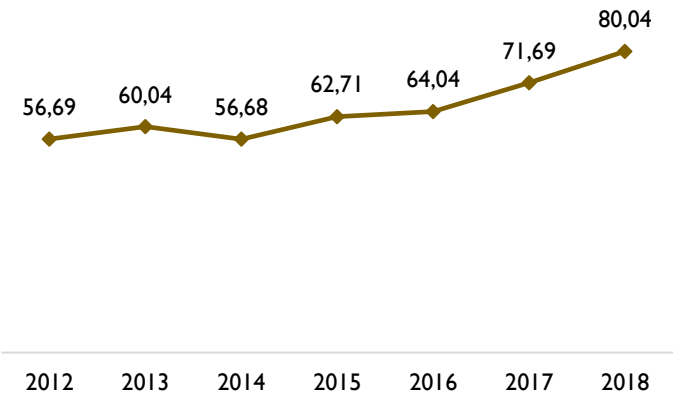

Sumber: Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Sidoarjo, 2018

Grafik 2. 44
Kenaikan nilai SAKIP dari Tahun 2012-2018

Berdasarkan Grafik 2.44 terlihat bahwa

a. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah mampu mendorong penguatan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja di hampir seluruh Perangkat Daerah sehingga mampu mewujudkan upaya perbaikan manajemen Pemerintah Daerah yang lebih baik;
b. Perbaikan dilakukan dengan revisi terhadap indikator kinerja utama dan diturunkan ke dalam Perjanjian Kinerja sampai ke level OPD, kondisi ini setidaknya telah menumbuhkan budaya kinerja pada sebagian besar Aparatur Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;

2. Pemanfaatan Dokumen perencanaan dan Penelitian

Pada tahun 2017 telah disusun 72 dokumen perencanaan dan penelitian sebagai masukan dalam penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan. Dari 72 (tujuh puluh dua) dokumen perencanaan dan penelitian yang utama sebanyak 36 (tiga puluh enam) dokumen yang utama, dengan rincian sebagai berikut.

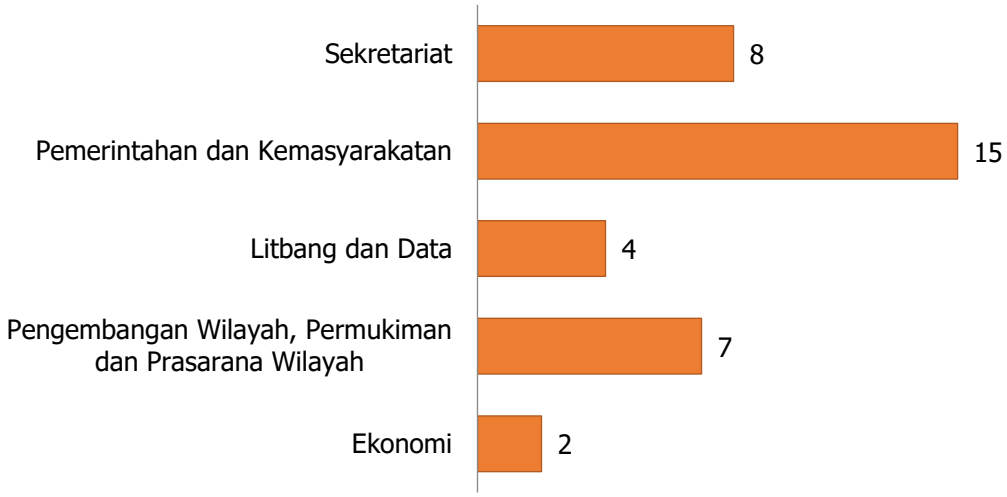

Sumber: SIPD Kabupaten Sidoarjo 2018

Grafik 2. 45
Jumlah Dokumen Masing-Masing Bidang

Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa setengah dari keseluruhan dokumen atau sejumlah 36 dokumen yang telah disusun oleh BAPPEDA Kabupaten Sidoarjo dapat dimanfaatkan secara optimal dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tahapan waktunya. Jumlah dokumen terbanyak adalah di bidang pemerintahan dan kemasyarakatan. Sedangkan jumlah dokumen paling sedikit adalah di bidang ekonomi.

Selanjutnya adalah urusan keuangan, BPK melakukan pemeriksaan yang bertujuan untuk menilai efektivitas pengawasan oleh aparat pengawas fungsional maka jumlah rekomendasi hasil audit dapat mewakili kinerja pengawasan yang dilakukan. Adapun hasil pemeriksaan oleh BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan) adalah sebagai berikut.

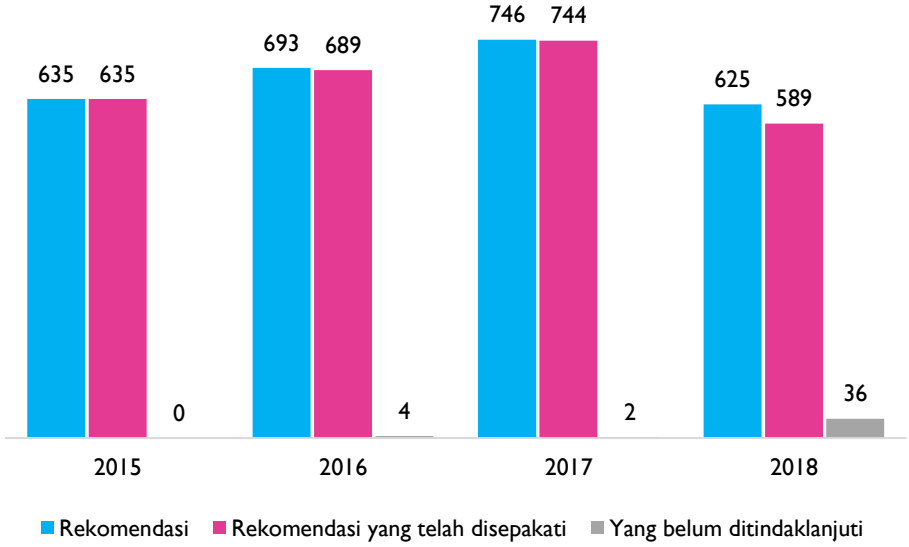

*Sumber: Inspektorat, *) Data Semester 1 Tahun 2018*

Grafik 2. 46
Jumlah Rekomendasi BPK

Berdasarkan grafik yang telah terbentuk, rekomendasi BPK dari tahun 2017 dapat ditindaklanjuti dengan baik. Terdapat 2 temuan yang belum tuntas yakni Pengelolaan Persediaan pada Enam SKPD Belum Tertib dan Pembangunan Aset Tetap Jalan Frontage Road Waru – Buduran Tidak Sesuai Ketentuan. Sedangkan pada tahun 2018 ada sejumlah rekomendas9 yang belum ditindaklanjuti (data semester I). Sebagai bentuk upaya perbaikan Tata kelola Keuangan Daerah Inspektorat Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya telah melakukan tindak lanjut pengawasan/pemeriksaan. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Auditor Inspektorat Kabupaten Sidoarjo.

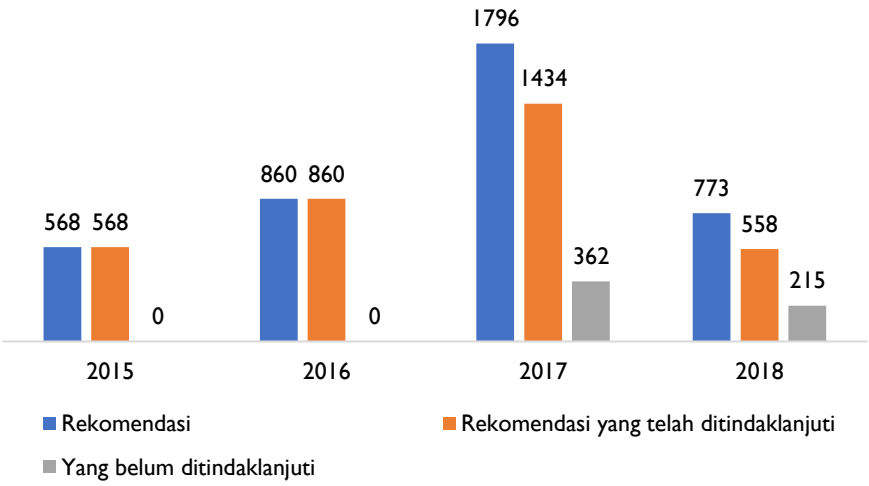

Sumber: SIPD Kabupaten Sidoarjo 2018

Grafik 2. 47
Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Inspektorat

Dari Grafik di atas dapat disimpulkan bahwa rekomendasi hasil pemeriksaan auditor inspektorat Kabupaten Sidoarjo sampai dengan tahun 2017 dapat ditindaklanjuti dengan baik. Hal ini berarti kinerja dokumen keuangan daerah sudah semakin baik.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo dari Tahun 2012 mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK. Namun di Tahun 2013 hingga Tahun 2016 Kabupaten Sidoarjo mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK artinya ada peningkatan performa keuangan daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo. Hasil pemeriksaan tersebut menggambarkan bahwa pengelolaan keuangan daerah sudah terlaksana secara baik. Opini BPK dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 dijelaskan oleh tabel berikut.

Tabel 2. 3412
Opini Atas Audit BPK

Tahun	Opini BPK
2014	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2015	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2016	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2017	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2018	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sidoarjo, 2019

Dari opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas hasil pemeriksaan

Laporan Keuangan mengambarkan bahwa pengelolaan keuangan daerah sudah terlaksana secara baik sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD yaitu opini WTP. Namun demikian Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah berkomitmen akan memperbaiki kinerja keuangan daerah sesuai dengan catatan yang telah dilakukan oleh BPK. Opini BPK tersebut telah dibuktikan dengan peningkatan realisasi komponen pendapatan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan komponen pendapatan yang dapat menggambarkan kemampuan daerah dalam membiayai operasional dan pembangunan daerahnya. Semakin besar PAD yang mampu dihimpun akan semakin menunjukkan kemandirian daerah dalam membiayai kebutuhannya. Terjadinya kenaikan pendapatan asli daerah di Kabupaten Sidoarjo dijelaskan oleh Grafik berikut.

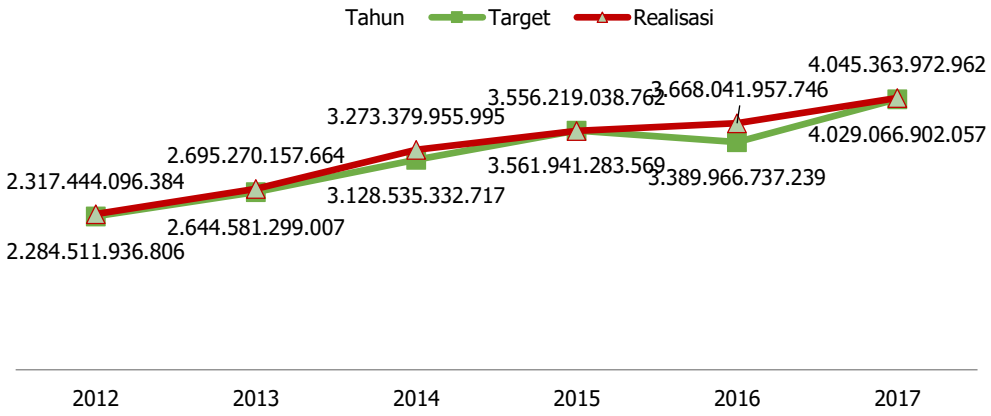

Sumber: SIPD Kabupaten Sidoarjo 2018

Grafik 2. 48
Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sidoarjo, 2012-2017

Berdasarkan Grafik di atas, terlihat bahwa realisasi pendapatan daerah yang ditandai dengan warna merah telah melebihi target pendapatan daerah yang ditandai dengan warna hijau. Seiring dengan bergantinya tahun tampak bahwa realisasi pendapatan daerah mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun – tahun sebelumnya.

Upaya untuk meningkatkan kontribusi pendapatan yang besar dari sektor PAD, antara lain:

1. Peningkatan kapasitas aparatur
2. Peningkatan kualitas pelayanan
3. Pemutakhiran data dan estimasi potensi pajak

Aset Daerah merupakan kekayaan terbesar yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Aset Daerah tersebut berupa tersebut berupa aset tetap, sehingga pengelolaan dan tata usaha aset tetap daerah harus dilakukan secara tertib dan bertanggung jawab dalam pengamanan maupun pemanfaatannya. Optimalisasi pengelolaan Aset Daerah dilakukan dengan aplikasi sistem yang dibangun secara terus menerus oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Badan Pengelola Keuangan (BPK). Optimalisasi tersebut diantaranya adalah sebagai berikut

1. Optimalisasi pengembangan aplikasi sistem tata kelola BMD.
2. Melakukan pendataan aset tetap tanah terhadap kecukupan bukti kepemilikan dan penguasaan tanah.
3. Melakukan pendataan aset tetap gedung dan bangunan terhadap luasan maupun kewajaran nilainya.
4. Melakukan pendataan aset tetap konstruksi jalan dan terhadap ketepatan penentuan ruas jalan dan ketepatan jaringan pada daerah irigasinya maupun kewajaran lainnya.
5. Mendorong para Pengurus Barang OPD besar untuk lebih aktif melakukan penatausahaan Barang Milik Daerah.

Selanjutnya urusan kepegawaian, Penataan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat dari indeks profesionalitas ASN. Dalam RPJMN 2015-2019 disebutkan bahwa pembangunan aparatur negara diarahkan pada peningkatan profesionalitas aparatur negara. Dengan adanya aparat negara yang profesional maka diharapkan mampu memberikan pelayanan yang maksimal guna mendukung pembangunan nasional.

Indeks Profesionalitas ASN adalah indikator tingkat profesionalitas ASN yang merupakan fungsi dari kesesuaian antara kompetensi pejabat dan jabatan yang disyaratkan, ditambah dengan kinerja pejabat yang bersangkutan, ditambah kompensasi dan ditambahkan kedisiplinan dalam organisasi sebagai bentuk budaya kerja.

Target yang ditetapkan ditetapkan di tahun 2017 dalam RPJMD untuk indeks profesionalitas ASN adalah 76, sedangkan realisasi tahun 2017 adalah 86,57, sehingga capaiannya 113,91% dimana perhitungan dilakukan pada pejabat struktural, yang ditunjukkan dengan data sebagai berikut.

Tabel 2. 3413
Indeks Profesionalitas ASN

Nilai Rata-Rata dari Indeks Variabel Koefisiennya			
Gap Kompetensi	Kinerja	Gap Kompensasi	Gap Indisipliner
0,29	88,78	0,14	0
Nilai Variabel Koefisiennya dalam Skala 1-100			
Kompetensi	Kinerja	Kompetensi	Indisipliner
71	89	86	100

Sumber: SIPD Kabupaten Sidoarjo 2018

Hal ini menunjukkan bahwa bahwa profesionalitas aparatur Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sudah baik dan diatas target RPJMN di tahun 2019 sebesar 78,3 maupun target RPJMD Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2017 yaitu sebesar 76. Adapun dari masing-masing variabel Indeks Profesionalitas dapat disampaikan sebagai berikut.

a. Variabel Kompetensi didapatkan Gap Kompetensi sebesar 0,29, adalah nilai yang terbesar dari variabel koefisien yang lain, hal ini menunjukkan bahwa persentase ASN Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang masuk dalam daftar penilaian ini (pejabat *structural*) telah sesuai dengan kompetensinya sebesar 71%.
b. Variabel koefisien kinerja terlihat bahwa rata-rata kinerja adalah sebesar 88,78. Penilaian dilakukan pada pejabat struktural yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui aplikasi kinerja SKP *online* atas kinerja tahun 2017.
c. Variabel koefisien Gap Kompensasi sebesar 0,14 menunjukkan bahwa 86 % ASN Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang masuk dalam daftar penilaian ini telah menerima kompensasi sesuai beban kerjanya, dengan asumsi perhitungan ini mengacu pada regulasi BKN atas kelas jabatan dan Peraturan Bupati Sidoarjo tentang pemberian nilai Tunjangan.
d. Penilaian koefisien variabel indisipliner, menunjukkan data sampling ASN yang dinilai (jabatan struktural) tidak dalam kondisi indisipliner.

Fungsi legislasi yang dilakukan oleh DPRD dalam rangka mengemban amanah dari rakyat dapat ditunjukkan dari tabel berikut.

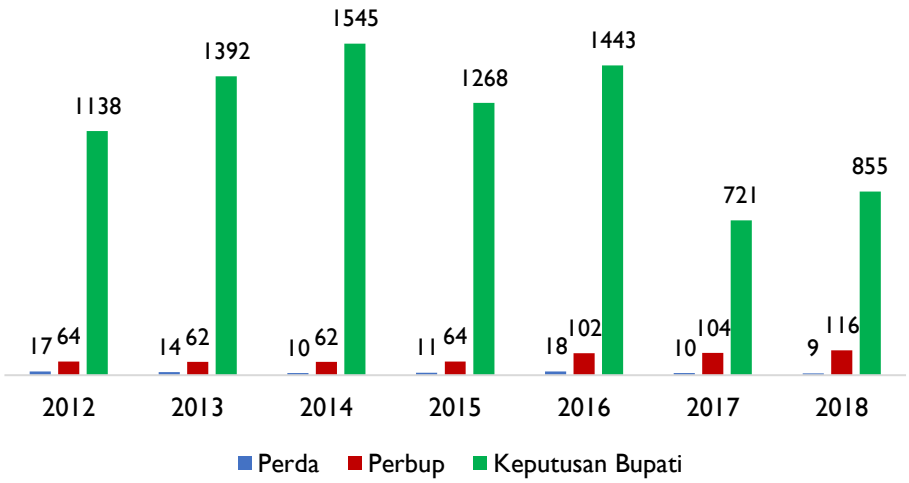

Sumber: Bagian Hukum Sekretariat Daerah, 2019

Grafik 2. 49
Produk Hukum yang Ditetapkan

Dari data tersebut menggambarkan bahwa aktivitas Peraturan Bupati semakin bertambah tahun maka semakin mengalami kenaikan seperti batang yang ditunjukkan oleh warna biru. Berbeda dengan peraturan daerah dan keputusan bupati yang setiap tahun fluktuatif. Namun demikian dengan terbentuknya dasar hukum, diharapkan dapat berdampak postif terhadap terakomodasinya aspirasi dari masyarakat dalam rangka menunjang proses pembangunan di Kabupaten Sidoarjo.

Guna meningkatkan kualitas kinerja pemerintah Kabupaten Sidoarjo maka dibentuklah Standar Operasional Prosedur yang telah disusun oleh masing-masing OPD. Berdasarkan hasil evaluasi dapat disimpulkan bahwa dari 47 OPD yang ada di Kabupaten Sidoarjo, sebanyak 47 OPD telah memiliki SOP (*Standart Operasional Procedure*) atau sekitar 100,00%.

Keseluruhan jumlah SOP yang disusun sebanyak 3.809 judul SOP dengan 3.809 SOP telah dimanfaatkan. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah penetapan tertulis mengenai aktivitas-aktivitas baku yang harus dilakukan dalam proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan melakukannya, dimana dan oleh siapa aktivitas dilakukan. Diperlukan adanya SOP oleh setiap unit pelayanan sebagai jaminan dan kepastian penyelenggaraan pelayanan. Tersusunnya SOP pada setiap unit pelayanan agar penyelenggaraan pelayanan publik dapat berjalan lebih baik.

Data Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Tahun 2017, sebagai berikut.

Tabel 2. 3514
Jumlah SOP yang Disusun

No	SKPD Pelaksana	Jumlah SOP
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	14
2	Dinas Kesehatan	14
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	24
4	Dinas Perhubungan	11
5	Inspektorat	3
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	46
7	Badan Kepegawaian Daerah	52
8	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	6
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4
10	Satuan Polisi Pamong Praja	14
11	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	20
12	Rumah Sakit Umum Daerah	16
13	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	3
14	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	53
15	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	57
16	Dinas Perikanan	14
17	Dinas Pangan dan Pertanian	17
18	Dinas Pemuda Olah Raga, dan Pariwisata	14
19	Dinas Perumahan dan Permukiman	30
20	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	52
21	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	10
22	Badan Pelayanan Pajak Daerah	3
23	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	37
24	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	5
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Keluarga Berencana	25
26	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	18
27	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	5
28	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo	8
29	Bagian Perekonomian Dan SDA Sekretariat Daerah	4
30	Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah	10
31	Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah	32
32	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	17
33	Bagian Umum Sekretariat Daerah	15
34	Bagian Protokol Dan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	12
35	Dinas Tenaga Kerja	7
36	Dinas Sosial	15

No	SKPD Pelaksana	Jumlah SOP
37	Kecamatan (18 Kecamatan)	174
38	Kelurahan (31 Kelurahan)	307
39	Puskesmas (26 Puskesmas)	2.303
40	UPTD (19 UPTD)	338
Jumlah		3809

Sumber: SIPD Kabupaten Sidoarjo 2018

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Poros perekonomian lainnya adalah daya saing. Adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tahun 2015 menuntut Indonesia untuk meningkatkan daya saing dalam segala bidang. Semakin terbukanya wilayah ASEAN membutuhkan upaya yang lebih dari pemerintah Indonesia untuk bersaing dengan negara-negara regional. Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan propinsi lainnya yang berdekatan, domestik atau internasional. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan indikator sebagai alat evaluasi atas program-program yang telah dilaksanakan yaitu :

A. Kualitas Tenaga Kerja (Rasio lulusan S1/S2/S3)

Semakin tinggi pendidikan penduduk akan semakin besar perannya dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu penduduk yang berkualitas berperan penting dalam pembangunan ekonomi suatu daerah. Kualitas penduduk yang baik, setidaknya diukur dengan banyaknya lulusan sarjana dalam suatu daerah. Banyaknya penduduk yang lulus pendidikan sarjana baik S1, S2 maupun S3 di Kabupaten Sidoarjo relatif tidak banyak dibanding dengan jenjang pendidikan lainnya. Pada tahun 2018, rasio lulusan S1/S2/S3 terhadap jumlah penduduk mencapai 8,04%. Sampai dengan tahun 2018 besarnya rasio ini secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 3615
Rasio Lulusan S1/S2/S3 Dengan Jumlah Penduduk di Kabupaten Sidoarjo

URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Penduduk yang lulus S1/S2/S3	161.829	155.829	NA	NA	164.872	179.999
Jumlah Penduduk	2.090.619	2.127.043	2.161.659	2.207.589	2.214.075	2.238.069
Persentase Lulusan S1/S2/S3 dengan Jumlah Penduduk	7,7%	7,33%	NA	NA	7,45%	8,04%

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2019

B. Rasio Ketergantungan

Tingkat Ketergantungan di Kabupaten Sidoarjo relatif cukup tinggi. Perbandingan antara jumlah penduduk usia non produktif dengan penduduk usia produktif rata-rata di atas 50%. Pada tahun 2013 rasio ketergantungan sebesar 39,01%, artinya dalam 100 penduduk, terdapat 39 penduduk usia non produktif yang bergantung pada penduduk usia produktif. Rasio ketergantungan pada tahun 2014 dan 2015 mengalami perlambatan sehingga masing-masing menjadi 36,45% dan 38,60%. Pada tahun 2018, rasio ketergantungan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi 37,67% . Angka ini menunjukkan jumlah penduduk usia non produktif terhadap total penduduk Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2018.

Tabel 2. 37
Rasio Ketergantungan di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013-2018

URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah penduduk Usia< 15 Tahun	478.060	469.064	473.632	458.905	458.552	454.299
Jumlah Penduduk Usia > 64 Tahun	108.557	9.942	128.458	145.558	145.558	158.109
Jumlah Penduduk Usia Non Produktif	586.617	568.306	602.090	604.463	604.110	612.408
Jumlah Penduduk usia produktif (15-64 tahun)	1.503.726	1.559.042	1.559.569	1.603.126	1.426.768	1.625.661
Rasio Ketergantungan	39,01%	36,45%	38,60%	37,70%	42,34%	37,67%

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2019

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Evaluasi adalah perbandingan antara dampak nyata dari suatu proyek dengan perencanaan strategis yang disepakati. Secara konseptual, evaluasi adalah melihat apa yang dilakukan, apa yang telah dicapai, dan bagaimana cara mencapainya. Evaluasi juga bisa bersifat sumatif, yaitu mengambil pembelajaran dari sebuah proyek yang telah selesai atau dari sebuah organisasi yang sudah tidak berfungsi lagi. Evaluasi bisa bersifat formatif, yaitu dilakukan ditengah berlangsungnya suatu proyek atau organisasi, agar selalu terjadi perbaikan.

Dalam urusan pendidikan, indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja adalah indikator APM, APK, APS, Rata-rata nilai UAN dan UAS, Persentase kelulusan, dan

Rasio ideal prasarana dan sarana pendidikan terhadap jumlah murid. Hasil kinerja pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam urusan pendidikan dirasa cukup baik yang diukur dari adanya peningkatan pada setiap indikator-indikator dan telah dicapainya target pembangunan urusan pendidikan.

Untuk meningkatkan kualitas melalui kesehatan, pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah bekerja secara maksimal. Indikator kinerja urusan kesehatan menunjukan tren yang meningkat baik dari sisi kesehatan masyarakat maupun dari sarana dan prasaranan kesehatan. Indikator kesehatan ditunjukan dengan semakin melambatnya angka kematian bayi, angka kematian balita, angka kematian ibu, serta tren angka morbilitas yang cenderung naik pada tahun 2016. Indikator sarana dan prasaran kesehatan ditunjukan dengan semakin banyaknya masyarakat yang memanfaatkan pukesmas dan RSUD.

Pembangunan daerah juga harus didukung dengan kualitas lingkungan yang baik. Dalam melaksanakan kinerja pada urusan lingkungan, pemerintah Kabupaten Sidoarjo berupaya keras untuk mencapai target pembangunan. Indikator kinerja urusan lingkungan hidup sebagian menunjukan hasil yang cukup baik terutama pada pengelolaan sampah. Terdapat peningkatan yang signifikan pada pengelolaan sampah yaitu pada jumlah sampah yang diangkut ke TPA dan persentase jumlah sampah yang terangkut. Dengan demikian pada tahun 2016, pemerintah Kabupaten Sidoarjo terfokus pada sampah untuk urusan lingkungan hidup.

Urusan Pekerjaan umum merupakan kunci utama dalam pembangunan daerah karena berkaitan langsung dengan infrastruktur daerah. Pada tahun 2016, pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah menunjukan kinerja dengan meningkatnya jumlah jalan yang baik, jembatan, dan daerah genangan banjir. Kondisi dilapangan ternyata jumlah jalan yang rusak juga mengalami peningkatan.

Proses penetapan kebijakan dalam rangka mendorong peningkatan pembangunan daerah tidak terlepas dari urusan prerencanaan pembangunan. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah melaksanakan program perencanaan pembangunan dengan baik yang diukur dari banyaknya dokumen perencanaan yang dihasilkan dan juga pemanfaatan dokumen tersebut dalam pembangunan. Selain urusan perencanaan, pengembangan perumahan juga merupakan hal penting bagi pemerintah daerah.Hal ini dapat dilihat dari

semakin berkembangnya investasi di bidang properti.

Dalam rangka mendukung kualitas kepemudaan dan olahraga, pemerintah melaksanakan urusan kepemudaan dan olahraga. Pada tahun 2016, terdapat perlambatan pada jumlah pemuda berprestasi tingkat nasional, disisi lain terdapat peningkatan pada cabang olahraga berprestasi pada tingkat provinsi dan nasional.Bimbingan teknis dan pelatihan untuk para pemuda terus diupayakan.

Secara umum, pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah melaksanakan peningkatan kualitas pelayanan perijinan dan penanaman modal. Hasil kinerja menunjukan adanya peningkatan investasi.Modal dan volume usaha, dan urusan koperasi mengalami peningkatan.Untuk sektor perijinan telah membangun gudung MPP (Mall Pelayanan Publik) yang melayani semua perijinan sebanyak kurang lebih 168 perijinan.

Administrasi kependudukan merupakan salah satu indikator kualitas pelayanan pemerintah pada masyarakat. Pertambahan jumlah penduduk menuntut adanya perbaikan pelayanan kependudukan seperti KTP, KK, dan akta kelahiran. Secara umum kinerja pemerintah dalam mengurusi masalah kependudukan mengalami peningkatan.

Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, prestasi ekonomi juga harus diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja sehingga dapat menurunkan tingkat pengangguran. Teradapat peningkatan jumlah pengangguran di Kabupaten Sidoarjo baik dilihat secara jumlah maupun persentase jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Disisi lain, jaminan kesehatan dan keselamatan kerja bagi tenaga kerja meningkat yang diimbangi dengan perlambatan angka kecelakaan kerja.

Ketahanan pangan merupakan aspek penting dalam menentukan kualitas pembangunan daerah. Bertambahnya jumlah penduduk menuntut pemerintah untuk dapat tetap menjaga tingkat ketahanana pangan masyarakat. Secara umum upaya pemerintah daerah cukup baik dalam meningkatkan ketersediaan pangan dan juga meningkatkan pola pangan harapan. Selanjutnya untuk urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam urusan pemberdayaan dan pembangunan gender mengalami peningkatan pelayanan.Selajutnya masih terdapat peningkatan jumlah tindak kekerasan pada perempuan dan anak. Efek jera yang diberikan pemerintah belum optimal dalam mengurangi tindak kekerasan.

Dalam rangka mendukung program pemerintah dalam mengendalikan pertumbuhan jumlah penduduk, pemerintah daerah berupaya melalui urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera. Program keluarga berencana secara umum menunjukkan kinerja yang baik. Terjadi perlambatan trayek fasilitas angkutan pedesaan dan jumlah penumpang, adanya stagnasi jumlah fasilitas dan sarana transportasi, serta meningkatnya jumlah korban kecelakaan lalu lintas.Hal tersebut dipengaruhi oleh maraknya transportasi online yang sangat berkembang pesat.Untuk selanjutnya pada tahap awal Pemkab mengupayakan pengadaan transportasi massal untuk anak – anak sekolah yaitu SOS (Save Our Student).

Seiring berkembanganya zaman dan adanya globalisasi, komunikasi dan informasi merupakan hal penting dalam pembangunan daerah. Teknologi canggih akan semakin mempermudah masyarakat dalam berkomunikasi dan mengakses informasi. Oleh sebab itu komunikasi dan informasi sangat berguna dalam pembangunan daerah. Saat ini, urusan pemerintah dalam menyediakan komunikasi dan informasi diniliai cukup baik. Untuk saat ini sidoarjo mengembangkan sistem informasi yang di koordinasikan dengan kominfo yang bertujuan untuk menciptakan Kota yang inovatif dan kreatif (Smart City).Upaya Pemkab sidoarjo mendukung smart city antara lain mengembangkan jaringan FO (Fiber Optic) sampek saat ini kurang lebih 140 meter.Kinerja pemerintah dalam melayani masyarakat juga ditunjukan dalam urusan pertanahan yang mencakup ijin serta pengadaan tanah. Selama ini pemerintah daerah cukup baik dalam merespon ijin dan juga merespon kebutuhan perijinan dan pengadaan tanah.

Keamanan dan kenyaman masyarakat dapat tercipta melalui urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri. Kinerja pemerintah dalam urusan tersebut mampu mendorong masyakat Kabupaten Sidoarjo merasakan keamanan dan kenyamanan serta situasi politik yang kondusif. Selain itu pelayanan pemerintah dalam urusan pemberdayaan masyarakat dan desa juga menunjukan tren yang positif. Dengan kata lain, pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah mampu melakukan pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai dengan target capaian. Di sisi lain, juga didukung oleh kinerja pemerintah dalam urusan sosial yang menunjukan tren peningkatan kualitas pelayanan, sehingga target pembangunan bisa tercapai.Khususnya dalam penanggulangan kemiskinan yang trennya menunjukan angka penurunan.Dengan adanya SLRT (Sistem Layanan Rujukkan Terpadau)

diharapkan angka kemiskinan terus menurun di kota sidaorjo.

Upaya pemerintah dalam melindungi kearifan lokal melalui budaya menunjukkan adanyan pengegembangan budaya terbukti dengan adanya sidoarjo carnival,sidoarjo travel fair. Kinerja pemerintah dalam urusan arsip dan perpustakaan menunjukkan tren yang meningkat. Indikator kinerja urusan kearsipan dan perpusatakaan menunjukan peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Dalam mendukung urusan perikanan Kabupaten Sidoarjo menunjukan tren yang positif. Peningkatan produksi perikanan baik perikanan laut, perikanan umum, dan kolam menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah dalam mendorong masyarakat di bidang kelautan dan perikanan menunjukkan keberhasilan. Selain itu, hal serupa juga terlihat dalam urusan pertanian, peningkatan produksi pertanian menggambarkan bahwa pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah berupaya keras dalam pembangunan pedesaan melalui petani. Berbagai upaya dilakukan termasuk mekanisasi pertanian untuk mendukung produktifitas. Sementara untuk urusan pariwisata juga menunjukan tren peningkatan. Kinerja pemerintah dalam mendorong perkembangan sektor pariwisata ditunjukan dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan dan pengelola jasa pariwisata. Kedepan akan diupayakan sektor pariwisata lebih mengemukakan rata-rata lama tinggal di sidoarjo. Oleh karena itu pemerintah kabupaten memberi kemudahan berdirinya hotel-hotel maupun penginapan.

Dalam menggerakkan roda perekonomian Kabupaten Sidoarjo, pemerintah daerah juga berupaya untuk menghidupkan kembali sektor industri. Peningkatan kinerja pemerintah dalam mendorong sektor industri ditunjukan dengan adanya peningkatan jumlah industri yang memiliki izin, volume industri dan jumlah tenaga kerja yang terserap. Selain itu, roda perekonomian Kabupaten Sidoarjo juga didorong oleh peningkatan indikator kinerja urusan perdagangan. Pemerintah daerah membuat kebijakan perdagangan yang berdampak pada peningkatan volume perdagangan, pelaku usaha perdagangan serta jumlah tenaga kerja yang terserap.Termasuk diantaranya adalah pembinaan terhadap industri industri kecil diharapkan mampu menyerap banyak tenaga kerja.

Uruan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, belum dapat mengoptimalkan kebijakan dalam mendorong masyarakat untuk bertransmigrasi. Sehingga

minat untuk bertransmigrasi masih sangat rendah. Rincian Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 38
Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

(Data Terlampir)

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Berdasarkan permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan pada RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2016-2021, serta berbagai dinamika yang terjadi baik dalam internal maupun eksternal, maka permasalahan daerah dapat dikemukakan sebagai berikut :

a. Masih rendahnya kualitas dan pemerataan pendidikan

Tabel 2. 39
Indikator Urusan Pendidikan

NO	INDIKATOR		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Persentase Nilai Rata-rata UN							
		SD/ MI	8,7	8,75	8,7	8,2	8,32	8,39
		SMP/Mts	7,69	7,69	7,69	7,06	6,25	5,16
2	Rasio ideal prasarana dan sarana pendidikan terhadap jumlah murid							
	Rasio guru terhadap jumlah murid							
		SD/ MI	1:27	1:28	1:18	1:18	1:20	1:20
		SMP/Mts	1:18	1:19	1:15	1:15	1:20	1:20

Kualitas dan pemerataan pendidikan masih menjadi isu penting dalam permasalahan pembangunan, masih belum optimal. Hal tersebut dikarenakan oleh banyak faktor antara lain kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya tenaga pendidik maupun tenaga administrasi pendidikan. Beberapa lokasi masih terdapat kesulitan infrastruktur / jalan. Sebagai upaya untuk mencapai tujuan pembangunan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, maka pemkab Sidoarjo perlu meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat sesuai dengan sasaran 5 RPJMD.

b. Belum optimalnya layanan dan akses kesehatan bagi masyarakat miskin

Tabel 2. 40
Indikator Urusan Kesehatan

No	INDIKATOR		Satuan	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Angka Morbiditas								
	a	Angka Keberhasilan Pengobatan TB Paru	%	90,88	92,5	90,3	86,44	89,64	88,34
	b	Angka kesakitan DBD	%	10,75	8,12	28,3	79,42	23,63	12,30

No		INDIKATOR	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	c	Angka penemuan AFP (*Acute Flaccid Paralysis* = Lumpuh layu mendadak)	jiwa	1,79	1,98	1,74	2,31	4,78	3,81
	d	Balita dengan gizi buruk	%	0,02	0,02	0,8	0,7	1,10	0,82
	e	Prevalensi Gizi kurang	%	6,9	5,92	4,9	6,2	-	-
	f	Kecamatan Bebas rawan gizi	%	100	100	100	100		
2		Persentase penduduk yang memanfaatkan puskesmas							
	a	Persentase kunjungan rawat jalan	%	67,39	72,9	77,31	86,79	125,43	76,47
	b	Persentase kunjungan rawat inap	%	0,83	0,82	0,83	1,26	5,32	0,60

Dinas Kesehatan kabupaten Sidoarjo, 2018

Permasalahan dalam bidang kesehatan antara lain adalah kecilnya angka morbiditas, selain itu pelayanan kesehatan dasar belum mampu dijangkau dan diakses oleh masyarakat khususnya masyarakat miskin. Selain itu kurangnya tenaga medis (Dokter, Perawat, dll) menjadi salah satu faktor penyebab pelayanan kesehatan kurang maksimal. Sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan pembangunan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, maka pemkab Sidoarjo perlu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sesuai dengan sasaran 6 RPJMD.

c. Pencemaran lingkungan dan kerusakan sumber daya alam seiring dengan pesatnya sektor industri dan perdagangan

Tabel 2. 33
Indikator Urusan Lingkungan Hidup

No	Indikator Lingkungan Hidup	2013	2014	2015	2016	2017
1	Indeks Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan					
	Indeks Kualitas Air				49,54	49,77
	Indeks Kualitas Udara				84,04	82,05
	Indeks Kualitas Lahan/Vegetasi				22,97	23,11
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup				49,26	48,79
2	Jumlah sampah yang terangkut ke TPA					
	*Jumlah sampah yang terangkut (M3/hari)	802	924	1.266	1.502	2.021
	*Jumlah produksi sampah (M3/hari)	4.517	4.517	4.599	5.404	5.536
	*% jumlah sampah terangkut	17,76%	20,46%	28,03%	27,79%	36,50%
	*Jumlah lokasi pemilahan sampah	10 lokasi	25 lokasi	41 lokasi	87 lokasi	156 lokasi

Sumber: SIPD Kabupaten Sidoarjo 2018

Kabupaten Sidoarjo merupakan wilayah dengan sektor basis industri dan perdagangan, sehingga besar potensinya untuk mengalami peningkatan pencemaran lingkungan. Hal ini menjadi distorsi terhadap upaya pemerintah dalam menuju kota yang ramah lingkungan. Oleh karena itu, pembangunan

berkelanjutan dan berwawasan lingkungan menjadi sangat strategis untuk diupayakan pemerintah Kabupaten Sidaorjo. Sehingga tujuan pembangunan yakni meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastuktur serta kelestarian lingkungan hidup dapat tercapai dan sasaran 9 RPJMD yakni meningkatnya kelestarian lingkungan hidup dapat terwujud.

d. Masih terdapat kawasan kumuh khususnya diperkotaan

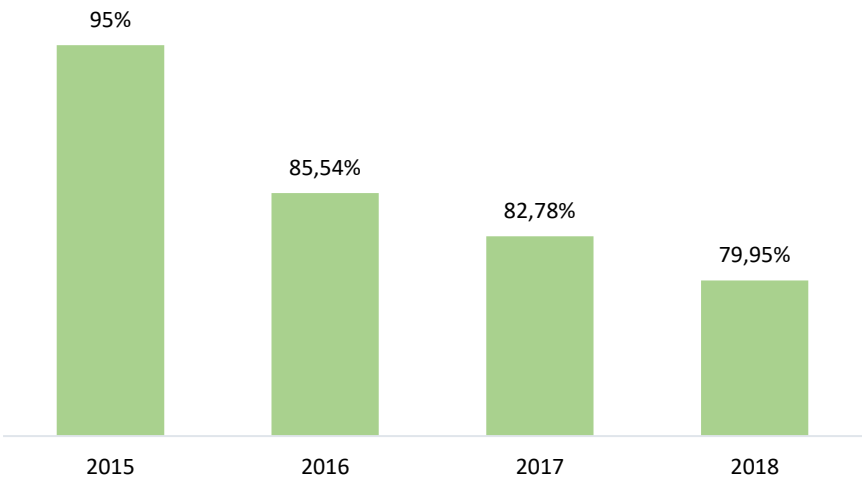

Sumber: SIPD Kabupaten Sidoarjo 2018

Grafik 2.50
Persentase Penurunan Luas Kawasan Kumuh

Permasalahan yang sering dihadapi perkotaan adalah terkait kawasan kumuh. Hal tersebut juga menjadi permasalahan bagi pemkab Sidoarjo dalam menangani masalah kawasan kumuh yang ada pada wilayah padat area terutama pada wilayah industri dan perdagangan. Sebagai upaya untuk mencapai tujuan pembangunan meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur serta kelestarian lingkungan hidup, maka pemkab Sidoarjo perlu meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastuktur daerah sesuai dengan sasaran 8 RPJMD.

e. Sarana dan prasarana kegiatan kepemudaan yang masih minim

Tabel 2. 42
Indikator Urusan Kepemudaan dan Olahraga

NO	INDIKATOR	Satuan	2017	2018
1	Jumlah prestasi pemuda yang diperoleh di Tingkat Regional, Nasional dan Internasional	prestasi	9	22
2	Jumlah pemuda yang berwirausaha (sebagai Wira Usaha Baru, WUB)	orang	12	12
3	Jumlah Prestasi Olahraga di tingkat	prestasi	384	452

NO	INDIKATOR	Satuan	2017	2018
	Regional, Nasional dan Internasional			
4	Tingkat Kepuasaan Pengunjung Fasilitas Olahraga	indeks	74,93	76,69

Sumber: Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata, 2018

Urusan kepemudaan dan olahraga di Sidoarjo, antara lain rendahnya minat masyarakat di bidang kepemudaan dan olahraga, sarana dan kesempatan bagi pemuda untuk menampilkan hasil karya dan kreatifitasnya masih minim, masih perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana olahraga dan kepemudaan, masih rendahnya kualitas artis dan belum adanya penghargaan dan perhatian bagi atlit yang berprestasi.

f. Degradasi kebudayaan lokal

Semakin sedikitnya masyarakat yang peduli dan menjaga budaya lokal yang ada di Kabupaten Sidoarjo.

g. Jumlah PMKS yang meningkat

Tabel 2. 35
Indikator Kinerja Kesejahteraan Sosial Masyarakat

No	Indikator	2015	2016
1	Jumlah PMKS	42.286	43.042

Sumber: SIPD Kabupaten Sidoarjo, 2018

Sidoarjo sebagai kota industri sehingga menarik perhatian PMKS untuk datang ke Sidoarjo baik mengadu nasib, maupun sekedar untuk transit.

h. Perkembangan produksi perikanan tambak cenderung melambat

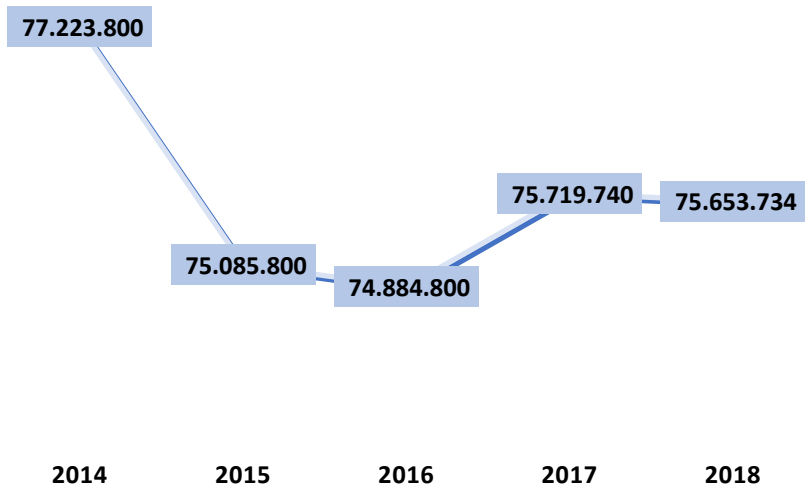

Sumber: SIPD Kabupaten Sidoarjo, 2018

Grafik 2.51
Perkembangan Produksi Perikanan Tambak

Masyarakat Sidoarjo perlu menggunakan teknologi yang lebih canggih dalam budidaya perikanan sehingga diharapkan dapat menggenjot produksi dan sekaligus menaikkan pendapatan para pembudidaya. Hal ini berkaitan dengan sasaran 3 RPJMD yaitu meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat untuk mencapai salah satu tujuan pembangunan Kabupaten Sidoarjo yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing.

i. Belum berkembangnya sektor industri kreatif dalam mendorong sektor pariwisata

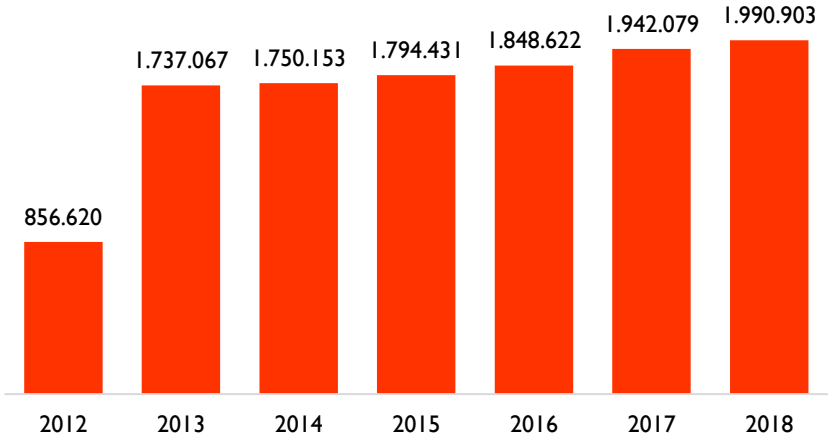

Sumber: Disporabudpar, 2018

Grafik 2.52
Jumlah Kunjungan Wisatawan

Tetapi jumlah ini masih sedikit jika dibandingkan dengan daerah lain. Untuk meningkatkan rata-rata lama tinggal wisatawan, perlu adanya integrasi dengan industri kreatif mengingat semakin tumbuhnya industri kreatif di Kabupaten Sidoarjo. Sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan pembangunan dalam pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing dan untuk mencapai sasaran 3 dan 4 RPJMD yaitu meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat dan meningkatnya pemerataan distribusi pendapatan masyarakat.

j. Produksi perkebunan tebu cenderung melambat selama lima tahun

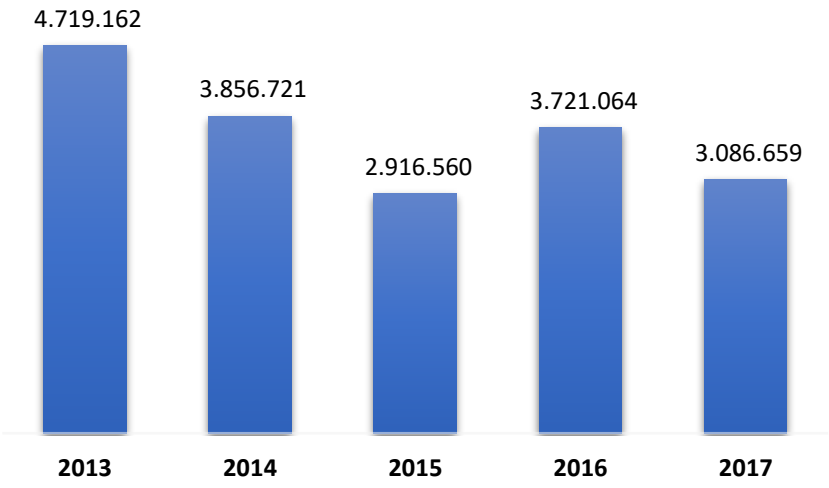

Sumber: SIPD Kabupaten Sidoarjo, 2018-

Grafik 2.53
Produksi Perkebunan Tebu

Permasalahan yang sering dihadapi perkotaan adalah berkurangnya lahan pertanian akibat berubahnya fungsi lahan menjadi perumahan, lokasi industri, dan perdagangan. Hal ini juga dialami oleh Kabupaten Sidoarjo sehingga mengakibatkan produksi perkebunan tebu menurun. Harga gula yang tidak stabil juga mempengaruhi permasalahan ini.

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan ketidaksesuaian antara hasil kinerja dengan target yang diharapkan. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang berpengaruh terhadap kerberhasilan dan kegagalan kinerja pembangunan daerah.

1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

   a. Urusan Pendidikan

      Permasalahan pada urusan pendidikan antara lain kualitas tenaga pendidik, sarana dan prasarana penidikan yang belum merata, serta hubungan antara pendidikan kejuruan dengan kebutuhan tenaga kerja di lapangan yang tidak seimbang.

   b. Urusan Kesehatan

      Urusan kesehatan memiliki permasalahan fasilitas sarana dan prasarana kesehatan yang masih perlu ditingkatkan, kesadaraan masyarakat untuk

berperilaku hidup sehat, serta pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.

c. Urusan Pekerjaan Umum

Permasalahan utama dalam urusan pekerjaan umum yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo adalah pembangunan jalan yang rusak. Bertambahnya jumlah jalan yang baik seharusnya dapat diimbangi dengan berkurangnya jumlah jalan yang rusak. Dengan demikian perlu adanya perencanaan dalam pemetaan kondisi jalan dan segera melakukan tindak lanjut untuk dapat mendorong pembangunan daerah melalui infrastruktur.

d. Urusan Perumahan Rakyat

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo masih perlu meningkatkan kinerja urusan perumahan dengan menambah pembangunan sarana air bersih, pembangunan jalan lingkungan serta meningkatkan kesadaran akan bahaya kebakaran bagi masyarakat.

e. Urusan Sosial

Permasalahan sosial di Kabupaten Sidoarjo diantaranya meningkat-nya jumlah PMKS di kabupaten Sidoarjo, belum optimalnya sarana dan prasarana penanganan PMKS, belum tersedianya data kemiskinan *by name by address* lintas perangkat daerah.

2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

a. Tenaga Kerja

Peningkatan tingkat pengangguran memberikan tugas tersendiri bagi pemerintah dalam menyelesaikan urusan ketenagakerjaan. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidoarjo harus dapat digiring untuk menciptakan lapangan kerja sehigga dapat menurunkan tingkat pengangguran.

b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Masih adanya tindak kekerasan pada anak dan perempuan memerlukan tindakan yang tegas dan perlindungan dari pemerintah daerah. Penegakan peraturan dan kebijakan perlindungan anak dan perempuan yang aktif diupayakan untuk meminimalisir tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan.

c. Pangan

Ketersediaan pangan daerah masih lebih banyak dipenuhi dari luar daerah dibanding dengan hasil produksi sendiri.Oleh karena itu perlu dilakukan upaya upaya untuk meningkatkan produktifitas.Untuk sektor perternakan perlu adanya upaya untuk pembudidayaan ternak seperti sapi.

d. Lingkungan Hidup

Permasalahan terkait lingkungan hidup di antaranya adalah terus meningkatnya jumlah sampah, masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam pelestarian lingkungan dan masih rendahya kawasan hijau atau ruang terbuka hijau di Kabupaten Sidoarjo.

e. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Terus bertambahnya jumlah penduduk akan berdampak pada tuntutan masyarakat akan kinerja pelayanan administrasi kependudukan. Masih adanya penduduk yang belum memiliki dokumen kependudukan menuntut pemerintah daerah untuk dapat bersosialisasi serta meningkatkan pelayanan dan inovasi administrasi kependudukan. Respon yang cepat terhadap penduduk pendatang juga perlu dilakukan untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan.

f. Perhubungan

Fasilitas perhubungan merupakan salah satu aspek penting bagi pembangunan perekonomian daerah. Akses jalan dan fasilitas sarana prasarana yang kurang memadai pada daerah pedesaan akan menghambat pembangunan daerah. Oleh karena itu perlu adanya penanganan khusus dari pemerintah kabupaten sidoarjo untuk menambah dan meningkatkan kualitas angkutan pedesaan. Selain itu, pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga perlu menyediakan infrastruktur yang memadai bagi peyandang cacat (kota insklusif).Disamping itu masalah kemacetan hal yang paling penting untuk di tangani.Angkutan massal dan pengaturan lalu lintas yang efektif di harapkan mampu

g. Komunikasi dan Informatika

Masih belum optimalnya pemanfaatan TIK (teknologi informasi dan komunikasi) dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Sidoarjo. Serta masih adanya kesenjangan

pemanfaatan teknologi informasi antara desa dengan kota.Integrasi antar aplikasi masing masing perangkat daerah sangat dibutuhkan untuk mendukung sidaorjo menuju kota smart city.

h. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Dalam mengembangkan perekonomian melalui UKM, pemerintah daerah harus dapat mendorong masyarakat untuk meningkatkan jiwa wirausaha agar dapat meningkatkan jumlah UMKM. Pengembangan ekonomi kreatif dapat mendorong masyarakat untuk berinovasi dan meningkatkan gairah UMKM Kabupaten Sidoarjo. Kualitas manajerial koperasi perlu ditingkatkan untuk mendorong kondisi kesehatan koperasi.

i. Penanaman Modal

Untuk urusan investasi pemerintah Kabupaten Sidoarjo perlu melakukan reformasi birokrasi dan mendorong iklim investasi, terutama investasi domestik. Dengan mempermudah akses perijinan investasi, akan menarik banyak investor domestik. Selain itu pemetaan atau *road map* investasi juga perlu dilakukan untuk mengidentifikasi bidang-bidang unggulan yang memerlukan dorongan investasi.

j. Kepemudaan dan Olahraga

Dalam urusan kepemudaan dan olahraga pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga harus mendorong prestasi para atlet untuk terus meningkatkan bakat dalam bidang olahraga. Permasalahan yang terjadi adalah kurangnya sarana dan prasarana olahraga berbagai cabor, sehingga bakat dan minat atlet belum bisa tersalurkan secara optimal.

k. Kebudayaan

Urusan kebudayaan terkendala oleh terbatasnya sarana dan prasarana pemerintah yang dapat dimanfaatkan masyarakat dalam rangka meningkatkan kinerja bidang kebudyaan. Selain itu belum tertatanya kelembagaan yang menangani kebudyaan lokal daerah. Selain itu terbatasnya partisipasi masyarakat pada kegiatan budaya juga menjadi permasalahan tersendiri bagi pembangunan budaya Kabupaten Sidoarjo.

3. Urusan Pilihan

a. Kelautan dan Perikanan

Produksi perikanan Kabupaten Sidoarjo cenderung mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Namun produktifitas hasil perikanan harus dikelola dengan manajemen yang baik agar dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat.

b. Pariwisata

Jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Sidoarjo cenderung meningkat dari tahun ke tahun, tetapi jumlah ini masih sedikit jika dibandingkan dengan daerah lain. Perlu adanya peningkatan dan pengembangan industri kreatif di Kabupaten Sidoarjo. Pengembangan Periwisata di kabupaten sidaorjo tetap harus memperhatikan rencana induk pariwisata daerah dan kebijakan dari pusat.

c. Pertanian

Terdapat beberapa komoditi pertanian yang mengalami perlambatan seperti tebu, hal ini dikarenakan berkurangnya area tanaman tebu karena fungsi lahan telah berubah menjadi perumahan, lokasi industri, dan perdagangan dan komoditas tanaman, kecilnya minat petani untuk menanam tebu karena harga gula tidak menjamin dan dinilai kurang memberikan keuntungan dan bibit yang sudah waktunya harus diganti, namun tidak segera diganti. Demikan juga dengan berkurangnya lahan pertanian tersendiri.

d. Perdagangan

Dalam mendorong kinerja urusan perdagangan promosi produk-produk unggulan perlu dilakukan dalam mendorong ekspor Kabupaten Sidoarjo. Selain itu, peningkatan kualitas produk-produk khas dan unggulan Kabupaten Sidoarjo juga perlu ditingkatkan untuk mendorong sektor perdagangan.

e. Perindustrian

Masih banyak ditemukan industri yang belum terstandarisasi. Jumlah industri yang telah terstandarisasi masih jauh sedikit dibandingkan jumlah industri di Kabupaten Sidoarjo.

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini mereview kondisi perekonomian sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah Kabupaten Sidoarjo serta analisis proyeksi perekonomian tahun 2019. Selain itu dalam bahasan bab ini juga akan dijabarkan tantangan yang dihadapi oleh perekonomian Sidoarjo yang berasal dari faktor eksternal dan internal yang kemungkinan akan berpengaruh terhadap kinerja perekonomian daerah Kabupaten Sidoarjo.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Dalam pembangunan daerah, terdapat dua faktor yang penting untuk diperhatikan. *Pertama,* pembangunan daerah Kabupaten Sidoarjo harus tetap mengedepankan potensi dan kondisi yang ada. Dengan memperhatikan hal ini, sumber daya yang ada di Kabupaten Sidoarjo dapat teralokasikan dengan optimal. *Kedua,* setiap pembangunan yang disusun harus juga mengedepankan aspek keselarasan kebijakan dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa timur dengan tetap berlandaskan visi misi daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 pemerintah menyampaikan Arah Kebijakan bidang ekonomi dalam rangka meningkatkan pemerataan ditunjukkan melalui penciptaan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Arah kebijakan tersebut ditujukan dalam rangka mendukung masyarakat ekonomi lemah, memperkuat kebijakan tenaga kerja dan peningkatan kesempatan kerja terutama bagi penduduk kurang mampu dan rentan, penguatan konektivitas dari daerah tertinggal atau kantong kemiskinan ke pusat ekonomi terdekat, pertumbuhan penduduk yang optimal, serta peningkatan akses terhadap lahan dan modal bagi penduduk miskin dan rentan.

Sementara itu dalam perencanaannya pemerintah pusat menetapkan arah pembangunan nasional dengan visi misi Nawacita dan Trisakti yang memiliki tiga tujuan utama, yaitu: (i) Pembangunan Daerah Pinggiran (desa); (ii) Meningkatkan Produktivitas; dan (iii) Kemandirian Ekonomi. Untuk mencapai hal tersebut pemerintah berupaya

melakukan penguatan fundamental perekonomian domestik dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

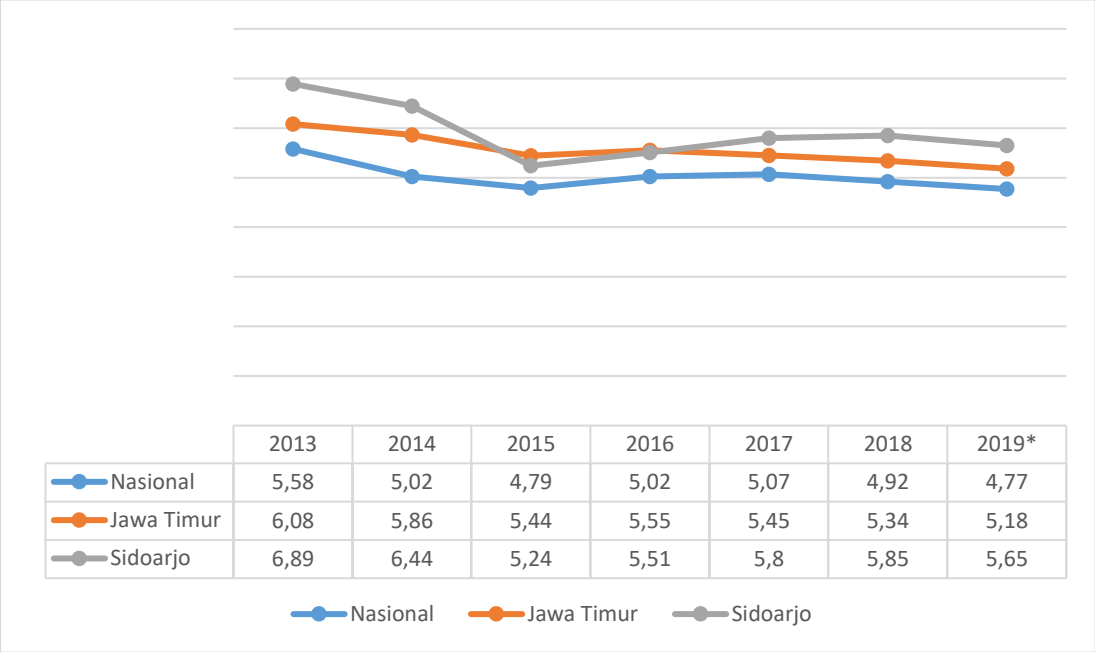

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019*
Nasional	5,58	5,02	4,79	5,02	5,07	4,92	4,77
Jawa Timur	6,08	5,86	5,44	5,55	5,45	5,34	5,18
Sidoarjo	6,89	6,44	5,24	5,51	5,8	5,85	5,65

Sumber: BPS Kabupaten Sidoarjo, 2018
*Keterangan: *) Target*

Grafik 3. 1
Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Jawa Timur, dan Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2013-2019*

Grafik 3.1 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidoarjo menurun dari tahun 2013 hingga tahun 2015. Penurunan pertumbuhan ekonomi tidak hanya terjadi di Kabupaten Sidoarjo, perekonomian Jawa Timur dan Nasional juga menurun pada tahun tersebut. Perlambatan yang terjadi disebabkan oleh adanya perlambatan ekonomi global, yang tidak hanya dialami oleh Indonesia, tetapi juga hampir semua negara di dunia. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidoarjo meningkat pada tahun 2016 ke tahun 2017 dari 5,51% menjadi 5,8%, dan terjadi peningkatan dari tahun 2017 ke tahun 2018 yaitu dari 5,8 menjadi 5,85.

Grafik 3.1 juga menginformasikan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2015 dan 2016 masih berada di bawah pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Namun pada tahun 2017 dan 2018, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidoarjo semakin membaik karena berada di atas pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan Nasional. Hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu daerah di Jawa Timur yang mampu memberikan kontribusi cukup besar pada perekonomian di Jawa Timur maupun Nasional.

Dengan mencermati perkembangan perekonomian global maupun nasional, dampak dari perubahan kondisi ekonomi global yang akan dihadapi Indonesia, kondisi ekonomi global pada Tahun 2019 diperkirakan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi global sebesar 3,6 persen, meningkat dari Tahun 2018 sebesar 3,5 persen dan 2017 sebesar 3,2 persen. Meskipun secara global pertumbuhan ekonomi membaik, pertumbuhan ekonomi pada beberapa negara maju yang menjadi tujuan ekspor Indonesia masih belum stabil sehingga ketidakpastian perekonomian pada Tahun 2019 masih cukup tinggi dan perlu dimitigasi dampaknya terhadap perekonomian daerah khususnya fiskal daerah.

Selanjutnya, kebijakan pemerintah nasional sejalan dengan arah pembangunan perekonomian Provinsi Jawa Timur. Kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Timur antara lain Pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada rakyat *(people centered development)*, yang mengedepankan partisipasi rakyat *(participatory based development)* dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi program pembangunan, keberpihakan kepada masyarakat miskin *(pro-poor)*, serta keseimbangan pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Berikut arah kebijakan ekonomi Pemerintah Provinsi Jawa Timur antara lain:

- Pemberdayaan UKMK khususnya dalam hal akses permodalan dan penguasaan teknologi tepat guna.
- Pemberdayaan petani dan nelayan khususnya dalam hal perbaikan akses faktor produksi (pupuk, benih, pestisida) termasuk peningkatan jaringan irigasi, penyuluhan dan promosi *brand* /citra komoditas daerah.
- Peningkatan kemudahan perizinan usaha
- Perbaikan kualitas jaringan jalan
- Peningkatan kapasitas/*supply* listrik wilayah
- Peningkatan akses pendidikan khususnya pendidikan menengah (umum dan kejuruan)
- Peningkatan porsi belanja modal APBD yang diprioritaskan pada sektor infrastruktur yang menjadi kewenangan daerah
- Peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah dan otoritas moneter dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif: peningkatan fungsi intermediasi perbankan di daerah, penjaminan kredit dan pengendalian inflasi daerah.

Penanganan kelas menengah, membangun segmen kecil ke menengah dan memperkuat yang sudah ada namun masih lemah. Dalam aspek pembiayaan, menyusun kerangka regulasi terkait dengan sistem kapitasi diantaranya pemanfaatan *iddle money*, optimasi kepemilikan saham Bank Jatim di atas 51% untuk skema APEX dengan BPR, pemanfaatan *Corporate Social Resposibility* (CSR)/PKBL.

Tabel 3. 1
Target IKU RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

INDIKATOR KINERJA UTAMA	2014	2015	2016	2017	2018
Pertumbuhan PDRB / LPE (%)	5,86	5,44	5,55	5,45	5,5
Indeks Gini	0,403	0,403	0,402	0,415	0,37
Indeks Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia (<40%)	18,63	16,61	17,03	16,49	17,93
Persentase Penduduk Miskin	12,28	12,28	11,85	11,2	10,85
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	68,14	68,95	69,74	70,27	
Indek Pembangunan Gender (IPG)	90,83	91,07	90,72	92,39	
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,19	4,47	4,21	4	3,99
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	56,48	61,7	63,98	66,29	
Indeks Kepuasan Masyarakat	79	80	81	81,33	
Indeks Reformasi Birokrasi	61,04	61,28	69,54	71,11	
Indeks Kesalehan Sosial					62,52

Sumber : RPJMD Jawa Timur Tahun 2014-2019

Maka berdasarkan tematik pembangunan pemerintah Indonesia serta sinkronisasi kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Timur di atas dengan begitu tematik pembangunan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk tahun 2020 diarahkan untuk mendukung visi misi pembangunan perekonomian nasional dan provinsi.

Tahun 2020 merupakan tahun kelima periodesasi Bupati Sidoarjo. Indikator kinerja pemerintah Kabupaten Sidoarjo tahun 2020 mengacu pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Berikut diuraikan Strategi dan tematik pembangunan Kabupaten Sidoarjo selama lima tahun (2016-2021), berdasarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati.

Tabel 3. 2
Strategi dan Tematik Pembangunan RPJMD Kab. Sidoarjo tahun 2016-2021

Visi : Kabupaten Sidoarjo yang Inovatif, Sejahtera, Mandiri, dan Berkelanjutan				
Tujuan	Sasaran		Strategi	Tematik Pembangunan
Misi I "Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Inovatif, Aspiratif, Partisipatif, dan Transparan"				2016 : Mewujudkan iklim demokrasi yang sehat dan kondusif guna menunjang peningkatan ekonomi dan pemerataan pembangunan daerah
Tujuan I. Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan	1	Meningkatnya penyelenggaraan Pemerintahan	Mengembangkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintah melalui Smart Government	
	2	Meningkatnya tata Kelola Pemerintahan Desa		
	3	Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan		
	4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi		2017 : meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan infrastruktur publik dalam rangka pembangunan ekonomi yang berkelanjutan
Misi II "Meningkatnya perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi bisnis industri pengolahan, pertanian, perikanan, pariwisata, UMKM dan Koperasi serta pemberdayaan masyarakat"				
Tujuan II. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berdaya Saing	5	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor-sektor unggulan	Penguatan ekonomi yang berdaya saing melalui pengembangan sektor potensial daerah, pendapatan daerah, dan investasi yang berbasis Eco Industry	
	6	Meningkatnya investasi daerah		
	7	Berkembangnya sektor pariwisata yang terintegrasi dengan industri kreatif		2018 : Pemerataan pembangunan infrastruktur daerah dalam menunjang pertumbuhan ekonomi guna menciptakan perluasan kesempatan kerja
	8	Meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat		
	9	Meningkatnya kapasitas fiskal daerah berbasis pada sumber-sumber penerimaan daerah yang fundamental		
	10	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka		
Misi III "Meningkatnya Kualitas dan Standar Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan"				2019: Pemantapan Infrastruktur Penunjang Ekonomi dan Lingkungan Hidup dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
Tujuan III. Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	11	Terwujudnya pendidikan yang berkualitas, berdaya saing, dan merata	Mendorong terciptanya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, melalui peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan	
	12	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		
Misi IV "Meningkatnya Tatanan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berakhlaqul Karimah, Berlandaskan Keimanan kepada Tuhan YME, serta dapat Memelihara Kerukunan, Ketentraman dan Ketertiban"				

Visi : Kabupaten Sidoarjo yang Inovatif, Sejahtera, Mandiri, dan Berkelanjutan				
Tujuan	Sasaran		Strategi	Tematik Pembangunan
Tujuan IV. Mewujudkan lingkungan sosial masyarakat yang rukun, aman, tertib, nyaman dan berkeadilan	13	Meningkatnya keamanan, kenyamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang berbudaya	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menciptakan lingkungan sosial yang kondusif dan bereorientasi terhadap penguatan nilai wawasan kebangsaan	2020: Percepatan pembangunan ekonomi melalui akselerasi sektor-sektorc potensial daerah
	14	Meningkatnya prestasi dan peran serta pemuda dalam pembangunan		
	15	Terwujudnya pengarusutamaan gender yang berkeadilan		
	16	Menurunnya Jumlah Masyarakat Miskin		
Misi V "Infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan"				2021 : Menciptakan stabilisasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidoarjo yang berdaya saing
Tujuan V Meningkatakan kuantitas dan kualitas infrastruktur penunjang pertumbuhan ekonomi yang berwawasan lingkungan hidup dan tanggap bencana	17	Meningkatnya Kuantitas dan kualitas dalam penyediaan infrastruktur Penunjang Perekonomian	Harmonisasi pembangunan infrastruktur fisik penunjang ekonomi dan lingkungan hidup dalam perspektif Pembangunan berkelanjutan	
	18	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Tanggap Bencana		

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2019 dan Prakiraan Tahun 2020

Kondisi makro ekonomi Kabupaten Sidoarjo akan ditinjau dari indikator utama dalam menilai kinerja ekonomi daerah yaitu (1) Pertumbuhan ekonomi (2) Pertumbuhan *Income* Per Kapita, (3) Angka Inflasi, dan (4) Indeks Pembangunan Manusia.

3.1.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sidoarjo cenderung mengalami perlambatan selama empat tahun mulai dari tahun 2013 sampai tahun 2016. Pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8%. Pertumbuhan ekonomi tersebut meningkat dari tahun 2016 yang hanya 5,51%. Kemudian tahun 2018 pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan menjadi 5,85% dan target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 sebesar 5,65%. Diperkirakan tahun 2020 pertumbuhan ekonomi naik menjadi 5,85%.Hal tersebut karena meningkatnya investasi dan penyerapan tenaga kerja adapun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidoarjo sebagaimana Grafik 3.1 berikut ini.

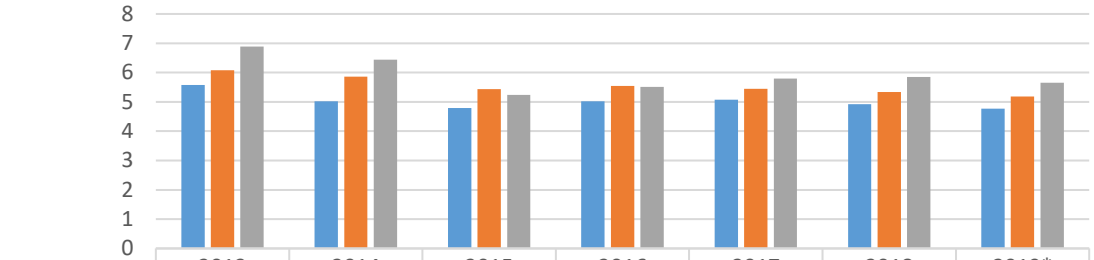

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019*
Nasional	5,58	5,02	4,79	5,02	5,07	4,92	4,77
Jawa Timur	6,08	5,86	5,44	5,55	5,45	5,34	5,18
Sidoarjo	6,89	6,44	5,24	5,51	5,8	5,85	5,65

Nasional Jawa Timur Sidoarjo

*Target dilihat dari IKU Kabupaten Sidoarjo
Sumber: BPS Kab. Sidoarjo dan Bappeda Kab. Sidoarjo (data diolah)

Grafik 3. 2
Capaian Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013-2018 dan Proyeksi Tahun 2019* (%) (ADHK 2010)

3.1.1.2. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita merupakan indikator yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian suatu daerah. Ukuran kemakmuran masyarakat suatu daerah dapat dilihat dari besarnya peningkatan PDRB per kapita. Pada umumnya, indikator ini disajikan dari angka atas dasar harga berlaku, walaupun sebetulnya masih mengandung

perubahan harga barang dan jasa. Pertumbuhan agregat pendapatan perkapita regional tentunya tidak lepas dari besarnya PDRB Kabupaten Sidoarjo secara total. Peningkatan PDRB yang beriringan dengan peningkatan jumlah penduduk akan dikuti oleh peningkatan PDRB per kapita Kabupaten Sidoarjo.

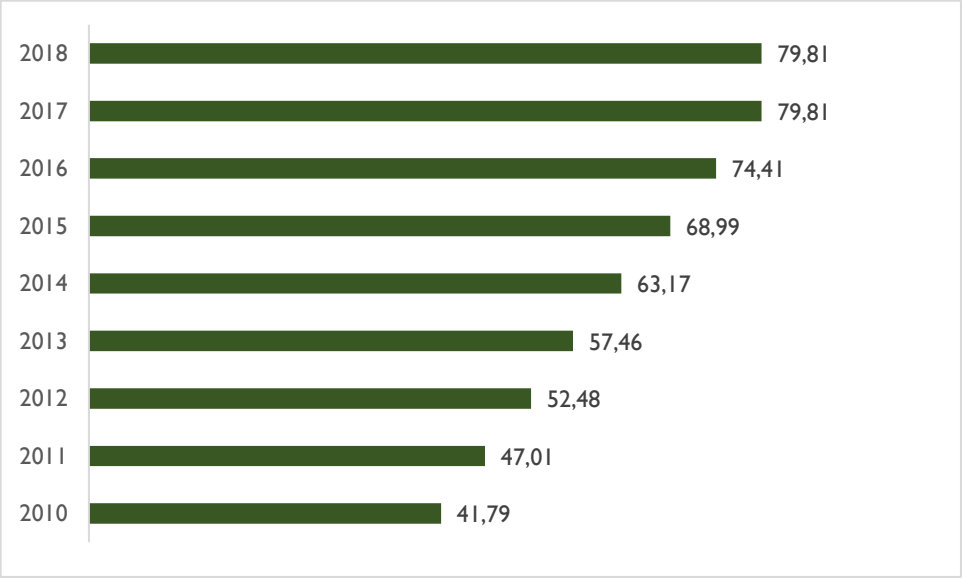

Sumber: BPS Kabupaten Sidoarjo

Grafik 3. 3
Pendapatan Perkapita Penduduk Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010-2018 (juta/tahun)

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidoarjo tahun 2010-2016 cenderung melemah. Namun, apabila dilihat dari pertumbuhan PDRB per kapita Kabupaten Sidoarjo tahun 2010-2017 selalu mengalami peningkatan. Peningkatan pendapatan perkapita yang terjadi mulai dari tahun 2010 yaitu sebesar Rp 41,79 juta (Rp 3,48 juta/bulan) menguat hingga tahun 2015 yaitu sebesar Rp 68,99 juta/tahun (Rp 5,75 juta/bulan) atau terjadi penambahan sekitar Rp 27,2 juta. Pada tahun 2017 dan 2018 pendapatan perkapita sebesar Rp 79,81 juta/tahun (Rp 6,65 juta/bulan).

Tingginya angka pendapatan perkapita penduduk menandakan tercukupinya kebutuhan masyarakat untuk hidup layak di Kabupaten Sidoarjo. Pertumbuhan PDRB per kapita tersebut bisa lebih tinggi apabila pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sidoarjo bisa ditekan lebih rendah lagi. Namun demikian dengan adanya kenaikan PDRB Perkapita seperti tersebut di atas, diharapkan masyarakat di Kabupaten Sidoarjo mulai merasakan hasil pembangunan ekonomi secara nyata.

3.1.1.3. Inflasi

Inflasi adalah suatu keadaan di mana harga barang-barang secara umum mengalami kenaikan dan berlangsung dalam waktu yang lama dan terus-menerus. Harga barang yang ada mengalami kenaikan nilai dari waktu-waktu sebelumnya dan berlaku di mana-mana dan dalam rentang waktu yang cukup lama. Di Kabupaten Sidoarjo, nilai inflasi tahun 2011 sebesar 4,01% dan pada tahun 2012 sebesar 4,31%. Sedangkan pada tahun 2013 dan 2014 mengalami peningkatan menjadi 7,72% dan 7,67%. Inflasi tahun 2015 lebih rendah yaitu 3,20% dan pada tahun 2016 sebesar 3.93%, dan mengalami penurunan lagi di tahun 2017, sehingga inflasi Kabupaten Sidoarjo menjadi 2,59%.

Tabel 3. 3
Nilai Inflasi Rata-Rata Tahun 2010-2017 Kabupaten Sidoarjo

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Inflasi	4,01	4,31	7,72	7,67	3.20	3,93	2,59	2,50

Sumber : BPS Kabupaten Sidoarjo

3.1.1.4. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu tolok ukur untuk melihat sejauh mana keberhasilan program pembangunan kesejahteraan sosial yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

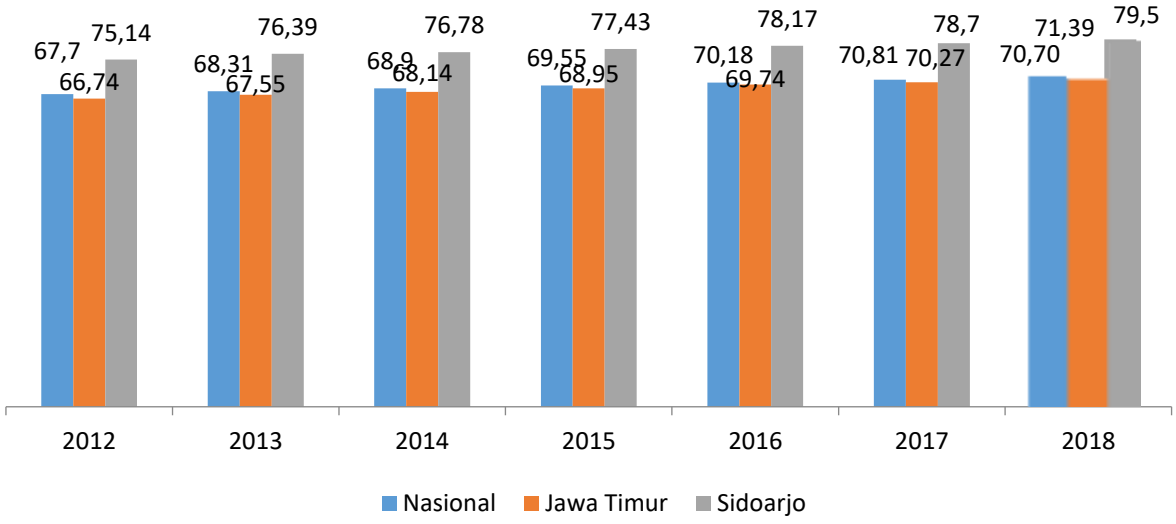

Sumber : BPS Kabupaten Sidoarjo

Grafik 3. 4
Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012-2018

IPM sampai dengan tahun 2018 menunjukkan tren kearah peningkatan, terkoreksi pada angka 79,5 poin (kategori tinggi).

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2019 dan Tahun 2020

Berdasarkan kondisi ekonomi pada tahun-tahun sebelumnya, perekonomian Kabupaten Sidoarjo masih menyimpan beberapa kelemahan yang menjadi tantangan untuk diperbaiki. Namun demikian, perekonomian Kabupaten Sidoarjo juga menyimpan beberapa kekuatan yang dapat dimanfaatkan. Berikut merupakan analisis kelemahan dan kekuatan perekonomian Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

a. Analisis Kondisi Internal Kabupaten Sidoarjo

a.1. Kekuatan

- **Pertama:** Sektor industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, reparasi merupakan potensi unggulan yang dimiliki oleh Kabupaten Sidoarjo, dimana sektor industri pengolahan mampu menopang sebesar 46,08% PDRB ADHB.
- **Kedua:** Investasi baik PMA maupun PMDN mengalami penurunan di Kabupaten Sidoarjo. Jumlah investasi baik PMA maupun PMDN lebih rendah dari tahun 2016 ke tahun 2017, hingga akhir tahun 2017 jumlah PMA yang tercatat sebesar Rp 1.698.323.750.000,00 dan PMDN sebesar Rp 2.338.750.900.000,00.
- **Ketiga:** Penerimaan pajak daerah di Kabupaten Sidoarjo mengalami peningkatan dari tahun 2016 ke tahun 2017. Hingga akhir tahun 2017 tercatat realisasi penerimaan pajak daerah sebesar Rp 925.569.237.852. Sedangkan penerimaan retribusi mengalami penurunan dari tahun 2016 ke tahun 2017, hingga akhir tahun 2017 penerimaan retribusi pajak sebesar Rp 80.087.712.760.
- **Keempat:** Afirmasi pemerintah pusat terhadap pembangunan infrastruktur.
- **Kelima:** Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berkomitmen untuk mewujudkan industri yang ramah lingkungan. Salah upaya yang telah dilaksanakan adalah dengan mengadakan bimbingan teknis pengelolaan limbah industri yang ditujukan kepada pelaku industri di Kabupaten Sidoarjo,membangun PLTSA (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah).

a.2. Kelemahan

- **Pertama:** Transportasi massal dalam kabupaten yang murah dan cepat belum tersedia di Kabupaten Sidoarjo. Hal ini menunjukkan bahwa masih lemahnya

inovasi untuk menunjang pelayanan publik pada penyelenggaraan pemerintah kabupaten maupun pemerintah desa.

- **Kedua:** Lemahnya kapasitas kelembagaan dalam tata kelola pemerintahan.
- **Ketiga :** Masih perlunya pemerataan kesempatan pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan**.** Urusan pendidikan hingga saat ini masih dirasa perlu untuk lebih ditingkatkan. Data BPS pemerintah kabupaten Sidoarjo menunjukkan masih perlunya perhatian pada Angka Putus Sekolah (APS).
- **Keempat:** Sarana prasarana kegiatan kepemudaan yang masih minim. Jumlah sarana olahraga milik pemerintah di Kabupaten Sidoarjo sampai akhir tahun 2016 tercatat hanya tiga unit.
- **Kelima:** Masih perlu ditingkatkannya kesehatan masyarakat. Kabupaten Sidoarjo masih menghadapi masalah terkait dengan bidang kesehatan, yaitu antara lain adalah masih adanya kematian ibu dan anak, serta gizi buruk; Rendahnya kesadaran masyarakat berperilaku hidup sehat akibat terbatasnya aksesibilitas terhadap sumber air minum yang bersih dan keperluan sanitasi dasar secara konsisten; Tingginya penyebaran penyakit tropis dan penyakit serius lainnya, serta penyebaran HIV/AIDS, dan psikotropika (narkotika); Terbatasnya jumlah tenaga keperawatan dan kesehatan, serta sarana prasarana kesehatan masyarakat,masih terdapat dibeberapa kecamatan anak stunting.
- **Keenam**: Rendahnya aksesibilitas kesehatan bagi masyarakat miskin. Masih tingginya PMKS di Kabupaten Sidoarjo. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Sidoarjo, seperti anak jalanan, pengemis dan pengamen semakin bertambah dan menempati ruas – ruas jalan protokol. Penanganan dan penertiban yang dilakukan oleh beberapa instansi belum terkoordinir dengan baik.
- **Ketujuh :** Terjadinya peningkatan perselisihan perusahaan dan tenaga kerja. Hal ini dapat merugikan pihak perusahaan sekaligus pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan bahkan dampak lebih buruk dapat mengurangi angka tenaga kerja**.**
- **Kedelapan :** belum produktifnya usaha ekonomi,ekonomi kreatif dan kemandirian pemerintahan desa.Termasuk belum optimalnya Program Peningkatan Infrastruktur Perdesaan (PPIP).

b. Analisis Kondisi Eksternal

b.1. Peluang

- **Pertama:** Kabupaten Sidoarjo adalah pusat perdagangan baik domestik maupun internasional di Indonesia Timur setelah Kota Surabaya. Di Sidoarjo terletak Bandara Internasional Juanda, yang merupakan pintu ekspor dan impor utama jalur udara dari Indonesia Timur ke Luar maupun sebaliknya. Terlebih saat ini kebijakan perdagangan bebas dengan negara-negara Asean dan China sudah terbuka, dan beberapa tarif komoditi ekspor-impor dengan Jepang sudah ada yang dihapus.
- **Kedua:** Indonesia menjadi salah satu tujuan favorit investasi oleh para investor asing. Hal ini tidak terlepas dari besarnya ekonomi domestik Indonesia dan kestabilan makro ekonomi pada lima tahun terakhir.
- **Ketiga:** komitmen terhadap reformasi birokrasi menjadi peluang pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Adanya pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan diharapkan dapat menjadi langkah strategis untuk membangun tata kelola pemerintahan Kabupaten Sidoarjo yang lebih baik.

b.2. Ancaman

- **Pertama:** Pencemaran lingkungan dan kerusakan sumber daya alam seiring dengan pesatnya sektor industri dan perdagangan.
- **Kedua:** Menurunnya kualitas permukiman sehingga tumbuh kawasan kumuh di perkotaan.
- **Ketiga:** Degradasi kebudayaan lokal.
- **Keempat:** Jumlah PMKS yang meningkat dari tahun ke tahun.
- **Kelima:** Pencegahan konflik berbau SARA dan politik.

Tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun berjalan dan mendatang perlu diminimalisir dengan arah-arah kebijakan yang sesuai dan berpedoman pada RKP dan RKPD Jatim. Arah kebijakan ekonomi dalam RKP adalah pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan, infrastruktur dan pemerataan wilayah, nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja. Sedangakn arah kebijakan perekonomian dalam RKPD Jatim adalah pembangunan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah ekonomi dan pariwisata, kualitas ketenagakerjaan serta perluasan kesempatan kerja.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Proyeksi anggaran tahun 2020 merupakan gambaran kapasitas fiskal yang dapat dikelola dalam program dan kegiatan yang tertuang pada RKPD Kabupaten Sidoarjo tahun 2020. Efektivitas pembangunan daerah Kabupaten Sidoarjo bergantung pada program prioritas pembangunan. Untuk itu, kebutuhan belanja pembangunan daerah akan selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non-APBD, seperti APBN, Hibah, dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Resposibility (CSR)*.Termasuk pola pembiayaan PPP (Public Private Partnership).

Kapasitas fiskal daerah tahun 2020 dapat dilihat pada *volume* APBD tahun 2020. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah).

Untuk pendapatan daerah akan bersumber dari: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-Lain Pendapatan Asli Daerah; 2) Dana Perimbangan yang Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; 3) Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dari Pemerintah Provinsi, Dana Penyesuaian dan Dana Alternatif Khusus, dan Dana Bantuan Keuangan. Selanjutnya untuk pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, Dana Cadangan Daerah (DCD), dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Selain dana dari penerimaan daerah tersebut, daerah menerima dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat berupa dana dekonsentrasi, dana tugas pembantuan dan urusan bersama, yang dialokasikan untuk menunjang program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan berdasarkan prioritas dan bersifat penugasan kepada perangkat daerah.

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Otonomi daerah yang diamanatkan pada UU 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, menuntut semua daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk

mengelola sumber keuangannya sendiri. Kabupaten Sidoarjo memiliki banyak potensi untuk memaksimalkan pengelolaan keuangan, terutama dari segi optimalisasi pendapatan. Pagu pendapatan dapat ditekan melalui penggalian potensi PAD, dan perbaikan kinerja pemerintah untuk merencanakan besaran pagu DAU dan DAK yang merupakan dana transfer dari pemerintah pusat. Secara umum struktur pendapatan daerah setelah otonomi, sumber penerimaan pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten berasal dari (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pos pendapatan pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, (2) Dana Perimbangan, (3) Dana Alokasi Umum (DAU), (4) Dana Alokasi Khsusus (DAK), dan (5) Bagi Hasil Pajak dan Batuan Keuangan dari Propinsi.

Secara umum peningkatan pendapatan daerah dapat dilakukan dengan dua cara:

1) Intensifikasi pendapatan daerah dilakukan dengan upaya optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang ada menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
2) Ekstensifikasi pendapatan daerah yaitu menggali sumber-sumber pendapatan dengan melihat kemungkinan-kemungkinan terhadap pemungutan akan sumber-sumber pendapatan daerah yang belum ada selama ini,atau dengan kata lain menggali sumber-sumber pendapatan baru.

Dalam upaya untuk mencapai pengelolaan pendapatan daerah yang lebih baik maka perlu ditetapkan kebijakan peningkatan pendapatan daerah. Kebijakan tersebut berfokus pada peningkatan dan optimalisasi PAD khususnya pada penerimaan pajak dan retribusi daerah tanpa harus menambah beban masyarakat. PAD sebagai sumber penerimaan daerah merupakan indikator kekuatan dan kemandirian pembiayaan pembangunan daerah sesuai misi Kabupaten Sidoarjo.

Pendapatan daerah Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 3,47% menjadi Rp. 4.079.767.188.177,00. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah pada tahun 2020 sebesar 1.770.526.779.717,00 meningkat sebesar 10,45% jika dibandingkan tahun 2019. Sedangkan untuk dana perimbangan mengalami penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2020 sebesar 18,65 %. Dan Pos Lain-Lain Pendapatan daerah yang sah meningkat sebesar 1,81%.

Tabel 3. 4

Realisasi dan Proyeksi Target Pendapatan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017-2021

URAIAN	REALISASI 2017	REALISASI 2018	APBD 2019	RAPBD 2020	PROYEKSI RAPBD 2021
PENDAPATAN DAERAH	***4.045.685.362.112,53***	***4.332.577.984.768,01***	***4.226.488.930.000,00***	***4.079.767.188.177,00***	***4.032.373.159.435,24***
Pendapatan Asli Daerah	**1.671.806.819.696,53**	**1.685.558.666.147,01**	**1.603.002.870.000,00**	**1.770.526.779.717,00**	**1.549.089.618.267,08**
Pajak Daerah	925.569.237.852,49	961.840.717.556,86	992.946.880.000,00	1.062.525.000.000,00	1.016.043.788.466,00
Retribusi Daerah	80.087.712.759,50	93.100.506.077,53	60.634.325.282,00	73.946.284.225,00	103.871.035.698,74
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	29.304.699.967,00	34.760.702.313,00	35.269.955.596,00	36.686.467.300,00	31.990.747.126,76
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	636.845.169.117,54	595.856.740.199,62	514.151.709.122,00	597.369.028.192,00	397.184.046.975,59
Dana Perimbangan	**1.708.887.132.594,00**	**1.793.474.341.790,00**	**1.767.882.511.000,00**	**1.438.141.340.460,00**	**1.925.547.805.738,23**
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	119.779.273.575,00	185.811.982.977,00	144.644.504.000,00	182.306.267.460,00	175.039.776.103,60
Dana Alokasi Umum	1.203.737.401.000,00	1.191.856.625.000,00	1.255.835.073.000,00	1.255.835.073.000,00	1.240.086.963.754,00
Dana Alokasi Khusus	385.370.458.019,00	415.805.733.813,00	367.402.934.000,00	-	159.044.339.211,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	**664.991.409.822,00**	**853.544.976.831,00**	**855.603.549.000,00**	**871.099.068.000,00**	**350.021.469.680,83**
Pendapatan Hibah	-	143.491.880.000,00	144.000.000.000,00	144.000.000.000,00	-
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	381.915.672.306,00	391.628.561.735,00	352.260.423.000,00	386.200.000.000,00	350.021.469.680,83
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	268.220.391.016,00	292.400.305.606,00	359.343.126.000,00	340.899.068.000,00	-
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah	14.855.346.500,00	26.024.229.490,00	-	-	-

Sumber : BPKAD Kabupaten Sidoarjo

Berdasarkan struktur kontribusi terhadap pendapatan daerah, dana perimbangan berkontribusi sangat besar terhadap pendapatan daerah Kabupaten Sidoarjo. Seiring berjalannya waktu, pemerintah kabupaten Sidoarjo berupaya untuk mengurangi kontribusi dana perimbangan dan meningkatkan kontribusi PAD. Pada tahun 2020 terjadi peningkatan kontribusi Pendapatan Daerah, kontribusi PAD di tahun 2020 sebesar 43,40% dan kontribusi Lain – Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 21,35%.

Tabel 3. 5
Kontribusi Realisasi Pendapatan Tahun 2017, APBD Tahun 2018, 2019, RAPBD Tahun 2020 dan Proyeksi RAPBD 2021

URAIAN	REALISASI 2017	REALISASI 2018	APBD 2019	RAPBD 2020	PROYEKSI RAPBD 2021
PENDAPATAN DAERAH	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***
Pendapatan Asli Daerah	**41,32%**	**38,90%**	**37,93%**	**43,40%**	**44,60%**
Pajak Daerah	22,88%	22,20%	23,49%	26,04%	29,25%
Retribusi Daerah	1,98%	2,15%	1,43%	1,81%	2,99%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0,72%	0,80%	0,83%	0,90%	0,92%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	15,74%	13,75%	12,16%	14,64%	11,44%
Dana Perimbangan	**42,24%**	**41,40%**	**41,83%**	**35,25%**	**45,32%**
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	2,96%	4,29%	3,42%	4,47%	5,04%
Dana Alokasi Umum	29,75%	27,51%	29,71%	30,78%	35,70%
Dana Alokasi Khusus	9,53%	9,60%	8,69%	0,00%	4,58%
Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	**16,44%**	**19,70%**	**20,24%**	**21,35%**	**10,08%**
Pendapatan Hibah	0,00%	3,31%	3,41%	3,53%	-
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	9,44%	9,04%	8,33%	9,47%	10,08%
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	6,63%	6,75%	8,50%	8,36%	-
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah	0,37%	0,60%	-	-	-

Sumber : BPKAD Kabupaten Sidoarjo

Kontribusi pendapatan terbesar di Kabupaten Sidoarjo didominasi Pendapatan Asli Daerah. Terdapat beberapa hal yang cukup penting terkait dengan prospek keuangan daerah ke depan, antara lain adalah:

1. Peranan sektor Pajak Daerah dan Retribusi dalam memberikan sumbangan ke PAD akan semakin penting. Untuk itu, upaya untuk terus melakukan ekstensifikasi melalui perluasan basis pajak tanpa harus menambah beban kepada masyarakat maupun intensifikasi melalui upaya yang terus menerus dalam melakukan perbaikan kedalam dan senantiasa meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi dalam memenuhi kewajibannya adalah hal yang mutlak untuk tetap dilanjutkan secara konsisten termasuk dalam upaya untuk terus meningkatkan efisiensi, di tubuh penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Sidoarjo.
2. Upaya ekstensifikasi pajak sebagaimana yang telah disampaikan, tampaknya tidak cukup hanya mengandalkan kondisi sarana prasarana daerah yang ada seperti saat ini. Untuk itu ke depan, prioritas pembangunan daerah harus benar-benar fokus pada sektor-sektor yang mampu menarik investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dalam upaya meningkatkan daya beli masyarakat yang dalam hal ini tentunya harus dilakukan dengan tanpa mengesampingkan konsistensi dalam menekan ketimpangan pendapatan masyarakat sebagai bentuk upaya untuk menekan angka kemiskinan, serta tetap memperhatikan keseimbangan dalam segala aspek kehidupan masyarakat yang ada di Kabupaten Sidoarjo.
3. Perlunya penetapan formulasi kebijakan di atas, dimaksudkan agar peningkatan pendapatan daerah pada tahun 2020-2021 diupayakan untuk tetap menjaga penciptaan iklim yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha, sehingga keberadaannya diharapkan dapat mewujudkan stabilitas fiskal daerah khususnya dalam memberikan ketersediaan sumber pembiayaan dalam menjaga kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui perluasan basis pajak tanpa harus menambah beban kepada masyarakat maupun intensifikasi melalui upaya yang terus menerus dalam melakukan perbaikan kedalam dan senantiasa meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi dalam memenuhi kewajibannya adalah hal yang mutlak untuk tetap dilanjutkan secara konsisten termasuk dalarn upaya untuk terus meningkatkan efisiensi, di tubuh penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Sidoarjo.

Secara teoritis, pendapatan daerah akan sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian daerah yang akan terjadi sampai dengan tahun 2020, atau dengan kata lain, bahwa suatu pendapatan daerah (termasuk PAD) harus benar-benar mampu merespon perkembangan ekonomi yang diperkirakan akan terjadi.

Dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah, perlu adanya strategi dan pemetaan potensi penerimaan daerah baik yang bersumber dari pajak, retribusi maupun penerimaan lain-lain yang sah menurut perundang-undangan yang berlaku.

Teknik yang digunakan untuk mengukur potensi harus lebih realistis yakni tidak hanya didasarkan pada keinginan untuk senantiasa menaikan pajak dan retribusi akan tetapi juga perlu melihat aspek lain yang mempengaruhi kebijakan tersebut. Aspek yang dapat mempengaruhi kebijakan pendapatan daerah antara lain adanya regulasi peraturan yang merupakan acuan yang dipakai dalam menggali penerimaan daerah dan struktur ekonomi/sosial masyarakat yang sangat menentukan kemampuan masyarakat dalam membayar segala pungutan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Bertitik tolak pada kondisi tersebut, kebijakan strategis yang akan dilakukan dalam pengelolaan pendapatan daerah antara lain:

1. Optimalisasi PAD dengan menitikberatkan pendekatan potensi.
2. Meningkatkan SDM dari petugas pemungut.
3. Mengimplementasikan peraturan yang ada dalam menggali sumber pendapatan.
4. Melakukan regulasi terhadap peraturan yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini.
5. Melakukan inovasi pelayanan pajak.

Upaya-upaya pemerintah daerah dalam mencapai target Pendapatan Daerah:

1. Penagihan aktif terhadap wajib pajak maupun retribusi yang kurang patuh secara lebih intensif.
2. Melakukan sosialisasi terhadap masyarakat melalui media cetak maupun media elektronik.
3. Melalukan penggalian potensi sumber pendapatan baru dengan mengedepankan azas keadilan.
4. Mengadakan pendataan ulang pada wajib pajak dengan menghitung kembali omset sehingga pengenaan pajak sesuai dengan potensi.

5. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan khususnya yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah.
6. Meningkatkan kontribusi pendapatan dari Badan Usaha Milik Daerah terhadap pendapatan daerah.
7. Meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam peningkatan pendapatan khususnya yang bersumber dari dana perimbangan dan retribusi daerah.

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi khususnya dalam pemberian layanan umum. Otonomi daerah menuntut daerah untuk bisa mengelola secara efisien dan efektif belanja daerah untuk kesejahteraan masyarakat secara umum. Saat ini pemerintah mulai menerapkan program anggaran berbasis kinerja, sebagi upaya efektivitas kinerja pemerintah dan mengalokasikan belanja secara efisien serta merencanakan anggaran secara transparan dan akuntabilitas. Pendekatan anggaran kinerja berorientasi pada pencapaian hasil dari *input* yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya.

Secara konsep, kebijakan anggaran belanja daerah terbagi ke dalam dua bagian belanja yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Untuk belanja yang bersifat strategis dengan nilai yang besar dapat dimungkinkan dengan menetapkan belanja dengan model pelaksanaan *multi-years* dan atau model pembayaran dengan *turn-keys*, yang pengalokasian dananya disepakati oleh DPRD dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan belanja untuk program dan kegiatan diarahkan untuk akselerasi pencapaian misi Kabupaten Sidoarjo sebagaimana berikut:

1) Pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui penyelenggaran pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan

2) Meningkatkan perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis industri pengolahan, pertanian, perikanan, pariwisata, UMKM dan Koperasi serta pemberdayaan masyarakat
3) Meningkatkan kualitas dan standar pelayanan pendidikan dan kesehatan
4) Meningkatkan tatanan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan ber*akhlaqul karimah*, berlandaskan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban
5) Infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan

Dalam rangka pencapaian misi tersebut pada tahun 2020, maka Arah kebijakan belanja Kabupaten Sidoarjo dikelompokkan dalam 2 jenis belanja sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, meliputi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

3.2.2.1. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung diarahkan pada :

a. Belanja Pegawai

- Untuk mengantisipasi kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga, mutasi dan penambahan PNS maka diperhitungkan *acress* 2,5% dari jumlah belanja pegawai (gaji pokok dan tunjangan);
- Dianggarkan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja bagi pegawai negeri sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.

b. Belanja Hibah

- Belanja hibah di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo diberikan kepada Badan/ Lembaga/Organisasi Pendidikan, keagamaan, semi pemerintah, kelompok masyarakat dan lainnya.
- Belanja hibah juga untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilakukan oleh instansi vertikal seperti TMMD dan KPUD, semi pemerintah (seperti PMI, KONI, Pramuka, KORPRI, dan PKK), perusahaan

daerah, serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dalam APBD.

- Dalam menentukan organisasi atau lembaga yang akan diberikan hibah akan dilakukan secara selektif dan rasional dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- Dalam rangka akuntabilitas penggunaan hibah kepada lembaga/organisasi maka pemberian hibah dilengkapi dengan naskah perjanjian hibah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.

c. Belanja Bantuan Sosial

- Dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dapat memberikan bantuan sosial kepada kelompok/anggota masyarakat namun tetap dilakukan secara selektif/tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi, belanja bantuan untuk kegiatan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan.
- Bantuan keuangan kepada partai politik mengacu pada Undang undang no 1 tentang bantuan keuangan partai politik serta pp no 1 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas pp no 1tahun 2009 tentang bantuan keuangan parpol.
- Belanja Bantuan Sosial untuk organisasi kemasyarakatan berupa belanja bantuan penanggulangan kemiskinan, belanja bantuan keuangan, bantuan uang untuk panti asuhan, belanja bantuan penunjang biaya operasional TMMD.
- Belanja bantuan untuk kegiatan lembaga pendidikan diperuntukan berupa bantuan uang kepada para guru PAUD, TK, TPQ, SD, SLTP, serta bantuan pendidikan sekolah gratis.

d. Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk keperluan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam penggunaannya harus sesuai dengan perundang undangan yang berlaku.

e. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bagian dana perimbangan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten.Untuk keperluan

peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam penggunaannya harus sesuai dengan perundang undangan yang berlaku.

f. Belanja tidak terduga

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya.Untuk keperluan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam penggunaannya harus sesuai dengan perundang undangan yang berlaku.

3.2.2.2. Belanja Langsung

Belanja langsung diarahkan pada pencapaian tema yaitu Percepatan pembangunan ekonomi melalui akselerasi sektor - sektor potensial daerah yang dijabarkan menjadi program program prioritas menjadi 59 program prioritas yang tersebar di seluruh pemerintahan daerah.

Tabel 3.6
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo

NO	OPD	NO	OPD
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	25	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
2	Dinas Kesehatan	26	Badan Kepegawaian Daerah
3	RSUD	27	Sekretariat DPRD
4	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air	28	Sekretariat Daerah
5	Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	29	Inspektorat
6	Satuan Polisi Pamong Praja	30	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	31	Kecamatan Balongbendo
8	Dinas Sosial	32	Kecamatan Buduran
9	Dinas Tenaga Kerja	33	Kecamatan Candi
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	34	Kecamatan Gedangan
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	35	Kecamatan Jabon
12	Dinas Pangan dan Pertanian	36	Kecamatan Krembung
13	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	37	Kecamatan Krian
14	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	38	Kecamatan Porong
15	Dinas Perhubungan	39	Kecamatan Prambon
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	40	Kecamatan Sedati

NO	OPD	NO	OPD
17	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	41	Kecamatan Sidoarjo
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	42	Kecamatan Sukodono
19	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata	43	Kecamatan Taman
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	44	Kecamatan Tanggulangin
21	Dinas Perikanan	45	Kecamatan Tarik
22	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	46	Kecamatan Tulangan
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	47	Kecamatan Waru
24	Badan Pelayanan Pajak Daerah	48	Kecamatan Wonoayu

Tabel 3. 7
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017-2021

URAIAN	REALISASI 2017	REALISASI 2018	APBD 2019	RAPBD 2020	PROYEKSI RAPBD 2021
BELANJA DAERAH	***3.748.313.122.059,10***	***4.188.537.810.911,10***	***4.826.488.930.000,00***	***4.833.767.188.177,00***	***4.127.405.873.052,24***
Belanja Tidak Langsung	**2.036.794.548.538,16**	**2.061.180.080.678,39**	**2.390.717.308.099,65**	**2.104.719.243.429,00**	**2.515.942.750.358,72**
Belanja Pegawai	1.264.759.726.621,71	1.274.409.734.119,00	1.492.157.103.618,10	1.241.621.552.949,00	1.863.714.804,734,62
Belanja Bunga	-	-	-	-	-
Belanja Hibah	145.911.030.742,43	217.991.296.776,39	210.601.062.000,00	203.816.178.500,00	125.269.702.100,00
Belanja Bantuan Sosial	47.732.025.000,00	57.659.202.664,00	73.097.083.100,35	73.432.005.000,00	55.337.353.560,00
Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi /Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	101.321.451.159,51	113.511.515.586,00	105.358.120.528,20	113.647.128.422,00	119.560.974.783,32
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten Kota dan Pemerintah Desa	476.197.488.480,51	397.608.331.533,00	499.293.533.651,00	467.202.378.558,00	349.059.915.180,00
Belanja Tidak Terduga	872.826.534,00	-	10.210.405.202,00	5.000.000.000,00	3.000.000.000,00
Belanja Langsung	**1.711.518.573.520,94**	**2.127.357.730.232,71**	**2.435.771.621.900,35**	**2.729.047.944.748,00**	**1.611.463.122.693,52**
Belanja Pegawai	127.872.939.754,08	145.368.363.650,16	177.079.353.469,00		
Belanja Barang dan Jasa	1.018.412.075.491,45	1.171.424.218.249,97	1.242.223.155.769,02		
Belanja Modal	565.233.558.275,41	810.565.148.332,58	1.016.469.112.662,33		
Jumlah Belanja	**3.748.313.122.059,10**	***4.188.537.810.911,10***	**4.826.488.930.000,00**	**4.833.767.188.177,00**	**4.127.405.873.052,24**
Surplus (Defisit)	***297.372.240.053,43***	***144.040.173.856,91***	**(600.000.000.000,00)**	**(754.000.000.000,00)**	**(100.000.000.000,00**

Sumber : BPKAD Kabupaten Sidoarjo

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

3.2.3.1. Arah Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Kebijakan penerimaan pembiayaan diarahkan kepada :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu merupakan estimasi selisih lebih antara realisasi pendapatan dengan belanja daerah dan didefinisikan dalam perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun sebelumnya.

b. Penerimaan kembali pengembalian Dana Bergulir

Penerimaan kembali pengembalian dana bergulir digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang berasal dari pengembalian angsuran pokok pinjaman dana bergulir.

Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada jenis-jenis penerimaan pembiayaan daerah. Berikut adalah Penerimaan Pembiayaan Tahun 2017-2020.

Tabel 3. 8
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah
Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2017-2021

URAIAN	REALISASI 2017	REALISASI 2018	APBD 2019	RAPBD 2020	PROYEKSI RAPBD 2021
PEMBIAYAAN DAERAH	**585.678.501.522,09**	***884.177.835.763,37***	***600.000.000.000,00***	***754.000.000.000,00***	***100.000.000.000,00***
Penerimaan Pembiayaan	**592.688.501.522,09**	**890.462.835.763,37**	**612.900.000.000,00**	**761.800.000.000,00**	**112.900.000.000,00**
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	583.992.202.843,64	883.050.741.575,52	600.000.000.000,00	754.000.000.000,00	100.000.000.000,00
Penerimaan Pengembalian Dana Bergulir	8.696.298.678,45	7.412.094.187,85	12.900.000.000,00	7.800.000.000,00	12.900.000.000,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**592.688.501.522,09**	**890.462.835.763,37**	**612.900.000.000,00**	**761.800.000.000,00**	**112.900.000.000,00**
Pengeluaran Pembiayaan	**7.010.000.000,00**	**6.285.000.000,00**	**12.900.000.000,00**	**7.800.000.000,00**	**12.900.000.000,00**
Penyertaan Modal (Investasi Daerah)	7.010.000.000,00	6.285.000.000,00	12.900.000.000,00	7.800.000.000,00	12.900.000.000,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**7.010.000.000,00**	**6.285.000.000,00**	**12.900.000.000,00**	**7.800.000.000,00**	12.900.000.000,00
Pembiayaan Neto	***585.678.501.522,09***	***884.177.835.763,37***	***600.000.000.000,00***	***754.000.000.000,00***	***100.000.000.000,00***

Sumber : BPKAD Kabupaten Sidoarjo

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa dari segi jumlah penerimaan pembiayaan daerah menunjukkan tren yang fluktuatif, hal ini lebih banyak disebabkan oleh ada sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SILPA) yang disebabkan karena ada beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan namun serapan dari anggaran belum mencapai 100 persen baik karena belum sepenuhnya diserap ataupun karena pemerintah berhasil melakukan efisiensi anggaran, atau juga karena ada beberapa program dan kegiatan yang tidak terealisasi sehingga mengakibatkan adanya selisih antara anggaran dan realisasinya.

Pada tahun 2017 Pembiayaan Daerah sebesar Rp 592.688.501.522,09. Pada Realisasi APBD tahun 2018 naik menjadi Rp 884.177.835.763,37. Pada APBD tahun 2019 lebih rendah yaitu Rp 600.000.000.000,00. Sedangkan pada tahun 2020 di estimasikan pembiayaan daerah sebesar Rp. 754.000.000.000,00.

3.2.3.2. Arah Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan untuk:

a. Penyertaan modal pemerintah daerah

Penyertaan modal (investasi) kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dalam rangka pelayanan/ pemberdayaan masyarakat untuk pemberian dana bergulir dan pembelian gabah petani.

Tabel 3. 9
Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2017, APBD Tahun 2018 dan 2019, serta RAPBD Tahun 2020

URAIAN	REALISASI 2017	REALISASI 2018	APBD 2019	RAPBD 2020	PROYEKSI RAPBD 2021
Pengeluaran Pembiayaan	**7.010.000.000,00**	**6.285.000.000,00**	**12.900.000.000,00**	**7.800.000.000,00**	**12.900.000.000,00**
Penyertaan Modal (Investasi Daerah)	7.010.000.000,00	6.285.000.000,00	12.900.000.000,00	7.800.000.000,00	12.900.000.000,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**7.010.000.000,00**	**6.285.000.000,00**	**12.900.000.000,00**	**7.800.000.000,00**	12.900.000.000,00
Pembiayaan Neto	***585.678.501.522,09***	***884.177.835.763,37***	***600.000.000.000,00***	***754.000.000.000,00***	***100.000.000.000,00***

Sumber : BPKAD Kabupaten Sidoarjo

Alokasi pengeluaran pembiayaan daerah Kabupaten Sidoarjo dalam beberapa tahun terakhir mengalami fluktuasi dari tahun 2017 ke tahun 2018, sampai tahun 2020. Pada tahun 2017 pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 7.010.000.000,00 menjadi Rp 6.285.000.000,00 pada tahun 2018. Pada Tahun

2019 mencapai Rp 12.900.000.000,00 dan di tahun 2020 di estimasi mencapai 7.800.000.000.

3.3 Rekapitulasi Realisasi dan Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah

Perkembangan anggaran Kabupaten Sidoarjo selama beberapa tahun terakhir dan satu tahun mendatang memiliki postur yang sama. Peningkatan pendapatan daerah masih tetap diiringi dengan peningkatan belanja daerah. Namun demikian jumlah pembiayaan ataupun belanja yang dikeluarkan tentunya bertujuan untuk melaksanakan misi pembangunan daerah dengan berbagai program dan kegiatan yang ditujukan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat serta untuk kemajuan Kabupaten Sidoarjo.

Arah kebijakan anggaran diupayakan lebih efektif dan efisien dalam mendukung program peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berikut merupakan ikhtisar dari besarnya penerimaan daerah, alokasi belanja daerah, serta pembiayaan baik pengeluaran maupun pendapatan Kabupaten Sidoarjo.

Tabel 3. 10

Rekapitulasi Realisasi APBD Tahun 2017, APBD Tahun 2018, 2019, RAPBD Tahun 2020 dan Proyeksi RAPBD 2021

URAIAN	REALISASI 2017	REALISASI 2018	APBD 2019	RAPBD 2020	PROYEKSI RAPBD 2021
PENDAPATAN DAERAH	***4.045.685.362.112,53***	***4.332.577.984.768,01***	***4.226.488.930.000,00***	***4.079.767.188.177,00***	***4.032.373.159.435,24***
Pendapatan Asli Daerah	**1.671.806.819.696,53**	**1.685.558.666.147,01**	**1.603.002.870.000,00**	**1.770.526.779.717,00**	**1.549.089.618.267,08**
Pajak Daerah	925.569.237.852,49	961.840.717.556,86	992.946.880.000,00	1.062.525.000.000,00	1.016.043.788.466,00
Retribusi Daerah	80.087.712.759,50	93.100.506.077,53	60.634.325.282,00	73.946.284.225,00	103.871.035.698,74
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	29.304.699.967,00	34.760.702.313,00	35.269.955.596,00	36.686.467.300,00	31.990.747.126,76
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	636.845.169.117,54	595.856.740.199,62	514.151.709.122,00	597.369.028.192,00	397.184.046.975,59
Dana Perimbangan	**1.708.887.132.594,00**	**1.793.474.341.790,00**	**1.767.882.511.000,00**	**1.438.141.340.460,00**	**1.925.547.805.738,23**
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	119.779.273.575,00	185.811.982.977,00	144.644.504.000,00	182.306.267.460,00	175.039.776.103,60
Dana Alokasi Umum	1.203.737.401.000,00	1.191.856.625.000,00	1.255.835.073.000,00	1.255.835.073.000,00	1.240.086.963.754,00
Dana Alokasi Khusus	385.370.458.019,00	415.805.733.813,00	367.402.934.000,00	-	159.044.339.211,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	**664.991.409.822,00**	**853.544.976.831,00**	**855.603.549.000,00**	**871.099.068.000,00**	**350.021.469.680,83**
Pendapatan Hibah	-	143.491.880.000,00	144.000.000.000,00	144.000.000.000,00	-
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	381.915.672.306,00	391.628.561.735,00	352.260.423.000,00	386.200.000.000,00	350.021.469.680,83

URAIAN	REALISASI 2017	REALISASI 2018	APBD 2019	RAPBD 2020	PROYEKSI RAPBD 2021
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	268.220.391.016,00	292.400.305.606,00	359.343.126.000,00	340.899.068.000,00	-
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah	14.855.346.500,00	26.024.229.490,00	-		-
Jumlah Pendapatan	***4.045.685.362.112,53***	***4.332.577.984.768,01***	***4.226.488.930.000,00***	***4.079.767.188.177,00***	***4.032.373.159.435,24***
BELANJA DAERAH	***3.748.313.122.059,10***	***4.188.537.810.911,10***	***4.826.488.930.000,00***	***4.833.767.188.177,00***	***4.127.405.873.052,24***
Belanja Tidak Langsung	**2.036.794.548.538,16**	**2.061.180.080.678,39**	**2.390.717.308.099,65**	**2.104.719.243.429,00**	**2.515.942.750.358,72**
Belanja Pegawai	1.264.759.726.621,71	1.274.409.734.119,00	1.492.157.103.618,10	1.241.621.552.949,00	1.863.714.804,734,62
Belanja Bunga	-	-	-	-	-
Belanja Hibah	145.911.030.742,43	217.991.296.776,39	210.601.062.000,00	203.816.178.500,00	125.269.702.100,00
Belanja Bantuan Sosial	47.732.025.000,00	57.659.202.664,00	73.097.083.100,35	73.432.005.000,00	55.337.353.560,00
Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi /Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	101.321.451.159,51	113.511.515.586,00	105.358.120.528,20	113.647.128.422,00	119.560.974.783,32
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten Kota dan Pemerintah Desa	476.197.488.480,51	397.608.331.533,00	499.293.533.651,00	467.202.378.558,00	349.059.915.180,00
Belanja Tidak Terduga	872.826.534,00	-	10.210.405.202,00	5.000.000.000,00	3.000.000.000,00
Belanja Langsung	**1.711.518.573.520,94**	**2.127.357.730.232,71**	**2.435.771.621.900,35**	**2.729.047.944.748,00**	**1.611.463.122.693,52**
Belanja Pegawai	127.872.939.754,08	145.368.363.650,16	177.079.353.469,00		
Belanja Barang dan Jasa	1.018.412.075.491,45	1.171.424.218.249,97	1.242.223.155.769,02		
Belanja Modal	565.233.558.275,41	810.565.148.332,58	1.016.469.112.662,33		
Jumlah Belanja	**3.748.313.122.059,10**	***4.188.537.810.911,10***	**4.826.488.930.000,00**	**4.833.767.188.177,00**	**4.127.405.873.052,24**

URAIAN	REALISASI 2017	REALISASI 2018	APBD 2019	RAPBD 2020	PROYEKSI RAPBD 2021
Surplus (Defisit)	***297.372.240.053,43***	***144.040.173.856,91***	**(600.000.000.000,00)**	**(754.000.000.000,00)**	**(100.000.000.000,00**
PEMBIAYAAN DAERAH	**585.678.501.522,09**	***884.177.835.763,37***	***600.000.000.000,00***	***754.000.000.000,00***	***100.000.000.000,00***
Penerimaan Pembiayaan	**592.688.501.522,09**	**890.462.835.763,37**	**612.900.000.000,00**	**761.800.000.000,00**	**112.900.000.000,00**
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	583.992.202.843,64	883.050.741.575,52	600.000.000.000,00	754.000.000.000,00	100.000.000.000,00
Penerimaan Pengembalian Dana Bergulir	8.696.298.678,45	7.412.094.187,85	12.900.000.000,00	7.800.000.000,00	12.900.000.000,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**592.688.501.522,09**	**890.462.835.763,37**	**612.900.000.000,00**	**761.800.000.000,00**	**112.900.000.000,00**
Pengeluaran Pembiayaan	**7.010.000.000,00**	**6.285.000.000,00**	**12.900.000.000,00**	**7.800.000.000,00**	**12.900.000.000,00**
Penyertaan Modal (Investasi Daerah)	7.010.000.000,00	6.285.000.000,00	12.900.000.000,00	7.800.000.000,00	12.900.000.000,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**7.010.000.000,00**	**6.285.000.000,00**	**12.900.000.000,00**	**7.800.000.000,00**	12.900.000.000,00
Pembiayaan Neto	***585.678.501.522,09***	***884.177.835.763,37***	***600.000.000.000,00***	***754.000.000.000,00***	***100.000.000.000,00***

Sumber : BPKAD Kabupaten Sidoarjo

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas pembangunan daerah tahun 2020 Kabupaten Sidoarjo disusun sebagai penjabaran RPJMD tahun 2016-2021 pelaksanaan tahun kelima. Penyusunan prioritas dirumuskan berdasarkan hasil pencapaian kinerja pembangunan tahun 2019-2020, peluang dan tantangan pembangunan daerah merujuk pada prioritas pembangunan nasional seperti termuat dalam RKP tahun 2020, RKPD Provinsi Jawa Timur tahun 2020 serta aspirasi masyarakat yang disepakati dalam hasil Musrenbang tahunan daerah Kabupaten Sidoarjo.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Untuk melaksanakan pembangunan dan mewujudkan misi jangka panjang, proses pembangunan harus dibagi menjadi empat tahapan atau periode yang disebut dengan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dengan masing-masing periode memiliki jangka waktu selama lima tahun. Periode RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 telah selesai dilaksanakan dan telah memberikan dampak yang baik pada masyarakat Kabupaten Sidoarjo. Berbagai kemajuan telah dicapai oleh Kabupaten Sidoarjo, namun agenda pembangunan tidak dapat berhenti begitu saja.

Dengan mempertimbangkan potensi, peluang, tantangan, masalah dan kondisi yang ada di Kabupaten Sidoarjo, dan mempertimbangkan sosial, ekonomi dan budaya dalam masyarakat, isu strategis serta capaian hasil pembangunan tahun sebelumnya. Merujuk kepada Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 – 2025 dan memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019 dan RPJMN tahun 2014-2019, serta perumusan permasalahan dan tantangan pada tahun sebelumnya, maka tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2020 mengacu kepada Visi Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo tahun 2016–2021

***"Kabupaten Sidoarjo yang Inovatif, Sejahtera, Mandiri dan Berkelanjutan"*.**

Tema dalam RKPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 selaras dengan penjabaran visi "Mandiri" yang artinya masyarakat yang mampu mengembangkan potebnsi, mampu mencukupi kebutuhannya sendiri secara layak dengan mengoptimalkan keunggulan dan potensi yang dimiliki.

Dalam penyusunan RKPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 juga mempertimbangkan misi dan agenda prioritas pembangunan nasional yang ada dalam RPJMN 2015-2019, sebagai berikut:

a. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
b. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
c. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
d. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
e. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
f. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
g. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Selanjutnya Provinsi Jawa timur telah menetapkan prioritas pembangunan dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur periode 2014-2019 dengan visi "Jawa Timur lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, berdaya Saing, dan Berakhlak" dan dengan rumusan misi pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan
2. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/agroindustri, dan industrialisasi
3. Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, dan penataan ruang
4. Meningkatkan reformasi birokrasi, dan pelayanan publik
5. Meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmoni sosial

Dalam mewujudkan visi dan misi yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 – 2021, serta dengan memperhatikan kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Timur, maka dibutuhkan kerangka perencanaan pembangunan

daerah tahun 2020 yang jelas agar setiap pelaksanaan tujuan dan sasaran pada setiap kegiatan pemerintahan daerah berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi Kabupaten Sidoarjo. Kerangka perencanaan pembangunan yang jelas sekaligus menjadi arahan maupun pedoman pelaksanaan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun penunjang pemerintahan.

Dengan demikian kebijakan pembangunan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 difokuskan pada isu-isu strategis yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagaimana tercantum dibawah ini:

1. Kualitas dan pemerataan pendidikan masih belum optimal yakni sebesar 96% untuk jenjang SD dan 79% untuk jenjang SMP. Dalam menunjang kenaikan partisipasi pendidikan untuk menciptakan pemerataan pendidikan di Kabupaten Sidoarjo, masih dinilai kurang. Permasalahan pada urusan pendidikan antara lain kualitas tenaga pendidik, sarana dan prasarana pendidikan yang belum merata, serta hubungan antara pendidikan kejuruan dengan kebutuhan tenaga kerja di lapangan yang tidak seimbang.
2. Permasalahan dalam bidang kesehatan antara lain adalah menurunnya angka morbiditas, selain itu pelayanan kesehatan dasar belum mampu dijangkau dan diakses oleh masyarakat khususnya masyarakat miskin. Selain itu, fasilitas sarana dan prasarana kesehatan dan kesadaraan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat masih perlu ditingkatkan.Masih terdapat di beberapa di kecamatan anak yang masih stunting.
3. Permasalahan utama dalam urusan pekerjaan umum yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo adalah pembangunan jalan yang rusak. Bertambahnya jumlah jalan yang baik seharusnya dapat diimbangi dengan berkurangnya jumlah jalan yang rusak. Dengan demikian perlu adanya perencanaan dalam pemetaan kondisi jalan dan segera melakukan tindak lanjut untuk dapat mendorong pembangunan daerah melalui infrastruktur.Untuk menjawab itu semua maka pemkab sidoarjo telah melakukan betonasi jalan.
4. Permasalahan yang sering dihadapi perkotaan adalah terkait kawasan kumuh. Hal tersebut juga menjadi permasalahan bagi pemkab Sidoarjo dalam menangani masalah permukiman kumuh yang ada pada wilayah padat area terutama pada wilayah industri dan perdagangan. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo masih perlu meningkatkan kinerja urusan perumahan dengan menambah pembangunan

sarana air bersih, pembangunan jalan lingkungan serta meningkatkan kesadaran akan bahaya kebakaran bagi masyarakat.Masyarakat perlu dilatih untuk secara mandiri menanggulangi kebencanaan seperti puting beliung, banjir dll

5. Permasalahan sosial di Kabupaten Sidoarjo diantaranya meningkatnya jumlah PMKS di kabupaten Sidoarjo, belum optimalnya sarana dan prasarana penanganan PMKS, belum tersedianya data kemiskinan *by name by address* lintas perangkat daerah. Jumlah penanganan PMKS dari tahun 2017 ke tahun 2018 meningkat. Pada tahun 2017 yang ditangani sebesar 31.667 PMKS dan di tahun 2018 meningkat menjadi 95.618 PMKS yang tertangani. Hal ini merupakan masalah fundamental di setiap daerah, sehingga perlu mendapat perhatian yang besar.
6. Peningkatan tingkat pengangguran memberikan tugas tersendiri bagi pemerintah dalam menyelesaikan urusan ketenagakerjaan. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidoarjo harus dapat digiring untuk menciptakan lapangan kerja sehigga dapat menurunkan tingkat pengangguran. Terbatasnya balai sarana pelatihan membuat banyaknya penganggur yang *unskill*.
7. Masih adanya tindak kekerasan pada anak dan perempuan memerlukan tindakan yang tegas dan perlindungan dari pemerintah daerah. Penegakan peraturan dan kebijakan perlindungan anak dan perempuan yang aktif diupayakan untuk meminimalisir tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan.
8. Ketersediaan pangan daerah masih lebih banyak dipenuhi dari luar daerah dibanding dengan hasil produksi sendiri.
9. Permasalahan terkait lingkungan hidup di antaranya adalah terus meningkatnya jumlah sampah, masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam pelestarian lingkungan dan masih rendahya kawasan hijau atau ruang terbuka hijau di Kabupaten Sidoarjo. Kabupaten Sidoarjo juga merupakan wilayah dengan sektor basis industri dan perdagangan, sehingga berpotensi besar untuk mengalami peningkatan pencemaran lingkungan.Oleh karena itu, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan menjadi sangat strategis untuk diupayakan pemkab.
10. Bertambahnya jumlah penduduk akan berdampak pada tuntutan masyarakat akan kinerja pelayanan administrasi kependudukan. Masih adanya penduduk yang belum memiliki dokumen kependudukan menuntut pemerintah daerah

untuk dapat bersosialisasi serta meningkatkan pelayanan dan inovasi administrasi kependudukan. Respon yang cepat terhadap penduduk pendatang juga perlu dilakukan untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan.

11. Fasilitas perhubungan merupakan salah satu aspek penting bagi pembangunan perekonomian daerah. Akses jalan dan fasilitas sarana prasarana yang kurang memadai pada daerah pedesaan akan menghambat pembangunan daerah. Oleh karena itu perlu adanya penanganan khusus dari pemerintah kabupaten untuk menambah dan meningkatkan kualitas angkutan pedesaan. Selain itu, pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga perlu menyediakan infrastruktur yang memadai bagi peyandang cacat (kota insklusif).Hal terpenting dari urusan perhubungan adalah mengurai ttitk kemacetan di kota Sidoarjo.
12. Belum optimalnya pemanfaatan dan pengintegrasian TIK (Teknologi informasi dan Komunikasi) dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Sidoarjo. Serta masih adanya kesenjangan pemanfaatan teknologi informasi antara desa dengan kota.
13. Mengembangkan perekonomian melalui UKM, pemerintah daerah harus dapat mendorong masyarakat untuk meningkatkan jiwa wirausaha agar dapat meningkatkan jumlah UMKM. Pengembangan ekonomi kreatif dapat mendorong masyarakat untuk berinovasi dan meningkatkan gairah UMKM Kabupaten Sidoarjo. Kualitas manajerial koperasi perlu ditingkatkan untuk mendorong kondisi kesehatan koperasi.
14. Untuk urusan investasi pemerintah Kabupaten Sidoarjo perlu melakukan reformasi birokrasi dan mendorong iklim investasi, terutama investasi domestik. Dengan mempermudah akses perijinan investasi, akan menarik banyak investor domestik. Selain itu pemetaan atau *road map* investasi juga perlu dilakukan untuk mengidentifikasi bidang-bidang unggulan yang memerlukan dorongan investasi.
15. Urusan kepemudaan dan olahraga pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga harus mendorong prestasi para atlet untuk terus meningkatkan bakat dalam bidang olahraga. Permasalahan yang terjadi adalah kurangnya sarana dan prasarana olahraga berbagai cabor, sehingga bakat dan minat atlet belum bisa tersalurkan secara optimal.
16. Urusan kebudayaan terkendala oleh terbatasnya sarana dan prasarana pemerintah yang dapat dimanfaatkan masyarakat dalam rangka meningkatkan

kinerja bidang kebudyaan. Selain itu belum tertatanya kelembagaan yang menangani kebudyaan lokal daerah. Selain itu terbatasnya partisipasi masyarakat pada kegiatan budaya juga menjadi permasalahan tersendiri bagi pembangunan budaya Kabupaten Sidoarjo.

17. Produksi perikanan Kabupaten Sidoarjo cenderung mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Untuk produksi perikanan tangkap dan budidaya tahun 2018 juga mengalami peningkatan dibanding tahun 2017. Hal ini disebabkan adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Perikanan supaya hasil produksi perikanan meningkat.Namun demikian produktifitas perikanan harus lebih ditingkatkan kualitasnya dari segi bibit maupun pemasarannya.
18. Jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Sidoarjo cenderung meningkat dari tahun ke tahun, tetapi jumlah ini masih sedikit jika dibandingkan dengan daerah lain. Perlu adanya peningkatan dan pengembangan industri kreatif di Kabupaten Sidoarjo.
19. Terdapat beberapa komoditi pertanian yang mengalami penurunan seperti tebu, hal ini dikarenakan berkurangnya area tanaman tebu karena fungsi lahan telah berubah menjadi perumahan, lokasi industri, dan perdagangan dan komoditas tanaman, turunnya minat petani untuk menanam tebu karena harga gula tidak menjamin dan dinilai kurang memberikan keuntungan dan bibit yang sudah waktunya harus diganti, namun tidak segera diganti.
20. Mendorong kinerja urusan perdagangan promosi produk-produk unggulan perlu dilakukan dalam mendorong ekspor Kabupaten Sidoarjo. Selain itu, peningkatan kualitas produk-produk khas dan unggulan Kabupaten Sidoarjo juga perlu ditingkatkan untuk mendorong sektor perdagangan.
21. Masih banyak ditemukan industri yang belum terstandarisasi. Jumlah industri yang telah terstandarisasi masih jauh sedikit dibandingkan jumlah industri di Kabupaten Sidoarjo.

4.2. Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Tahun 2020

Prioritas pembangunan Kabupaten Sidoarjo tahun 2020 merupakan tindak lanjut atau dalam rangka mendukung program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021. Prioritas pembangunan daerah tahun 2020 dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi pencapaian

kinerja dan proyeksi pencapaian kinerja pemerintah sebelumnya. Prioritas pembangunan tahun 2020 ini adalah sebuah alat atau pedoman untuk mengarahkan pola pembangunan yang berupa program dan kegiatan pada masing-masing Perangkat Daerah untuk fokus pada tujuan dan sasaran yang mengacu pada visi dan misi Kabupaten Sidoarjo.

Dalam penetapan prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2020, selain berpedoman pada pencapaian target kinerja RPJMD tahun kelima, penetapan prioritas pembangunan juga dilakukan dengan mempertimbangkan rencana pembangunan Nasional yang tercantum dalam RKP Tahun 2020 dan rencana pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2020. Keterkaitan Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Nasional dan Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

TEMA RKP 2020		"Peningkatan Sumber Daya Manusia Untuk Pertumbuhan Berkualitas"
TEMA RKPD 2020		"Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Jawa Timur Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berdaya Saing"
TEMA RKPD 2020		"Percepatan Pembangunan Ekonomi Melalui Akselerasi Sektor-Sektor Potensial Daerah"

Gambar 4.1
Tema Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020

Prioritas pembangunan Tahun 2020 tetap diarahkan untuk memperhatikan sinergitas antara pembangunan daerah Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur hingga prioritas pembangunan nasional sebagai berikut:

Tabel 4. 1
Tabel Persandingan Prioritas Nasional, Provinsi Jawa Timur, dan Kabupaten Sidoarjo

NO	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur	Prioritas Pembangunan Kabupaten Sidoarjo
1	Pembangunan manusia dan Pengentasan Kemiskinan	Peningkatan Manusia melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan serta Pengentasan Kemiskinan	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan
2	Konektivitas dan Pemerataan	Pemerataan pembangunan dan Penguatan Konektivitas serta Manajemen Kebencanaan	Optimalisasi pembangunan sistem infrastruktur daerah yang terpadu dan berkelanjutan guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif
3	Nilai Tambah Ekonomi dan Kesempatan Kerja	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Pariwisata, Kualitas Ketenagakerjaan serta Perluasan Kesempatan Kerja	Meningkatkan inovasi, kemandirian dan daya saing ekonomi daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah
4	Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup	Peningkatan Ketahanan Pangan, Pengelolaan Sumber Daya Air, Energi dan Pelestarian Lingkungan Hidup	Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pengembangan tata kelola pemerintahan daerah yang baik
5	Stabilitas pertahanan dan Keamanan	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban	Meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang aman, nyaman, demokratis, berbudaya dan agamis

Arah kebijakan memberikan pedoman dan arahan tema pembangunan dan prioritas tahunan apa yang harus dikerjakan. Pada tiap tahunnya diberikan penekanan terhadap prioritas tertentu sesuai dengan pemetaan strategi yang telah dirumuskan. Prioritas pembangunan RKPD Tahun 2020 dijabarkan dalam 59 program prioritas.

Tabel 4. 2
Tema dan Program Prioritas RKPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020

TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS
1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pengembangan tata kelola pemerintahan daerah yang baik	1. Program pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal 2. Program peningkatan mutu dan relevansi layanan pendidikan 3. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan 4. Program pendidikan sekolah dasar 5. Program pendidikan sekolah menengah pertama 6. Program perluasan dan aksesibilitas Pendidikan 7. Program Penyediaan Dana BOSREG 8. Program pengembangan perpustakaan dan pembudayaan gemar membaca 9. Program pelayanan kesehatan masyarakat 10. Program pengembangan sumber daya kesehatan 11. Program upaya kesehatan masyaraka 12. Program Penumbuhan dan Pengembangan IKM 13. Program Pengembangan, Penyediaan Sarana Prasarana dan Peningkatan Pelayanan infrastruktur melalui kemitraan serta Pendapatan Pasar rakyat 14. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan, peningkatan kerjasama dan pengembangan perdagangan serta pembinaan pedagang informal 15. Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya 16. Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dan Garam 17. Program Pembinaan Usaha Pengolahan dan Pemasaran hasil Perikanan 18. Program Peningkatan Hasil Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan 19. Program Peningkatan Produksi Peternakan dan Hasil Hewan 20. Peningkatan Ketahanan pangan daerah 21. Program Pengembangan Objek, promosi, dan usaha pariwisata 22. Program Pemberdayaan dan Pengembangan, Usaha Koperasi dan Usaha Mikro 23. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 24. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 25. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 26. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
2. Meningkatkan inovasi, kemandirian dan daya saing ekonomi daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah	
3. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	
4. Meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam mewujutkan tatanan kehidupan masyarakat yang aman, nyaman, demokratis, berbudaya dan agamis	
5. Optimalisasi pembangunan system infrastruktur daerah yang terpadu dan berkelanjutan guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif	

TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS
	Perdesaan 27. Program peningkatan keberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat 28. Program Penetapan Pajak Daerah 29. Program Pengendalian Pajak Daerah 30. Program pengelolaan keluarga berencana dan keluarga sejahtera 31. Program Kesetaraan gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 32. Program peningkatan pelayanan pada badan layanan umum daerah 33. Program Pengelolaan, Fasilitasi dan Implementasi Teknologi Informatika 34. Program Peningkatan Kualitas Layanan Data Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 35. Program Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kebinamargaan 36. Program Pembangunan, Peningkatan, Pemeliharaan Jaringan irigasi, pematusan dan pengendalian Banjir 37. Program pembangunan sarana prasarana perumahan dan permukiman 38. Program penataan bangunan 39. Program peningkatan pelayanan angkutan 40. Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan 41. Program Pemberdayan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS Lainnya 42. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 43. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 44. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja 45. Program peningkatan kesempatan kerja dan penyelenggaraan transmigrasi 46. Program pengembangan dan perlindungan ketenagakerjaan 47. Program pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat 48. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 49. Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan 50. Pogram Peningkatan pendidikan politik masyarakat dan hubungan antar lembaga 51. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 52. Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) dan penerangan jalan dan lingkungan 53. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 54. Program Penganggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 55. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS
	56. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 57. Program Pembinaan dan Kesejahteraan ASN 58. Program Peningkatan Kesiagaan, Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran 59. Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan.

Berdasarkan program prioritas nasional dan program prioritas Provinsi Jawa Timur tersebut, maka fokus serta program pembangunan daerah Kabupaten Sidoarjo yang dilaksanakan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 3
Penjelasan Program Pembangunan Daerah Tahun 2020 Kabupaten Sidoarjo

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Fokus Program	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	• Peningkatan Aksesbilitas dan kualitas pendidik*an	1.Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	a. Persentase tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi S1/D4 b. Persentase guru/tenaga pendidik yang berkualifikasi ahli	a. 97,87% b. 80%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			2.Program Perluasan dan Aksesibilitas Pendidikan	a. APM SD/MI b. APK SMP/MTs c. APK SD/MI d. APM SMP/MTs	a. 97,43% b. 92,89% c. 108,64% d. 79,71%	
			3.Program Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	a. APK PAUD b. Persentase PAUD yang telah terakreditasi c. Persentase Pendidikan Non Formal yang memenuhi standar	a. 92,89% b. 35% c. 30%	
			4.Program Pendidikan Sekolah Dasar	a. Rasio jumlah ruang kelas terhadap jumlah siswa b. Rata-Rata Nilai UN SD/MI c. APK SD/MI d. Persentase bangunan ruang kelas SD kategori baik e. APM SD/MI f. Rasio guru terhadap murid untuk jenjang SD	a. 1:28 b. 8,40 c. 108,64% d. 95,25% e. 97,43% f. 1:28	
			5.Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	a. Persentase bangunan ruang kelas SMP kategori baik b. APK SMP/MTs c. Rasio guru terhadap murid untuk jenjang SMP d. Rasio jumlah ruang kelas terhadap jumlah siswa untuk jenjang SMP e. APM SMP/MTs	a. 95,39% b. 99,45% c. 1:32 d. 1:32 e. 79,71% f. 6,95	

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Fokus Program	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				f. Rata-rata nilai UN SMP/MTs		
			6.Program Peningkatan Mutu dan Relevansi Layanan Pendidikan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pengelolaan dan pelayanan pendidikan	97%	
			7.Program Penyediaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Regional (BOSREG)	a. APM SD/MI b. APM SMP/MTs c. APK SMP/MTs d. APK SD/MI	a. 97,43% b. 79,71% c. 92,89% d. 108,64%	
			8.Program Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan	a. Jumlah kelompok seni yang melestarikan seni dan budaya daerah b. Jumlah seni dan budaya daerah yang dibina menjadi destinasi wisata	a. 4 Kelompok b. 2 jenis	
		• Peningkatan Aksesbilitas dan Kualitas Kesehatan	1.Program Upaya Kesehatan Masyarakat	a. AKB b. Persentase desa siaga aktif purnama mandiri c. Persentase Usia lanjut yang sehat d. Persentase balita stunting e. AKI	a. 6,6 b. 50 c. 53 d. 24,2 e. 71,2	Dinas Kesehatan
			2.Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat	a. Persentase Puskesmas dengan akreditasi minimal dasar b. Persentase FKTL yang memenuhi akreditasi c. Persentase Penyehat tradisional yang memiliki STPT (Surat Terdaftar Pengobat Tradisional) d. Persentase keluarga yang disurvey KS e. stunting f. Persentase penduduk memiliki jaminan kesehatan	a. 100% b. 70% c. 16% d. 20% e. 90%	

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Fokus Program	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			3.Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan	a. Persentase ketersediaan obat dan vaksin b. Persentase puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standar c. Persentase IRPT yang mendapatkan sertifikat (ijin edar) d. Persentase nakes yang memiliki ijin praktek	a. 100% b. 100% c. 100% d. 100%	
			4.Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	a. Angka keberhasilan pengobatan TB b. Persentase Penduduk 18 Th dengan Hipertensi c. Persentase Desa/Kel UCI d. Persentase orang terinfeksi HIV positif mendapatkan ARV	a. 93 b. 23 c. 90 d. 90	
			5.Program Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas	Puskesmas Terakreditasi	26	
			6.Program Pengelolaan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	a. Persentase pencapaian peserta KB Baru b. Persentase PPKBD yang aktif c. Persentase kelompok bina keluarga yang mandiri d. Persentase pencapaian peserta KB aktif	a. 85% b. 85,5% c. 73% d. 100%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana
			7.Program Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Anak	a. Prosentase Lembaga/organisasi yang melaksanakan kebijakan PUG dan Pemberdayaan Perempuan b. Prosentase Kasus Kekerasan dan Trafficking Terhadap Perempuan dan Anak c. Prosentase Lembaga/organisasi	a. 55,19% b. 100% c. 44,19% d. 19,31%	

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Fokus Program	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				yang melaksanakan kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak d. Prosentase Lembaga/Organisasi yang melaksanakan kebijakan Pemenuhan Hak Anak		
			8.Program Peningkatan Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah	a. Bed Turn Over (BTO) b. Gross Death Rate (GDR) c. Persentase penyusunan dokumen perencanaan yang tepat waktu d. Persentase Indikator SPM Bidang penunjang Medis dan Non Medis yang mencapai target e. Persentase keluhan pelanggan (Number of Complain) f. Persentase Indikator SPM Bagian Umum yang mencapai target g. Persentase indikator SPM Bagian Keuangan yang mencapai target h. Average Length of Stay (ALOS) i. Persentase elemen penilaian akreditasi rumah sakit yang memenuhi standar akreditasi j. Persentase indikator SPM Bagian Perencanaan dan Pemasaran yang mencapai target k. Persentase KSO baru dibidang non pelayanan kesehatan yang diselesaikan l. Persentase KSO baru dibidang pelayanan kesehatan yang diselesaikan m. Turn Over Interval (TOI)	a. 40-50 kali b. 45% c. 100% d. 95% e. 0,02% f. 95% g. 95% h. 6-9 hari i. 85% j. 95% k. 27% l. 18% m. 1-3 hari n. 15% o. 100% p. 90% q. 100% r. 90% s. 100% t. 25% u. 60-85% v. 95%	Rumah Sakit Umum Daerah

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Fokus Program	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				n. Persentase diterbitkan penelitian dalam jurnal ilmiah o. Persentase tercapainya indikator keuangan sesuai standar p. Persentase terlaksananya pengukuran parameter akreditasi rumah sakit pendidikan yang memenuhi standar akreditasi q. Persentase terlaksananya evaluasi Standar Asuhan keperawatan r. Persentase indikator SPM bagian SDM dan Diklit yang mencapai target s. Ketepatan Waktu penyusunan laporan keuangan t. Net Death Rate (NDR) u. Bed Occupancy Rate (BOR) v. Persentase indikator SPM bidang pelayanan yang mencapai target		
2	Optimalisasi pembangunan sistem infrastruktur daerah yang terpadu dan berkelanjutan guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif	• Pembangunan dan pengembangan infrastruktur daerah yang berkualitas, merata dan sinergis dengan potensi ekonomi daerah	1.Program Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Kebinamargaan	a. Persentase panjang jalan dan jembatan yang dipelihara b. Persentase panjang jalan kabupaten yang dibangun c. Persentase panjang bagian-bagian jalan kabupaten yang dibangun d. Persentase pemanfaatan jalan dan jembatan yang berijin e. Persentase panjang jalan kabupaten yang ditingkatkan f. Persentase panjang jalan penghubung pusat kegiatan baru	a. 9,00% b. 1,75% c. 0,27% d. 100% e. 1,87% f. 100%	Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Sumber Daya Air

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Fokus Program	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2.Program Penyusunan Perencanaan Teknis dan Pengelolaan Data ke-PU-an	a. Persentase perencanaan teknis jalan dan jembatan yang disusun b. Persentase perencanaan teknis itrigasi yang disusun c. Persentase perencanaan teknis pematusan dan pengendalian banjir yang disusun	a. 100% b. 100% c. 100%	
			3.Program Pembangunan, Peningkatan, Pemeliharaan Jaringan Irigasi, Pematusan dan Pengendalian Banjir	a. Persentase pemenuhan sarpras pengendalian banjir b. Persentase jaringan irigasi yang dibangun/ditingkatkan dan dipelihara c. Persentase saluran pematusan yang dibangun/ditingkatkan dan dipelihara d. Persentase aset pengairan tertangani e. Persentase pembinaan dan penyuluhan di kecamatan	a. 65% b. 87% c. 25% d. 37,4% e. 90%	
			4.Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Persentase sarana dan prasarana perhubungan yang berfungsi dengan baik (dalam RIK)	80%	Dinas Perhubungan
			5.Program Evaluasi Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Persentase penurunan pelanggaran kelayakan jalan	2,60%	
			6.Program Penyusunan Kebijakan Teknis, Norma, Standart Prosedur dan Sistem	Persentase rekomendasi andalalin yang digunakan untuk kebijakan peningkatan layanan kapasitas jalan	100%	

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Fokus Program	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Informasi Dibidang Perhubungan			
			7.Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Persentase masyarakat yang merasa puas dengan pelayanan angkutan umum	80%	
			1.Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Persentase Lembaga/organisasi masyarakat desa/kelurahan yang mempunyai peran aktif dalam pembangunan desa/kelurahan	95%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			2.Program Pembinaan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang melaksanakan administrasi pemerintah desa sesuai ketentuan	95%	
			3.Program Pembinaan Keuangan, Aset dan Kekayaan Desa	Persentase desa yang menyusun tatakelola keuangan aset dan kekayaan sesuai ketentuan	90%	
		• Pengendalian pembangunan yang berwawasan lingkungan	1.Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	a. Persentase pelaku usaha dan kegiatan yang telah melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Bidang Lingkungan Hidup dengan tepat b. Persentase penanganan pengaduan tentang kasus pencemaran lingkungan hidup yang diselesaikan c. Persentase kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup	a. 1,61% b. 100% c. 10,08%	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
			2.Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase volume sampah yang terlayani di TPA dan TPST	53%	
			3.Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) dan penerangan	a. Luas RTH yang dikelola b. Persentase PJU yang terpasang dalam kondisi baik	a. 42,05 Ha b. 82,00%	

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Fokus Program	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			jalan dan lingkungan			
			4.Program Tata Lingkungan dan Pengendalian Pencemaran	a. Persentase pelaku usaha dan kegiatan yang mempunyai Rekomendasi Teknis Izin Pembuangan Air Limbah b. Persentase ketersediaan informasi pemantauan kualitas lingkungan c. Persentase pelaku usaha dan kegiatan yang mempunyai Rekomendasi Teknis Izin Pengelolaan Limbah B3 d. Persentase pelaku usaha dan kegiatan yang menerapkan dokumen lingkungan	a. 1,54% b. 39% c. 5,38% d. 12,31%	
		• Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang yang berkelanjutan	1.Program Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Kebinamargaan	a. Persentase panjang jalan dan jembatan yang dipelihara b. Persentase panjang jalan kabupaten yang dibangun c. Persentase panjang bagian-bagian jalan kabupaten yang dibangun d. Persentase pemanfaatan jalan dan jembatan yang berijin e. Persentase panjang jalan kabupaten yang ditingkatkan f. Persentase panjang jalan penghubung pusat kegiatan baru	a. 9,00% b. 1,75% c. 0,27% d. 100% e. 1,87% f. 100%	Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Sumber Daya Air
			2.Program Pembangunan, Peningkatan, Pemeliharaan Jaringan Irigasi, Pematusan dan	a. Persentase pemenuhan sarpras pengendalian banjir b. Persentase jaringan irigasi yang dibangun/ditingkatkan dan dipelihara	a. 65% b. 87% c. 25% d. 37,4%	

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Fokus Program	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Pengendalian Banjir	c. Persentase saluran pematusan yang dibangun/ditingkatkan dan dipelihara d. Persentase aset pengairan tertangani e. Persentase pembinaan dan penyuluhan di kecamatan	e. 90%	
			1.Program Penataan Bangunan	Persentase bangunan gedung negara yang layak fungsi	43%	Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang
			2.Program Pengawasan Bangunan	Persentase bangunan yang ber-IMB	64,5%	
			3.Program Penataan Ruang, Pengadaan Tanah, dan Fasilitasi Permasalahan Pertanahan	a. Persentase peningkatan pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang b. Persentase terfasilitasinya permasalahan pertanahan dan pengadaan tanah sesuai prosedur	a. 65% b. 100%	
			4.Program Pembangunan Sarana Prasarana Perumahan dan Permukiman	a. Persentase pelayanan PALD sesuai target b. Persentase penanganan drainase sesuai dengan kajian c. Persentase prasarana air bersih yang disediakan sesuai target d. Persentase jalan lingkungan perumahan dan permukiman dalam kondisi baik e. Persentase prasarana sanitasi yang disesuaikan sesuai target f. Persentase penurunan luasan kawasan kumuh g. Persentase jumlah hunian	a. 9% b. 70% c. 5% d. 93% e. 93% f. 58,5% g. 97%	

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Fokus Program	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RUSUNAWA yang dihuni		
			1.Program Pencegahan Dini, Kesiapsiagaan, Tanggap Darurat dan Manajemen Logistik Kebencanaan	a. Persentase logistik kebencanaan yang tersalurkan tetap sasaran dan sesuai kebutuhan b. Persentase desa tangguh bencana di Kabupaten Sidoarjo	a. 100% b. 90%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			2.Program Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	a. Persentase bantuan pasca bencana yang terealisasi b. Persentase korban bencana yang terehabilitasi	a. 60% b. 100%	
			3.Program Peningkatan Kesiagaan, Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	a. Persentase wilayah kabupaten yang sudah mempunyai pos pmk b. Persentase satuan petugas PMK yang memiliki sertifikasi sesuai standar kualifikasi c. Cakupan wilayah kabupaten yang tertangani dalam waktu tanggap	a. 25% b. 65% c. 40%	
2	Meningkatkan inovasi, kemandirian dan daya saing ekonomi daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah	• Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	1.Program Penetapan Pajak Daerah.	Persentase jumlah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang sesuai ketentuan	83%	Badan Pelayanan Pajak Daerah
			2.Program Pengendalian Pajak Daerah	Persentase realisasi pembayaran tagihan pajak daerah	23%	
			3.Program Pendataan, Peningkatan dan Pengembangan Pajak Daerah.	Persentase pertumbuhan objek pajak daerah	4%	
			1.Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Jumlah pemuda yang berprestasi di tingkat Regional, Nasional dan Internasional	30 orang	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Fokus Program	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2.Program Pelayanan Pemanfaatan Fasilitas Keolahragaan	Jumlah Standart Operasional Procedure (SOP) yang dimiliki	3 SOP	Pariwisata
			3.Program Peningkatan Peran Serta dan Pemberdayaan Keolahragaan	Jumlah prestasi yang diraih tingkat Regional, Nasional, dan Internasional	155 prestasi	
		• Pemberdayaan ekonomi lokal dan perluasan kesempatan kerja	1.Program Pengembangan dan Perlindungan Ketenagakerjaan	a. Persentase perusahaan yang menerapkan fasilitas kesejahteraan pekerja b. Persentase perusahaan yang memiliki LKS Bipartit c. Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang difasilitasi penyelesaiannya melalui Perjanjian Bersama (PB)	a. 35% b. 22% c. 13%	Dinas Tenaga Kerja
			2.Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Penyelenggaraan Transmigrasi	a. Persentase pencari kerja yang telah difasilitasi penempatannya b. Persentase transmigran yang berhasil (bekerja sendiri/membuka lapangan usaha atau ke orang lain) c. Persentase peserta bimtek TKMT & kewirausahaan yang telah membuka usaha	a. 67% b. 10% c. 7%	Dinas Tenaga Kerja
			3.Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	a. Persentase lulusan pelatihan yang memiliki keterampilan / kompetensi b. Persentase lembaga pelatihan tenaga kerja yang terakreditasi	a. 81% b. 19%	
			1.Pemberdayaan dan Pengembangan, Usaha Koperasi dan Usaha Mikro	a. Persentase Koperasi sehat b. Persentase pertumbuhan usaha mikro c. Persentase SDM/Pengelola Koperasi	a. 40,22% b. 4,62% c. 23,60%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Fokus Program	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				bersertifikat SKKNI		
			2.Program Pengendalian dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro	a. Persentase koperasi yang memiliki derajat kepatuhan berkoperasi b. Persentase Usaha mikro yang memiliki derajat kepatuhan usaha mikro	a. 14,18% b. 48,01%	
			3.Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	92,18%	
			1.Program Peningkatan Keberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat	a. Persentase usaha ekonomi masyarakat pedesaan yang berkembang : UPPKS Berkembang b. Persentase usaha ekonomi masyarakat pedesaan yang berkembang : UED-SP Berkembang c. Persentase usaha ekonomi masyarakat pedesaan yang berkembang : P 3 EL Berkembang d. Persentase usaha ekonomi masyarakat pedesaan yang berkembang : BUMDES Berkembangan	a. 42% b. 46% c. 41% d. 15,5%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		• Pengembangan produk unggulan daerah yang berdaya saing global	1.Program Pengembangan, Penyediaan Sarana Prasarana dan Peningkatan Pelayanan infrastruktur melalui kemitraan serta Pendapatan Pasar rakyat	SKM terhadap layanan pasar	76,9%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Fokus Program	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2.Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan, peningkatan kerjasama dan pengembangan perdagangan serta pembinaan pedagang informal	a. Nilai ekspor non migas b. Nilai net ekspor perdagangan dalam negeri	a. 2,75 Triliun b. 1859	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			3.Program Penumbuhan dan Pengembangan IKM	a. Persentase pertumbuhan usaha industri b. Persentase IKM yang terstandarisasi	a. 0,81% b. 4,35%	
		• Peningkatan pemanfaatan teknologi tempat guna yang inovatif	1.Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	a. Nilai realisasi investasi PMA b. Persentase permasalahan penanaman modal yang diselesaikan c. Nilai realisasi investasi PMDN	a. 676.428 Milyar b. 200 permasalahan c. 17.328 Triliun	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			2.Program Peningkatan Promosi dan Kerja sama Investasi	a. Jumlah investor baru b. Persentase peningkatan kepeminatan untuk kerjasama	a. 162 investor b. 2%	
			3.Program Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	a. Persentase kontribusi retribusi pelayanan perizinan tertentu terhadap PAD b. Persentase pelayanan perizinan tertentu yang tepat waktu sesuai SOP c. Persentase perizinan yang terbit	a. 100% b. 100% c. 100%	
		• Peningkatan upaya intensifikasi pertanian	1.Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah	a. Tingkat konsumsi beras b. Indikator Fluktuasi harga (constant of variant)	a. 240 gram/kapita /hari	Dinas Pangan dan Pertanian

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Fokus Program	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		dan perikanan yang berbasis agrobisnis		c. Persentase Peningkatan cadangan pangan d. Persentase pangan segar yang aman dikonsumsi	b. 11 c. 0,23% d. 83,7%	
			2.Program Peningkatan Hasil Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	a. Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura b. Persentase peningkatan produktivitas perkebunan	a. 1,63% b. 1,63%	
			3.Program Peningkatan Sarana Prasarana Pertanian/Perkebunan dan Pemberdayaan Penyuluhan	a. Persentase peningkatan kecukupan pemanfaatan sarana prasarana pertanian dan perkebunan b. Persentase kelompok tani yang naik kelas	a. 2,4% b. 2,3%	
			4.Program Peningkatan Produksi Peternakan dan Hasil Hewan	a. Persentase peningkatan produktivitas peternakan b. Persentase peningkatan populasi ternak	a. 1% b. 1%	
			5.Program Peningkatan Kualitas Produksi peternakan	a. Persentase penurunan angka kejadian penyakit hewan b. Persentase produk pangan dan non pangan asal hewan yang asuh	a. 4% b. 50%	
			1.Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	1,4%	Dinas Perikanan
			2.Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dan Garam	a. Jumlah produksi garam b. Jumlah produksi perikanan tangkap, perairan umum dan daratan c. Jumlah produksi perikanan laut	a. 10.073.206 kg b. 550.000 kg c. 15.600.000 kg	
			3.Program Pembinaan Usaha Pengolahan dan	a. Jumlah produksi olahan hasil perikanan	a. 12.076.090 kg	

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Fokus Program	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Pemasaran hasil Perikanan	b. Jumlah kelompok pengolah dan pemasar yang mempunyai sertifikat jaminan mutu	b. 1 SKP	
4	Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pengembangan tata kelola pemerintahan daerah yang baik	• Peningkatan kualitas pelayanan publik	1.Program pelayanan pencatatan sipil	a. Persentase pelayanan pencatatan sipil yang tepat waktu b. Persentase layanan kepemilikan akta kelahiran yang sesuai dengan ketentuan	a. 100% b. 100%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			2.Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	a. Persentase pelayanan pindah datang/keluar yang tepat waktu b. Persentase desa/kelurahan yang rentan pendataan administrasi kependudukan c. Persentase kepemilikan KTP-EL yang sesuai ketentuan d. Persentase kepemilikan KK yang sesuai ketentuan	a. 100% b. 30% c. 100% d. 100%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			3.Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	a. Persentase rekomendasi kebijakan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang ditindaklanjuti b. Persentase data kependudukan yang dimanfaatkan dalam kebijakan pembangunan daerah c. Persentase penduduk terjaring operasi yustisi yang ditindaklanjuti	a. 6 kebijakan' b. 80% c. 100%	
			4.Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	a. Persentase pelayanan kebutuhan data kependudukan yang tepat waktu b. Persentase Sarpras SIAK yang layak fungsi	a. 100% b. 100%	

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Fokus Program	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			1.Pengembangan Koleksi dan Pelayanan Perpustakaan	a. Jumlah pengunjung perpustakaan b. Jumlah koleksi perpustakaan	a. 160.000 orang b. 100.000 eks	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			2.Program Pengelolaan, Pelayanan dan Dokumentasi Kearsipan	a. Persentase pelayanan kearsipan yang terpenuhi (jumlah pelayanan arsip yang dapat dipenuhi dibagi jumlah permintaan layanan data/arsip) b. Jumlah lembaga yang telah menyelenggarakan sistem kearsipan dengan standar yang ditentukan	a. 25% b. 104 lembaga	
			3.Program Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca	Jumlah perpustakaan di Kabupaten Sidoarjo	951 perpustakaan	
			1.Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai SP dan SOP	100%	Kecamatan Balongbendo
			2.Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan	a. Persentase desa yang menyusun sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu dokumen: perencanaan, penganggaran dan pelaporan b. Persentase desa yang sudah menyusun dokumen pemutakhiran data Indeks Desa Membangun (IDM) secara valid c. Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang: pemerintahan, ketentraman ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan	a. 90% b. 100% c. 100%	

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Fokus Program	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			1.Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai SP dan SOP	100%	Kecamatan Buduran
			2.Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan	a. Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang: pemerintahan, ketentraman ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan b. Persentase desa yang menyusun sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu dokumen: perencanaan, penganggaran dan pelaporan c. Persentase desa yang sudah menyusun dokumen pemutakhiran data Indeks Desa Membangun (IDM) secara valid	a. 100% b. 100% c. 100%	
			1.Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai SP dan SOP	100%	Kecamatan Candi
			2.Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan	a. Persentase desa yang menyusun sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu dokumen: perencanaan, penganggaran dan pelaporan b. Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang: pemerintahan, ketentraman ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan c. Persentase desa yang sudah menyusun dokumen pemutakhiran	a. 95% b. 95% c. 90%	

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Fokus Program	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				data Indeks Desa Membangun (IDM) secara valid		
			1.Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai SP dan SOP	100%	Kecamatan Gedangan
			2.Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan	a. Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang: pemerintahan, pembangunan, perekonomian, keamanan dan ketertiban umum, kesejahteraan sosial b. Persentase desa yang sudah menyusun dokumen pemutakhiran data IDM secara valid c. Persentase desa yang menyusun sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu dokumen: perencanaan, penganggaran dan pelaporan	a. 100% b. 100% c. 100%	
			1.Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai SP dan SOP	94%	Kecamatan Jabon
			2.Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan	a. Persentase desa yang sudah menyusun dokumen pemutakhiran data Indeks Desa Membangun (IDM) secara valid b. Persentase desa yang menyusun dokumen sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu dokumen: perencanaan, penganggaran dan pelaporan c. Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam	a. 90% b. 100% c. 100%	

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Fokus Program	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				satu tahun bidang: pemerintahan, ketentraman ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan		
			1.Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai SP dan SOP	84%	Kecamatan Krembung
			2.Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan	a. Persentase desa yang menyusun sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu dokumen: perencanaan, penganggaran dan pelaporan b. Persentase desa yang sudah menyusun dokumen pemutakhiran data Indeks Desa Membangun (IDM) secara valid c. Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang: pemerintahan, ketentraman ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan	a. 100% b. 100% c. 100%	
			1.Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan kelurahan	100%	Kecamatan Krian
			2.Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian,	a. Persentase desa yang sudah menyusun dokumen pemutakhiran data Indeks Desa Membangun (IDM) secara valid b. Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang: pemerintahan,	a. 94,74% b. 100% c. 100%	

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Fokus Program	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			kesejahteraan sosial dan pembangunan	ketentraman ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan c. Persentase desa yang menyusun sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu dokumen: perencanaan, penganggaran dan pelaporan		
			1.Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai SP dan SOP	100%	Kecamatan Porong
			2.Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan	a. Persentase desa yang sudah menyusun dokumen pemutakhiran data Indeks Desa Membangun (IDM) secara valid b. Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang: pemerintahan, ketentraman ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan c. Persentase desa yang menyusun sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu dokumen : perencanaan , penganggaran dan pelaporan	a. 100% b. 100% c. 100%	
			3.Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan kelurahan	100%	
			1.Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan,	a. Persentase desa yang sudah menyusun dokumen pemutakhiran data Indeks Desa Membangun (IDM) secara valid	a. 85% b. 85% c. 85%	Kecamatan Prambon

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Fokus Program	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan	b. Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang: pemerintahan, ketentraman ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan c. Persentase desa yang menyusun sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu dokumen: perencanaan, penganggaran dan pelaporan		
			1.Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai SP dan SOP	100%	Kecamatan Sedati
			2.Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan	a. Persentase desa yang menyusun sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu dokumen: perencanaan, penganggaran dan pelaporan b. Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang: pemerintahan, ketentraman ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan c. Persentase desa yang sudah menyusun dokumen pemutakhiran data Indeks Desa Membangun (IDM) secara valid	a. 93,75% b. 100% c. 100%	
			1.Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai SP dan SOP	100%	Kecamatan Sidoarjo
			2.Program Koordinasi, pembinaan dan	a. Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	a. 100%	

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Fokus Program	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan	dalam satu tahun bidang: pemerintahan, ketentraman ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan b. Persentase desa yang menyusun sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu dokumen: perencanaan, penganggaran dan pelaporan c. Persentase desa yang sudah menyusun dokumen pemutakhiran data Indeks Desa Membangun (IDM) secara valid		
			3.Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan kelurahan	100%	
			1.Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai SP dan SOP	100%	Kecamatan Sukodono
			2.Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan	a. Persentase desa yang menyusun sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu dokumen: perencanaan, penganggaran dan pelaporan b. Persentase desa yang sudah menyusun dokumen pemutakhiran data Indeks Desa Membangun (IDM) secara valid c. Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang: pemerintahan, ketentraman	a. 100% b. 100% c. 100%	

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Fokus Program	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan		
			1.Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai SP dan SOP	100%	Kecamatan Taman
			2.Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan	a. Persentase desa yang sudah menyusun dokumen pemutakhiran data Indeks Desa Membangun (IDM) secara valid b. Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang: pemerintahan, ketentraman ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan c. Persentase desa yang menyusun sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu dokumen : perencanaan , penganggaran dan pelaporan	a. 90% b. 100% c. 100%	
			3.Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan kelurahan	100%	
			1.Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai SP dan SOP	86%	Kecamatan Tanggulangin
			2.Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan,	a. Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang: pemerintahan, ketentraman	a. 97,75% b. 100% c. 89,47%	

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Fokus Program	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan	ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan b. Persentase desa yang menyusun sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu dokumen: perencanaan, penganggaran dan pelaporan c. Persentase desa yang sudah menyusun dokumen pemutakhiran data Indeks Desa Membangun (IDM) secara valid		
			1.Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai SP dan SOP	100%	Kecamatan Tarik
			2.Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan	a. Persentase desa yang sudah menyusun dokumen pemutakhiran data Indeks Desa Membangun (IDM) secara valid b. Persentase desa yang menyusun sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu dokumen: perencanaan, penganggaran dan pelaporan c. Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang: pemerintahan, ketentraman ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan	a. 100% b. 100% c. 100%	
			1.Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai SP dan SOP	100%	Kecamatan Tulangan

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Fokus Program	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2.Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan	a. Persentase desa yang menyusun sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu dokumen: perencanaan, penganggaran dan pelaporan b. Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang: pemerintahan, ketentraman ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan c. Persentase desa yang sudah menyusun dokumen pemutakhiran data Indeks Desa Membangun (IDM) secara valid	a. 100% b. 100% c. 24%	
			1.Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan	a. Persentase desa yang sudah menyusun dokumen pemutakhiran data Indeks Desa Membangun (IDM) secara valid b. Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang: pemerintahan, ketentraman ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan c. Persentase desa yang menyusun sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu dokumen: perencanaan, penganggaran dan pelaporan	a. 85% b. 100% c. 85%	Kecamatan Waru
			1.Program Penyelenggaraan	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai SP	100%	Kecamatan Wonoayu

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Fokus Program	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Pelayanan Umum	dan SOP		
			2.Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan	a. Prosentase desa yang menyusun sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu dokumen: perencanaan, penganggaran dan pelaporan b. Persentase desa yang sudah menyusun dokumen pemutakhiran data Indeks Desa Membangun (IDM) secara valid c. Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang: pemerintahan, ketentraman ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan	a. 100% b. 0,83% c. 100%	
			1.Program Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	a. Persentase kontribusi retribusi pelayanan perizinan tertentu terhadap PAD b. Persentase perizinan yang terbit c. Persentase pelayanan perizinan tertentu yang tepat waktu sesuai SOP	a. 100% b. 100% c. 100%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		• Pengembangan ketatalaksanaan pasca restrukturisasi organisasi pemerintahan daerah	1.Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	a. Persentase perangkat daerah yang nilai SAKIP minimal B b. Nilai Maturitas SPIP Kabupaten Sidoarjo minimal terdefinisi c. Persentase kasus/pengaduan yang ditindaklanjuti d. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan inspektorat yang	a. 1 Laporan b. Terdefinisi c. 100% d. 75% e. 4,08% f. 0,93% g. 96%	Inspektorat

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Fokus Program	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				ditindaklanjuti e. Persentase perangkat daerah bebas temuan administrasi yang berakibat kerugian keuangan negara f. Persentase desa bebas temuan administrasi yang berakibat kerugian keuangan negara g. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti		
			2.Program Koordinasi Rumusan Kebijakan Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan	a. Persentase Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Yang Ukuran Kinerja telah sesuai dengan dok Perencanaan Diatasnya b. Persentase Progress / Kemajuan Pengembangan Sistem Aplikasi RDS (Regional Development System c. Persentase Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Yang Dilaksanakan Sesuai Dengan Target d. Persentase Pelaporan Kinerja Daerah (LKPJ, LPPD, LAKIP dan Laporan Berkala) Yang Sesuai Ketentuan dan Disusun Tepat Waktu	a. 100% b. 100% c. 87% d. 100%	Sekretariat Daerah
			3.Program Perumusan dan Penyelenggaraan Kebijakan Organisasi Perangkat Daerah dan Pelayanan Publik	a. Persentase perangkat daerah yang hasil evaluasi kelembagaannya ditindaklanjuti b. Persentase Perangkat Daerah / unit kerja yang SKMnya berkategori baik	a. 100% b. 100%	
			4.Program pelayanan administrasi kegiatan,	Tingkat kepuasan Pimpinan Daerah terhadap layanan administrasi kegiatan,	84%	

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Fokus Program	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			keprotokolan dan rumah tangga pimpinan daerah.	keprotokolan, dan Rumah Tangga		
			5.Program Pembinaan Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah dan Kerjasama	Persentase kebijakan daerah bidang Pemerintahan yang diterapkan	100%	
			6.Program Koordinasi Kebijakan Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Persentase kebijakan daerah bidang kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan yang diterapkan	100%	
			7.Program Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa	Level Kematangan Organisasi PBJ	Level 4	
			8.Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Bantuan dan Dokumentasi Hukum	a. Persentase doktasi informasi hukum yang dipublikasikan b. Persentase rancangan peraturan perundang-undangan yang terbentuk c. Persentase permasalahan hukum yang difasilitasi	a. 100% b. 100% c. 100%	
			9.Program Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Bidang Perekonomian, SDA, Penanaman Modal & BUMD	Persentase kebijakan daerah bidang perekonomian yang diterapkan dengan baik	100%	
		• Peningkatan kapasitas sarana prasarana dan SDM Aparatur	1.Program Pengembangan ASN	Persentase PNS dalam talent pool	60%	Badan Kepegawaian Daerah
			2.Program Pelayanan Administrasi	Persentase ASN yang telah ditempatkan sesuai dengan formasi jabatan	100%	

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Fokus Program	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Kepegawaian			
			3.Program Pembinaan dan Kesejahteraan ASN	Persentase perangkat daerah yang telah tertib administrasi kepegawaian	80%	
			4.Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	Persentase jumlah ASN yang meningkat kompetensinya	18%	
		• Pengembangan e-Government yang terintegrasi	1.Program pelayanan informasi, pemberitaan dan pengelolaan pengaduan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan informasi	83 indeks	Dinas Komunikasi dan Informatika
			2.Program pengelolaan, fasilitasi dan implementasi teknologi informatika	Persentase aplikasi OPD berbasis e-gov yang terintegrasi dengan data center	80%	
			3.Program peningkatan kualitas layanan data teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	Persentase jaringan FO yang dibangun	81,4%	
			4.Program pengembangan data informasi statistik daerah	Persentase data statistik yang diolah dan dianalisa	80%	
		• Pengembangan sistem perencanaan, penganggaran dan pengendalian pembangunan	1.Program perencanaan pembangunan daerah	a. Persentase konsistensi antara dokumen perencanaan dengan penganggaran pembangunan daerah b. Persentase usulan musrenbang kecamatan yang diakomodir menjadi RKPD c. Persentase konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	a. 90% b. 70% c. 95%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Fokus Program	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		yang efektif	2.Program Penelitian, Pengembangan dan Penyusunan Data Pembangunan Daerah	a. Persentase ketersediaan elemen data yang aktual dan valid sebagai masukan perencanaan pembangunan daerah b. Persentase rekomendasi hasil penelitian dan kajian yang ditindaklanjuti	a. 90% b. 100%	
			3.Program Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan	a. Persentase capaian kinerja program PD bidang Penmas terhadap perencanaan dengan capaian 76 % b. Persentase Hasil Rapat Koordinasi bidang Penmas yang ditindaklanjuti c. Persentase dokumen perencanaan PD Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan yang berkualitas baik	a. 90% b. 90% c. 90%	
			4.Program Perencanaan Bidang Ekonomi	a. Persentase capaian kinerja program PD bidang ekonomi terhadap perencanaan dengan capaian 76 % b. Persentase Hasil Rapat Koordinasi bidang ekonomi yang ditindaklanjuti c. Persentase dokumen perencanaan PD Bidang ekonomi berkualitas baik	a. 95% b. 90% c. 100%	
			5.Program Perencanaan Bidang Pengembangan Wilayah, Permukiman dan Prasarana Wilayah	a. Persentase dokumen perencanaan RKPD yang sesuai dengan arahan dalam dokumen tata ruang b. Persentase Hasil Rapat Koordinasi bidang PD Bidang pengembangan wilayah, permukiman dan prasarana wilayah yang ditindaklanjuti c. Persentase capaian kinerja program PD Bidang pengembangan wilayah,	a. 70% b. 85% c. 95% d. 90%	

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Fokus Program	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				permukiman dan prasarana wilayah terhadap perencanaan dengan capaian 76 % d. Persentase dokumen perencanaan Renja PD Bidang pengembangan wilayah, permukiman dan prasarana wilayah berkualitas baik		
			1.Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	a. Persentase Penyelenggaraan kegiatan dialog dan jaring aspirasi masyarakat b. Persentase penyelenggaraan kegiatan BK, Komisi, dan Monev c. Persentase penyelenggaraan kegiatan Banggar, KUA, KUPA, APBD dan PAPBD	a. 84% b. 84% c. 84%	Sekretariat DPRD
			2.asilitasi Persidangan dan Perundang-undangan	a. Persentase Perda dan produk hukum lainnya yang dibahas, disusun dan ditetapkan oleh DPRD b. Persentase persidangan dan rapat - rapat DPRD yang difasilitasi	a. 84% b. 84%	
			3.Peningkatan Kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	a. Tingkat penyelesaian tugas setelah mengikuti peningkatan kapasitas DPRD b. Meningkatnya kesehatan anggota DPRD	a. 84% b. 50 orang	
			1.Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	a. Ketetapan waktu dalam penyusunan laporan keuangan daerah (LKPD) b. Ketepatan waktu dalam penyusunan penganggaran (APBD dan PAPBD) c. Persentase OPD yang tepat waktu penyerapan anggaran sesuai anggaran kas yang ditetapkan	a. Tepat waktu b. Tepat waktu c. 95,7% d. 100% e. 100%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Fokus Program	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				d. Persentase dokumen penganggaran yang telah dipublikasikan melalui media publik e. Persentase OPD yang tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan berbasis SAP (Akrual) f. Persentase OPD yang tepat dalam menentukan kode rekening RKA OPD	f. 100%	
			2.Program Penganggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	a. Persentase OPD yang tepat dalam menentukan kode rekening RKA OPD b. Ketepatan waktu dalam penyusunan KUA-PPAS Perubahan c. Persentase dokumen penganggaran yang telah dipublikasikan melalui media publik d. Ketetapan waktu dalam penyusunan APBD dan PAPBD	a. 100% b. Tepat waktu c. 100% d. Tepat waktu	
			3.Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	a. Persentase pemindahtanganan BMD yang diproses melalui lelang umum b. Persentase OPD yang tepat waktu dalam penyampaian laporan BMD c. Persentase aset tetap (tanah) yang telah di inventarisasi dalam laporan BMD	a. 100% b. 100% c. 30,94%	
5	Meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat	• Peningkatan wawasan kebangsaan	1.Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan	a. Kategori kabupaten peduli HAM b. Jumlah kader wawasan kebangsaan	a. 90% b. 100 orang	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Fokus Program	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	yang aman, nyaman, demokratis, berbudaya dan agamis	• Peningkatan pendidikan politik masyarakat	2.Program Peningkatan pendidikan politik masyarakat dan hubungan antar lembaga	Persentase partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak politiknya	90%	
		• Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat • Peningkatan kerukunan antar umat beragama	3.Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	a. Persentase potensi konflik yang berhasil dicegah tepat waktu b. Persentase konflik yang berhasil di tangani tepat waktu	a. 90% b. 90%	
			1.Program Perlindungan Masyarakat	Persentase satlinmas yang aktif dalam pengendalian lingkungan	100%	Satuan Polisi Pamong Praja
			2.Program pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	a. Cakupan Wilayah Pengamanan ketentraman dan ketertiban masyarakat b. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) ketertiban dan ketentraman c. Cakupan Wilayah Patroli	a. 18 kecamatan b. Baik c. 18 kecamatan	
			3.Program pembinaan dan Pengawasan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah	Persentase kasus pelanggaran peraturan daerah yang ditangani	100%	
			1.Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	a. Persentase anak dan lansia bermasalah sosial yang terlayani b. Persentase Penyandang Disabilitas yang terlayani c. Persentase PMKS yang terlayani d. Persentase Tuna Sosial yang terlayani	a. 47,09% b. 3,48% c. 100% d. 17,92%	Dinas Sosial

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Fokus Program	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2.Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	a. Persentase PSKS yang berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial b. Persentase fakir miskin yang telah terpenuhi fungsi sosialnya	a. 66,70% b. 60%	
			3.Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	a. Persentase Korban Bencana Sosial yang tertangani b. Persentase Korban Bencana Alam yang tertangani c. Prosentase penduduk miskin yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	a. 80% b. 90% c. 80%	
		• Pengembangan kelestarian budaya lokal	1.Program Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan	a. Jumlah kelompok seni yang melestarikan seni dan budaya daerah b. Jumlah seni dan budaya daerah yang dibina menjadi destinasi wisata	a. 4 kelompok b. 2 jenis	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			2.Program peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah Pemuda Yang Berprestasi di Tingkat Regional, Nasional dan Internasional	30 orang	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
			3.Program Pelayanan Pemanfaatan Fasilitas Keolahragaan	jumlah Standar Operasional Procedure (SOP) yang dimiliki	3 SOP	
			4.Peningkatan peran serta dan pemberdayaan keolahragaan	Jumlah prestasi yang diraih tingkat Regional, Nasional dan Internasional	155 prestasi	

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Fokus Program	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		• Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang responsif gender	1.Program Kesetaraan gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	a. Persentase lembaga/organisasi yang melaksanakan kebijakan pemenuhan hak anak b. Persentase kasus kekerasan dan trafficking terhadap perempuan dan anak yang tertangani c. Persentase lembaga/organisasi yang melaksanakan kebijakan PUG dan pemberdayaan perempuan d. Persentase lembaga/organisasi yang melaksanakan kebijakan perlindungan perempuan dan anak	a. 19,31% b. 100% c. 55,19% d. 44,19%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana
		• Penegakan supremasi hukum	1.Program Pembinaan dan Pengawasan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah	Persentase kasus pelanggaran peraturan daerah yang ditangani	100%	Satuan Polisi Pamong Praja

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan penjelasan rinci mengenai jumlah usulan program dan kegiatan yang direncanakan akan dibiayai pada tahun 2020 sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 - 2021. Prioritas pembangunan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sidoarjo tahun 2005-2025 serta dengan memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019 dan RPJMN tahun 2014-2019.

Rekapitulasi program dan kegiatan masing-masing Perangkat Daerah dijelaskan dalam tabel 5.1 rekapitulasi usulan pagu indikatif Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020. Rencana program dan kegiatan prioritas tahun 2020 keseluruhan program dan kegiatan dibiayai oleh APBD Kabupaten Sidoarjo.

Jumlah keseluruhan kegiatan yang diusulkan sebanyak 1.365 kegiatan yang akan menghasilkan keluaran kegiatan *(output)* yang merupakan indikator keberhasilan capaian kegiatan. Rincian rencana kerja dan pendanaan daerah masing-masing perangkat daerah terlampir dalam dokumen ini.

Tabel 5.1 Rekapitulasi Usulan Pagu Indikatif Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2020

NO	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	JUMLAH
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	6	17	29.155.351.549
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	4	15	12.030.181.405
3	BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH	4	16	19.553.406.423,80
4	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	4	24	53.199.861.147,50
5	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	4	14	14.012.866.220
6	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	6	45	22.985.695.304

NO	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	JUMLAH
7	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	5	17	30.867.414.380
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5	22	12.776.949.321,36
9	DINAS KESEHATAN	6	119	427.919.126.176,92
10	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5	27	31.790.239.266,50
11	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	4	16	36.911.844.970
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	5	34	281.316.414.899
13	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	6	37	36.102.858.514,30
14	DINAS PEKERJAAN UMUM, BINA MARGA , DAN SUMBER DAYA AIR	4	32	5.183.825.167.126,68
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5	21	19.092.383.707
16	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KB	4	22	20.335.125.896
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4	15	14.034.318.784
18	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	9	55	591.050.401.680
19	DINAS PERHUBUNGAN	5	19	52.472.075.273
20	DINAS PERIKANAN	4	18	56.942.574.963,50
21	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	4	27	72.725.604.907,50
22	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	4	23	21.026.988.602
23	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG	5	34	2.429.116.423.168,92
24	DINAS SOSIAL	4	21	11.341.898.790
25	DINAS TENAGA KERJA	4	23	19.353.819.415
26	INSPEKTORAT	2	6	11.531.153.429
27	KECAMATAN BALONGBENDO	3	28	3.219.991.212,68
28	KECAMATAN BUDURAN	3	19	3.737.431.030
29	KECAMATAN CANDI	3	28	2.374.558.672
30	KECAMATAN GEDANGAN	3	30	2.999.512.863
31	KECAMATAN JABON	3	22	2.819.135.461,50

NO	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	JUMLAH
32	KECAMATAN KREMBUNG	3	29	4.303.396.134
33	KECAMATAN KRIAN	3	35	9.638.344.820
34	KECAMATAN PORONG	4	51	9.525.870.354
35	KECAMATAN PRAMBON	2	23	2.814.429.918
36	KECAMATAN SEDATI	3	25	3.204.299.700
37	KECAMATAN SIDOARJO	5	78	22.483.803.254,50
38	KECAMATAN SUKODONO	3	27	4.309.679.638
39	KECAMATAN TAMAN	4	56	16.422.021.830,60
40	KECAMATAN TANGGULANGIN	3	18	2.479.941.290
41	KECAMATAN TARIK	3	16	2.566.948.655
42	KECAMATAN TULANGAN	3	28	2.071.268.060
43	KECAMATAN WARU	2	26	4.889.936.520
44	KECAMATAN WONOAYU	3	26	3.470.239.105
45	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	1	1	579.152.108.520
46	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	4	17	18.637.719.365
47	SEKRETARIAT DAERAH	9	42	80.616.568.331,10
48	SEKRETARIAT DPRD	4	21	75.478.750.860
TOTAL		**196**	**1365**	**10.368.686.100.913,60**

Tabel 5.2

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021

(Data Terlampir)

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

Menurut Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (Kepmenpan) No. 09 Tahun 2007 dijelaskan bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Sehingga pengukuran keberhasilan Rencana Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Periode 2016-2021 tercermin dari capaian indikator kinerja utama yang ditetapkan.

Keberhasilan program pembangunan daerah yang telah ditetapkan diukur melalui Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama digunakan sebagai sebuah indikator makro untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo sebagaimana disajikan dalam Tabel 6.1

Tabel 6. 1
Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2016-2021

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	BASELINE DATA	REALISASI		TARGET	REALISASI	TARGET		
			2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	Indeks Good Governance	Poin	*)	65,35	63,96	67,33	69,19	69,32	69,55	70,76
2	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	NA	C	B	B	B	B	B	B
3	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,24	5,51	5,80	5,65	5,85	5,67	5,75	5,85
4	Indeks Gini	Poin	0,35	0,37	0,34	0,37	*	0,37	0,37	0,37
5	Tingkat Kemiskinan	%	6,44	6,39	6,23	6,37	5,69	6,36	6,35	6,34

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	BASELINE DATA	REALISASI		TARGET	REALISASI	TARGET		
			2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
6	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	6,3	6,12	4,97	5,74	4,73	5,56	5,37	5,19
7	Indeks Infrastruktur	Poin	1,402	1,406	1,41	1,414	1,419	1,418	1,422	1,426
8	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	77,43	78,17	78,70	78,84	79,50	79,51	79,96	80,57
9	Indeks Kebahagiaan	Poin	*)	77,11	78,58	78,23	79,37	79,83	80,47	81,14
10	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	49,47	49,26	48,79	51,01	55,1	52,01	53,01	54,26

**) Data menunggu rilis dari Badan Pusat Statistik*

Sumber : RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021

Sepuluh Indikator Kinerja Utama (IKU) di atas merupakan tolok ukur makro yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan dan program yang dirumuskan dalam RKPD memiliki kontribusi yang besar dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. Indeks *Good Governance* merupakan indikator IKU pertama yang mencerminkan komitmen untuk memperbaiki kinerja pemerintahan. Sedangkan indeks Reformasi Birokrasi merupakan implementasi dari 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi sesuai dengan Road Map Reformasi Birokrasi yang ditetapkan oleh KEMENPAN dan RB, sedangkan indikator pertumbuhan ekonomi, disparitas (indeks gini), kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) merupakan tolok ukur makro untuk kesejahteraan bidang ekonomi.

Untuk indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup setelah dilakukan review, terjadi perubahan target karena terdapat perubahan dalam metode analisa dan perhitungan hasil sampling pemantauan.

Tabel 6. 2
Indikator Kinerja Daerah (IKD) RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2016-2021

No.		Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	PD Penanggung jawab	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2015)	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	Target
						2016		2017		2018		2019	2020	2021
I		**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**												
1		Pendapatan Perkapita	Bidang Ekonomi Bappeda	Juta	68.994	71.664	74.411	75.181	79.810	78.870		82.741	86.801	91.061
2		Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tahun	13,89	14	14,13	14,25	14,34	14,25		14,35	14,45	14,55
3		Rata – Rata Lama Sekolah (RTLS)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tahun	10,1	10,5	10,22	10,7	10,23	10,75		10,75	10,8	10,8
4		Angka Harapan Hidup	Dinas Kesehatan	Tahun	73,63	73,73	73,67	73,83	73,71	73,68	73,83	73,68	73,69	73,69
5		Opini atas Audit BPK	BPKAD	Kategori	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
6		Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Bag.Organisasi-Setda	Predikat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	B/Baik (3,51 - 4,00)	B/Baik (3,79)	B/Baik	B/Baik	B/Baik
7		Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Bag.Organisasi-Setda	Predikat	78,09	B/Baik (76,61 - 88,30)	B/Baik (78,96)	B/Baik (76,61 - 88,30)	B/Baik (79,89)	B/Baik (76,61 - 88,30)	B/Baik (84,93)	B/Baik (76,61 - 88,30)	B/Baik (76,61 - 88,30)	B/Baik (76,61 - 88,30)
8		Kontribusi PDRB Subsektor Perikanan	Dinas Perikanan	%	1,44	1,40	1,44	1,41	1,41	1,41		1,41	1,41	1,41
9		Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	Dinas Perindag	%	45,92	45,98	46	46,01	46,08	46,07	46,12	46,11	46,13	46,15
10		Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	Dinas Perindag	%	15,72	15,75	15,78	16	16,01	16,13	16,15	16,25	16,27	16,27
11		Persentase Pertumbuhan	Dinas Koperasi		0,25	0,25	0,25	0,25	0,5	1,25	5,4	1,5	2,25	2,5

No.		Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	PD Penanggung jawab	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2015)	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	Target
						2016		2017		2018		2019	2020	2021
		Usaha Mikro yang Mandiri	dan Usaha Mikro											
12		Persentase Pencari Kerja yang telah ditempatkan	Dinas Tenaga Kerja	%	56	58	58	61	61	63	61,99	65	67	70
13		Persentase Pencari kerja yang telah membuka usaha secara mandiri	Dinas Tenaga Kerja	%	2	2	2,7	3	4,21	5	5,26	6	7	8
14		Rasio PAD terhadap total pendapatan daerah	BPKAD	%	35,62	35,51	36,4	38,67	41,31	36,21	39,12	37,93	38,42	39,72
15		Indeks Profesionalitas ASN	BKD	Poin	N/A	N/A	86,4	76	86,57	78	86,57	78	79	80
16		Nilai SAKIP Kabupaten	Bag.Pembangunan - Setda	kategori	B	B	B	B	BB	BB	A	BB	A	A
17		Tingkat Maturitas SPIP	Inspektorat	kategori	N/A	N/A	N/A	N/A	berkembang	terdefinisi	terdefinisi	terdefinisi	terdefinisi	terdefinisi
18		Nilai PPD (Perencanaan Pembangunan Daerah)	Bappeda	kategori	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
19		Status Kinerja LPPD	Bag. Pembangunan	kategori	ST	ST	ST	ST	ST	ST		ST	ST	ST
II		**ASPEK PELAYANAN UMUM**												
	A	**Layanan Urusan Wajib Dasar**												
	1	**Pendidikan**												
		Pendidikan Dasar												
20		Rata-rata Nilai UN SD/MI	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Nilai	8,75	8,2	8,2	8,25	8,32	8,3	8,39	8,35	8,4	8,45
21		APM SD/MI	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	99,86	99,87	95,37	99,88	94,42	96,54	98,35	96,98	97,43	97,88

No.		Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	PD Penanggung jawab	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2015)	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	Target
						2016		2017		2018		2019	2020	2021
22		APK SD/MI	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	109,13	110,29	107,12	110,29	107,71	107,93	107,97	108,26	108,64	108,89
		Pendidikan Menengah												
23		Rata-rata Nilai UN SMP/MTs	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Nilai	7,69	7,06	7,06	6,85	6,25	6,87	5,16	6,87	6,89	6,9
24		APM SMP/MTs	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	79,72	80,31	74,95	80,91	79,58	78,99	84,03	79,34	79,71	79,95
25		APK SMP/MTs	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	103,39	103,39	98,51	103,39	98,85	98,97	99,01	99,21	99,45	99,78
	2	**Kesehatan**												
26		Angka Kematian Ibu (AKI)	Dinas Kesehatan	per 100.00 KH	72,09	71,9	66,34	71,8	82,67	71,8	59,63	71,4	71,2	71
27		Angka Kematian Bayi (AKB)	Dinas Kesehatan	per 1000 KH	6,27	6,27	4,3	6,22	5,45	6,65	4,17	6,6	6,5	6,5
28		Persentase balita stunting	Dinas Kesehatan	%	28,7	28,5	28,2	28	27,2	26,2	25,9	25,2	24,2	24,2
29		Persentase Desa/Kel *Universal Child Immunization* (UCI)	Dinas Kesehatan	%	85	92	86	94	87	88	93	89	90	91
30		Persentase orang terinfeksi HIV positif mendapatkan ARV	Dinas Kesehatan	%	52	90	53	90	70	90	68	90	90	90
31		Status akreditasi Rumah Sakit	RSUD		N/A	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Terakreditasi Internasional	Terakreditasi Internasional
32		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat RSUD	RSUD	Kategori	N/A	B	B	A	A	A	B	A	A	A

No.		Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	PD Penanggung jawab	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2015)	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	Target
						2016		2017		2018		2019	2020	2021
33		Persentase Pasien Keluar Hidup	RSUD	%	N/A	N/A	93,4	94	93,5	95	93,91	96	97	98
	3	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**												
34		Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Mantap	Dinas PU BM dan SDA	%	95,15	82	95,3	84	95,9	85	93,06	87	90	95
35		Persentase luas sawah yang terlayani irigasi	Dinas PU BM dan SDA	%	75	82	82,8	83	83,81	84	85,73	85	86	87
36		Prosentase penurunan luas wilayah rawan genangan	Dinas PU BM dan SDA	%	0	30	40	50	42	55	50	60	65	70
37		Persentase Bangunan ber-IMB	Dinas Perkim CKTR	%	N/A	60,05	60,05	60,50	60,50	61	61	62	63	64
38		Persentase peningkatan pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang	Dinas Perkim CKTR	%	N/A	N/A	N/A	100	N/A	100	N/A	63	65	67
	3	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**												
39		Prosentase luasan kawasan kumuh	Dinas Perkim CKTR	%	N/A	N/A	N/A	77,71	82,78	75	79,95	50,03	19,7	0,24
40		Persentase peningkatan rumah layak huni	Dinas Perkim CKTR	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	99,92	99,92	99,93	99,96	100
41		Persentase prasarana sanitasi yang disediakan sesuai target	Dinas Perkim CKTR	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	94,01	94,01	94,21	94,50	95,00
42		Persentase prasarana air bersih yang disediakan sesuai target	Dinas Perkim CKTR	%	N/A	N/A	N/A	0,5	0,7	1,0	1,0	2,0	3,5	5,0

No.		Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	PD Penanggung jawab	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2015)	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	Target
						2016		2017		2018		2019	2020	2021
	4	**Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**												
43		Indeks Rasa Aman	Satpol pp	Poin	N/A	N/A	N/A	72,44	72,44	73,89	73,77	75,37	76,87	76,87
44		Indeks Resiko Bencana	BPBD	Poin	N/A	N/A	N/A	140,6	126,75	131,65	128,6	105	85	75
45		Persentase kejadian Kebakaran yang ditangani dalam waktu tanggap (se-Kabupaten Sidoarjo) sesuai SPM	BPBD	%	24,64	30	24,8	40	25,19	45	44,49	50	55	60
	5	**Sosial**												
46		Persentase penurunan PMKS terhadap penduduk	Dinas Sosial	%	1,92	1,96	1,96	1,93	1,93	1,9	1,89	1,87	1,84	1,81
	B	**Layanan Urusan Wajib Non Dasar**												
	1	**Tenaga Kerja**												
47		Persentase tenaga kerja yang terserap di 9 sektor	Dinas Tenaga Kerja	%	93,69	93,88	93,88	94,07	95,03	94,26	95,27	94,44	94,63	94,81
48		Persentase Pencari Kerja yang telah ditempatkan	Dinas Tenaga Kerja	%	56	58	58	61	61	63	61,99	65	67	70
	2	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**												
49		Indeks Pembangungan Gender	Dinas P3A KB	Poin	94,28	94,2	N/A	94,35	93,33	94,45	N/A	94,55	94,65	94,75

No.		Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	PD Penanggung jawab	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2015)	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	Target
						2016		2017		2018		2019	2020	2021
50		Indeks Pemberdayaan Gender	Dinas P3A KB	Poin	63,99	64,6	N/A	64,65	64,65	64,7	N/A	64,75	64,8	64,85
51		Persentase kasus kekerasan dan Traficking terhadap Perempuan dan Anak yang diselesaikan	Dinas P3A KB	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	3	**Pangan**												
52		Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	Dinas Pangan dan Pertanian	%	84,38	86,95	86,95	87,5	87,78	87,9	88,3	88,4	88,9	89,4
53		Skor Pola Pangan Ketersediaan	Dinas Pangan dan Pertanian	%	48,13	87,27	87,27	89,32	89,32	89,45	88,72	89,45	89,59	89,77
	4	**Pertanahan**												
54		Persentase pengadaan tanah yang terfasilitasi sesuai prosedur	Dinas Perkim CKTR	%	N/A	100	100	N/A	65	72	72,6	73	74	75
	5	**Lingkungan Hidup**												
55		Indeks Kualitas Air	DLHK	Poin	46,97	49,54	49,54	50,29	49,77	51,29	49,59	52,29	53,29	54,54
56		Indeks Kualitas Udara	DLHK	Poin	87,51	84,04	84,04	84,79	82,05	85,79	85,04	86,79	87,79	89,04
57		Indeks Tutupan Lahan / Vegetasi	DLHK	Poin	22,81	22,97	22,97	23,72	23,11	24,72	36,77	25,72	26,72	27,97
58		Persentase sampah yang terkelola menjadi bernilai guna	DLHK	%	N/A	35,7	35,7	38,4	38,4	42,9	42,9	46	50	54

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

No.		Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	PD Penanggung jawab	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2015)	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	Target
						2016		2017		2018		2019	2020	2021
	6	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**												
59		Persentase penduduk yang ber-KTP Elektronik	Dispendukcapil	%	76,4	78	82,37	85	84,01	90	90,50	95	100	100
60		Persentase penduduk yang ber-Kartu Keluarga (KK)	Dispendukcapil	%	94,29	95	95,97	97	98,03	99	99,20	100	100	100
61		Persentase penduduk usia 0 s.d. 18 tahun yang ber-akta kelahiran	Dispendukcapil	%	68	70	74,04	80	80,01	90	89,54	100	100	100
	7	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**												
62		Persentase Usaha Ekonomi masyarakat pedesaan BUMDES Mandiri	Dinas PMD	%	16,67	18	9,76	19	4,55	20	5,56	24	26	28
63		Persentase Desa Maju	Dinas PMD	%	17,4	17,7	17,7	20,49	20,49	23,6	12,73	27,33	31,68	36,65
	8	**Pengendalian Penduduk dan KB**												
64		CBR (Crude Birt Rate): Kelahiran hidup pada pertengahan tahun	Dinas P3A KB	per 1000 KH	N/A	10	10,6	12,5	15,7	16,8	17,116	16,4	16	15,6
65		Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang ikut KB	Dinas P3A KB	%	N/A	80,25	83,11	81,29	83,61	81,43	84,11	84,11	84,61	85,11
	9	**Perhubungan**												
66		Prosentase Keselamatan Angkutan Darat	Dinas Perhubungan	%	70	70	90,85	70	90,26	75	88,27	88	90	95

No.		Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	PD Penanggung jawab	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2015)	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	Target
						2016		2017		2018		2019	2020	2021
	10	**Komunikasi dan Informatika**												
67		Nilai Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Dinas Kominfo	Poin	2,68	2,68	2,68	2,78	2,78	2,88	2,55	2,98	3,08	3,18
	11	**Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah**												
68		Persentase pertumbuhan usaha mikro yang mandiri	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	%	0,25	0,25	0,25	0,5	0,5	1,25	5,4	1,5	2,25	2,5
69		Persentase Pertumbuhan Koperasi yang berkualitas	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	%	14,8	14,8	15	16,48	17	18,15	27,6	19,83	21,5	23,18
	12	**Penanaman Modal**												
70		Persentase Pertumbuhan nilai investasi	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	%	N/A	1	1,02	1	1,06	1	1,33	1	1	1
71		Jumlah investor	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	unit usaha	NA	5437	5437	7628	7628	3121	5741	3184	3247	3312
	13	**Kepemudaan dan Olahraga**												
72		Jumlah prestasi pemuda yang diperoleh ditingkat regional, nasional, dan internasional.	Disporapar	prestasi	N/A	10	10	10	10	10	10	15	20	25

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

No.		Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	PD Penanggung jawab	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2015)	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	Target
						2016		2017		2018		2019	2020	2021
73		Jumlah prestasi olahraga tingkat Regional, Nasional dan Internasional	Disporapar	prestasi	135	135	135	135	135	140	250	150	155	160
	14	**Statistik**												
74		Persentase data statistik yang diolah dan dianalisa	Dinas Kominfo	%	N/A	N/A	N/A	28	N/A	40	48	60	80	100
	15	**Persandian**												
75		Persentase keamanan TIK yang terpasang	Dinas Kominfo	%	N/A	N/A	N/A	50	N/A	40	60	60	80	100
	16	**Kebudayaan**												
76		Jumlah seni dan budaya daerah yang dilestarikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	kelompok	1	1	1	1	1	2	2	3	4	4
	17	**Perpustakaan**												
77		Indeks Minat Baca	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Poin	N/A	N/A	N/A	42	42,95	60	69	69	70	71
	18	**Kearsipan**												
78		Prosentase lembaga yang menyelenggarakan kearsipan secara baku	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	%	14,73	14,73	14,73	17,63	17,87	20,05	20,05	22,46	25,12	27,78

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

No.		Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	PD Penanggung jawab	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2015)	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	Target
						2016		2017		2018		2019	2020	2021
	C	**Layanan Urusan Pilihan**												
	1	**Kelautan dan Perikanan**												
79		Persentase peningkatan produksi budidaya payau	Dinas Perikanan	%	N/A	0,30	9,26	0,35	1,10	0,20	0,20	0,40	0,50	0,55
80		Persentase peningkatan produksi budidaya kolam	Dinas Perikanan	%	N/A	0,30	8,75	0,39	0,39	3,00	4,30	4,00	5,00	6,00
	2	**Pariwisata**												
81		Rata - rata lama tinggal wisatawan	Dinas Porapar	Hari	0,7	1	1	1	1	1	1	1	1	1
82		Jumlah kunjungan wisatawan	Dinas Porapar	Orang	1.794.431	1.800.000	1.848.622	1.825.000	1.942.079	1.850.000	1.990.903	1.867.290	1.885.962	1.904.821
	3	**Pertanian**												
83		Produksi pertanian, perkebunan dan peternakan : padi	Dinas Pangan dan Pertanian	kw	23251,9	21863,1	21863,1	20589	20589	20591,06	20328,3	20593,12	20595,18	20597,24
	4	**Perdagangan**												
84		Nilai ekspor non migas	Dinas Perindag	juta $	1.710.252,00	1.720.587,00	1.748.281,00	1.740.212,00	1.740.212,00	1.745.253,00	1.753.114,00	1.775.000,00	1.783.500,00	1.790.555,00
	5	**Perindustrian**												
85		Persentase pertumbuhan usaha industri	Dinas Perindag	%	0,4	0,41	0,42	0,6	0,72	0,66	0,45	0,71	0,77	0,82

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

No.		Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	PD Penanggung jawab	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2015)	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	Target
						2016		2017		2018		2019	2020	2021
	6	**Transmigrasi**												
86		Persentase transmigran yang berhasil (bekerja sendiri/membuka lapangan usaha atau ke orang lain)	Dinas Tenaga Kerja	%	30%	30%	35%	30%	45%	50%	60%	55%	60%	65%
	D	**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**												
	1	**Inspektorat**												
87		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan ekternal yang ditindaklanjuti	Inspektorat	%	98,2	98,2	97,33	98,5	99,73	99	94,24	99,25	99,5	100
	2	**Perencanaan**												
88		Persentase program pembangunan PD dengan tingkat capaian hasil (outcome) > 76%	Bappeda	%	79	80	84	82	95,80	85	93,70	87	90	92
89		Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	Bappeda	%	N/A	35	30	40	59,5	45	64,5	50	55	60
	3	**Keuangan**												
90		Persentase OPD yang taat penyerapan anggaran berdasarkan anggaran kas yang telah ditetapkan	BPKAD	%	91,17	93,75	95,08	100	84,9	100	86,03	100	100	100

No.		Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	PD Penanggung jawab	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2015)	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	Target
						2016		2017		2018		2019	2020	2021
91		Persentase aset tetap dengan dokumentasi legal	BPKAD	%	98,06	99,718	99,82	99,725	99,805	99,731	99,812	99,738	99,745	99,752
92		Persentase pertumbuhan Penerimaan pajak daerah	BPPD	%	5,2	6,3	1,05	7,01	21,01	7,01	8,83	7,05	7,09	7,14
93		Prosentase Realisasi Piutang	BPPD	%	71,5	73,3	90,19	74,1	89,69	74,9	92,44	75,01	76,05	77,13
	4	**Kepegawaian**												
94		Persentase penempatan ASN sesuai dengan kompetensinya	BKD	%	N/A	55,00	63,80	66,90	69,70	67,00	70,29	68	69	70
	5	**Pendidikan dan Pelatihan**												
95		Persentase jumlah ASN yang meningkat kompetensinya	BKD	%	N/A	N/A	N/A	10	10	12	25,48	15	18	20
	6	**Penelitian dan Pengembangan**												
96		Persentase dokumen Penelitian/kajian yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan pembangunan daerah	Bappeda	%	50	55	58	60	61	65	69	70	75	80
	E	**PENDUKUNG**												
	1	**Sekretariat Daerah**												
97		Persentase rancangan produk hukum daerah yang menjadi produk hukum daerah	Sekretariat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

No.		Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	PD Penanggung jawab	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2015)	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	Target
						2016		2017		2018		2019	2020	2021
98		Persentase rumusan kebijakan daerah yang menjadi kebijakan daerah; a. Bidang Pembangunan b. Bidang Perekonomian c. Bidang Kesra d. Bidang PBJ e. Bidang Organisasi f. Bidang Pemerintahan	Sekretariat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	2	**Sekretariat DPRD**												
99		Prosentase penyelesaian produk hukum yang masuk dalam Prolegda	Sekretariat DPRD	%	64,29	65,18	66,67	66,05	43,48	68,02	43,56	70	72	74
	F	**Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik**												
100		Indeks Toleransi	Bakesbangpol	Poin	N/A	N/A	N/A	N/A	72,25	73,7	72,84	75,17	76,67	77,14
	G	**Kewilayahan**												
101		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan / PATEN (18 Kecamatan)	18 Kecamatan	Nilai	80,37	83,54	83,54	80,07	80,07	81,33	83,38	82,95	84,6	86,29

Keterangan: N/A (Indikator belum dirumuskan pada tahun tersebut)

Sumber : RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021

BAB VII
PENUTUP

Sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahunan, RKPD digunakan untuk acuan dalam penyusunan KUA, PPAS, RAPBD dan dasar-dasar pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah. RKPD berperan menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat prioritas pembangunan daerah, rencana kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian daerah secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program satuan kerja perangkat daerah dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RKPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 merupakan pedoman untuk penyusunan rancangan APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020.

Dokumen ini berfungsi sebagai acuan dan pedoman bagi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum, serta menjadi acuan bagi masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam Proses penyusunan dokumen rencana pembangunan dilakukan koordinasi antar lintas instansi pemerintah dengan seluruh pelaku pembangunan, melalui suatu forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan arah dan kebijakan pembangunan. Selain itu, Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan terutama sinkronisasi rencana kegiatan, penyelarasan program dan kegiatan yang tercantum dalam agenda nasional.

Tingkat keberhasilan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo selain ditentukan oleh kinerja aparatur pemerintahan juga sangat ditentukan oleh dukungan masyarakat dan swasta untuk menjawab tantangan dan mengurangi permasalahan yang ada, sehingga cita-cita masyarakat Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan Visi dan Misi yang tertuang dalam Dokumen RPJMD dapat terwujud secara optimal.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- Pemerintah Daerah serta seluruh pelaku pembangunan, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2020, secara sinergis dan terintegrasi baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha.
- RKPD Tahun 2020 dijabarkan lebih lanjut dalam Dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2020.
- Bilamana dalam pembahasan KUA-PPAS dan APBD Tahun 2020, terdapat peningkatan pendapatan, maka peruntukan belanjanya menggunakan data usulan Perangkat Daerah Tahun 2020, sebagaimana yang tercantum dalam RKPD Tahun 2020.

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH